

Desa Bulolohe merupakan desa korporatis yang dibentuk pada masa orde baru. Berdasarkan tipologinya Desa Bulolohe merupakan salah satu desa pertanian di Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan. Sejak terbentuknya sebagai desa definitif telah di introduksi pemerintah dengan berbagai kegiatan pembangunan, baik pembangunan fisik maupun nonfisik. Melalui introduksi pembangunan, masyarakat Desa Bulolohe mengalami transformasi dalam berbagai aspek, seperti aspek sosial budaya, politik, ekonomi dan teknologi di desa. Transformasi masyarakat di Desa Bulolohe dapat berlangsung karena didukung dengan adanya infrastruktur desa, kelembagaan desa dan supradesa. Perubahan yang terjadi membawa implikasi dalam masyarakat, karenadapat memberikan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, perubahan yang terjadi dapat pula menimbulkan marginalisasi dalam kehidupan masyarakat desa.

Transformasi sosial budaya dapat dilihat dari peningkatan pendidikan masyarakat, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, perubahan tenaga kerja yang sebelumnya homogen sebagai petani menjadi heterogen sesuai jenis usaha yang dikembangkan masyarakat, perubahan budaya sebagai implikasi kehadiran teknologi serta berkembangnya kehidupan beragama mulai dari anak-anak hingga orang dewasa di Desa Bulolohe. Perubahan ekonomi dari ekonomi subsisten menjadi ekonomi komersial yang berorientasi pasar. Kehadiran teknologi di Desa Bulolohe juga membawa perubahan, karena selain memudahkan kehidupan masyarakat karena penggunaan mesin, juga memberikan dampak terhadap marginalisasi tenaga kerja, khususnya perempuan di desa.

Semua yang dideskripsikan di atas telah dirangkum dalam buku ini, sehingga layak dibaca bagi mereka yang menaruh minat dengan perubahan sosial di desa, terutama kalangan mahasiswa, akademisi, petugas lapangan dan pegiat pembangunan desa.




PUSTAKA PELAJAR
Penerbit Pustaka Pelajar
Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167
Telp. (0274) 381542, Faks. (0274) 383083
e-mail: pustakapelajar@yahoo.com
website: pustakapelajar.co.id



Dr. Umar Nain, S.Sos., M.Si.
TRANSFORMASI MASYARAKAT DESA
Kajian di Desa Bulolohe Kabupaten Bulukumba

TRANSFORMASI MASYARAKAT DESA

Kajian di Desa Bulolohe Kabupaten Bulukumba



Dr. Umar Nain, S.Sos., M.Si.



TRANSFORMASI MASYARAKAT DESA

Kajian di Desa Bulolohe Kabupaten Bulukumba

Dr. Umar Nain, S.Sos., M.Si.

TRANSFORMASI MASYARAKAT DESA

Kajian di Desa Bulolohe Kabupaten Bulukumba



PUSTAKA PELAJAR

TRANSFORMASI MASYARAKAT DESA
Kajian di Desa Bulolohe Kabupaten Bulukumba

Penulis

Umar Nain

Desain Sampul

Wisnu

Penata Aksara

Adnanta Ivan A.

Cetakan I, Desember 2021

Penerbit :

PUSTAKA PELAJAR

Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167

Telp. (0274) 381542, Fax (0274) 383083

Email : pustakapelajar@yahoo.com

ISBN : 978-623-236-238-3

PRAKATA

Dengan mengucapkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku ini dapat diselesaikan dengan judul "Transformasi Masyarakat Desa, Kajian di Desa Bulolohe Kabupaten Bulukumba". Buku ini merupakan hasil penelitian penulis yang dilaksanakan pada 2021 dengan lokus penelitian di Desa Bulolohe. Desa Bulolohe merupakan desa korporatis yang dibentuk pada masa orde baru, telah mengalami transformasi sosial karena adanya berbagai program dan kegiatan pembangunan yang diintroduksi pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa yang dilaksanakan di Desa Bulolohe telah menciptakan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Dalam buku ini tidak semua perubahan yang terjadi menjadi subjek kajian, akan tetapi dibatasi pada perubahan dalam aspek sosial budaya, politik, ekonomi dan teknologi di desa. Selain itu transformasi sosial yang berlangsung dalam masyarakat menimbulkan implikasi sehingga perubahan yang terjadi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun dapat pula menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat. Transformasi sosial budaya tampak dari perkembangan pendidikan

masyarakat, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, berkembangnya mata pencaharian masyarakat di luar sektor pertanian, tradisi dan budaya masyarakat tetap dipelihara dan dipertahankan serta berkembangnya kehidupan beragama mulai dari anak-anak hingga orang dewasa di Desa Bulolohe.

Selain aspek sosial budaya maka dalam aspek politik dapat dilihat dari tingginya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, sehingga partisipasi politik masyarakat cukup tinggi dalam Musrenbang, pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam aspek ekonomi terjadi perubahan dari ekonomi subsisten menjadi ekonomi komersial yang berorientasi pasar. Desa mengalami kapitalisasi sehingga relasi sosial masyarakat mengalami perubahan berdasarkan relasi untung-rugi. Untuk aspek teknologi, terjadi perubahan dari penggunaan tenaga hewan menjadi tenaga mesin yang di satu sisi dapat membantu meringankan beban manusia namun di sisi lain terjadi marginalisasi tenaga kerja perempuan di Desa Bulolohe. Pada bagian akhir buku ini dibahas pula dukungan infrastruktur desa dan kelembagaan desa/supradesa dalam transformasi sosial masyarakat di Desa Bulolohe, yang ke semuanya telah dirangkum dalam buku ini.

Dengan selesainya buku ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor IPDN Jatinangor, Dr. Drs. Hadi Prabowo, M.M., karena atas motivasi dan arahnya kepada dosen IPDN untuk menulis buku. Terima kasih pula penulis ucapkan kepada Direktur IPDN Kampus Sulawesi Selatan, Prof. Dr. H. Murtir Jeddawi, S.H., S.Sos., M.Si., atas motivasi dan bantuan fasilitas kepada penulis sehingga buku ini dapat diterbitkan. Tak lupa pula

penulis ucapkan terima kasih kepada civitas akademika IPDN Kampus Sulawesi Selatan, karena atas segala bantuannya mulai dari penelitian hingga tersusunnya buku ini. Terima kasih yang sama diucapkan kepada Ahmad Subair karena ketekunannya mengedit naskah ini hingga menjadi buku. Demikian pula, diucapkan terima kasih kepada Bupati Bulukumba, Camat Rilau Ale dan Kepala Desa Bulolohe, yang telah banyak membantu selama penelitian. Pada akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada Eni Sulistiyarningsih, S.Sos., istriku yang telah kehilangan waktu bercengkerama selama menulis buku ini, begitu juga kepada anak saya Aryo Sosiawan, S.Sos. dan Anan Umran. Terakhir, penulis mengucapkan salam kepada pembaca buku ini semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Gowa, November 2021

Penulis
Umar Nain

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tinjauan Pustaka.....	11
C. Kerangka Pikir.....	29
D. Metode Penelitian	31
BAB II DESKRIPSI DESA BULOLOHE	
A. Terbentuknya Desa Bulolohe	36
B. Tipologi Desa Bulolohe	40
C. Orbitasi dan Persebaran Desa	42
D. Kondisi Alam.....	46
E. Keadaan Penduduk	53
BAB III DINAMIKA SOSIAL BUDAYA	
A. Pendidikan Masyarakat	62
B. Kesehatan Masyarakat	75

C. Ketenagakerjaan.....	89
D. Budaya Masyarakat	94
E. Agama	102

BAB IV PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT

A. Musrenbang Desa	110
B. Pemilihan Kepala Desa	113
C. Pemilihan Kepala Daerah	118
D. Pemilihan Legislatif	122
E. Pemilihan Presiden.....	124

BAB. V PERKEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT

A. Pertanian Polikultur	132
B. Pertanian Sawah.....	136
C. Tanaman Sayuran	146
D. Tanaman Buah-Buahan.....	153
E. Perkebunan	156
F. Perternakan dan Perikanan	161
G. Industri dan Perdagangan.....	168

BAB VI KEHADIRAN TEKNOLOGI DI DESA

A. Teknologi Pertanian.....	180
B. Pengolahan Hasil Pertanian	192
C. Teknologi Informasi dan Komunikasi	195
D. Teknologi Energi dan Listrik.....	202

BAB VII INFRASTRUKTUR DESA

A. Perpipaan Air Bersih	215
B. Jalan dan Jembatan Desa	218
C. Irigasi Desa	220
D. Drainase.....	222

BAB VIII KELEMBAGAAN DESA DAN SUPRADESA

A. Pemerintah Desa dan BPD.....229
B. LPMD/PKK Desa231
C. Kelompok Wanita Tani.....236
D. UPTD PSDA Parukku239
E. BPP Parukku.....241

BAB IX PENUTUP

A. Kesimpulan.....244
B. Rekomendasi249

DAFTAR PUSTAKA.....253

TENTANG PENULIS261

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Luas Penggunaan Lahan di Desa Bulolohe Tahun 2020	49
2.2 Penduduk Desa Bulolohe berdasarkan Usia Tahun 2020	59
3.1 Perkembangan Tingkat Pendidikan Masyarakat di Desa Bulolohe Tahun 2020	72
3.2 Dinamika Sosial Budaya Masyarakat di Desa Bulolohe Tahun 2020	107
5 Perkembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Sektor dan Jenis Usaha di Desa Bulolohe Tahun 2020	174
6 Kehadiran Teknologi dan Implikasinya di Desa Bulolohe Tahun 2020	209
7 Perkembangan Infrastruktur Desa di Desa Bulolohe Tahun 2020	225

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1 Alur Kerangka Pikir	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat desa di Indonesia pada awalnya memiliki karakteristik yang sama sebagai masyarakat agraris. Sebagai masyarakat agraris kehidupan masyarakatnya lebih banyak tergantung pada alam, sehingga ketika desa baru terbentuk menjadi suatu desa definitif masih merupakan masyarakat agraris yang bercorak tradisional. Pada dasarnya masyarakat tradisional di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup dinamis. Masyarakat tradisional tersebut selalu mengalami perubahan sosial yang terus menerus sesuai dengan tantangan internal dan kekuatan eksternal yang memengaruhinya (Suwarsono & So, 1991:71). Berdasarkan cara pandang modernis, maka desa sebagai masyarakat tradisional kerap kali dilabelkan dengan keteringgalan, keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan.

Melihat label yang melekat pada masyarakat tradisional, maka kaum modernis merekomendasikan perlunya dilaksanakan pembangunan desa. Secara historis pembangunan desa di Indonesia sudah cukup lama berlangsung, baik pembangunan

fisik maupun pembangunan nonfisik secara simultan. Pembangunan desa yang dilaksanakan sejak 1970 sampai saat ini telah dilakukan secara merata untuk 74.910 desa di Indonesia. Tujuan pembangunan desa adalah untuk menciptakan terwujudnya modernisasi desa, dengan melakukan perubahan masyarakat dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Perubahan yang direncanakan melalui pembangunan adalah perubahan yang umumnya datang dari luar masyarakat atau keompoknya menurut arahan tertentu (Garna, 1993: 21).

Berkaitan dengan perubahan dalam pembangunan maka sesungguhnya terdapat 2 (dua) aspek, yaitu aspek perubahan fisik/teknologi dan aspek perubahan sistem nilai dan sikap (sikap mental). Dalam pembahasan ditemukan 2 (dua) pendapat ekstrim (Soetomo, 1990 : 5), yaitu: *Pertama*, menghendaki perubahan fisik dan teknologi menunggu terjadinya perubahan sikap mental, sehingga masyarakat telah siap untuk menerima perubahan. Kelemahannya perubahan yang terjadi membutuhkan waktu cukup lama. *Kedua*, menghendaki dilaksanakannya perubahan fisik/teknologi tanpa harus memperhatikan sikap mental masyarakatnya, karena dengan sendirinya sikap mental masyarakat terseret mendekati modernisasi. Kelemahannya akan mudah menimbulkan proses disorganisasi sosial dan tidak fungsionalnya hasil pembangunan.

Dalam realitas sosial, Desa Bulolohe sebagai desa korporatis dikonstruksi sebagai desa terbelakang dan tertinggal, sehingga menjadi objek intervensi pemerintah supradesa. Intervensi pemerintah pusat terhadap desa-desa di Indonesia dilakukan dengan menerapkan program secara seragam melalui ideologi cetak biru (*blue print*). Program pembangunan desa diatur secara

sentralistik dan setiap program yang dilaksanakan diikuti dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) serta anggaran pelaksanaan program dan kegiatan yang masih terbatas. Desa Bulolohe sebagai salah satu desa di Kabupaten Bulukumba menjadi sasaran pelaksanaan pembangunan desa secara sentralistik, sehingga peran pemerintah supradesa menjadi dominan mengurus desa. Posisi masyarakat desa belum menjadi subjek pembangunan, akan tetapi lebih banyak diperlakukan sebagai objek pembangunan. Kebijakan pembangunan desa yang telah dilaksanakan dalam upaya pertumbuhan ekonomi dan modernisasi antara lain: (i) kebijakan penguatan ekonomi masyarakat desa; (ii) kebijakan penguatan kelembagaan dan sosial budaya masyarakat; (iii) kebijakan peningkatan pemanfaatan teknologi perdesaan; dan (iv) kebijakan peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Kebijakan tersebut berjalan secara spontan dan sinergi, yang bertujuan menciptakan perubahan kehidupan masyarakat desa yang kuat, maju, mandiri, sejahtera dan demokratis.

Berbagai kebijakan pembangunan desa yang telah dilakukan oleh pemerintah menempatkan desa sebagai objek pembangunan. Posisi desa sebagai objek, maka desa ditempatkan sebagai arena membuang bantuan. Dalam arti, banyak sekali program bantuan pembangunan pemerintah yang masuk ke desa (Rozaki, 2012 : 39). Adapun berbagai program bantuan yang selama ini diberikan kepada desa, seperti Bantuan Dana Pembangunan Desa, Kredit Usaha Tani (KUT), Inpres Desa Tertinggal (IDT), Alokasi Dana Desa (ADD), Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP).

Untuk akhir-akhir ini kebijakan pemerintah yang cukup populis di perdesaan adalah Program Dana Desa, yang dimulai tahun 2015 sampai sekarang.

Selain pembangunan wilayah berbasis perdesaan, maka ada pula pembangunan sektoral yang dilakukan di desa dalam upaya modernisasi perdesaan, seperti program revolusi hijau (*green revolution*) di sektor pertanian. Masyarakat Desa Bulolohe sebagai komunitas petani menjadi salah satu target sasaran dalam pelaksanaan revolusi hijau, melalui penerapan panca usaha tani dengan sistem intensifikasi pada lahan persawahan. Pada awalnya program ini banyak ditentang oleh petani dalam bentuk protes kepada pemerintah desa karena persyaratannya tidak mampu dipenuhi petani, seperti penggunaan benih varietas unggul, penggunaan pupuk, pestisida dan lain-lain. Oleh karena, pemerintah menginginkan transformasi pertanian tradisional menjadi pertanian modern agar tercapai peningkatan produksi padi, maka petani dimobilisasi secara paksa untuk melaksanakan intensifikasi pertanian.

Setelah program revolusi hijau ini berjalan di Desa Bulolohe telah membawa perubahan dalam kehidupan petani. Temuan awal di lapangan bahwa dengan revolusi hijau terjadi perubahan sosial budaya, ekonomi dan perubahan teknologi, yang di satu sisi membawa manfaat bagi petani dan di sisi lain membawa dampak negatif dalam kehidupan petani. Inovasi pertanian yang diperkenalkan pemerintah tidak berjalan mulus, sehingga memakan waktu sampai 4 tahun baru berjalan normal. Hal ini tampak setelah petani menerima dan mererapkan teknologi pertanian dalam usaha taninya. Menurut Carl Roger dalam R. H. Lauer (2001 : 235) mengakui bahwa tidak setiap inovasi yang

diterima itu menguntungkan orang. Carl Roger mengklasifikasi penerima inovasi ke dalam sejumlah kategori: pembaru, penerima awal, mayoritas akhir dan penerima yang terlambat. Dalam hal tertentu, penerima yang terlambat itu mungkin saja merupakan orang yang lebih beruntung.

Desa Bulolohe merupakan desa yang cukup dinamis yang ditandai dengan perubahan sosial yang berlangsung dalam masyarakat. Perubahan sosial di Desa Bulolohe dapat dilihat di bidang pendidikan. Temuan awal menunjukkan bahwa perkembangan pendidikan masyarakat dilihat dari peningkatan partisipasi usia sekolah dan tersedianya prasarana pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak sampai sekolah dasar. Di Desa Bulolohe setiap individu memiliki kebebasan untuk mencapai pendidikan yang tinggi. Dukungan masyarakat khususnya para orangtua cukup besar terhadap pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya. Meningkatnya pendidikan masyarakat membawa perubahan terhadap berkurangnya jumlah buta huruf dalam suatu keluarga. Demikian pula, perubahan di bidang kesehatan, yang selama ini memanfaatkan pola pengobatan tradisional (dukun) berangsur-angsur menggunakan pola pengobatan modern dengan memanfaatkan fasilitas dan tenaga kesehatan, baik yang ada di desa maupun di luar desa. Meningkatnya kesadaran masyarakat Desa Bulolohe dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan karena didukung dengan tersedianya prasarana pelayanan kesehatan, seperti puskesmas pembantu (pustu), pos kesehatan desa (poskesdes) pos pelayanan terpadu (posyandu) dan pelayanan mobil sehat yang siap mengantar warga masyarakat ke fasilitas kesehatan di dalam dan di luar desa.

Dalam perkembangannya Desa Bulolohe juga mengalami transformasi dalam ketenagakerjaan yang cukup dinamis dalam masyarakat. Bahwa salah satu transformasi sosial yang terjadi adalah berkembangnya berbagai macam pekerjaan. Pada awal terbentuknya Desa Bulolohe masyarakatnya masih homogen sebagai petani, sehingga yang ditemukan di masyarakat adalah petani pemilik lahan dan petani penggarap. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan masyarakatnya, maka homogenitas dalam pekerjaan tidak bertahan lama karena munculnya variasi pekerjaan baru sebagai implikasi dari tuntutan dan kemajuan masyarakat. Jika sebelumnya hanya petani pemilik dan petani penggarap saja, kini terdapat beberapa jenis pekerjaan yang berkembang, seperti Aparat Sipil Negara, TNI/Polri, karyawan perusahaan, purnawirawan, perangkat desa, wiraswasta, pedagang, tukang batu, montir, buruh harian dan lain-lainnya. Perubahan dari homogenitas menjadi heterogenitas pekerjaan tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses dalam waktu jangka panjang sejalan dengan dinamika masyarakat Desa Bulolohe.

Dalam hal budaya masyarakat, seperti budaya gotong royong masih tetap berlangsung di bidang pertanian sawah dengan saling membantu secara berkelompok menanam padi. Kegiatan ini dikenal dengan budaya *rera*, yaitu tolong menolong sesama petani dalam menanam padi. Budaya *sipakatau sipakalebbi* (saling menghargai) pada kalangan orang dewasa masih tetap dipelihara sebagai bagian dari budaya masyarakat. Sedikit berbeda dengan kalangan generasi milenial yang banyak mengalami perubahan, karena budaya *sipakatau sipakalebbi* sering kali kurang ditaati dalam masyarakat di Desa Bulolohe. Apalagi yang melanggar juga tidak mendapat sanksi di masyarakat. Budaya *mattiro laonruma*

yang merupakan institusi lokal di Desa Bulolohe, yang berfungsi sebagai forum musyawarah tani tradisional pada level dusun telah kehilangan keabsahannya. Pemerintah melakukan kooptasi terhadap institusi *mattiro launruma* karena bukan bentukan pemerintah, sehingga termarginalkan dalam masyarakat desa. Dengan demikian, budaya *mattiro laonruma* tidak pernah lagi tampak kegiatannya pada komunitas petani di Desa Bulolohe, sehingga hanya menjadi budaya masa lalu untuk dikenang saja. Dalam hal bahasa yang dipakai masyarakat terdapat 2 jenis bahasa, yaitu bahasa Bugis dan bahasa Makassar yang berdialek konjo. Kedua bahasa tersebut digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan telah berlangsung cukup lama, sehingga telah menjadi budaya masyarakat di Desa Bulolohe.

Perubahan yang tak kalah pentingnya untuk dikaji adalah perubahan di bidang politik karena berkaitan dengan demokratisasi di Desa Bulolohe. Di masa pembangunan khususnya di era orde baru, desa diposisikan sebagai objek politik. Sebagai objek politik ia tidak memiliki *voice* (suara) dalam mengungkapkan aspirasi dan kebutuhan terbaik menurut dirinya (Rozaki, 2012 : 38). Perubahan yang terjadi di era reformasi saat ini menunjukkan hubungan politik cukup terbuka sehingga kehidupan demokrasi berjalan baik karena masyarakat mudah menyampaikan aspirasinya. Salah satu penyampaian aspirasi adalah ketika berlangsung pemilihan kepala desa, sehingga warga masyarakat Desa Bulolohe secara bebas menentukan pilihannya. Perubahan dalam aspek politik juga ditandai dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, seperti pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.

Sejalan dengan upaya meningkatkan pendapatan masyarakat di sektor pertanian maka pemerintah senantiasa mendorong diterapkannya modernisasi pertanian. Melalui modernisasi pertanian di Desa Bulolohe, yang ditandai dengan perubahan dari usaha tani subsisten menjadi usaha tani komersial. Dari kondisi masyarakat yang subsisten menuju masyarakat yang berorientasi pasar (Nugroho, 2001: 61). Dalam masyarakat hubungan ekonomi berlangsung melalui mekanisme pasar sejalan dengan masuknya kapitalisme di desa. Kapitalisme menunjukkan suatu organisasi ekonomi yang dalam operasionalnya mengakui hak-hak perorangan atas alat-alat produksi dan distribusi hasil-hasilnya dengan tujuan untuk meraih keuntungan (Ahmadin, 2008 :1). Berkembangnya infrastruktur ekonomi desa, seperti adanya pasar dan lembaga keuangan sehingga Desa Bulolohe telah mengalami transformasi kapitalis. Menurut K. J. Kautsky dalam Sosialismanto (2001: 248) bahwa transformasi kapitalis di pedesaan meliputi: perubahan dari produksi subsisten kepada produksi komoditi, masuknya pembayaran secara tunai (*cash*) sehingga pembayaran dalam bentuk barang diganti oleh pembayaran dalam bentuk uang dan terakhir adalah penggantian tenaga kerja keluarga menjadi tenaga kerja sewa atau bayaran.

Transformasi kapitalis ini melahirkan kelas pedagang, yang membeli hasil produksi pertanian di desa dan kelas pedagang lain yang berdagang sarana produksi pertanian yang menjadi kebutuhan petani. Desa Bulolohe sebagai desa pertanian, yang menghasilkan berbagai komoditi dari pertanian polikultur sangat memerlukan pemasaran. Pasar dapat berperan dalam mempertemukan aktor ekonomi, seperti pembeli, pedagang, produsen, konsumen dalam lokasi dan waktu tertentu. Keberadaan

pasar ini mendorong perkembangan perekonomian desa, karena arus uang, barang dan jasa dapat berjalan lancar di desa. Dengan demikian, sektor pertanian dalam arti luas yang menjadi sumber perekonomian di Desa Bulolohe akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, jika didukung dengan pemasaran hasil produksi yang baik.

Selain transformasi dalam aspek sosial budaya, politik dan ekonomi maka masyarakat Desa Bulolohe juga mengalami transformasi teknologi yang menimbulkan implikasi bagi masyarakat di Desa Bulolohe. Menurut H. M. McLuhan dalam J. D. Narwoko & B. Suyanto (2019 : 334) bahwa setiap teknologi secara bertahap menciptakan lingkungan kehidupan manusia yang sama sekali baru. Teknologi merupakan kekuatan dahsyat dan tidak terbandung dalam memengaruhi kehidupan manusia. Kehadiran teknologi di desa telah menggeser kaum perempuan pedesaan di sektor pertanian, terutama keberadaan mesin pemanen padi. Begitu kuatnya pengaruh teknologi di desa, sehingga keberadaannya juga cukup banyak menimbulkan dampak positif dan dampak negatif dalam masyarakat. Berdasarkan dampak yang ditimbulkan dari teknologi, maka menarik untuk dikaji kehadiran teknologi dalam kehidupan masyarakat di Desa Bulolohe.

Dengan mencermati transformasi dalam aspek sosial budaya, politik, ekonomi dan teknologi di Desa Bulolohe, yang telah membawa berbagai perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Perubahan yang terjadi seharusnya memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Akan tetapi tidak sedikit dari transformasi sosial budaya, politik, ekonomi dan teknologi tersebut menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan masyarakat di Desa Bulolohe.

Transformasi yang terjadi membawa implikasi dalam masyarakat, sehingga menarik untuk dilakukan kajian. Selain itu, transformasi sosial yang berlangsung selama ini diduga berkaitan dengan adanya dukungan infrastruktur desa dan kelembagaan desa yang ada di Desa Bulolohe. Berlangsungnya transformasi sosial budaya, politik, ekonomi dan teknologi serta implikasinya dan adanya dukungan infrastruktur desa dan kelembagaan desa dan supradesa dalam transformasi sosial yang ada di Desa Bulolohe, perlu dirumuskan dalam pertanyaan penelitian.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: (i) bagaimana transformasi masyarakat dalam aspek sosial budaya, politik, ekonomi dan teknologi serta implikasinya bagi masyarakat Desa Bulolohe?; dan (ii) bagaimana dukungan infrastruktur desa dan kelembagaan desa dan supradesa dalam transformasi masyarakat dalam aspek sosial budaya, politik, ekonomi dan teknologi di Desa Bulolohe? Adapun tujuan penelitian ini adalah: (i) untuk menganalisis dan mendeskripsikan transformasi masyarakat dalam aspek sosial budaya, politik, ekonomi dan teknologi serta implikasinya bagi masyarakat di Desa Bulolohe. (ii) untuk menganalisis dan mendeskripsikan dukungan infrastruktur desa dan kelembagaan desa dan supradesa dalam transformasi masyarakat dalam aspek sosial budaya, politik, ekonomi dan teknologi di Desa Bulolohe.

Adapun manfaat hasil penelitian ini terdiri atas manfaat teoretis dan manfaat praktis. Manfaat teoretis penelitian adalah: (i) untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terkait dengan transformasi masyarakat dalam aspek sosial budaya, politik, ekonomi dan teknologi serta implikasinya bagi masyarakat di Desa Bulolohe;

dan (ii) dukungan infrastruktur desa dan kelembagaan desa dan supradesa dalam transformasi masyarakat dalam aspek sosial budaya, politik, ekonomi dan teknologi di Desa Bulolohe. Sedangkan manfaat praktis bagi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) adalah untuk memenuhi terlaksananya Tri Dharma perguruan tinggi melalui penelitian, sehingga dapat menambah publikasi penelitian yang terkait dengan transformasi masyarakat dalam aspek sosial budaya, politik, ekonomi dan teknologi serta implikasinya bagi masyarakat di Desa Bulolohe. Termasuk dukungan infrastruktur dan kelembagaan desa dan supradesa dalam transformasi masyarakat di Desa Bulolohe.

B. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Transformasi

Dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, baik secara besar-besaran maupun dalam skala kecil serta terjadi secara lambat. Secara etimologi transformasi berasal dari 2 kata, yaitu *trans* dan *form*. Kata *trans* berarti melintasi dari suatu sisi ke sisi lain (*across*), melampaui (*beyond*) perpindahan atau perubahan. Sedangkan kata *form* berarti bentuk. Menurut A. Zaeny (2010) bahwa:

Transformasi merupakan suatu perubahan dari kondisi (bentuk awal) ke kondisi yang lain (bentuk akhir) dan dapat terjadi terus menerus atau berulang kali yang dipengaruhi oleh dimensi waktu yang dapat terjadi secara cepat atau lambat, tidak hanya berhubungan dengan perubahan fisik tetapi juga menyangkut perubahan sosial, budaya, ekonomi dan politik masyarakat karena tidak dapat terlepas dari proses perubahan lingkungan (fisik) maupun manusia (non fisik).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) transformasi berarti perubahan rupa (bentuk, sifat, fungsi dan sebagainya). Untuk memudahkan memahami pengertian transformasi biasanya dikaitkan dengan aspek tertentu. Dalam kaitannya dengan masyarakat, transformasi adalah perubahan bentuk, sifat dan fungsi masyarakat dari masyarakat yang terbelakang menuju masyarakat maju, inovatif, kreatif dan mandiri. Adapun proses-proses transformasi dikemukakan oleh Alexander dalam A. Zaeny (2010) yaitu: (a) perubahan terjadi secara perlahan-lahan atau sedikit demi sedikit. (b) tidak dapat diduga kapan mulainya dan sampai kapan proses tersebut akan berakhir, tergantung dari faktor yang mempengaruhinya. (c) komprehensif dan berkesinambungan. (d) perubahan yang terjadi memiliki keterkaitan erat dengan emosional (sistem nilai) yang ada dalam masyarakat. Dalam proses transformasi sering kali berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan, karena pembangunan bertujuan untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat.

Menurut D. T. Tikson (2005) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Lebih jauh dikemukakan oleh Tikson, bahwa: *Pertama*, transformasi ekonomi dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya kontribusi sektor pertanian semakin kecil berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi. *Kedua*, transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial, seperti pendidikan,

kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas rekreasi dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. *Ketiga*, transformasi budaya sering dikaitkan dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme, di samping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat.

Pendapat lain mengenai transformasi dalam kaitannya dengan pembangunan perdesaan dikemukakan oleh N. A. Fernando (2008), bahwa secara mendasar mencakup 3 (tiga) dimensi utama, yaitu: *Pertama*, dimensi ekonomi, mencakup penyediaan baik kapasitas maupun peluang bagi masyarakat miskin dan masyarakat berpendapatan rendah perdesaan terutama sekali untuk mendapatkan manfaat dari proses pertumbuhan ekonomi. Dimensi ekonomi ini juga mencakup kebijakan untuk mengurangi ketidakmerataan pendapatan baik intra maupun antar sektor. *Kedua*, dimensi sosial, yang mendukung pembangunan sosial masyarakat miskin, masyarakat berpendapatan rendah dan kelompok-kelompok masyarakat yang tidak beruntung, menghilangkan ketidakmerataan dalam beberapa indikator sosial dan penyediaan jaringan pengaman sosial. *Ketiga*, dimensi politik, yang memperbaiki peluang masyarakat miskin dan masyarakat berpendapatan rendah untuk berpartisipasi secara efektif dan setara dalam proses politik pada tingkat desa. Transformasi dalam pembangunan harus dilihat sebagai suatu proses yang multidimensional yang mencakup perubahan-perubahan mendasar di dalam struktur sosial, perilaku masyarakat, perbaikan institusi-institusi, yang seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan ketidakmerataan distribusi pendapatan dan pemberantasan kemiskinan (Todaro & Smith dalam Arsyad, L. et al, 2011 :13).

2. Pengertian Modernisasi.

Pembahasan lain yang sering kali berkaitan dengan transformasi adalah modernisasi dalam kehidupan masyarakat. Modernisasi diartikan sebagai proses transformasi. Dalam rangka mencapai status modern, struktur dan nilai-nilai tradisional secara total harus diganti dengan seperangkat struktur dan nilai-nilai modern (Suwarsono & So, 1991 : 24). Lebih dipertegas lagi oleh Wilbert Moore dalam P. Sztompka (2017 : 142) bahwa modernisasi adalah transformasi total masyarakat tradisional atau pra-modern ke tipe masyarakat teknologi dan organisasi sosial yang menyerupai kemajuan dunia Barat yang ekonominya makmur dan situasi politiknya stabil.

Analisis lain yang lebih khusus dengan melukiskan dimensi masyarakat modern untuk ditanamkan dalam masyarakat tradisional atau masyarakat pra-modern. Hal ini dikemukakan oleh Neil Smelser dalam Sztompka (2017 : 143) melukiskan modernisasi sebagai transisi multidimensional yang meliputi 6 (enam) bidang, yaitu: *Pertama*, bidang ekonomi berarti (a) mengakarnya teknologi dan ilmu pengetahuan; (b) bergerak dari pertanian subsistensi ke pertanian komersial; (c) penggantian tenaga hewan dan manusia oleh energi benda mati dan produksi mesin; (d) berkembangnya bentuk pemukiman urban dan konsentrasi tenaga kerja di tempat tertentu. *Kedua*, di bidang politik, ditandai oleh transisi dari kekuasaan suku ke sistem hak pilih, perwakilan, partai politik dan kekuasaan demokratis. *Ketiga*, di bidang pendidikan meliputi penurunan angka buta huruf dan peningkatan perhatian pada pengetahuan, keterampilan dan kecakapan. *Keempat*, di bidang agama ditandai oleh sekularisasi. *Kelima*, di bidang kehidupan keluarga ditandai oleh berkurangnya

peran ikatan kekeluargaan dan makin besarnya spesialisasi fungsional keluarga, dan *Keenam*, di bidang stratifikasi berarti penekanan pada mobilitas dan prestasi individual ketimbang pada status yang diwarisi.

Berkaitan dengan modernisasi, maka desa sebagai masyarakat tradisional melalui transformasi menuju masyarakat modern, sehingga desa diintroduksi dengan pembangunan. Melalui pembangunan menuju perubahan dalam masyarakat. Menurut E. M. Setiadi & U. Kolip (2011: 50) bahwa perubahan sosial adalah pergeseran nilai-nilai, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, pelapisan sosial, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan sebagainya. Perubahan sosial mengarah pada pergeseran yang bersifat pola-pola tradisional ke arah modern tetapi ada juga yang justru bergeser dari pola-pola tradisional atau bahkan mengalami kehancuran (*Ibid*, 50).

Di dalam kehidupan sehari-hari, modernisasi dapat dilihat dari fenomena berikut (Martono, 2016 : 175), yaitu: *Pertama*, budaya tradisional mengalami marginalisasi, posisinya tergantikan dengan budaya modern yang datang dari luar sehingga budaya asli semakin pudar. *Kedua*, semakin banyak negara yang lepas dari penjajahan, munculnya negara-negara yang baru merdeka, tumbuhnya negara-negara demokrasi, lahirnya lembaga-lembaga politik dan semakin diakuinya hak-hak asasi manusia. *Ketiga*, dalam bidang ekonomi ditandai dengan kebutuhan manusia akan barang-barang dan jasa semakin kompleks, sehingga sektor industri dibangun secara besar-besaran untuk memproduksi barang. *Keempat*, pada bidang sosial ditandai dengan kelompok baru dalam masyarakat yang semakin banyak, seperti kelompok

buruh, kaum intelektual, kelas menengah dan kelas atas. *Kelima*, adanya perluasan bidang pekerjaan dan pemisahannya dengan kehidupan keluarga. *Keenam*, pertumbuhan kemandirian (privatisasi) keluarga dan pemisahannya dari kontrol sosial komunitas atau masyarakat yang lebih luas.

Berkaitan dengan intervensi pembangunan pada komunitas perdesaan maka perubahan yang terjadi dapat bersifat eksogen dan endogen. Menurut Arsyad, L. et al (2011: 16) pembangunan eksogen lebih bersifat *top down* yang banyak menggunakan perencanaan terpusat dan membawa sumber daya-sumber daya eksternal ke masyarakat perdesaan tetapi tanpa melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan (Arsyad, L. et al, 2011: 16). Adapun menurut S. Muhlighaus & S. Walty (2011) pembangunan endogen sebagai strategi pembangunan yang ditentukan sendiri (*self determined*) yang bersifat partisipatif yang berbasiskan pada kebutuhan lokal dan penggunaan potensi-potensi endogen.

Dalam hal paradigma dunia yang telah berubah yang mendudukan desa sebagai bagian penting dalam globalisasi, hal itu ikut mendorong Indonesia untuk segera mengubah sudut pandangnya akan desa (Soemarsono dalam Kumolo, 2017 : 212). Proses perubahan yang terjadi di desa dinilai oleh pengamat perdesaan, bahwa desa saat ini sedang mengalami perubahan global. Suatu perubahan yang ditandai dengan akses teknologi dan informasi yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Peristiwa yang terjadi di daerah lain dengan mudah diakses, sehingga dapat memengaruhi kehidupan masyarakat desa. Dengan demikian, kekuatan untuk melihat transformasi masyarakat perdesaan sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi, yang disertai dengan kemampuan melakukan adopsi inovasi.

Berkembangnya adopsi inovasi masyarakat paling tidak dapat membawa perubahan dari berbagai aspek, seperti perubahan pada lingkungan fisik, perkembangan ekonomi masyarakat, dinamika sosial budaya masyarakat, partisipasi politik masyarakat dan perkembangan teknologi di perdesaan. Dengan melihat kedudukan kausalitas menurut P. Sztompka (2017 : 18) apabila faktor penyebab perubahan itu berasal dari dalam ia sebut proses endogen dan apabila perubahan dari luar disebut proses eksogen. Untuk menentukan proses endogen dan eksogen selalu berkaitan dengan kerangka analisis yang digunakan. Penyebab perubahan mungkin berbeda substansi dan kualitasnya, yaitu alam, demografi, politik, ekonomi, kultur, agama dan lain-lain. Lebih jauh dikemukakan Sztompka (2017 : 20) bahwa sosiolog harus berupaya menemukan faktor mana yang terpenting sebagai penyebab perubahan. Ada 2 (dua) kategori utama pendorong perubahan, yaitu: *Pertama*, mencakup proses material yang ditimbulkan oleh tekanan keras dari teknologi, ekonomi, lingkungan atau biologi; *Kedua*, proses idealistis. Peran ideologi, agama, etos kerja dan lainnya diakui sebagai pendorong perubahan. Di Indonesia tekanan teknologi telah banyak mendorong terjadinya perubahan dalam masyarakat, terutama ketika pemerintah mengadopsi program revolusi hijau (*green revolution*).

Menurut William S. Gaud dalam F. Wahono (1999 : 1) bahwa secara ekonomi, revolusi hijau adalah modernisasi pertanian khususnya tanaman pangan, yang mengandalkan asupan kimiawi dan biologi selain prasyarat kelancaran irigasi ke dalam

kultur bercocok tanam tanaman pangan pokok khususnya padi di Indonesia dan gandum di India Utara. Dengan revolusi hijau melalui intensifikasi pertanian telah menimbulkan implikasi bagi kehidupan petani dan keluarganya, terutama munculnya marginalisasi tenaga kerja perempuan di desa. Implikasi lain terjadinya dampak sosial, seperti pengangguran yang merupakan konsekuensi dari perubahan penggunaan tenaga manusia ke penggunaan mesin dalam kegiatan pertanian. Mencermati implikasi yang ditimbulkan sehingga revolusi hijau hanya memberikan keuntungan kepada petani golongan menengah dan petani-petani yang progresif (Conyers, 1992: 196).

3. Konsep Masyarakat.

Untuk memahami pengertian masyarakat maka sulit kita temukan dalam bentuk yang baku, karena terdapat perbedaan pandangan di antara para ahli. Masyarakat sebagai komunitas (*community*) adalah kelompok orang yang terikat oleh pola-pola interaksi karena kebutuhan dan kepentingan bersama untuk bertemu dalam kepentingan mereka (Murdiyanto, 2008: 65). Menurut Ralph Linton dalam S. Soekanto (2013 : 22) masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

Untuk memperdalam pemahaman kita tentang konsep masyarakat dapat dikemukakan satu definisi masyarakat. Menurut P. B. Horton dan C. L. Hunt (1989 : 59) mendefinisikan masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri, yang hidup bersama-sama cukup lama, yang mendiami suatu wilayah mandiri, memiliki kebudayaan yang sama, dan

melakukan sebagian besar kegiatannya dalam kelompok tersebut. Dalam literatur ditemukan juga pengertian tentang masyarakat kompeten (*competent community*). Menurut Cottrell dalam T. Ndraha (1990 : 58) masyarakat kompeten terdiri dari beberapa komponen, yaitu: (a) mampu mengidentifikasi masalah dan kebutuhan komunitas; (b) mampu mencapai kesepakatan tentang sasaran yang hendak dicapai dan skala prioritasnya; (c) mampu menemukan dan menyepakati cara dan alat mencapai sasaran yang telah disetujui bersama; dan (d) mampu bekerja sama rasional bertindak mencapai tujuan. Pengertian lain tentang masyarakat dikemukakan oleh Selo Soemardjan dalam S. Soekanto (2013 : 22) bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan.

Meskipun terdapat definisi yang berlainan tentang masyarakat, akan tetapi pada dasarnya isinya sama, yaitu masyarakat yang mencakup beberapa unsur, (Soekanto, 2013 : 22), yaitu: (a) masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama. Tidak ada ukuran mutlak berapa jumlah manusia yang harus ada, akan tetapi secara teoretis angka minimnya adalah dua orang yang hidup bersama; (b) bercampur untuk waktu yang cukup lama; (c) mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan; dan (d) mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan lainnya.

Sepintas kondisi masyarakat Desa Bulolohe sama seperti masyarakat pedesaan lainnya. Masyarakat pedesaan adalah sekelompok orang yang hidup bersama, bekerja sama, dan berhubungan erat dengan sifat-sifat yang hampir sama (Setiadi & Kolip, 2013: 842). Sebagai suatu sistem sosial, masyarakat juga

memiliki elemen-elemen dasar (Murdiyanto, 2008:70), yaitu: (a) penduduk (orang), terikat secara paternal, hubungan darah, *ascribed status* maupun *achievement status*; (b) wilayah, terdapat masyarakat setempat, ada interaksi antara penduduk dan wilayahnya; (c) interaksi; (d) kepentingan bersama; dan (e) kebutuhan bersama. Dari ke 5 elemen-elemen dasar masyarakat dapat menjadi acuan untuk melihat masyarakat Desa Bulolohe dalam suatu komunitas.

Sebagai suatu komunitas, masyarakat Desa Bulolohe adalah merupakan masyarakat setempat. Suatu masyarakat setempat ditandai dengan lokalitas dan perasaan masyarakat setempat. Menurut R. M. Mac Iver dan Page dalam S. Soekanto (1993) bahwa perasaan masyarakat setempat mempunyai 3 unsur, yaitu: (a) seperasaan, seseorang berusaha untuk mengidentifikasi dirinya dengan sebanyak mungkin orang-orang dalam kelompok tersebut, sehingga kesemuanya dapat menyebutkan dirinya sebagai “kelompok kita” dan “perasaan kita”; (b) sepenanggungan, setiap individu sadar akan perannya dalam kelompok dan keadaan masyarakat sendiri memungkinkan bahwa perannya tadi dijalankan, sehingga ia mempunyai kedudukan yang pasti dalam darah dagingnya sendiri; dan (c) saling memerlukan, individu yang tergabung dalam masyarakat setempat merasa dirinya tergantung pada komunitasnya yang meliputi kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikologisnya. Dengan masuknya introduksi pembangunan dalam komunitas desa, seperti di Desa Bulolohe akan tampak bahwa dari 3 unsur perasaan masyarakat setempat dapat bertahan atau sebaliknya mengalami perubahan dalam masyarakat. Desa Bulolohe yang dibentuk secara korporatis tidak terlepas dari ciri tradisional kehidupan komunitasnya.

Menurut P. B. Horton dan C. L. Hunt (1989) membagi komunitas dalam 5 tipe, antara lain: (a) komunitas desa kecil dengan ladang pertanian yang tersebar disekitar pusat desa; (b) komunitas desa terbuka yang tidak memiliki pusat desa; (c) komunitas desa yang tipenya sejenis, seperti desa nelayan, pertambangan dan desa penggilingan; (d) desa bergaris lurus dengan rumah-rumah yang berdiri memanjang jalan dengan ladang pertanian yang panjang dan sempit; dan (e) komunitas desa perkebunan. Mengacu kepada tipe komunitas sebagaimana diuraikan diatas, maka Desa Bulolohe sebagai suatu komunitas setempat akan tampak dalam tipologi dan persebarannya sehingga dapat dideskripsikan karakteristik masyarakat Desa Bulolohe yang sesungguhnya. Desa Bulolohe memiliki komunitas terbuka, memiliki daerah pertanian, perkebunan dan penduduknya bertempat tinggal mengikuti jalan raya dan jalan desa.

4. Pengertian Desa

Secara sederhana pengertian desa merupakan suatu wilayah di luar kota, yang terdapat golongan manusia yang bertempat tinggal bersama pada tempat tertentu untuk menetap dan mempertahankan diri dari berbagai gangguan dari luar, yang semakin lama jumlahnya semakin bertambah untuk memenuhi kebutuhan dan keamanan hidup. Akan tetapi apabila dikaji secara cermat, ternyata desa memiliki potensi yang multidimensi dilihat dari potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi lain berupa kearifan lokal di desa. Terlepas dari berbagai potensi yang dimiliki desa, maka untuk mengetahui konsep desa dapat dilihat melalui beberapa pendekatan, antara lain:

a. Pendekatan teoretis.

Kajian desa secara teoretis bukan merupakan sesuatu yang

baru, karena para ahli telah memberikan pandangannya mengenai desa. Dalam buku "Desa", kajian historis dan antropologis telah dikemukakan oleh Soetardjo Kartohadikoesoemo (1984 : 16) bahwa desa adalah suatu kesatuan hukum, di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Berdasarkan pengertian ini terdapat 4 (empat) unsur desa, yaitu : (a) wilayah atau daerah, (b) penduduk, (c) tata kehidupan, dan (d) otonomi. Unsur-unsur tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan, sehingga hilangnya salah satu unsur apalagi kalau beberapa unsur akan menjadikan desa mengalami disfungsi atau bahkan ambruk dalam arti kehilangan makna sebagai suatu sistem.

Dalam interaksi antara desa dengan kota, maka arti desa ditinjau dari segi geografis seperti dijelaskan oleh R. Bintarto (1983: 11) bahwa:

Desa adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu ujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.

Selain dari kajian historis dan antropologis serta tinjauan dari segi geografis maka pengertian desa dapat pula dilihat dari aspek sosiologis, ekonomis dan politis sebagaimana dijelaskan oleh Maschuri Maschab. Menurut Maschab (2013: 1) bahwa apabila membicarakan "desa" di Indonesia, maka sekurang-kurangnya akan menimbulkan 3 (tiga) macam pengertian. *Pertama*, secara sosiologis, menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau suatu komunitas penduduk yang tinggal dan menetap

dalam suatu lingkungan, di mana antara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung pada kebaikan-kebaikan alam. *Kedua*, secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam disekitarnya. Desa merupakan satu lingkungan ekonomi, di mana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam yang mereka miliki ada kalanya sangat besar berupa tanah pertanian, hutan, danau, laut-dalam batas tertentu bisa memenuhi kebutuhan mereka untuk bertahan hidup (*survival*). *Ketiga*, secara politik, desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politis yang mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara.

Desa dapat pula dikaji dalam 2 (dua) ontologi: sebagai statika dan sebagai dinamika (Salman, 2016 : 2). Sebagai statika, desa ditempatkan sebagai entitas diam pada ruang dan waktunya yang dalam kediamannya tersimpan berbagai aspek, seperti aspek hukum, administratif, geografis, ekonomis, sosiologis, budaya dan aspek ekologi. Sebagai dinamika, desa ditempatkan sebagai entitas bergerak melintasi waktu, yang dalam pergerakannya berlangsung sejumlah proses. Desa berproses dari ciri pradesa, desa swadaya, desa swakarya dan desa swasembada; desa berubah menjadi kelurahan; desa berubah semakin dekat dengan ciri sebagai kota (*Ibid*, 4).

b. Pendekatan Legalistik

Desa dalam pendekatan legalistik dapat dilihat dari berbagai regulasi yang mengatur tentang desa. Pengertian desa sesuai

peraturan perundang-undangan baik yang pernah berlaku maupun yang sementara diberlakukan di Indonesia adalah:

Pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implikasi dari Undang-Undang ini adalah penyeragaman desa di seluruh Indonesia, baik nama desa maupun struktur pemerintahan desa. Dalam regulasi ini tampak bahwa pemerintah sangat dominan mengatur desa dan masyarakatnya. Segala inisiatif dan prakarsa serta inovasi masyarakat tidak diberi ruang untuk berkembang sehingga pemerintah mengendalikan masyarakat desa, demi tercapainya stabilitas masyarakat sampai di level desa. Dampaknya transformasi masyarakat desa mengalami stagnasi, karena semua aspek kehidupan masyarakat diatur secara sentralistik. Posisi masyarakat bukan selaku subjek pembangunan melainkan hanya sebagai objek pembangunan.

Kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten. Dalam regulasi ini memberi pengakuan (rekognisi) bahwa nama desa tidak harus diseragamkan, tetapi dapat memberikan nama desa yang beragam

sesuai kondisi masing-masing daerah di Indonesia. Kedudukan desa mengalami perubahan, jika sebelumnya desa berada di bawah kecamatan maka dengan regulasi ini kedudukan desa berada di kabupaten. Implikasinya pemerintah kabupaten memiliki peran sangat besar dalam pengembangan masyarakat desa, yang dapat dilakukan melalui pembinaan, pengawasan dan fasilitasi pemerintah desa dan masyarakat desa. Posisi Camat bukan lagi menjadi atasan kepala desa dan tidak lagi menjadi pembina langsung pemerintahan desa, melainkan sebagai koordinator. Masyarakat desa mulai diberi ruang yang cukup terbuka dalam berpartisipasi, karena selain menjadi objek juga selaku subjek pembangunan desa.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pengertian desa sedikit mengalami perubahan dengan dimunculkannya batas-batas wilayah suatu desa. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keempat, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan, bahwa digabungkannya fungsi *self-governing community* dengan *local self-government* diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa, ditata sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat.

Ditegaskan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, adalah: (1) memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. (3) melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa. (4) mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. (5) membentuk pemerintah desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab. (6) meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. (7) meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional. (8) memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dan (9) memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

c. Pendekatan sistem.

Pendekatan ini melihat desa dalam keterkaitannya dengan sistem pemerintahan di atasnya (supradesa). Menurut Wasistiono (2013: 80-81) sistem pemerintahan di Indonesia dilihat secara

hierarkis, yaitu: suprasistem adalah pemerintah nasional, sistem adalah pemerintah provinsi, subsistem adalah pemerintah kabupaten/kota dan sub-subsistem adalah pemerintahan desa. Secara hierarkis relasi pemerintahan desa dengan pemerintah di atasnya, terdiri dari pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah nasional (pusat). Dalam kaitannya dengan pengembangan masyarakat desa, maka pemerintah supradesa dapat melakukan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi. Peran pemerintah supradesa harus menjadi agen perubahan (*agent of change*) dalam memfasilitasi desa dan masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik, maju, sejahtera dan mandiri.

Dalam jangka pendek desa mengalami ketergantungan dengan pemerintah supradesa, terutama ketergantungan dengan pemerintah pusat terkait alokasi anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan ketergantungan desa dengan pemerintah kabupaten dapat dilihat dari Alokasi Dana Desa (ADD), yang merupakan dana perimbangan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa yang dialokasikan ke desa setiap tahun. Alokasi Dana Desa ini bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Pemerintah Kabupaten setiap tahun. Ditegaskan oleh J. Ife & F. Tesoriero (2008 : 225) ketergantungan pada negara mungkin diperlukan dalam jangka pendek, biasanya terjadi dengan biaya besar pada pengembangan masyarakat yang *bottom-up* karena tujuan akhir dari pengembangan masyarakat haruslah berswadaya.

Besarnya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diterima Pemerintah Desa Bulolohe memberikan indikasi begitu besarnya ketergantungan desa dari segi anggaran pembangunan, demi

untuk melakukan transformasi atau perubahan kehidupan masyarakat desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa, pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Untuk menghindari terjadinya kekacauan sistem pemerintahan dilihat dari relasi pemerintah desa dengan pemerintah supradesa dalam penganggaran pembangunan, maka pemerintah supradesa harus memenuhi kewajibannya sesuai regulasi Undang-Undang Desa yang baru. Kewajiban itu terkait dengan pengalokasian Dana Desa dari suprasistem (pemerintah pusat) kepada sub-subsistem (pemerintahan desa). Hal ini karena dalam Undang-Undang Desa pasal 72 disebutkan bahwa salah satu pendapatan desa yang bersumber dari APBN dikenal dengan Dana Desa. Dengan demikian setiap anggota susunan sistem harus taat kepada prinsip-prinsip dasar yang telah disepakati.

Dijelaskan oleh S. Wasistiono (2013: 40) bahwa ada 3 (tiga) prinsip dasar yang perlu dipahami dalam melihat pemerintahan sebagai sebuah sistem. *Pertama*, bahwa hubungan antara suprasistem, sistem, subsistem dan sub-subsistem diatur melalui berbagai asas yang perlu disepakati dan dipahami oleh semua anggota susunan sistem. *Kedua*, sistem yang berada dalam susunan yang lebih rendah dan lebih kecil tunduk pada mekanisme sistem yang susunannya lebih besar dan lebih tinggi, disertai mekanisme untuk mengajukan keberatan dari bawah. *Ketiga*, susunan sistem yang lebih besar dan lebih tinggi mempunyai kewajiban

melindungi dan memberdayakan susunan sistem yang lebih rendah dan lebih kecil.

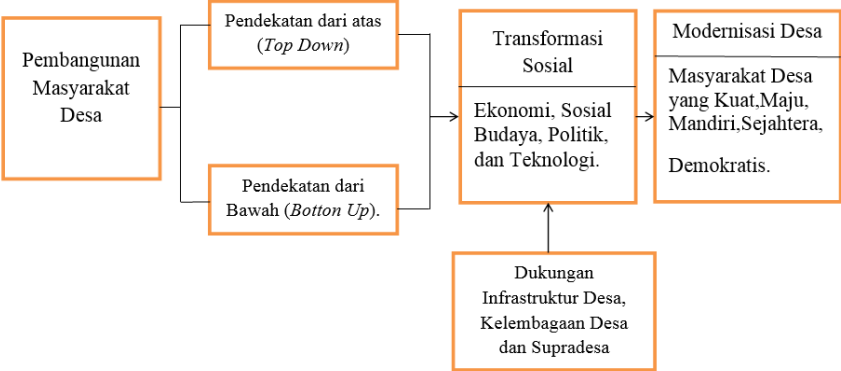
Berkaitan dengan posisi pemerintahan desa sebagai sub-subsistem, dalam relasinya dengan pemerintah supradesa, maka pada poin 1 asas yang perlu disepakati dan dipahami adalah berbagai regulasi yang mengatur tentang desa baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah sampai kepada turunannya dalam Peraturan Menteri dan aturan yang lebih terinci seperti petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan. Dengan memahami berbagai regulasi diharapkan semua anggota susunan sistem dapat melakukan tugas pokok dan fungsinya sesuai kewenangan yang dimilikinya. Pada poin ke 2 ini terkait dengan ketaatan dalam menjalankan segala regulasi yang telah disepakati. Ketaatan antara pemerintahan desa sebagai sistem yang lebih rendah dan lebih kecil, dalam relasinya dengan pemerintah supradesa sebagai sistem yang lebih besar dan lebih tinggi. Dengan kata lain ada akuntabilitas dari pemerintahan desa kepada pemerintah supradesa selaku masing-masing anggota susunan sistem. Untuk poin ke 3 ini sering kali terabaikan karena terkait dengan relasi kekuasaan antara susunan sistem yang lebih rendah dengan susunan sistem yang lebih tinggi. Pemerintah pusat sebagai suprasistem dapat meningkatkan kapasitas pemerintahan desa melalui pelatihan, sehingga susunan sistem yang lebih rendah dan lebih kecil dapat lebih berdaya karena memiliki kemampuan dalam melaksanakan kewenangannya.

C. Kerangka Pikir

Dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat desa digunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan dari atas (*top down*) dan

pendekatan dari bawah (*bottom up*). Pendekatan dari atas dilakukan secara seragam untuk semua desa di Indonesia melalui cetak biru (*blue print*), yang ditandai dengan adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk dipedomani di desa. Pendekatan dari bawah dilakukan melalui partisipasi masyarakat terutama dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan ke-2 pendekatan tersebut, baik dari atas maupun dari bawah agar dapat sinergi dalam menciptakan transformasi bagi kehidupan masyarakat desa. Transformasi yang terjadi dalam aspek sosial budaya, politik, ekonomi dan teknologi di desa, yang didukung dengan adanya infrastruktur desa dan kelembagaan desa dan supradesa. Tujuannya yang akan dicapai melalui transformasi sosial adalah terwujudnya modernisasi desa, yang ditandai dengan perkembangan masyarakat desa yang kuat, maju, mandiri, sejahtera dan demokratis. Untuk lebih jelasnya kerangka pikir seperti pada gambar berikut ini.

Gambar 1. Alur Kerangka Pikir.



D. Metode Penelitian

Berawal dari minat penulis untuk memotret perubahan sosial di suatu desa, sebagai implikasi dari introduksi pembangunan desa yang dilaksanakan pemerintah selama ini. Kemudian penulis melakukan studi pendahuluan pada lokus penelitian yang dipilih yaitu di Desa Bulolohe, Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. Dari hasil studi pendahuluan penulis mendapatkan gambaran sekilas mengenai berlangsungnya transformasi sosial di Desa Bulolohe, sumber data yang mudah diperoleh, lokasi penelitian mudah dijangkau dan belum pernah ada penelitian sebelumnya. Melalui studi pendahuluan, peneliti menetapkan fokus penelitian ini adalah transformasi masyarakat Desa Bulolohe dalam aspek sosial budaya, politik, ekonomi dan teknologi serta dukungan infrastruktur desa dan kelembagaan desa dan supradesa dalam transformasi sosial di Desa Bulolohe.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini mampu menggambarkan proses dari waktu ke waktu dalam situasi yang alami tanpa rekayasa peneliti dan dapat mengungkap hubungan yang wajar antara peneliti dan informan (Nugrahani, 2014 : 32). Menurut H. Usman & P. S. Akbar (2011: 130), penelitian deskriptif kualitatif diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat informan apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitiannya, kemudian dianalisis pula dengan kata-kata yang melatarbelakangi informan berperilaku (berpikir, berperasaan dan bertindak).

1. Teknik Pengumpulan Data.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui

dokumentasi. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal (Arikunto, 2014 : 33).

Penulis melakukan wawancara terhadap informan yang telah dipilih karena dianggap memahami dan mengetahui perubahan masyarakat di Desa Bulolohe. Wawancara berakhir setelah data yang dibutuhkan telah memenuhi yang diperlukan (data jenuh) sehingga informan tidak ditentukan jumlahnya. Adapun informan yang diwawancarai terbagi dalam 3 tahap pelaksanaan, yaitu:

Pertama, pada Juni 2021, melakukan wawancara dengan lembaga pemerintahan desa, yang terdiri dari: Kepala Desa, Perangkat Desa dan Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa, seperti Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Desa, Pengurus Kelompok Tani, Pengelola Kelompok Wanita Tani (KWT), Pengelola BUM Desa serta pegawai yang mewakili lembaga pemerintah supradesa yang ada di Desa Bulolohe dari unsur UPTD PSDA Parukku dan BPP Parukku.

Kedua, pada Juli 2021, melakukan wawancara dengan pelaku usaha ekonomi masyarakat sesuai jenis usaha yang di-lakukan, seperti petani sawah, petani sayur mayur, petani buah-buahan, pekebun, peternak, pengrajin mebel, penjahit, wiraswasta, pedagang hasil bumi, pedagang kelontong dan pedagang kendaraan bermotor. Penulis juga melakukan wawancara dengan warga masyarakat pengguna teknologi dalam jumlah yang terbatas, seperti ibu rumah tangga, pendengar radio, pengguna

telepon biasa, pemirsa televisi, pengguna *handphone* dan laptop serta pemilik ojek gabah.

Ketiga, pada Agustus 2021, melakukan wawancara dengan warga masyarakat yang dituakan atau ditokohkan oleh masyarakat, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh perempuan dan tokoh pemuda serta orangtua siswa secara terbatas. Penulis melakukan pula wawancara dengan warga masyarakat yang memiliki tugas pelayanan khusus, seperti aparat sipil negara, bidan desa, dukun, guru SD, guru TPA/TKA, kader posyandu, pengelola mobil sehat, pengelola air bersih dan delegasi desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dari 3 tahapan pelaksanaannya, ditemukan adanya berbagai data yang memerlukan konfirmasi dari Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Bulukumba. Untuk menguatkan data hasil wawancara, penulis mengkroscek data kepada: (i) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, terkait bantuan sarana produksi pertanian, (ii) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mengenai penyusunan RKP Desa dan penggunaan Dana Desa, (iii) Dinas Pengeloloan Sumber Daya Air, terkait pengelolaan Daerah Irigasi Sungai Balantieng, (iv) Dinas Kesehatan, yang berkaitan dengan mekanisme penggunaan mobil sehat dan pendampingan persalinan antara bidan dukun beranak, (v) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dalam hal peningkatan jalan desa menjadi jalan kabupaten, (vi) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, terkait dengan himbauan larangan memotong sapi betina dan dampaknya dalam peningkatan populasi ternak sapi di desa.

Selain wawancara, penulis juga melakukan observasi terhadap subjek penelitian di Desa Bulolohe dengan mengamati kegiatan sosial budaya masyarakat, seperti kegiatan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, budaya dan kegiatan keagamaan yang berlangsung dalam masyarakat. Penulis juga secara intens mengamati aktivitas ekonomi masyarakat, seperti kegiatan pertanian sawah, perkebunan, peternakan, kegiatan industri dan perdagangan serta penggunaan teknologi di desa. Termasuk penulis mengamati aktivitas Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan supradesa yang ada di Desa Bulolohe.

Pada bagian akhir penulis melakukan pengumpulan data sekunder dengan memilih berbagai dokumen sesuai kebutuhan peneliti sebagai tambahan data primer yang ditemukan di lapangan. Adapun dokumen yang dipilih oleh penulis adalah: (1) Sejarah terbentuknya Desa Bulolohe, (2) Daftar nama-nama Kepala Desa dan periode kepemimpinannya, (3) Profil Desa Bulolohe Tahun 2020, (4) Regulasi tentang Desa, seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri, (5) Perda Keagamaan Kabupaten Bulukumba, (6) Peraturan Bupati tentang Alokasi Penggunaan ADD dan Dana Desa Tahun 2020, (7) RPJM Desa Bulolohe Periode 2016-2022, (8) RKP Desa Bulolohe Tahun 2020 dan 2021, (9) APB Desa Bulolohe Tahun 2020, (10) Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa Tahun 2020, (11) Laporan Bulanan SDN 187 Bontomanai, (12) Daftar Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, dan (13) Literatur terkait Transformasi Sosial.

2. Teknik Analisis Data.

Menurut Miles & Huberman (Lincoln & Denzin, 2009: 592) bahwa analisis data kualitatif terdiri atas 3 (tiga) sub proses

yang saling terkait, yaitu: reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan/verifikasi. Dalam penelitian ini analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, observasi/ pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dan dokumen-dokumen yang mendukung transformasi masyarakat di Desa Bulolohe. Hasil wawancara dipetakan berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang berkaitan dengan transformasi masyarakat di Desa Bulolohe. Mengategorikan/mengklasifikasikan dan memberikan kode jenis-jenis data mulai dari data tentang konsep dinamika sosial budaya, partisipasi politik masyarakat, perkembangan ekonomi masyarakat dan kehadiran teknologi di Desa Bulolohe, termasuk data dukungan infrastruktur desa dan kelembagaan desa dan supradesa.

Dokumen-dokumen sebagai data sekunder juga akan dikelompokkan dan diurutkan secara kronologis menurut timing kejadiannya mulai dari perubahan sosial dan teknologi sejak Desa Bulolohe menjadi desa persiapan hingga menjadi desa definitif sekarang ini. Langkah selanjutnya adalah membuat abstraksi. Abstraksi dalam penelitian ini merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan dari berbagai sumber yang perlu dijaga sehingga tetap fokus pada inti permasalahan yaitu transformasi masyarakat desa dalam aspek sosial budaya, politik, ekonomi dan teknologi serta implikasinya bagi masyarakat Desa Bulolohe. Selanjutnya, data kualitatif disajikan secara tekstular, tabel dan persentase sesuai dengan temanya masing-masing. Sebagai langkah terakhir dari analisis data kualitatif adalah verifikasi/menarik kesimpulan.

BAB II

DESKRIPSI DESA BULOLOHE

A. Terbentuknya Desa Bulolohe

Desa Bulolohe merupakan salah satu desa di Kecamatan Rilau Ale. Kecamatan Rilau Ale terbentuk dari hasil pemekaran Kecamatan Bulukumpa. Kecamatan Rilau Ale terdiri dari 14 desa dan 1 kelurahan. Kabupaten Bulukumba terdiri dari 10 kecamatan, 109 desa dan 27 kelurahan. Desa Bulolohe merupakan salah satu desa di Kabupaten Bulukumba. Secara etimologi Bulolohe terdiri 2 kata yaitu, *Bulo* dan *Lohe*. Kata *bulo* dalam bahasa Makassar berarti "bambu" dan kata *lohe* berarti "banyak", sehingga jika kata "bambu" disatukan dengan kata "banyak" maka akan menjadi "bambu banyak" atau "banyak bambu". Kumpulan dari banyak bambu disebut dengan "rumpun bambu". Menelusuri keberadaan rumpun bambu yang menandai nama Bulolohe terdapat di sekitar makam Karaeng Peso dan di Saukangnge. Di Saukangnge cukup banyak rumpun bambu yang letaknya dikelilingi daerah persawahan dan wilayah pinggiran Sungai Balantieng.

Wilayah Desa Bulolohe yang terbentang dari makam Karaeng Peso dekat jalan raya hingga daerah di sekitar Saukangnge, yang

oleh masyarakat desa dikenal dengan kawasan Bentengnge. Berawal dari lebatnya rumpun bambu di kawasan Bentengnge, kemudian warga masyarakat memberikan nama dengan istilah "Bulolohe". Di antara jalan desa Bulolohe dengan Saukangnge terdapat suatu benteng, yang bentuknya berupa gundukan tanah yang tinggi, namun di kiri kanannya seperti lembah yang datar. Dalam perkembangannya sebutan Bulolohe diabadikan menjadi salah satu nama dusun di Desa Bontomanai dengan sebutan Dusun Bulolohe. Setelah menjadi desa persiapan dikenal dengan sebutan Desa Persiapan Bulolohe dan pada saat menjadi desa definitif tetap dengan sebutan Desa Bulolohe.

Seiring dengan perkembangan masyarakat akan pelayanan pemerintahan dan pembangunan maka Pemerintah Kabupaten Bulukumba melakukan penataan desa dengan membentuk desa baru. Menurut Sutoro Eko, et al (2013:248) terbentuknya suatu desa dapat dilihat dari berbagai pengaruh, yaitu: pengaruh adat membentuk desa asli (*indigenous village*), pengaruh kekerabatan dan agama membentuk desa parokial (desa genealogis), pengaruh pemerintah membentuk desa korporatis dan pengaruh organisasi masyarakat sipil membentuk desa sipil. Secara umum untuk mengetahui terbentuknya desa-desa di Kabupaten Bulukumba, termasuk Desa Bulolohe sedikit mengalami kesulitan. Hal ini karena terbatasnya dokumen autentik yang menunjukkan terbentuknya desa secara formal, sehingga dapat dipastikan hampir semua desa tidak dapat diketahui waktu pembentukannya. Dampaknya pemimpin desa dan warga masyarakatnya kesulitan memperingati hari ulang tahun desanya.

Dalam suatu dialog dengan kepala desa yang sudah terpilih 2 periode terungkap bahwa selama menjadi kepala desa tidak

diketahui kapan desanya terbentuk secara formal. Mungkin agenda ke depan perlu kita seminarkan terhadap desa-desa di Kabupaten Bulukumba yang belum jelas waktu pembentukannya. Berbeda dengan desa-desa di Jawa, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta yang setiap tahun melaksanakan peringatan hari ulang tahun desanya dengan semarak. Tujuannya adalah membangun kebersamaan, persatuan dan harmoni sesama warga desa. Sekaligus melihat capaian perkembangan desa sebagai implikasi dari sentuhan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa bersama masyarakat desa selama satu tahun .

Berdasarkan penelusuran dokumen dan informasi dari perangkat desa maka terbentuknya Desa Bulolohe bukan merupakan pengaruh adat (desa asli) dan bukan pengaruh kekerabatan dan agama (desa parokial) serta bukan pula pengaruh organisasi masyarakat sipil (desa sipil), melainkan terbentuknya karena pengaruh pemerintah (desa korporatis). Desa Bulolohe sebagai desa korporatis terbentuk pada masa orde baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Sebagai desa korporatis tidak mempunyai otonomi dan hanya menjadi kepanjangan tangan negara, sehingga menjadi objek pemerintahan dan pembangunan dari atas. Desa tidak bermakna untuk penghidupan-kehidupan masyarakat desa, kecuali hanya untuk urusan administratif (Eko, et al. 2017: 191-192).

Proses terbentuknya Desa Bulolohe merupakan intervensi Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam melakukan penataan desa. Desa Bontomanai yang merupakan desa induk telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan penataan desa dengan membentuk desa baru. Adapun desa baru yang terbentuk dari

hasil penataan Desa Bontomanai terdiri dari 3 (tiga) desa, yaitu: Desa Bulolohe, Desa Tanah Harapan dan Desa Batukaropa. Dari ke 3 (tiga) desa yang telah terbentuk tidak langsung menjadi desa definitif, melainkan melalui proses sebagai desa persiapan. Dengan status desa persiapan maka desa induk (Desa Bontomanai) tetap bertanggungjawab melakukan pembinaan dan pengawasan sampai menjadi desa definitif. Desa Bulolohe mengalami desa persiapan sekitar 3 tahun (1993-1995) sebelum berpisah dengan desa induk dan menjadi desa definitif.

Pada awal terbentuknya Desa Bulolohe sebagai desa definitif hanya memiliki 2 dusun, yaitu: Dusun Bulolohe dan Dusun Parukku. Akan tetapi, dalam perkembangan saat ini Desa Bulolohe telah memiliki 5 dusun, yaitu: Dusun Bulolohe, Dusun Parukku, Dusun Abbatungge, Dusun Bentengge dan Dusun Balantieng. Dari ke 5 (lima) wilayah dusun tersebut batas wilayahnya ditandai dengan batas buatan dan batas alam. Batas buatan yang terpasang sebagai tanda batas wilayah adalah pal, sedangkan batas alam adalah berupa pohon dan sungai. Meskipun batas dusun ditandai dengan batas buatan dan batas alam, namun ke depan perlu ditetapkan batas-batas tersebut dengan peraturan desa (Perdes) sehingga memiliki batas secara legalistik. Selain batas dusun maka yang perlu diperjelas pula adalah batas desa, guna menghindari terjadinya sengketa batas desa pada masa yang akan datang. Batas Desa Bulolohe sampai saat ini belum ditetapkan dalam peraturan desa. Sehingga batas antardesa yang dipakai adalah batas desa yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bulukumba ketika desa itu ditetapkan menjadi desa definitif sampai saat ini. Adapun batas wilayah Desa Bulolohe adalah di sebelah utara dengan Desa Batukaropa, di

sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bontomanai, di sebelah timur dengan Desa Bontomanai dan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Anrang.

B. Tipologi Desa Bulolohe

Tipologi suatu desa berkaitan dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki dan dikelola masyarakat sebagai sumber mata pencaharian utama. Untuk menentukan tipologi suatu desa tidak mudah karena dibutuhkan pengamatan lapangan secara cermat terhadap desa yang akan ditentukan tipologinya. Secara teoretis, tipologi suatu desa dapat dilakukan dengan menggunakan indikator yang beragam sesuai dengan sudut pandang para ahli. Menurut S. M. P. Tjondronegoro (2008) tipologi suatu desa dapat dilihat dari basis topografis, yang terdiri atas desa pegunungan, desa dataran tinggi, desa dataran rendah, dan desa pantai. Mengacu kepada basis topografis, Desa Bulolohe termasuk desa dataran rendah karena letaknya di atas permukaan laut masih di bawah 500 meter. S. I. Asy'ari (1993: 117) menggunakan pendekatan potensi dominan yang diolah dan dikembangkan serta menjadi sumber penghasilan sebagian besar masyarakat desa. Berdasarkan pendekatan tersebut maka ditentukan 8 jenis tipologi desa yaitu: (1) Desa Nelayan; (2) Desa Persawahan; (3) Desa Perladangan; (4) Desa Perkebunan; (5) Desa Peternakan; (6) Desa Kerajinan/Industri Kecil; (7) Desa Industri Sedang dan Besar; dan (8) Desa Jasa dan Perdagangan.

Selain pendekatan potensi dominan yang dikembangkan dalam menentukan jenis tipologi desa dapat pula dilihat berdasarkan mata pencaharian penduduknya. Menurut Yulianti dan Poernomo dalam Yabbar, R. & Hamzah, A. (2015: 5) terdapat

3 tipologi desa berdasarkan mata pencaharian, yaitu: (1) Desa Pertanian, biasanya dilandasi oleh mayoritas pekerjaan dari penduduknya adalah pertanian tanaman budi daya. Desa ini bisa pertanian lahan sawah dan tegal dengan karakteristik masing-masing; (2) Desa Peternakan, merupakan desa di mana penduduknya mempunyai mata pencaharian utama peternakan. Meskipun ada mata pencaharian lain, namun peternakan tetap merupakan mata pencaharian utama; dan (3) Desa Industri, desa yang memproduksi kebutuhan dan alat perlengkapan hidup.

Berdasarkan pendapat S. I. Asy'ari, maka Desa Bulolohe termasuk dalam jenis desa persawahan. Hal ini karena dilihat dari potensi dominan yang dikelola dan dikembangkan serta menjadi sumber penghasilan sebagian besar masyarakat Desa Bulolohe adalah dari persawahan. Berdasarkan Profil Desa Bulolohe Tahun 2020 menunjukkan bahwa, luas sawah yang dikelola petani sekitar 175,90 ha, jauh lebih luas dari usaha pertanian lainnya seperti perkebunan 150,50 ha dan perladangan 145,70 ha. Jumlah petani yang mendapat penghasilan dari pertanian sawah adalah 419 orang. Berdasarkan aspek legalitasnya tipologi desa diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan. Dalam Permendagri tersebut disebutkan bahwa salah satu tipologi desa adalah desa persawahan.

Dengan mengacu kepada tipologi desa yang dikemukakan oleh Yuliati dan Poernomo sebagaimana disebutkan di atas, maka mayoritas penduduk Desa Bulolohe memiliki mata pencaharian pertanian budi daya, sehingga Desa Bulolohe termasuk tipologi desa pertanian. Oleh karena persawahan merupakan bagian dari kegiatan di bidang pertanian maka dapat dikatakan bahwa

Desa Bulolohe termasuk dalam tipologi desa pertanian. Dengan menyatukan aspek teoretis dan aspek legalistik dalam melihat tipologi desa, maka sesungguhnya Desa Bulolohe termasuk tipologi desa pertanian. Dengan kata lain, Desa Bulolohe adalah desa pertanian yang berada pada dataran rendah di Kabupaten Bulukumba. Meskipun Desa Bulolohe termasuk desa pertanian, yang memiliki persawahan dan perkebunan, namun berdasarkan pengamatan lapangan bahwa Desa Bulolohe tidak terlepas dari adanya perubahan fungsi lahan dari lahan persawahan dan perkebunan berubah menjadi lahan pemukiman dan lahan tempat usaha.

Berkembangnya tuntutan masyarakat akan kebutuhan perumahan sehingga dengan mudah lahan persawahan berangsur-angsur berubah menjadi lokasi perumahan. Demikian pula, lahan perkebunan ada yang berubah menjadi lokasi perumahan dan lokasi tempat usaha. Lahan pekarangan yang ada di depan rumah penduduk juga ada yang berubah menjadi lokasi tempat usaha, seperti lokasi pembangunan kios. Perubahan fungsi lahan yang terjadi secara berangsur-angsur dari tahun ke tahun, tampaknya sampai saat ini belum mengubah tipologi Desa Bulolohe sebagai desa pertanian. Hal ini karena secara umum penduduk Desa Bulolohe masih dominan bekerja di sektor pertanian. Dengan demikian, Desa Bulolohe tidak mengalami perubahan sehingga masih tetap sebagai tipologi desa persawahan atau desa pertanian.

C. Orbitasi dan Persebaran Desa

Letak suatu desa dapat dilihat dari keterkaitannya dengan pusat pemerintahan di atasnya (supradesa) minimal dengan

pemerintah kecamatan, kabupaten dan provinsi. Keterkaitan suatu desa dengan pusat pemerintahan supradesa biasanya diukur dari jarak dan waktu tempuh yang dikenal dengan orbitasi desa. Orbitasi desa memberi gambaran mengenai jarak dan waktu tempuh dari suatu desa dengan ibu kota kecamatan, kabupaten dan provinsi. Berdasarkan orbitasinya, jarak Desa Bulolohe ke ibu kota Kecamatan Rilau Ale adalah 8 km dengan jarak tempuh 20 menit, jarak dengan ibu kota Kabupaten Bulukumba adalah 15 km dengan waktu tempuh 30 menit dan jarak dari ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan (Makassar) adalah 165 km dengan waktu tempuh 5 jam.

Untuk menuju Desa Bulolohe tidak sulit karena desa ini tidak termasuk desa terisolir di antara 109 desa di Kabupaten Bulukumba. Desa ini sangat mudah dijangkau dengan sarana transportasi berupa motor dan mobil dengan lancar. Apalagi posisinya cukup strategis karena Desa Bulolohe dibelah dengan jalan negara, mulai dari Desa Bontomanai sampai Desa Batukaropa. Jalan negara ini merupakan jalan poros yang menghubungkan Kabupaten Bulukumba dengan Kabupaten Sinjai. Dengan lancarnya jalur transportasi menuju Desa Bulolohe, maka warga masyarakatnya mengalami mobilitas cukup tinggi dilihat dari interaksinya dengan warga masyarakat yang lain baik dari dalam desa sendiri maupun keluar Desa Bulolohe.

Masyarakat Desa Bulolohe sangat mudah menuju ibu kota kecamatan, kabupaten dan provinsi karena desa ini dilalui dengan sarana transportasi umum. Transportasi umum yang melalui Desa Bulolohe sangat membantu masyarakat dalam melakukan perjalanan atau bepergian ke daerah lain. Kelancaran transportasi umum dimanfaatkan warga masyarakat Bulolohe

untuk beraktivitas di luar desanya, seperti bekerja di ibu kota Kabupaten Bulukumba. Selain transportasi umum, maka akhir-akhir ini sarana transportasi pribadi seperti motor dan mobil cukup berkembang. Perkembangan kendaraan pribadi merupakan bagian dari tuntutan kebutuhan masyarakat untuk selalu meningkatkan mobilitasnya, terutama mobilitas horizontal. Terlepas dari tuntutan mobilitasnya, maka ditemukan pula bahwa kepemilikan kendaraan pribadi merupakan bagian dari gaya hidup dalam lingkungan desanya.

Ditemukan adanya warga masyarakat Desa Bulolohe yang bepergian bekerja keluar dari desanya pada pagi hari dan kembali di desanya pada sore hari. Hal ini sama dengan bentuk mobilitas penduduk khas Yogyakarta, yang dikenal dengan istilah *nglaju* (Mantra : 1978). Mobilitas penduduk Desa Bulolohe berjalan dengan lancar karena orbitasinya, sehingga warga masyarakat Desa Bulolohe tidak terperangkap sebagai masyarakat yang mengalami *in ward looking*. Tampak bahwa ada keleluasaan masyarakat untuk berinteraksi dengan daerah lain karena didukung dengan sarana transportasi, infrastruktur jalan dan jembatan. Tersedianya infrastruktur jalan, baik jalan desa maupun jalan kabupaten dan jalan negara memudahkan warga masyarakat Desa Bulolohe saling berkomunikasi secara langsung dengan warga desa lain di sekitarnya. Masyarakat Desa Bulolohe tidak terisolir dan mudah melakukan komunikasi dengan masyarakat lain, sehingga berbagai informasi dapat diperoleh karena hasil interaksi sosial dengan masyarakat lainnya. Hal yang menarik bahwa warga masyarakat Desa Bulolohe cukup kondusif menerima orang lain dari luar Desa Bulolohe untuk menetap atau bertempat tinggal di Desa Bulolohe. Toleransi masyarakat Desa

Bulolohe yang terpelihara selama ini, sehingga dengan mudahnya setiap orang atau keluarga dapat diterima menetap sebagai warga masyarakat Bulolohe.

Selain orbitasi seperti dideskripsikan di atas maka Desa Bulolohe dapat pula dilihat dari pola persebarannya. Di Indonesia dikenal ada 3 pola persebaran desa, yaitu: (1) pola desa memanjang (linear); (2) pola desa menyebar; dan (3) pola desa tersebar. Pola desa memanjang terdiri pola yang mengikuti jalan, sungai dan pantai serta mengikuti rel kereta api. Pola desa menyebar pada umumnya terdapat di daerah pegunungan atau dataran tinggi yang berrelief kasar. Pemukiman penduduk membentuk kelompok unit-unit yang kecil dan menyebar. Pola desa tersebar merupakan pola desa yang tidak teratur karena terkait dengan kesuburan tanah yang tidak merata. Topografinya sangat buruk seperti desa-desa terdapat di daerah karst atau daerah berkapur.

Dengan mengacu pada pola persebaran desa seperti diuraikan diatas maka Desa Bulolohe termasuk pola desa memanjang (linear), yang mengikuti jalan baik jalan negara, jalan kabupaten dan jalan desa. Sebagai desa yang terletak di dataran rendah, mulai dari batas Desa Bontomanai di sepanjang jalan negara menuju batas Desa Batukaropa sekitar 1 km terdapat perumahan penduduk di sebelah kiri dan kanan jalan negara. Perumahan penduduk juga ditemukan mengikuti jalan kabupaten dari pusat Desa Bulolohe menuju Dusun Parukku dan Dusun Abbatungge sampai batas Desa Anrang. Hal yang sama dapat dilihat dari rumah penduduk yang mengikuti jalan kabupaten mulai dari Dusun Bulolohe menuju Dusun Bentengge sampai batas Desa Bontomanai.

Meskipun ada beberapa rumah penduduk yang terletak di pinggir aliran sungai seperti di Dusun Balantieng namun pola persebarannya tetap mengikuti jalan, seperti rumah penduduk yang terdapat di kiri dan kanan jalan desa Bulolohe. Dengan demikian, pola persebaran Desa Bulolohe dominan adalah memanjang mengikuti jalan raya. Dengan pola ini memudahkan untuk diakses dengan sarana transportasi baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat ke atas. Dengan demikian di Desa Bulolohe terlihat bahwa arus barang dan jasa berjalan lancar, baik barang dari dalam desa sendiri yang akan dibawa keluar Desa Bulolohe maupun barang dari luar desa Desa Bulolohe karena wilayah desanya tidak ada yang terbelakang.

D. Kondisi Alam

Secara umum kondisi alam Desa Bulolohe memiliki daerah yang datar dan sedikit landai. Dilihat dari letaknya, Desa Bulolohe tepatnya berada di jalan Poros Kabupaten Bulukumba dengan Kabupaten Sinjai. Berada pada ketinggian 500 meter di atas permukaan laut dengan suhu udara rata-rata 24 derajat celsius. Sebagai desa dataran rendah memiliki iklim sedang dengan curah hujan 3 mm dan lamanya hujan dalam setahun adalah 8 bulan dan waktu kemarau paling lama 4 bulan. Keadaan curah hujan ini berpengaruh kepada kondisi udara, yang pada waktu tertentu memiliki udara panas dan dingin. Pada Januari sampai dengan Agustus memiliki kondisi udara yang sedikit dingin, karena bersamaan dengan berlangsungnya musim hujan. Dalam artian bahwa selama bulan Januari sampai dengan bulan Agustus dalam 1 (satu) bulan selalu terjadi hujan, baik secara teratur maupun tidak teratur. Sedangkan pada September sampai Desember,

kondisi udaranya cukup panas karena pada bulan tersebut sedang berlangsung musim kemarau.

Berkaitan dengan musim kemarau pada 1997/1998 Desa Bulolohe mengalami dampak El Nino, seperti desa-desa lainnya di Kabupaten Bulukumba. Menurut W. Fitria & M. S. Pratama (2013 : 1) bahwa El Nino mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia tetapi intensitasnya bervariasi tergantung lokasi dan kondisi lokal. Dampak El Nino di Desa Bulolohe menyebabkan kemarau panjang, yang di satu sisi masyarakat diuntungkan tetapi disisi lain ada pula yang dirugikan. Fenomena alam ini cukup menguntungkan bagi petani yang memiliki komoditi perkebunan, seperti tanaman coklat (kakao), tanaman cengkeh dan lada (merica). Komoditi ini meningkat harganya di pasar dalam negeri, sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani. Berbeda dengan petani yang tidak memiliki komoditi perkebunan, tampak bahwa fenomena alam El Nino kurang menguntungkan bagi mereka. Hal ini karena produksi pertaniannya, seperti beras dan sayur mayur serta buah-buahan tidak meningkat harganya secara signifikan di pasar lokal. Dampaknya petani tidak dapat meningkatkan pendapatannya, bahkan ada di antara mereka hampir gagal panen. Hal ini karena terbatasnya air sebagai akibat kemarau panjang pada saat El Nino melanda Desa Bulolohe.

Terpeliharanya kestabilan udara di Desa Bulolohe karena adanya pengaruh dari hutan lindung, yaitu hutan Anrang. Hutan Anrang ini sekitar tahun 1980-1990 cukup memberi kontribusi kepada wilayah Desa Bulolohe dan sekitarnya dalam menciptakan udara yang sejuk di desa. Selain itu Desa Bulolohe juga sangat diuntungkan dengan adanya perkebunan karet di Kawasan Palangisang Kecamatan Ujung Loe. Berdasarkan pengamatan

lapangan bahwa jika di Kawasan Palangisang terjadi kondisi cuaca yang mendung dan berawan dan berpotensi hujan, yang pada akhirnya Desa Bulolohe akan menerima manfaat dengan turunnya hujan. Desa Bulolohe diapit oleh kawasan perkebunan karet Palangisang dengan kawasan hutan Anrang, sehingga Desa Bulolohe terpelihara dari gangguan polusi udara. Berkembangngnya tanaman musiman dan tanaman jangka panjang yang dikelola oleh masyarakat di Desa Bulolohe menambah hijaunya desa ini, sehingga tanahnya tidak gersang dan tandus meskipun berlangsung musim kemarau. Pepohonan yang ada baik di pekarangan penduduk maupun di lahan perkebunan rakyat cukup terpelihara karena memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam menambah pendapatan pekebun. Di pekarangan rumah tumbuh berbagai varietas bunga, termasuk tanaman obat keluarga yang turut menambah keindahan desa.

Selain kondisi alam yang sejuk, Desa Bulolohe juga dianugerahi kekayaan alam berupa air, yang tersedia sepanjang tahun. Dalam memenuhi kebutuhan air bagi warganya cukup tersedia dan terpenuhi di desa, seperti kebutuhan air minum, kebutuhan budi daya tanaman dan kebutuhan lain sesuai keperluan masyarakat desa. Kebutuhan air minum dapat terpenuhi dari sumur yang ada mata airnya, sumur pompa dari air tanah dan air perpipaan yang dialirkan kepada rumah penduduk. Kebutuhan air untuk budi daya tanaman, khususnya tanaman padi, palawija dan sayur mayur berasal dari air sungai Balantieng. Aliran sungai Balantieng sangat mendukung aktivitas masyarakat dalam bidang pertanian. Hal ini karena airnya mengalir sepanjang tahun, meskipun kondisi kemarau berlangsung di Desa Bulolohe. Masyarakat Desa Bulolohe tidak

berhenti kegiatan pertaniannya dan tetap berlangsung sepanjang tahun, hanya karena adanya aliran sungai Balantieng.

Kondisi alam Desa Bulolohe dapat pula dilihat dari penggunaan tanah, yang dari tahun ke tahun mengalami perubahan seiring dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat. Dalam Profil Desa tahun 2020, disebutkan luas wilayah Desa Bulolohe berdasarkan penggunaan lahan adalah 534,80 Ha. Dari total luas tersebut penggunaan lahannya, antara lain untuk: tanah persawahan, tanah kering, tanah basah, tanah perkebunan, fasilitas umum dan tanah hutan. Untuk lebih mengetahui luas penggunaan lahan di Desa Bulolohe secara terinci, seperti pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1 Luas Penggunaan Lahan
Di Desa Bulolohe Tahun 2020.

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
Tanah sawah	175,90
Tanah kering	145,70
Tanah basah	20,00
Tanah perkebunan	150,50
Tanah fasilitas umum	17,70
Tanah hutan	25,00
Jumlah	534,80

Sumber : Profil Desa Bulolohe Tahun 2020.

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas menunjukkan bahwa secara umum penggunaan lahan di Desa Bulolohe masih dominan di sektor pertanian, seperti tanah persawahan dan perkebunan. Oleh karena dominannya penggunaan tanah pada bidang pertanian, sehingga Desa Bulolohe masih tetap dengan tipologi desa pertanian di Kabupaten Bulukumba. Penggunaan lahan

untuk persawahan yang paling luas, yaitu seluas 175,90 ha ditunjang dengan irigasi teknis, sehingga aktivitas pertanian sawah tetap berlangsung sepanjang tahun dan sawah di Desa Bulolohe secara keseluruhan tidak termasuk kategori sawah tadah hujan. Berdasarkan data Profil Desa Bulolohe Tahun 2020 disebutkan bahwa, wilayah Desa Bulolohe yang merupakan tanah kering seluas 145,70 ha, yang digunakan untuk lokasi pemukiman penduduk seluas 60 ha dan untuk tanah pekarangan dengan luas 85,70 ha. Selain lahan kering, di Desa Bulolohe ditemukan juga lahan basah 20 ha, yang terdiri dari tanah rawa 15 ha dan usaha perikanan 5 ha.

Dalam hal penggunaan lahan untuk perkebunan termasuk cukup luas, yaitu seluas 150,50 ha, yang terdiri perkebunan rakyat dan perkebunan negara dengan luas masing-masing 144,50 ha dan 6,00 ha. Tanah perkebunan ini menempati urutan ke-2 penggunaan lahan di Desa Bulolohe. Hal ini karena Desa Bulolohe memiliki berbagai jenis tanaman perkebunan yang dibudidayakan oleh masyarakat, seperti tanaman cengkeh, lada, rambutan, durian, manggis dan lain-lain. Bervariasinya komoditi perkebunan di Desa Bulolohe sehingga memiliki pertanian yang polikultur. Berkaitan dengan penggunaan lahan untuk fasilitas umum seluas 17,70 ha, yang terdiri dari tanah perkantoran/bangunan pemerintah 5 ha, jalan 10 ha dan kuburan umum 2,70 ha. Di Desa Bulolohe terdapat beberapa perkantoran pemerintah, seperti Kantor Desa Bulolohe, Kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Parukku Kecamatan Rilau Ale, Kantor UPTD PSDA Sungai Balantieng Parukku Kecamatan Rilau Ale, Kantor UPTD BKKBN Kecamatan Rilau Ale, Pustu Dusun Parukku dan Poskesdes

Dusun Bulolohe. Selain itu terdapat bangunan pemerintah, seperti Sekolah Dasar Negeri 187 di Dusun Bulolohe, sekolah PAUD/TK Azisah II di Dusun Parukku.

Di antara berbagai penggunaan lahan di Desa Bulolohe sebagaimana diuraikan di atas, maka yang memprihatinkan adalah penggunaan lahan pada sektor kehutanan yang semakin berkurang. Semula merupakan lokasi hutan lindung dan kini menjadi hutan produksi yang terletak di Dusun Abbatungge. Kondisi hutan di sepanjang kiri jalan menuju Desa Anrang telah berubah menjadi lokasi pemukiman penduduk. Perubahan fungsi lahan hutan menjadi lokasi pemukiman dapat berdampak pada krisis ekologi, karena fungsi hutan tidak lagi menyediakan udara bersih yang bebas dari polusi dan peresapan air hujan. Perubahan dari hutan lindung menjadi hutan produksi dapat pula mempercepat kerusakan hutan. Masuknya warga masyarakat Desa Bulolohe melakukan kegiatan tumpang sari di kawasan hutan, sehingga ekosistem hutan mengalami kerusakan dengan hilangnya kayu besar dan semak belukar yang dapat menjaga kelembaban tanah. Jika tidak ada pengendalian dalam pemanfaatan lahan hutan ini, bukan tidak mungkin keadaan alam akan tidak stabil lagi. Hal ini karena semua daya dukung lingkungan, khususnya di sektor kehutanan kurang berfungsi lagi. Dampaknya masyarakat sendiri akan menanggung beban sebagai konsekuensi dari kerusakan lingkungan di desanya.

Apabila diamati secara cermat kondisi alam Desa Bulolohe, tidak hanya tampak hamparan sawah, perkebunan rakyat, pemukiman dan pekarangan penduduk serta keberadaan hutan. Akan tetapi wilayah Desa Bulolohe yang dilalui oleh sungai Balantieng sepanjang 4 kilometer, menyimpan potensi alam

berupa batu kali, yang selama ini kurang diketahui masyarakat desa. Potensi batu kali ini baru diketahui masyarakat pada saat pemerintah ingin melakukan eksploitasi pada tahun 1972, dengan mendirikan pabrik pemecah batu (*stone crusher*) di pinggiran sungai Balantieng. *Stone crusher* ini merupakan sebuah mesin penghancur batu besar menjadi pecahan batu kecil, yang digunakan untuk campuran aspal dalam pembangunan jalan dan campuran beton dan bangunan lainnya.

Pada 1972 ketika dimulai pengaspalan jalan yang pertama Poros Kabupaten Bantaeng menuju Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Sinjai, maka disitulah mulai batu kali dari Dusun Bulolohe dimanfaatkan pemerintah. Dalam pembangunan jalan tersebut bahan baku berupa batu kecil (krikil) yang telah diolah berasal dari Desa Bontomanai (Bulolohe masih salah satu dusun dari Desa Bontomanai). Pada saat itu Dusun Bulolohe (kini Desa Bulolohe) telah memberikan kontribusi pada pembangunan jalan provinsi dan belakangan ini menjadi jalan negara. Sebetulnya keberadaan *stone crusher* ini kurang memberikan manfaat bagi pemerintah desa dan masyarakat, karena tidak ada bagi hasil pengelolaan kekayaan desa dan pemanfaatan tenaga kerja lokal. Selama batu kali ini dieksploitasi oleh pemerintah supradesa, masyarakat tidak pernah melakukan protes. Bahkan membiarkan saja *stone crusher* ini beroperasi di Desa Bulolohe sampai berhenti kegiatannya pada 1980. Memang sepintas belum ada dampak yang ditimbulkan dari pengambilan batu kali di sungai Balantieng. Hal ini karena aliran air sungai Balantieng masih berjalan lancar masuk ke wilayah persawahan petani. Dengan demikian, petani ketika itu belum terganggu dengan keberadaan *stone crusher* di Desa Bulolohe.

Selama 26 tahun (1981-2007) tidak dilakukan pengolahan batu kali dengan mesin *stone crusher*, maka penduduk yang bermukim di pinggir sungai Balantieng melakukan pemecahan batu kali secara manual dengan menggunakan martil. Kegiatan ini dilakukan oleh laki-laki dan ibu rumah tangga sehingga komunitas mereka dikenal dengan warga Desa Bulolohe yang bekerja sebagai pemecah batu. Batu kecil hasil olahan mereka dijual keluar desa kepada rekanan bangunan dan masyarakat umum yang sedang mengerjakan bangunan. Selama tidak dieksploitasi cukup lama, maka pada 2008 batu kali di sepanjang sungai Balantieng kembali dieksploitasi oleh perusahaan swasta di bawah bendera PT Prima Logam dari Kabupaten Tegal Jawa Tengah. Hasil produksi tidak hanya batu kecil tetapi juga ada pasir halus yang dipasarkan sampai Sulawesi Tenggara dan Kalimantan, melalui Pelabuhan Leppe'e Kabupaten Bulukumba. Selama 3 tahun beroperasi perusahaan tersebut menghentikan kegiatannya karena mendapat protes dari petani Desa Batukaropa, yang merupakan desa tetangga dengan Desa Bulolohe. Protes dilakukan karena air yang seharusnya masuk ke persawahan mereka mulai terganggu, sebagai konsekuensi pengambilan batu kali yang tidak terkontrol. Melihat kejadian ini maka seharusnya dalam pengelolaan sumber daya alam desa perlu diperhitungkan dampaknya, sehingga tidak merugikan masyarakat desa khususnya para petani.

E. Keadaan Penduduk

Berdasarkan Profil Desa Bulolohe tahun 2020, jumlah penduduk Desa Bulolohe adalah 2.604 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki 1.274 orang dan penduduk perempuan 1.330 orang dan jumlah kepala keluarga sebanyak 760. Secara historis penduduk

Desa Bulolohe terdiri dari 2 (dua) etnis, yaitu Bugis dan Makassar. Keberadaan kedua etnis tersebut jauh sebelum Desa Bulolohe menjadi desa definitif pada 1995. Untuk menelusuri penduduk asli Desa Bulolohe tampaknya tidak mudah karena tidak adanya petunjuk resmi dalam bentuk dokumen kependudukan terkait asal mula penduduk Desa Bulolohe. Walaupun demikian, ukuran yang dipakai masyarakat Desa Bulolohe dalam menentukan penduduk asli adalah waktu pertama kali menetap dan bertempat tinggal secara permanen di Desa Bulolohe.

Penduduk asli Desa Bulolohe adalah warga masyarakat desa yang leluhurnya bertempat tinggal di Desa Bulolohe sebelum kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini ditandai dengan adanya kuburan leluhur mereka di Desa Bulolohe jauh sebelum kemerdekaan, yang dahulu disebut Kampung Jera terletak di Dusun Bulolohe. Penduduk asli Desa Bulolohe adalah homogen sebagai petani, yang ketika itu bertempat tinggal mengikuti lahan usaha taninya, berupa persawahan dan perkebunan. Secara teoretis untuk mengidentifikasi penduduk asli Desa Bulolohe dapat digunakan kriteria yang dikemukakan oleh J. R. Martines Cobo.

Menurut J. R. Martines Cobo dalam Z. Daulay (2011: 44) telah memperkenalkan pendekatan kriteria objektif dan subjektif untuk mengidentifikasi penduduk asli (*indigenous peoples*). Kriteria objektif digunakan untuk mengidentifikasi penduduk asli sebagai komunitas, sedangkan kriteria subjektif digunakan untuk menilai penduduk asli sebagai seorang individu. Dengan mengacu kepada kriteria objektif dalam konteks historis maka penduduk asli adalah suatu komunitas, yang mempunyai keberlanjutan historis dengan masyarakat yang telah berkembang

dalam wilayah mereka. Sedangkan kriteria objektif dalam konteks saat ini menetapkan bahwa suatu penduduk asli adalah mereka bukanlah bagian masyarakat yang dominan (*dominant sectors of society*). Berdasarkan kriteria objektif baik konteks historis maupun konteks saat ini, maka penduduk asli Desa Bulolohe adalah rumpun keluarga yang secara historis cukup lama bertempat tinggal di desa sebelum kemerdekaan dan berkembang secara turun temurun hingga saat ini dan mereka bukan rumpun yang dominan. Adapun rumpun keluarga yang memenuhi kriteria penduduk asli Desa Bulolohe sesuai penjelasan di atas, seperti diungkapkan oleh MTY (80 tahun) yang diwawancarai pada 2 Agustus 2021 adalah: Karaeng Paduai, Puang Timo Daeng Macora, disusul dengan Puang Massenge, Puang Tengnga, Karaeng Toi, Karaeng Maninriang, Karaeng Bajide dan Puang Bulu Daeng Mattiro. Berikutnya adalah Baco Jipang dan Baco Miri.

Dengan menggunakan kriteria objektif baik konteks historis maupun konteks saat ini, sudah cukup dalam mengidentifikasi penduduk asli Desa Bulolohe, sebagaimana disebutkan dari beberapa rumpun keluarga tersebut di atas. Dengan demikian, pendekatan kriteria subjektif tidak perlu dilakukan guna menghindari terjadinya bias dalam menentukan penduduk asli Desa Bulolohe. Pada dasarnya upaya untuk mengidentifikasi penduduk asli Desa Bulolohe bukan bertujuan untuk mencari dikotomi antara penduduk asli dengan penduduk pendatang. Identifikasi penduduk asli Desa Bulolohe dilakukan untuk memperoleh keterangan ilmiah, guna menjawab pertanyaan masyarakat terkait siapa penduduk asli Desa Bulolohe yang sesungguhnya? Dengan adanya keterangan ilmiah ini akan menjadi informasi penting sekaligus merupakan dokumen

histori yang dapat diketahui dari suatu generasi kepada generasi berikutnya, terutama penduduk yang menetap di Desa Bulolohe.

Dalam perkembangannya sesudah kemerdekaan hingga tahun 1960, Desa Bulolohe mulai kedatangan etnis Makassar dari Kabupaten Jeneponto dan etnis Bugis dari Kabupaten Bone. Penduduk pendatang dari Kabupaten Jeneponto ini menetap di sepanjang pinggiran Sungai Balantieng di Dusun Balantieng dalam wilayah Desa Bulolohe, yang pada umumnya bekerja sebagai petani penggarap. Adapun penduduk pendatang dari Kabupaten Bone bertempat tinggal secara berkelompok dan membentuk perkampungan yang dikenal dengan kampung Bone, yang terletak di Dusun Balantieng. Mereka membuka daerah persawahan yang subur sehingga secara umum bekerja sebagai petani sawah. Dalam beberapa tahun kedatangan orang Jeneponto dan orang Bone, maka Desa Bulolohe juga kedatangan etnis Makassar yang bahasanya berdialek konjo, yaitu orang Kajang. Pendatang dari Kajang ini masih merupakan warga masyarakat Bulukumba, yang berasal dari Desa Possi Tanah dan Desa Mattoanging Kecamatan Kajang. Mereka menjadi penduduk Desa Bulolohe yang bertempat tinggal di Dusun Bentengnge. Pada awal kedatangannya di Desa Bulolohe merupakan pekerja sawah dan kebun serta memelihara kuda. Sejak awal kedatangan orang Bone, Jeneponto dan orang Kajang di Desa Bulolohe tidak diketahui berapa jumlahnya baik dalam hitungan perorangan atau individu, kepala keluarga maupun dalam kelompok. Pada tahun 1998 Desa Bulolohe mengalami penambahan penduduk dengan adanya penduduk pendatang dari etnis Makassar yang berasal dari Kabupaten Bantaeng sebanyak 5 kepala keluarga. Penduduk pendatang ini berasal dari pegunungan Kabupaten

Bantaeng, yang bertempat tinggal di Dusun Parukku dan melakukan kegiatan usaha berkebun. Mereka pada awalnya hanya datang 5 kepala keluarga dan kini secara berangsur-angsur bertambah menjadi 20 kepala keluarga.

Penduduk Desa Bulolohe yang terdiri dari berbagai etnis ini, dalam kesehariannya tidak menjadi kendala dalam berinteraksi sosial, karena mereka merupakan suatu entitas sosial sebagai penduduk Desa Bulolohe. Kerukunan hidup penduduk desa tercermin dengan tidak adanya dikotomi antara penduduk asli dan pendatang, tetapi menyatu secara bersama menjadi warga Desa Bulolohe. Penduduk Desa Bulolohe yang pada awalnya hanya terdiri dari etnis Bugis dan Makassar, maka keadaan sekarang ini telah berkembang dengan adanya etnis Jawa dan Ternate yang menetap sebagai penduduk Desa Bulolohe. Untuk mengetahui secara jelas penduduk Desa Bulolohe berdasarkan etnis, sesuai Profil Desa Bulolohe Tahun 2020 adalah: (1) etnis Bugis sebanyak 1.405 orang, yang terdiri dari laki-laki 705 orang dan perempuan 700 orang. (2) etnis Makassar sebanyak 185 orang, yang terdiri dari laki-laki 90 orang dan perempuan 95 orang. (3) etnis Jawa sebanyak 12 orang, yang terdiri dari laki-laki 6 orang dan perempuan 6 orang. (4) etnis Ternate sebanyak 1 orang laki-laki.

Berdasarkan data Profil Desa tersebut di atas menunjukkan bahwa, penduduk Desa Bulolohe didominasi oleh etnis Bugis sebanyak 1.405 orang, yang terdiri dari penduduk asli dan pendatang. Sejak Desa Bulolohe terbentuk menjadi desa tersendiri memang penduduknya merupakan etnis Bugis, sehingga bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Bugis. Penduduk Desa Bulolohe yang merupakan etnis terbanyak setelah etnis Bugis

adalah etnis Makassar sebanyak 185 orang. Penduduk dari etnis Makassar ini merupakan perpindahan penduduk dari Kabupaten Jeneponto ke Desa Bulolohe jauh sebelum Desa Bulolohe menjadi desa tersendiri. Mereka datang ketika Desa Bulolohe masih merupakan salah satu dusun di Desa Bontomanai. Sebagai penduduk pendatang, kini mengalami perkembangan karena kelahiran dan juga perkawinan dengan penduduk Desa Bulolohe. Penduduk Desa Bulolohe yang merupakan urutan ke-3 (tiga) terkecil sesudah etnis Bugis dan Makassar adalah etnis Jawa sebanyak 12 orang. Migrasi penduduk dari etnis Jawa berasal dari Kabupaten Sragen ke Desa Bulolohe karena membuka usaha warung makan dan etnis Jawa yang lain dari Kota Yogyakarta karena perkawinan dengan warga Desa Bulolohe. Demikian pula dengan kedatangan etnis Ternate 1 orang, karena adanya perkawinan dengan salah seorang penduduk perempuan di Desa Bulolohe.

Selain penduduk berdasarkan etnis sebagaimana dideskripsikan di atas, penduduk Desa Bulolohe dapat juga dilihat perkembangannya berdasarkan usia. Adapun penduduk Desa Bulolohe berdasarkan usia tahun 2020 seperti pada Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2 Penduduk Desa Bulolohe
Berdasarkan Usia Tahun 2020

Usia	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
0-5 tahun	40	58	98
6-10 tahun	118	118	236
11-15 tahun	126	130	256
16-20 tahun	126	146	272
21-25 tahun	108	110	218
26-30 tahun	103	97	200
31-35 tahun	124	99	223
36-40 tahun	91	78	169
41-45 tahun	99	110	209
46-50 tahun	120	106	226
51-55 tahun	66	79	145
56-60 tahun	53	62	115
61-65 tahun	22	32	54
66-70 tahun	23	32	55
71-75 tahun	32	36	68
Lebih dari 75 tahun	23	37	60
Jumlah	1.274	1.330	2.604

Sumber : Profil Desa Bulolohe Tahun 2020.

Berdasarkan Tabel 2.2 di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada penduduk laki-laki, yaitu penduduk perempuan sebanyak 1.330 jiwa dan penduduk laki-laki sebanyak 1.272 jiwa. Dilihat dari komposisi penduduk Desa Bulolohe berdasarkan usia dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu : (1) penduduk usia belum produktif (0-20 tahun); (2) penduduk usia produktif (21-60 tahun); dan (3) penduduk usia tidak produktif (61-75 tahun ke atas). Jumlah penduduk usia produktif sebanyak 1.505 orang, yang terdiri dari penduduk laki-

laki sebanyak 764 orang dan penduduk perempuan sebanyak 741 orang. Penduduk usia belum produktif sebanyak 862 orang, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 410 orang dan penduduk perempuan sebanyak 452 orang. Sedangkan penduduk usia tidak produktif jumlahnya lebih kecil, yaitu sebanyak 237 orang, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 100 orang dan penduduk perempuan sebanyak 137 orang. Dengan mencermati jumlah penduduk berdasarkan usia di Desa Bulolohe tahun 2020, maka tampak bahwa jumlah penduduk usia produktif masih lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk usia belum produktif dan penduduk tidak produktif. Dengan demikian produktivitas masyarakat Desa Bulolohe termasuk tinggi karena secara umum penduduknya masih bekerja dan produktif, sehingga ketergantungan masyarakat termasuk rendah.

BAB III

DINAMIKA SOSIAL BUDAYA

Masyarakat Desa Bulolohe bukan merupakan masyarakat yang tertutup dari berbagai pengaruh sosial budaya yang berkembang dalam interaksinya dengan masyarakat lainnya. Pada dasarnya masyarakat Desa Bulolohe sama dengan masyarakat desa yang lain, yaitu cukup terbuka menerima perubahan yang dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Pola kehidupan tradisional yang mengawali terbentuknya Desa Bulolohe secara evolusi sosio-kultural mengalami perubahan secara bertahap sesuai tuntutan masyarakatnya. Bahwa evolusi sosio-kultural adalah proses perubahan di mana satu bentuk sosio kultural beralih ke bentuk yang lain. Dengan mengkonseptualisasikan bahwa evolusi sosio-kultural adalah sebuah proses perubahan yang bersifat kualitatif daripada kuantitatif (Sanderson, 2003: 63). Perubahan kuantitatif adalah perubahan dari jumlah yang kurang menjadi jumlah yang lebih banyak atau sebaliknya. Sebaliknya perubahan kualitatif adalah perubahan dimana satu jenis atau bentuk baru menggantikan jenis atau bentuk yang lama.

Pemerintah desa dalam merespons perubahan dalam masyarakat dilakukan dengan sikap terbuka dan sejauh mungkin dihindari stagnasi. Perkembangan kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan senantiasa diwujudkan melalui introduksi pembangunan, sehingga berimplikasi dengan terjadinya transformasi dalam masyarakat. Transformasi yang berlangsung dari atas melalui pembangunan yang searah dengan gerakan perubahan dari bawah menciptakan dinamika masyarakat. Dinamika masyarakat dapat dilihat dari aspek sosial dan budaya masyarakat. Dinamika masyarakat di Desa Bulolohe ditandai dengan adanya transformasi dalam aspek sosial budaya, seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, budaya dan agama, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

A. Pendidikan Masyarakat

Untuk memahami asal mula pendidikan warga masyarakat di Desa Bulolohe tidak dapat dilepaskan dengan adanya Sekolah Dasar Negeri (SDN) 98 Bontomanai. Sekolah dasar ini merupakan satu-satunya tempat pendidikan pertama bagi penduduk Dusun Bulolohe, yang akan memasuki usia pendidikan sekolah dasar. Bulolohe sebagai salah satu dusun dari Desa Bontomanai tidak memiliki pendidikan dasar, apalagi pendidikan anak usia dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK) pada saat itu. Dalam upaya pemerintah meningkatkan pendidikan masyarakat terutama pada usia pendidikan dasar, maka ditetapkan kebijakan pengembangan pembangunan sekolah dasar melalui Instruksi Presiden (Inpres) sehingga dikenal secara luas dengan SD Inpres. Ketika Desa Bulolohe masih merupakan salah satu dusun dari Desa Bontomanai maka dibangunlah satu SD Inpres di dusun

Bulolohe, yaitu Sekolah Dasar Negeri (SDN) 187 Bontomanai. Keberadaan Sekolah Dasar ini menandai terputusnya ikatan antara anak usia sekolah dasar di Desa Bulolohe dengan SDN 98 Bontomanai. Hal ini karena SDN 187 Bontomanai yang terletak di Dusun Bulolohe telah mampu menampung anak usia sekolah dasar dari Dusun Bulolohe. Setelah Dusun Bulolohe ditingkatkan menjadi desa, terpisah dengan Desa Bontomanai, maka SDN 187 Bontomanai menjadi sekolah dasar yang dimiliki oleh Desa Bulolohe meskipun masih tertera nama Bontomanai dalam sekolah tersebut.

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar memudahkan akses bagi anak usia sekolah dasar untuk memperoleh pendidikan tanpa harus keluar dari Desa Bulolohe. Salah seorang informan, NN (49 tahun) yang diwawancarai pada 2 Agustus 2021 menyatakan bahwa, keberadaan sekolah dasar di desanya sangat membantu pendidikan anak-anaknya karena mereka tidak perlu jauh lagi untuk bersekolah. Mencermati penjelasan dari informan tersebut, menunjukkan bahwa mulai ada proses transformasi dalam pendidikan di Desa Bulolohe. Transformasi ini berlangsung karena mulai ada perubahan dari penduduk yang belum sekolah hingga dapat memasuki usia sekolah dasar. Sejalan dengan tuntutan masyarakat Desa Bulolohe akan pentingnya pendidikan, maka dikembangkan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan taman kanak-kanak (TK), selain sekolah dasar yang terlebih dahulu ada di Desa Bulolohe. Pola pendidikan anak-anak mulai terpola, yang dimulai dari PAUD ke TK hingga masuk sekolah dasar dan kesemuanya berada di Desa Bulolohe. Dengan adanya fasilitas pendidikan yang tersedia di Desa Bulolohe mulai dari PAUD, TK dan SD sangat menunjang

terlaksananya pendidikan masyarakat secara berjenjang dan berkesinambungan.

Sebagai gambaran jumlah PAUD di Desa Bulolohe sebanyak 1 unit, yaitu: PAUD Azisah Iidi Dusun Parukku dengan jumlah siswa 8 orang, yang terdiri dari siswa laki-laki sebanyak 6 orang dan siswa perempuan sebanyak 2 orang serta tenaga pengajar sebanyak 3 orang. Sedangkan jumlah TK sebanyak 1 unit, yaitu: TK Azisah II di Dusun Parukku dengan jumlah murid 45 orang, yang terdiri dari murid laki-laki sebanyak 21 orang dan jumlah murid perempuan sebanyak 24 orang serta tenaga pengajar 3 orang. Untuk keberlanjutan pendidikan bagi anak usia sekolah dasar di Desa Bulolohe tidak mengalami kesulitan, karena terdapat 1 unit sekolah dasar, yaitu Sekolah Dasar Negeri 187 Bontomanai.

Berdasarkan Laporan Bulanan Sekolah Dasar Negeri 187 Bontomanai untuk Juli 2021, bahwa jumlah siswa secara keseluruhan sebanyak 242 orang, yang terdiri dari kelas I 32 orang (laki-laki 17 orang dan perempuan 15 orang), kelas II 32 orang (laki-laki 10 orang dan perempuan 22 orang). Untuk kelas III terbagi dalam 2 kelas, yang terdiri dari kelas IIIA dan kelas III B. Jumlah siswa di kelas III A 30 orang (laki-laki 10 orang dan perempuan 20 orang) dan kelas III B 29 orang (laki-laki 16 orang dan perempuan 13 orang), kelas IV 42 orang (laki-laki 24 dan perempuan 18 orang), kelas V 33 orang (laki-laki 14 orang dan perempuan 19) dan kelas VI 44 orang (laki-laki 19 orang dan perempuan 25 orang). Di sekolah dasar ini terdapat tenaga pengajar sebanyak 13 orang, yang terdiri dari guru laki-laki 6 orang dan guru perempuan 7 orang. Berdasarkan status kepegawaian dari tenaga pengajar di Sekolah Dasar Negeri 187 Bontomanai, yang berstatus aparat sipil negara sebanyak 4 orang

dan berstatus tenaga honorer sebanyak 9 orang. Dengan demikian, jumlah guru yang berstatus sebagai tenaga honorer jauh lebih banyak daripada guru yang berstatus aparat sipil negara/pegawai negeri sipil.

Dalam hal perkembangan pendidikan di Desa Bulolohe, maka sekolah dasar tersebut telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan partisipasi usia sekolah. Hal ini karena di sekolah tersebut mampu menampung anak-anak yang masuk usia sekolah dasar sehingga mereka tidak terlantar dan tetap diterima sebagai siswa sekolah dasar. Meskipun ada di antara siswa sekolah dasar yang tidak bersekolah di desanya, bukan berarti sekolah tersebut tidak menerimanya melainkan karena jarak rumahnya dekat dengan sekolah dasar yang ada di desa tetangga. Bagi “orang tua” yang menetap di Dusun Balantieng, ada di antara anak-anak mereka yang sekolah di SDN Batukaropa karena lebih dekat dari pada sekolah dasar yang ada di Desa Bulolohe. Dalam pembahasan selanjutnya yang dimaksud dengan “orang tua” adalah ayah dan ibu yang memiliki anak. Untuk melanjutkan pendidikan di sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) bagi anak-anak yang telah tamat sekolah dasar, biasanya mereka masuk SMP Negeri 3 Bontomanai (kini SMP Negeri 40 Bulukumba) yang terletak di Desa Bontomanai dengan jarak terjauh 3 km dari Desa Bulolohe. Pada 2021 jumlah siswa dari Desa Bulolohe yang sementara sekolah di SMP Negeri 40 Bulukumba adalah sebanyak 31 orang, mulai dari kelas I, II dan III. Secara umum mereka memilih sekolah terdekat, termasuk Madrasah Tsanawiyah yang ada di Desa Bontomanai.

Meskipun demikian, selama 4 tahun terakhir dari tahun 2016-2020 terdapat pula tamatan sekolah dasar dari Desa Bulolohe yang

tidak melanjutkan ke SLTP terdekat dari rumahnya. Hal ini karena di antara mereka melanjutkan pendidikan ke Pondok Pesantren yang ada dalam wilayah Sulawesi Selatan, seperti di Kabupaten Bone dan Kabupaten Gowa. Fenomena menarik bahwa mereka yang tidak mampu beradaptasi dengan kehidupan pesantren, pada akhirnya kembali ke SLTP yang ada di dekat rumahnya, sehingga dipilih SMP Negeri 40 Bulukumba. Diberlakukannya sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru memberikan implikasi terhadap tertutupnya peluang bagi anak-anak dari Desa Bulolohe, untuk melanjutkan pendidikan mereka di SLTP yang ada di Kota Bulukumba.

Sementara untuk memperoleh pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) tidak begitu sulit, karena siswa yang tamat SLTP di Desa Bulolohe dapat melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Rilau Ale (kini SMA Negeri 10 Bulukumba) dan di SMA Negeri 17 Bulukumba yang terletak di Desa Tanah Harapan, jaraknya 4 km dari Desa Bulolohe. Dengan tersedianya sarana transportasi dan prasarana jalan yang menghubungkan antara Desa Bulolohe dengan Kota Bulukumba dan Kecamatan Rilau Ale, memberikan kemudahan bagi warga Desa Bulolohe mendapatkan pendidikan dengan menggunakan motor atau mobil pete-pete yang melewati Desa Bulolohe. Untuk menempuh pendidikan tinggi pada jenjang diploma dan strata 1, tamatan SLTA dari Desa Bulolohe melanjutkan ke perguruan tinggi yang ada di Bulukumba dan perguruan tinggi negeri atau swasta yang ada di Kota Makassar.

Selain fasilitas pendidikan sekolah dasar yang mendukung pencapaian partisipasi usia sekolah, maka kerja sama warga masyarakat juga sangat baik dilihat dari respons mereka terkait

pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya. Antusias masyarakat untuk menyekolahkan anaknya sangat tinggi, karena terjadi perubahan pandangan di kalangan orangtua yang selama ini pendidikan hanya untuk tahu membaca dan menulis agar tidak menjadi orang buta huruf. Akan tetapi, selama satu dasawarsa terakhir mengalami perubahan bahwa pendidikan akan memberikan kedudukan dan masa depan yang lebih baik. Dari berbagai informan yang ditemui memberikan pendapat yang sama, bahwa jika perlu pendidikan anak-anaknya sedapat mungkin lebih tinggi dari orangtuanya yang hanya tamat sekolah rakyat atau tidak pernah bersekolah sama sekali.

Di kalangan orangtua siswa sering kali diungkapkan kata, yang menyatakan “kalau dirinya tidak berhasil di pendidikan, mudah-mudahan anaknya dapat mencapai dengan sukses”. Demikian besarnya harapan orangtua terhadap anaknya agar sukses dalam pendidikan, sehingga cukup banyak orang tua rela berkorban tenaga, pikiran dan materi demi membiayai sekolah anak-anaknya. Seorang informan mengungkapkan bahwa anak merupakan pelita kehidupan, sehingga dengan pendidikan yang dimiliki berguna minimal untuk menyinari dirinya sendiri dan secara maksimal menyinari atau bermanfaat kepada orang lain.

Dalam teori penduduk yang disebut dengan teori kapilaritas sosial (*theory of socialcapilarity*) dari Arsene Dumont dalam I. B. Mantra (2015: 58) bahwa kapilaritas sosial mengacu kepada keinginan seseorang untuk mencapai kedudukan yang tinggi di masyarakat, misalnya seorang ayah selalu mengharapakan dan berusaha agar anaknya memperoleh kedudukan sosial ekonomi yang tinggi melebihi apa yang dia sendiri telah mencapainya. Berkaitan dengan kapilaritas sosial sesungguhnya sudah

berlangsung di Desa Bulolohe, di mana para orangtua memberikan kebebasan kepada anak-anaknya untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Para orangtua sudah cukup demokratis sehingga tidak menghalangi lagi anak perempuannya melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, seperti pada masyarakat tertentu yang melarang anak perempuan berpendidikan tinggi.

Sedikit berbeda dengan penguasa di desa yang terkadang tidak demokratis, dengan menghalangi keluarga tertentu untuk meraih pendidikan yang tinggi karena dia prediksi akan bersaing meraih kekuasaan di desa. Seharusnya penguasa di desa memotivasi warganya untuk meningkatkan pendidikan karena jika berhasil belum tentu kembali ke desa untuk bersaing meraih kekuasaan. Hal ini karena bisa saja mereka mengabdikan diluar desanya dengan lebih baik dari pada di desa kelahirannya sendiri. Putra Desa Bulolohe sudah banyak yang sukses di daerah lain mengabdikan sebagai aparat sipil negara, pegawai swasta, wiraswasta dan lain-lain. Mungkin ada baiknya kita perhatikan makna pernyataan bahwa membangun desa tidak harus bekerja di desa. Maknanya bahwa kontribusi ide dan pemikiran termasuk dana sekalipun untuk desanya senantiasa dinantikan demi membantu kemajuan pembangunan di desanya.

Masyarakat Desa Bulolohe telah menyadari adanya perbedaan antara orang yang berpendidikan dengan yang tidak berpendidikan. Dengan perbedaan yang mereka lihat terutama orang berpendidikan yang bekerja sebagai guru, pegawai dan petani berpendidikan memiliki wawasan dan pengetahuan serta ketrampilan sehingga dapat memiliki masa depan yang baik. Pendidikan berfungsi untuk memberikan ketrampilan khusus

bagi individu, yaitu berbagai keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaannya di masa mendatang (Durkheim dalam Martono, 2016:270). Transformasi masyarakat tradisional menuju masyarakat yang maju dapat berlangsung karena didukung dengan pendidikan. Menurut Inkeles dan Smith dalam A. Budiman (1996:35) menjumpai bahwa memang pendidikan adalah yang paling efektif untuk mengubah manusia. Dampak pendidikan tiga kali lebih kuat dibandingkan dengan usaha-usaha lainnya. Keberadaan guru sekolah dasar sangat berperan memotivasi penduduk Desa Bulolohe mengenai pentingnya pendidikan yang dapat mengubah kehidupan individu, kelompok dan masyarakat. Guru tidak hanya berperan selaku pengajar tetapi lebih jauh dia juga berfungsi sebagai *agent of change* dalam masyarakat desa.

Sebagai agen perubahan, dia melakukan transformasi dengan menanamkan pemahaman kepada masyarakat desa terkait pentingnya manfaat pendidikan demi meraih masa depan yang lebih baik. Selain dari kalangan guru di desa maka yang tidak kalah menarik untuk dicermati adalah keberadaan aparat sipil negara terutama tenaga penyuluh lapangan. Mereka juga sama seperti guru yang cukup gencar menghimbau masyarakat agar meningkatkan pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. Sekolah lapang pertanian yang dilaksanakan di Desa Bulolohe merupakan salah satu bentuk transformasi dalam meningkatkan pengetahuan petani.

Sebagai desa pertanian di Kabupaten Bulukumba maka sangat wajar jika pendidikan petani menjadi prioritas untuk ditingkatkan, sejalan dengan pendidikan kaum anak-anak dan remaja dalam usia sekolah. Berkaitan dengan pendidikan petani, secara legalistik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dalam pasal 42 disebutkan bahwa: (1) pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada petani; dan (2) pendidikan dan pelatihan antara lain berupa: (a) pengembangan program pelatihan dan pemagangan; (b) pemberian bea siswa bagi petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang pertanian; atau (c) pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis. Meskipun Undang-undang ini telah berlaku selama 8 tahun sejak diundangkan pada 6 Agustus 2013, namun perintah Undang-undang untuk pelatihan petani di Desa Bulolohe kurang berjalan optimal. Dari 3 poin a, b dan c di atas yang seharusnya dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kualitas petani, namun kurang terlaksana dengan baik sehingga produktivitas petani di Desa Bulolohe masih rendah. Oleh karena keterbatasan pendidikan dan keterampilan sehingga usaha taninya belum dikelola secara agribisnis, termasuk masih rendahnya daya saing produk pertaniannya.

Dalam hal pendidikan dan pelatihan perangkat desa, yang sedikit lebih baik daripada petani karena perangkat desa di Desa Bulolohe telah mendapat dana pelatihan dari APB Desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun anggaran. Perangkat desa adalah unsur staf yang melaksanakan tugas teknis pelayanan dan membantu kepala desa sebagai unsur wilayah yang jumlah dan sebutannya sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat (Nain, 2012: 1). Sebagai aparat pelaksana teknis pelayanan di desa diberikan pelatihan pengelolaan keuangan desa, pelatihan administrasi desa dan pelatihan profil desa dalam meningkatkan pengetahuan mengenai data

pendukung dalam pembangunan desa. Terjadinya perubahan regulasi yang begitu cepat sehingga banyak yang belum dipahami oleh perangkat desa, sehingga pendidikan dan pelatihan menjadi salah satu kebutuhan untuk dilaksanakan. Penyimpangan pengelolaan keuangan desa ditengarai ada kaitannya dengan kurangnya mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Menarik untuk kita cermati pendapat dari Martono (2016:266) bahwa: (1) pendidikan dapat mengubah pola pikir individu serta memberikan pencerahan pada individu mengenai hal-hal yang selama ini belum diketahui banyak masyarakat; (2) pendidikan juga dapat merombak berbagai mitos yang selama ini berkembang dalam masyarakat; dan (3) pendidikan dapat meluruskan berbagai hal yang selama ini dimaknai salah oleh masyarakat. Masalah perubahan adalah masalah sejauh mana sikap menerima. Perubahan sikap merupakan masalah pendidikan. Mengubah sikap dilakukan melalui pendidikan. Ernest Green dalam I. L. Pasaribu & B. Simanjuntak (1986: 37) mengatakan *the purpose of education is to educate the individual for the society in which they must live and give him the power to change that society*. Ini berarti pendidikan memberi kekuatan mengubah masyarakat.

Berkaitan dengan pengaruh pendidikan dalam mengubah masyarakat di Desa Bulolohe, tampak dengan adanya perubahan dalam menerima inovasi yang ditunjukkan dengan besarnya perhatian mengembangkan teknologi pertanian modern. Sikap menerima pengembangan tanaman tertentu, seperti tanaman cabe dengan teknologi mulsa plastik dan tanaman porang merupakan suatu bentuk kompromi terhadap teknologi dari luar. Hal ini dapat berlangsung karena terbukanya wawasan sebagai implikasi dengan pendidikan yang dimiliki masyarakat,

khususnya bagi petani. Transformasi lain yang berkembang dan mengubah masyarakat di Desa Bulolohe adalah perubahan dalam meningkatkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sebelum Desa Bulolohe menjadi desa tersendiri maka tingkat pendidikan masyarakat masih tergolong rendah, yaitu tamat sekolah dasar dan paling tinggi SLTP/ sederajat atau kalau ada yang tamat SLTA/sederajat termasuk masih sedikit. Setelah tahun 1990 mengalami perubahan secara bertahap hingga sekarang, sehingga pendidikan masyarakat di Desa Bulolohe sudah ada yang mencapai tingkat Strata 1 (S1) dan Strata 2 (S2). Dengan demikian, Desa Bulolohe dari segi pendidikan mulai mengalami kemajuan karena warga masyarakatnya sudah ada sarjana yang bertempat tinggal dan menetap serta mengabdikan diri di desa. Untuk lebih jelasnya tingkat perkembangan pendidikan masyarakat di Desa Bulolohe pada 2020, seperti dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Perkembangan Tingkat Pendidikan Masyarakat
Di Desa Bulolohe Tahun 2020

Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
Belum sekolah	267
SD/sederajat	397
SMP/sederajat	87
SMA/sederajat	143
Diploma 1	3
Diploma 2	5
Diploma 3	8
Strata 1 (S1)	14
Strata 2 (S2)	2
Strata 3 (S3)	0

Sumber : Profil Desa Bulolohe Tahun 2020.

Berdasarkan Tabel 3.1 di atas menunjukkan bahwa pendidikan masyarakat di Desa Bulolohe masih didominasi dengan pendidikan sekolah dasar sebanyak 397 orang. Penduduk yang memiliki pendidikan SD pada umumnya mereka yang berumur di atas 40 tahun. Penduduk yang belum memasuki usia sekolah juga termasuk tinggi, yaitu sebanyak 267 orang. Mereka ini merupakan kategori penduduk yang termasuk bayi dan balita yang masih dalam proses pertumbuhan dan ada juga di antara mereka yang tidak lama lagi masuk PAUD dan TK.

Perkembangan pendidikan masyarakat di Desa Bulolohe juga mengalami peningkatan yang memadai dilihat dari jumlah penduduk yang berpendidikan SMA/ sederajat lebih banyak dari yang berpendidikan SMP/ sederajat. Penduduk yang memiliki pendidikan SMA/ sederajat sebanyak 143 orang dan yang berpendidikan SMP/ sederajat sebanyak 87 orang. Meningkatnya tingkat pendidikan SMA/ sederajat di Desa Bulolohe sangat terkait dengan besarnya kesadaran orangtua akan pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa respons para orangtua sangat tinggi, karena dengan pendidikan dapat meraih masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu harapan orang tua dapat tercapai dengan pendidikan anak-anaknya sampai SMA/ sederajat. Dengan demikian, cukup wajar jika penduduk Desa Bulolohe lebih banyak yang berpendidikan SMA/ sederajat daripada yang berpendidikan SMP/ sederajat.

Selain keberhasilan penduduk Desa Bulolohe meraih pendidikan setingkat SLTA, namun tidak dapat dipungkiri masih ditemukan adanya warga masyarakat yang gagal dalam pendidikan. Mereka yang gagal ini karena orangtua mereka terlalu cepat melibatkan anak-anaknya menjadi pekerja di sektor

pertanian, perkebunan dan peternakan. Setelah dilibatkan dalam bertani, berkebun dan beternak dan mendapatkan penghasilan meskipun dalam jumlah yang terbatas, maka mereka tidak berminat lagi melanjutkan pendidikan. Dampaknya ada yang dikeluarkan dari sekolah dan dinyatakan *drop out* pada tingkat SD, SLTP dan SLTA. Informasi terkait *drop out* di sekolah sudah lama berlangsung mulai 1980 sampai 1995 dan berangsur-angsur berkurang sampai saat ini.

Bahkan dengan adanya dana bantuan operasional sekolah (BOS) di sekolah sangat membantu meminimalisir terjadinya *drop out* terutama dari keluarga yang tidak mampu membiayai kebutuhan pendidikan anak-anaknya di Desa Bulolohe. Bagi mereka yang gagal dalam pendidikan memiliki 2 pilihan, yaitu: (1) menetap di desanya. Bagi mereka yang tinggal di desa melanjutkan usaha tani orangtuanya dengan bekerja sebagai petani, pekebun, peternak, pedagang hasil bumi, tukang dan pengrajin dan (2) merantau ke daerah lain. Dengan pendidikan yang terbatas karena hanya dapat membaca dan menulis atau tamat SD dan SLTP, namun mereka dapat merantau sampai ke Makassar, Sulawesi Tenggara, Kalimantan dan Malaysia tanpa pendidikan keterampilan yang dimiliki.

Perkembangan lain yang menggembirakan karena di Desa Bulolohe sudah ada penduduknya yang memiliki pendidikan tinggi, mulai dari diploma, strata 1 sampai strata 2. Penduduk Desa Bulolohe yang berpendidikan diploma sebanyak 16 orang, yang terdiri dari diploma 1 sebanyak 3 orang, diploma 2 sebanyak 5 orang dan diploma 3 sebanyak 8 orang. Adapun penduduk Desa Bulolohe yang memiliki pendidikan sarjana, antara lain : strata 1 (S1) sebanyak 14 orang dan strata 2 (S2) sebanyak 2 orang. Dengan

adanya sarjana yang bertempat tinggal di desa, khususnya di Desa Bulolohe maka asumsi yang berkembang bahwa sarjana hanya dapat mengabdikan di kota dinilai tidak relevan lagi. Oleh karena itu sarjana tidak hanya berada di kota tetapi bisa juga berada di desa, sehingga dapat menjadi agen perubahan (*agent of change*) dalam masyarakat desa. Mengacu kepada tingkat pendidikan masyarakat di Desa Bulolohe sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka telah terjadi transformasi pendidikan. Transformasi pendidikan dilihat dari perkembangan pendidikan yang dimiliki masyarakat berdasarkan tingkatannya, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan lanjutan tingkat pertama dan pendidikan lanjutan tingkat atas serta pendidikan tinggi.

B. Kesehatan Masyarakat

Kondisi kesehatan masyarakat di Desa Bulolohe sekitar tahun 1993 masih termasuk rendah. Bulolohe masih merupakan desa persiapan karena ketika itu baru terpisah dari Desa Bontomanai, sehingga tidak memiliki fasilitas kesehatan. Masyarakat Desa Bulolohe pada saat itu lebih banyak percaya kepada pengobatan tradisional dengan menggunakan dukun. Terdapat 2 jenis dukun yang besar pengaruhnya di masyarakat, yaitu dukun biasa dan dukun beranak. Besarnya pengaruh dukun tersebut karena di desa belum ada tenaga kesehatan dan dukun terlatih untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat desa. Setelah Desa Bulolohe resmi menjadi desa definitif pada 1995 maka dibangun Puskesmas Pembantu (Pustu) di Dusun Parukku sekaligus ditempatkan 1 orang bidan desa di situ.

Keberadaan bidan desa ini yang tugas pokoknya melayani persalinan kepada ibu hamil, namun dia juga bertindak sebagai

agen pembaruan di bidang kesehatan. Bidan desa melakukan transformasi dengan menghimbau masyarakat agar melakukan perubahan pengobatan, dari pengobatan tradisional ke pengobatan secara medis (modern). Setelah 7 tahun terbangunnya Pustu di Dusun Parukku, maka untuk mendekatkan pelayanan kesehatan masyarakat dibangun pula Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) di Dusun Bulolohe. Poskesdes di Dusun Bulolohe melayani warga masyarakat dari 3 dusun, yaitu Dusun Bulolohe, Dusun Balantieng dan Dusun Bentengnge. Sedangkan Pustu di Dusun Parukku melayani warga masyarakat dari Dusun Parukku dan Dusun Abbatungnge.

Menguatnya intervensi pemerintah supradesa melalui introduksi pembangunan di bidang kesehatan dengan penyediaan fasilitas kesehatan, seperti Pustu dan tenaga medis sangat mendukung percepatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Di Desa Bulolohe terdapat beberapa fasilitas kesehatan yang dapat digunakan masyarakat, baik untuk pengobatan kuratif seperti Pustu maupun pengobatan preventif seperti posyandu. Dalam pelaksanaan pelayanan di Pustu didukung dengan 2 orang bidan, yaitu masing-masing Pustu 1 orang bidan. Mengenai pelayanan posyandu didukung dengan kehadiran kader posyandu dan didampingi dengan tenaga medis dari Pustu atau Puskesmas pada hari H pelayanan setiap bulan. Apabila pelayanan di Pustu tidak dapat dilakukan karena keterbatasan sarana dan kemampuan petugas medis maka dilakukan rujukan ke Puskesmas Bontobangun, yang jaraknya 8 km dari Desa Bulolohe.

Selain fasilitas kesehatan yang ada di Desa Bulolohe maka dalam memenuhi kebutuhan hidup sehat masyarakat juga sering

menggunakan fasilitas kesehatan di luar desa. Secara umum mereka menggunakan jasa dokter praktik yang ada di Kota Bulukumba, Puskesmas Bontobangun atau di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Sultan Daeng Raja Bulukumba. Kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan modern sangat terkait dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat untuk hidup sehat. Sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat yang gencar dilaksanakan pemerintah di desa-desa membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat. Perubahan yang terjadi tampak dari menguatnya pergeseran pilihan pengobatan masyarakat Desa Bulolohe dari pengobatan tradisional melalui dukun menjadi pengobatan modern dengan pelayanan secara medis di fasilitas kesehatan.

Untuk memahami perkembangan kesehatan masyarakat di Desa Bulolohe, seperti diuraikan berikut ini:

1. Kesehatan Ibu dan Anak.

Dalam hal pelayanan kesehatan ibu hamil dan anak di Desa Bulolohe, maka keberadaan Posyandu sangat berperan penting dalam masyarakat. Posyandu merupakan salah satu bentuk usaha kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) dikelola dan diselenggarakan oleh masyarakat secara bersama dalam upaya pelaksanaan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dengan memberi kemudahan untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar dalam mempercepat penurunan angka kematian ibu dan anak (Nain, 2015: 17). Posyandu di Desa Bulolohe terdapat di setiap dusun, antara lain Posyandu Dahlia I di Dusun Bulolohe, Posyandu Dahlia II di Dusun Bentengnge, Posyandu Dahlia III di Dusun Balantieng, Posyandu Dahlia IV di Dusun Parukku dan Posyandu Dahlia V di Dusun Abbatungge.

Setiap Posyandu melakukan paket kegiatan minimal dan paket kegiatan tambahan sesuai kebutuhan (*optional*). Paket kegiatan minimal dilaksanakan di semua Posyandu karena merupakan kegiatan utama, seperti perbaikan gizi, kesehatan ibu dan anak (KIA), keluarga berencana (KB), imunisasi dan penanggulangan penyakit diare. Adapun paket kegiatan tambahan antara lain, pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita, bina keluarga balita (BKB), penyuluhan gizi dan kesehatan, kampanye pertolongan persalinan oleh tenaga medis (bidan) dan pemberian vitamin A dan tablet tambah darah (Fe).

Di Desa Bulolohe, Posyandu telah aktif melaksanakan kegiatan setiap bulan sesuai hari dan tanggal buka Posyandu. Setiap Posyandu pada hari H (*high*) pelayanan melaksanakan kegiatan dengan sistem 5 meja pelayanan, yaitu: *Pertama*, meja 1 pendaftaran. Setiap sasaran Posyandu yang datang pada hari buka Posyandu didaftar terlebih dahulu. Adapun sasaran Posyandu dimaksud adalah bayi dan anak balita, ibu hamil, ibu nifas, menyusui dan wanita pasangan usia subur (PUS). Pendaftaran pada meja 1 bertujuan untuk mengetahui jumlah sasaran yang datang di Posyandu, sehingga memudahkan secara kuantitas diketahui besarnya partisipasi sasaran dalam memanfaatkan pelayanan Posyandu. Apabila partisipasi sasaran rendah maka menjadi tugas pemerintah desa, dalam hal ini kepala dusun melakukan penggerakan masyarakat kepada sasaran Posyandu. Tujuannya adalah agar mereka datang di Posyandu pada bulan berikutnya sehingga partisipasi sasaran Posyandu mencapai target.

Kedua, meja 2 penimbangan bayi dan balita. Pelaksanaan penimbangan bayi dan balita bertujuan untuk mengontrol

perkembangan berat badan, sehingga dari hasil penimbangan dapat diketahui tumbuh kembang anak secara wajar. Dalam pelaksanaan penimbangan bayi dan balita sering kali muncul masalah nonteknis, yaitu kurang tepatnya hasil penimbangan karena timbangan yang dipakai sudah tua dan jarang dilakukan tera sehingga hasilnya tidak tepat lagi. Terkadang ibu-ibu melakukan protes dari hasil timbangan bayi dan balitanya karena dinilai tidak tepat atau mengalami penurunan berat badan bayi dan balitanya.

Ketiga, meja 3 pencatatan hasil melalui pengisian kartu menuju sehat (KMS). Hasil penimbangan bayi dan balita di catat dalam KMS, yang bertujuan untuk mengetahui perubahan berat badan dengan membandingkan penimbangan yang lalu dengan penimbangan saat ini. Jika seorang anak setelah ditimbang 2-3 kali dan berat badannya tidak mengalami kenaikan, maka anak tersebut perlu perhatian khusus dari petugas kesehatan untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Anak-anak yang mengalami seperti ini biasanya hasil timbangannya berada di bawah garis merah (BGM) yang tertera dalam KMS;

Keempat, meja 4 penyuluhan perorangan, merujuk dan menyebarluaskan program. Untuk pelayanan penyuluhan perorangan dilakukan kepada ibu yang memiliki anak balita berdasarkan naik turunnya berat badan diikuti pemberian makanan tambahan dan vitamin A. Penyuluhan perorangan dilakukan pula kepada ibu hamil yang mengalami risiko tinggi diikuti dengan pemberian tablet besi (Fe). Selain itu penyuluhan perorangan diberikan juga pasangan usia subur (PUS) agar dapat menjadi peserta KB lestari;

Kelima, meja 5 pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA)-keluarga berencana (KB), imunisasi dan pengobatan. Pelayanan kesehatan ibu ditujukan kepada pemeriksaan kehamilan agar tercapai kunjungan 1 sampai kunjungan ke 4 (K1-K4) selama persalinan. Persalinan yang berkualitas apabila memenuhi kunjungan pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali sebelum melahirkan. Sedangkan pelayanan kesehatan anak terutama kepada anak balita untuk diberikan imunisasi, seperti DPT, Hepatitis, Polio dan Campak. Adapun pelayanan KB hanya sebatas sosialisasi karena tidak diikuti dengan pemberian kontrasepsi, pil dan lain-lain. Pengadaan kontrasepsi diupayakan sendiri oleh pasangan usia subur di Desa Bulolohe, sehingga pada hari buka Posyandu tidak tampak lagi keterpaduan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana.

Keberhasilan mekanisme pelayanan pada hari buka Posyandu sangat ditentukan oleh peran kader Posyandu dan tenaga teknis kesehatan. Setiap meja pelayanan terdapat perbedaan tugas dan tanggung jawab bagi petugas pelayanan. Petugas pelayanan mulai dari meja 1 sampai dengan meja 4 dilaksanakan oleh kader Posyandu, yang merupakan kader perberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) dusun. Sedangkan pelayanan di meja 5 dilaksanakan oleh petugas teknis kesehatan dari Puskesmas, yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk membina Posyandu di desa dalam wilayah kerja Puskesmas. Peran kader sangat besar karena lancar tidaknya penyelenggaraan kegiatan Posyandu ditentukan oleh sejauh mana kemampuan dan keaktifan kader melaksanakan fungsinya serta membangun kerja sama yang baik sesama kader maupun kepada petugas pembina dan kelompok sasaran Posyandu (Nain, 2015: 33). Berbagai informasi

dari pemerintah lebih mudah disampaikan kepada masyarakat apabila melalui kader, karena kader lebih tanggap dan memiliki pengetahuan kesehatan di atas rata-rata dari kelompok sasaran Posyandu. Posisi kader adalah menjembatani masyarakat khususnya kelompok sasaran Posyandu dengan pihak pemerintah atau Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) pembina Posyandu yang ada di Kecamatan dan Kabupaten.

Pada hari buka Posyandu kegiatan yang paling menonjol adalah penimbangan bayi dan anak balita. Dengan demikian, keberadaan Posyandu di Desa Bulolohe hanya berfungsi sebagai pos penimbangan bayi dan anak balita. Bagi ibu hamil ada diantaranya yang melakukan pemeriksaan kehamilan di Pustu atau di bidan desa, baik yang ada di Desa Bulolohe maupun di luar Desa Bulolohe. Hal ini memengaruhi berkurangnya kunjungan ibu hamil ke Posyandu, sehingga sulit dikontrol perkembangan pencapaian K1-K4 selama persalinan. Dalam hal persalinan yang aman bagi ibu hamil di Desa Bulolohe telah dilakukan dengan pendampingan persalinan melalui kerja sama antara dukun beranak dengan bidan di desa. Setiap ada ibu hamil yang akan melahirkan maka dukun menyampaikan kepada bidan dan selama proses persalinan ditangani oleh bidan didampingi dengan dukun. Tugas dukun beranak adalah memandikan bayi yang telah lahir dalam waktu yang tidak ditentukan, sehingga peran dukun tidak terpinggirkan dengan kehadiran bidan di desa.

Pelaksanaan pendampingan persalinan dilakukan bagi ibu hamil yang bersalin di rumah sendiri. Seiring dengan anjuran pemerintah daerah agar semua persalinan ibu hamil harus dilaksanakan di tempat pelayanan kesehatan dan tidak dibenarkan persalinan dilakukan di rumah. Dengan anjuran ini

secara perlahan-lahan peran dukun beranak mulai berkurang dan hingga kini sudah tidak tampak lagi di desa. Semua persalinan ibu hamil ditangani oleh bidan secara penuh di Puskesmas Pembantu yang ada di Desa Bulolohe. Apabila bidan tidak mampu menangani persalinan di Pustu maka ibu hamil dirujuk ke Puskesmas Bontobangun dan jika tidak dapat ditangani di Puskesmas Bontobangun selanjutnya dirujuk ke RSUD. H Sultan Daeng Raja Bulukumba, selaku rumah sakit rujukan di Kabupaten Bulukumba.

Untuk kelancaran pelaksanaan rujukan ibu hamil, pemerintah Desa Bulolohe mulai tahun 2020 menyiapkan sarana transportasi melalui pengadaan mobil sehat. Dikatakan mobil sehat, bukan *ambulance* karena merupakan bagian dari upaya memotivasi masyarakat untuk tetap sehat, meskipun kondisi pada saat berada di mobil tersebut dalam keadaan sakit. Dengan menggunakan mobil sehat warga yang sakit memiliki semangat untuk sembuh dari penyakitnya. Mobil sehat ini dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2020, yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp.177.500.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dianggarkan pada 2020, tetapi pengadaan mobil sehat tersebut pada 2021. Keberadaan mobil sehat ini berfungsi sebagai *ambulance* desa, yang siap mengantar ibu hamil pergi-pulang ke tempat pelayanan kesehatan. Dalam perkembangannya mobil sehat tidak hanya melayani ibu hamil, tetapi juga melayani warga Desa Bulolohe yang sedang sakit untuk dibawa ke tempat pelayanan kesehatan, termasuk ke dokter praktik. Dengan demikian, masalah sarana transportasi bagi ibu hamil atau orang sakit di Desa Bulolohe

bukan lagi menjadi hambatan, karena tersedia mobil sehat selama 24 jam melayani masyarakat desa.

Sebelum ada mobil sehat maka masalah transportasi ibu hamil atau orang sakit menjadi kendala dalam mempercepat pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Melihat kondisi ini sering terulang maka pemerintah desa bersama masyarakat sepakat untuk melakukan pengadaan mobil sehat. Segala biaya operasional penggunaan mobil sehat tersebut dianggarkan dalam APBDesa Bulolohe setiap tahun. Dilihat dari manfaat mobil sehat di Desa Bulolohe, dikemukakan oleh AFL (39 tahun) selaku pengelola pada 2 Agustus 2021 bahwa, mobil sehat sangat membantu mengurangi beban masyarakat, karena selain mempercepat sampai ke tempat pelayanan kesehatan juga tidak ada biaya transportasi yang dikeluarkan masyarakat karena ditanggung pemerintah desa.

Lebih jauh dikatakan bahwa penggunaan mobil sehat mulai Februari sampai Agustus 2021 telah melayani ibu hamil sebanyak 35 orang dan orang sakit sebanyak 17 orang. Sebelumnya pada 2020 ibu hamil yang dilayani sebanyak 40 orang, namun belum menggunakan mobil sehat karena pengadaan mobil sehat nanti pada 2021. Dalam pelayanan ibu hamil di Desa Bulolohe, selain keberadaan mobil sehat juga sikap tanggap kepala desa dan bidan di desa cukup tinggi. Pada waktu siang dan malam selalu siaga melayani ibu hamil dengan harapan tidak ada ibu hamil meninggal karena melahirkan di Desa Bulolohe. Hasilnya 2 tahun terakhir dari tahun 2020 sampai Agustus 2021 tidak terjadi kematian ibu melahirkan di Desa Bulolohe, karena kerja sama yang baik semua pihak yang terlibat dalam pelayanan ibu hamil di desa.

Mencermati kegiatan Posyandu terkait pelayanan kesehatan ibu dan anak, pendampingan persalinan dan pengadaan mobil sehat di Desa Bulolohe tampaknya sangat terkait dengan rekomendasi Unicef. Pada tahun 1995-2000 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kerjasama dengan Unicef, mengembangkan desa model Kelangsungan Hidup, Perkembangan dan Perlindungan Ibu dan Anak (KHPPIA). Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu daerah yang dipilih sebagai pengembangan desa model KHPPIA, yang lokasinya di Desa Batulohe Kecamatan Bulukumpa dan Desa Bontolohe (kini Kecamatan Rilau Ale).

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan di desa model KHPPIA di kedua desa tersebut, maka direkomendasikan beberapa kegiatan ketika itu yang perlu dilakukan Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak. Adapun kegiatan yang direkomendasikan adalah penyediaan *ambulance* desa bagi ibu hamil, kerja sama bidan dan dukun dalam menangani persalinan bersama, biaya transport ibu hamil untuk pemeriksaan kehamilan, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan penyuluhan tentang upaya mengurangi beban kerja ibu hamil. Rekomendasi kegiatan terkait pemeriksaan kehamilan dan pendampingan persalinan tidak membutuhkan waktu lama untuk di replikasi Pemerintah Desa Bulolohe. Hal ini karena kegiatan tersebut tidak membutuhkan anggaran yang besar dalam pelaksanaannya di Desa Bulolohe. Berbeda dengan pengadaan *ambulance* desa yang membutuhkan waktu lama untuk direalisasikan karena terbatasnya anggaran di desa.

Keterbatasan anggaran desa sehingga pemerintah memandang perlu menyediakan dana yang berasal dari Anggaran

Pembangunan dan Belanja Negara (APBN). Setelah Desa Bulolohe menerima Dana Desa mulai tahun 2015 sampai sekarang maka pada 2020 dilakukan replikasi kegiatan sesuai rekomendasi Unicef untuk penyediaan *ambulance* desa dengan nama mobil sehat. Pengadaan mobil sehat dilakukan secara merata untuk semua desa di Kabupaten Bulukumba. Dengan adanya mobil sehat maka penggunaan Dana Desa tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur di desa, tetapi lebih luas juga digunakan untuk peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.

Dari berbagai kegiatan yang dideskripsikan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak dapat dilihat dari terlaksananya perilaku sehat ibu dan keluarganya. Hal ini telah terlaksana di Desa Bulolohe yang ditandai dengan perilaku makan makanan bergizi, pemeriksaan kehamilan, imunisasi, menimbang bayi dan balitanya, penggunaan kontrasepsi, penggunaan sistem kesehatan modern, penggunaan air bersih, penggunaan jamban keluarga, dan pemeliharaan kebersihan rumah, yang kesemuanya itu merupakan persyaratan hidup sehat. Dengan kebiasaan hidup sehat berarti dapat mengurangi angka kematian ibu dan anak di desa.

2. Kesehatan Lingkungan.

Dilihat dari aspek kesehatan lingkungan di Desa Bulolohe terdapat 2 permasalahan yang dihadapi, yaitu: masalah saluran pembuangan air limbah (SPAL) dan masalah sampah rumah tangga. Secara umum setiap rumah penduduk tidak memiliki saluran pembuangan air limbah, sehingga air limbahnya dibuang di sembarang tempat yang berpotensi menimbulkan pencemaran di pemukiman penduduk. Di belakang rumah penduduk seringkali ditemukan genangan air limbah, yang pada musim kemarau

menimbulkan bau sehingga mengganggu antar tetangga. Di pemukiman penduduk yang padat sedikit lebih parah karena antar tetangga sama-sama tidak memiliki SPAL, sehingga semakin menambah deretan pembuangan air limbah yang tidak sehat. Dahulu diatasi dengan menggali lubang dengan ukuran panjang 2 meter dan lebar 1 meter serta kedalaman 2 meter. Pada bagian bawah dari lubang tersebut diberi ijuk untuk membantu peresapan air dan bagian atasnya diberikan penutup. Air limbah dari rumah disalurkan ke lubang tersebut kemudian ditutup dengan rapat sehingga tidak menimbulkan bau.

Teknologi tepat guna untuk penampungan air limbah tidak diterapkan lagi di Desa Bulolohe sehingga jika terjadi pencemaran lingkungan dibiarkan saja, meskipun diketahui dapat menimbulkan berbagai penyakit. Berbeda dengan warga masyarakat yang di belakang rumahnya terdapat sungai, maka dengan mudah air limbahnya dibuang di sungai. Dampaknya air sungai mengalami pencemaran, sehingga petani yang bekerja di sawah dan memanfaatkan air tersebut menerima dampaknya. Dengan melihat permasalahan air limbah ini maka perlu digerakkan masyarakat untuk menerapkan teknologi tepat guna untuk penampungan air limbah, guna mengatasi pencemaran lingkungan yang berdampak menimbulkan penyakit tertentu di masyarakat.

Berkaitan dengan masalah sampah rumah tangga tampaknya hampir sama dengan masalah air limbah. Permasalahannya adalah tidak adanya tempat pembuangan sampah rumah tangga yang permanen untuk setiap rumah. Pada umumnya sampah rumah tangga dibuang di belakang rumah, biasanya di bawah pohon pisang atau pohon kayu tertentu. Sampah yang dibuang

tidak dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, tetapi ditumpuk begitu saja sehingga menimbulkan bau tidak sedap hingga ke dalam rumah. Jika hal ini dibiarkan terus berlangsung di daerah pemukiman penduduk, maka dapat saja menimbulkan pencemaran sehingga memberikan dampak terhadap timbulnya penyakit tertentu.

Ketika Bulolohe masih merupakan salah satu dusun dari Desa Bontomanai, warga masyarakatnya cukup tertib dalam mengelola sampah rumah tangga. Setiap rumah membuat lubang pembuangan sampah yang terletak di sebelah kanan atau kiri dari rumahnya. Sampah yang dibuang dan telah hancur digunakan untuk pupuk tanaman pekarangan, sehingga tanaman menjadi subur dan cepat berproduksi. Seharusnya saat ini perlu diupayakan kembali agar setiap rumah memiliki tempat pembuangan sampah, sehingga sampah yang terbuang ditata dengan baik dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak kepada kesehatan masyarakat.

3. Pandemi COVID 19

Setelah Pemerintah Indonesia menetapkan terjadinya Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang dampaknya tidak hanya di perkotaan, tetapi juga menyebar sampai ke desa-desa di seluruh Indonesia. Desa Bulolohe termasuk juga merasakan dampaknya mulai dari Maret 2020 sampai sekarang. Adapun gejala umum infeksi COVID 19, seperti demam, batuk kering dan kelelahan dan gejala serius, seperti kesulitan bernapas atau sesak napas, nyeri dada atau rasa tertekan pada dada dan hilangnya kemampuan berbicara (Yulianto, 2021: 9). Informasi gejala infeksi COVID 19 di Desa Bulolohe ditanggapi masyarakat secara berbeda. Ada di antara warga masyarakat yang

mengatakan bahwa infeksi COVID 19 merupakan hal yang biasa, karena sejak dahulu orang sering demam, batuk, kesulitan bernapas dan nyeri dada. Sementara warga masyarakat yang lain menilai infeksi COVID 19 sesuatu yang membahayakan karena cepat menular dan memiliki gejala berbeda karena orang yang terinfeksi hilang indra perasa atau penciumannya.

Terlepas dari prokontra masyarakat, Pemerintah Desa Bulolohe aktif menghimbau warga masyarakat agar dalam menghadapi Pandemi COVID 19 tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes) dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah dalam menghadapi Pandemi Covid 19 meliputi 3 M, yaitu: (1) menggunakan masker. Menutup mulut dan hidung menggunakan masker menjadi penghalang fisik pertama agar seseorang tidak menularkan atau tertular dari infeksi COVID 19 (*Ibid*, 94); (2) menjaga jarak. Membatasi interaksi seseorang dengan orang lain sehingga mengurangi risiko untuk tertular virus penyebab COVID 19; dan (3) mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun jauh lebih efektif dalam membasmi kuman. Air dan sabun dapat membunuh kuman sekaligus melarutkan bahan-bahan kimia berbahaya pada tangan maupun alat-alat yang kita gunakan (*Ibid*, 109).

Selain dari penerapan protokol kesehatan yang menjadi himbauan pemerintah kepada masyarakat maka pada Januari 2021 pemerintah juga mengumumkan rencana pelaksanaan vaksinasi COVID 19. Terkait dengan vaksinasi Covid 19 di Desa Bulolohe terjadi prokontra, karena di satu sisi vaksinasi tersebut diterima warga masyarakat demi menjaga kesehatan mereka dari infeksi COVID 19. Akan tetapi pada sisi yang lain masih muncul penolakan penggunaan vaksin bagi masyarakat. Hal ini karena

informasi tentang manfaat vaksin yang diterima masyarakat kurang lengkap dan terkadang disampaikan oleh orang yang tidak tepat. Cara terbaik mencari informasi adalah mencarinya di tempat yang tepat, menyaringnya terlebih dahulu, dan kemudian mencocokkannya dengan informasi resmi yang dikeluarkan oleh pihak berwenang (Yulianto, 2021 : 55).

Pemberitaan media sosial terkait vaksin Covid 19 yang simpang siur memberikan dampak kepada ketidakpercayaan (*distrust*) masyarakat akan manfaat vaksin bagi diri dan keluarganya. Walaupun demikian, secara bertahap di antara mereka sudah mulai mengikuti vaksinasi setelah dilakukan upaya persuasif dari Pemerintah Desa Bulolohe. Termasuk gencarnya himbauan pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi Covid 19, baik untuk di perkotaan maupun di perdesaan. Jumlah warga Desa Bulolohe yang telah melaksanakan vaksinasi Covid 19 tahap pertama dan tahap kedua sebanyak 270 orang. Secara kuantitas masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan penduduk Desa Bulolohe sebanyak 2.604 orang.

C. Ketenagakerjaan

Untuk membahas ketenagakerjaan di Desa Bulolohe sangat terkait dengan tipologi desa yang berdasarkan mata pencaharian. Sejak terbentuknya Desa Bulolohe pada 1993 sebagai desa korporatis, kehidupan masyarakat masih bercorak agraris. Sebagai masyarakat agraris mata pencaharian penduduknya adalah di sektor pertanian dalam arti luas, seperti pertanian sawah, pekebun dan peternak. Pertanian merupakan sumber penghasilan utama masyarakat Desa Bulolohe, sehingga ketika itu penduduknya homogen sebagai petani. Dalam sistem pertanian

(hortikultura) ini, pola produksi masyarakatnya adalah bertani/bercocok tanam. Konsekuensi logis dari pola produksi bercocok tanam ini adalah memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk melahirkan banyak anak. Anak masih dipandang sebagai faktor produksi yang dapat menghasilkan kapital. Karena dalam pola produksi bertani ini membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit jumlahnya (Sanderson, 2003). Posisi anak laki-laki dalam keluarga petani dapat memberikan keuntungan ekonomis, yang membantu orangtua dalam meningkatkan produksi dan pendapatan.

Berkembangnya tenaga kerja sebagai petani di Desa Bulolohe karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

Pertama, kesuburan tanah. Penduduk yang sudah lama menetap di Desa Bulolohe tetap melanjutkan usaha pertaniannya karena didukung dengan kesuburan tanah. Tanah perkebunan yang subur di kawasan pinggiran hutan Anrang mulai dari Dusun Parukku sampai di Dusun Abbatungge, memudahkan petani dalam melakukan budi daya tanaman karena tanaman mereka begitu mudah tumbuh dan menghasilkan. Kemudahan dalam berkebun menjadi salah satu faktor pendorong bagi warga Desa Bulolohe untuk tetap bertahan menjadi tenaga kerja sebagai petani. Bahwa jauh sebelum terbentuk Desa Bulolohe, tanah yang subur untuk lokasi persawahan menjadi faktor penarik orang luar untuk datang ke Desa Bulolohe. Tanah subur yang terbentang mulai dari lembah Dusun Parukku dan Dusun Bulolohe hingga Lembang Karaeng merupakan daerah persawahan yang subur. Kedatangan kelompok orang Bone, Jenepono dan orang Kajang di Desa Bulolohe sangat terkait dengan kesuburan tanah yang dimiliki Desa Bulolohe. Mereka datang secara berkelompok

dan setelah menetap bekerja sebagai petani, baik petani pemilik maupun petani penggarap.

Ada pendapat masyarakat lokal yang menyatakan bahwa untuk mencari daerah subur maka wilayah itu senantiasa diapit oleh 2 sungai. Mengacu kepada pendapat tersebut maka Desa Bulolohe dapat disebut memiliki tanah yang subur karena letaknya diapit oleh 2 sungai besar, yaitu sungai Balantieng dan sungai Bijawang. Aliran sungai Balantieng yang masuk ke persawahan membawa humus sehingga menciptakan kesuburan tanah. Dengan kesuburan tanah di Desa Bulolohe memberikan implikasi terhadap terbatasnya minat pemuda untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi. Rendahnya minat melanjutkan pendidikan masih berlangsung sampai tahun 1998, karena mereka lebih memilih bertani daripada kuliah di perguruan tinggi. Kesuburan tanah pertanian dan kemudahan mengelola usaha tani yang cepat menghasilkan uang menjadi daya tarik bekerja sebagai petani.

Kedua, pembagian warisan. Konflik pertanahan dalam suatu keluarga besar di Desa Bulolohe jarang terjadi karena ada kelakuan berpola yang dilakukan para orangtua apabila anaknya mulai dewasa dengan melakukan pembagian warisan. Tanah berupa sawah dan kebun dibagi secara merata kepada anak laki-laki dan perempuan yang disaksikan oleh keluarga terdekat yang dituakan dari saudara ayah atau ibu, termasuk melibatkan Kepala Dusun dan Kepala Desa. Meskipun anak perempuan telah menikah dan bertempat tinggal di luar desa mengikuti suaminya maka tetap memiliki hak yang sama dalam pembagian warisan. Setelah pembagian warisan dilaksanakan maka anak laki-laki yang mendapat warisan melanjutkan pekerjaan orangtuanya

yang selama ini selaku petani. Dengan demikian, anak laki-laki mengukuhkan dirinya selaku petani sehingga menambah jumlah petani di Desa Bulolohe, sebagai konsekuensi dari pembagian warisan.

Ketiga, pola bagi hasil. Terlaksananya bagi hasil yang menguntungkan petani penggarap menjadi motivasi untuk tetap bertahan bekerja sebagai bertani, karena penghasilan yang diterima dari petani pemilik dinilai layak untuk memenuhi kebutuhannya. Relasi antara petani pemilik dan petani penggarap terpelihara dengan baik dan tidak saling merugikan, sehingga dengan kondisi tersebut petani penggarap tetap melanjutkan pekerjaan mereka dengan bekerja selaku petani.

Dalam upaya melanjutkan pekerjaan dan bertahan sebagai petani, sehingga jumlah petani di Desa Bulolohe dapat bertambah. Bahkan seorang petani penggarap terkadang menambah tenaga kerja dengan mengikutsertakan keluarganya bekerja di sawah. Dengan adanya tambahan tenaga kerja yang baru menunjukkan semakin bertambahnya jumlah petani di Desa Bulolohe. Bertambahnya petani memiliki korelasi dengan banyaknya jumlah perempuan yang bekerja di sektor domestik sebagai ibu rumah tangga. Hal ini karena secara umum baik petani yang lama maupun yang baru, istri mereka lebih banyak bekerja sebagai ibu rumah tangga dari pada bekerja di bidang lain.

Dalam perkembangan masyarakat di Desa Bulolohe menunjukkan bahwa tenaga kerja yang homogen sebagai petani tidak dapat bertahan lama, karena pada 2000 mulai mengalami perubahan komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian. Seiring dengan penambahan jumlah penduduk dan terbatasnya lahan pertanian yang dapat menyerap tenaga kerja, maka

komposisi tenaga kerja mulai mengalami transformasi yang sebelumnya homogen sebagai petani menjadi heterogen dengan adanya berbagai jenis pekerjaan di luar sektor pertanian. Komposisi tenaga kerja yang heterogen dapat dilihat dari berkembangnya pekerjaan di luar sektor pertanian. Dalam Profil Desa Bulolohe Tahun 2020, disebutkan: wiraswasta 220 orang, buruh tani 113 orang, karyawan perusahaan swasta 22 orang, pegawai negeri sipil 21 orang, pengrajin 20 orang, buruh harian lepas 16 orang, pedagang 15 orang, tukang batu 15 orang, tukang kayu 13 orang, karyawan perusahaan pemerintah 3 orang, montir 3 orang.

Pekerjaan selaku petani mulai berkurang karena sampai pada tahun 2020 hanya sebanyak 397 orang. Meningkatnya jumlah buruh tani sebanyak 113 orang, memberikan indikasi adanya kesenjangan antara petani pemilik lahan dengan petani yang tidak memiliki lahan pertanian. Kesenjangan ini diperkirakan tetap berlangsung, jika mereka bertahan selaku buruh tani dan tidak terbuka lapangan pekerjaan di luar sektor pertanian. Oleh karena itu, industrialisasi perdesaan menjadi salah satu alternatif untuk dikembangkan, sehingga mereka dapat terserap menjadi tenaga kerja di sektor industri kecil di desa. Kini, agroindustri perlu dikembangkan agar dapat menampung tenaga kerja, terutama industri pengolahan hasil pertanian, seperti industri buah-buahan. Potensi tanaman buah-buahan cukup mendukung kegiatan agroindustri di Desa Bulolohe.

Berkurangnya jumlah tenaga kerja petani karena mulai berkembang jiwa wiraswasta masyarakat dengan membuka usaha-usaha baru yang mendukung pengembangan ekonomi desa, seperti usaha kios, warung makan, usaha galon, bengkel dan lain-lain. Selain itu, bagi penduduk Desa Bulolohe yang tamat

SLTA/ sederajat kurang berminat lagi menjadi petani. Mereka lebih tertarik bekerja di luar sektor pertanian, seperti wiraswasta, pedagang atau merantau ke daerah lain. Sedangkan tenaga kerja perempuan yang bekerja selaku ibu rumah tangga mengalami juga perubahan secara perlahan-lahan, seperti munculnya pekerjaan baru selaku wiraswasta 26 orang, pegawai negeri sipil 16 orang, karyawan swasta 9 orang, penjahit 5 orang, buruh harian lepas 4 orang, penjual barang campuran 14 orang, pedagang keliling 3 orang.

Meskipun terjadi perubahan komposisi tenaga kerja perempuan, namun perubahan tersebut kurang signifikan karena tenaga kerja sebagai ibu rumah tangga masih tetap dominan. Sebagai gambaran bahwa jumlah tenaga kerja perempuan selaku ibu rumah tangga di Desa Bulolohe sampai tahun 2020 adalah sebanyak 656 orang. Dengan memperhatikan komposisi penduduk Desa Bulolohe berdasarkan mata pencaharian sebagaimana diuraikan sebelumnya, tampak bahwa penduduk yang homogen selaku petani tidak dapat bertahan karena terbukanya akses ekonomi masyarakat yang membutuhkan pelaku ekonomi yang lain di luar sektor pertanian. Dengan demikian, kondisi terkini ketenagakerjaan di Desa Bulolohe telah mengalami transformasi dari tenaga kerja homogen selaku petani menjadi tenaga kerja heterogen dilihat dengan berkembangnya berbagai jenis usaha ekonomi di luar sektor pertanian.

D. Budaya Masyarakat

Untuk melihat perkembangan budaya masyarakat di Desa Bulolohe paling tidak kita harus menggali tradisi yang pernah dianut masyarakat dan tradisi yang sampai saat ini

masih dipelihara dan dipertahankan sebagai bagian dari budaya masyarakat. Tradisi adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Hal ini juga menunjukkan bahwa orang tersebut menyukai perbuatan itu (Dilurrohmah, V.W, 2021: 107). Mengacu dari pengertian tradisi di atas di Desa Bulolohe terdapat tradisi masyarakat yang sering diulang-ulang pada masa lalu, namun tradisi tersebut tidak berkembang lagi, yaitu:

Pertama, mattiro laonruma. Mattiro laonruma sebagai budaya masyarakat merupakan musyawarah tani tradisional yang dilak sanakan oleh petani, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemerintah desa. Di Desa Bulolohe musyawarah *mattiro laonruma* dilaksanakan 2 kali setahun pada saat menghadapi musim tanam padi, yaitu musim gaduh dan musim rendengan. Adapun yang dibahas dalam musyawarah *mattiro laonruma* terkait dengan pelaksanaan musim tanam padi, seperti jenis padi yang akan ditanam, jadwal hambur, jadwal tanam padi, pengamatan cuaca dan musim, kondisi perkembangan hama dan penyakit tanaman, serta pelaksanaan perbaikan dan kebersihan saluran irigasi. Ketika orde baru berkuasa yang ditandai dengan penetrasi negara yang jauh masuk ke desa, sehingga keberadaan *mattiro laonruma* termarginalkan dalam masyarakat. Budaya *mattiro laonruma* mengalami kooptasi dari negara sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas dalam masyarakat. Selain itu *mattiro laonruma* bukan merupakan bentukan pemerintah sehingga dinilai tidak legitimate. Lembaga desa yang berbeda dengan bentuk birokratik baku yang ditetapkan oleh negara kehilangan keabsahannya (Mas' oed,1994). Oleh karena, *mattiro laonruma* tidak diakui keberadaan dan keabsahannya maka segala sesuatu

yang diputuskan dalam musyawarah tidak diakomodir sebagai aspirasi yang murni dari masyarakat desa. Berawal dari tidak terakomodirnya aspirasi masyarakat sehingga secara perlahan-lahan budaya *mattiro laonruma* tidak dilaksanakan lagi hingga saat ini. Di Desa Bulolohe ada ungkapan bahwa budaya *mattiro laonruma* identik dengan menanam padi varietas lokal, sehingga pada saat menanam padi varietas unggul yang dianjurkan pemerintah maka *mattiro laonruma* tidak dilaksanakan lagi. Mencermati ungkapan tersebut, maka teknologi benih padi unggul/modern sangat terkait dengan proses hilangnya budaya *mattiro laonruma* di masyarakat Desa Bulolohe.

Kedua, tradisi panen padi. Pada masa lalu masyarakat Desa Bulolohe memiliki ikatan kuat dengan tanah, karena selaku petani mengolah tanah dengan menanam padi merupakan kewajiban untuk menghasilkan pangan. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidup. Kebutuhan pangan dapat terpenuhi apabila negara atau masyarakat menciptakan ketersediaan, distribusi dan kemudahan akses memperoleh pangan (Nain, 2018: 85). Untuk memenuhi kebutuhan pangan khususnya beras yang merupakan makanan pokok warga masyarakat Desa Bulolohe, maka menanam padi sudah merupakan tradisi yang berlangsung secara turun-temurun dari generasi ke generasi sehingga menjadi budaya masyarakat.

Puncak kegembiraan petani ketika panen padi di sawah disambut dengan tradisi panen padi. Tradisi ini ditandai dengan kegiatan seremonial di persawahan dengan menyanyikan berbagai lagu tradisional yang dilakukan oleh kaum perempuan dalam bentuk paduan suara. Para ibu berbaur dengan beberapa gadis untuk bernyanyi sambil memegang alat pemotong padi

(ani-ani). Setelah menyanyikan lagu diikuti kegiatan memotong padi yang telah menguning dengan menggunakan ani-ani. Padi yang telah dipotong yang merupakan hasil panen diletakkan di atas pematang sawah dan sampai jumlah tertentu padi tersebut diikat dengan daun enau yang sudah berwarna kuning.

Pada sore hari padi tersebut diangkut dengan kuda ke rumah petani untuk disimpan dalam lumbung keluarga yang dikenal dengan nama *rakkeang*. Dalam rumah panggung/kayu posisi *rakkeang* ini terletak di atas lantai rumah kayu atau di bawah atap rumah dan disitulah padi diletakkan di atas lantai kayu secara teratur. Untuk mengambil padi di *rakkeang* biasanya menggunakan tangga berukuran 3 meter. Jika dianalogikan dengan rumah permanen sekarang, maka posisi *rakkeang* berada di atas plafon rumah. Tradisi panen padi cukup meriah, karena selain diperdengarkan lagu tradisional dengan suara yang merdu juga disuguhkan berbagai kue tradisional, seperti kue taripang, kopi langit, onde-onde, pisang goreng dan lain-lain. Bahkan, jika panen padi dilakukan pada sawah cukup luas biasanya mereka yang datang mengikuti seremoni panen padi disuguhkan makanan, berupa nasi dan lauk-pauk dari ikan asap yang telah dimasak santan bercampur terong hijau.

Dalam perjalanannya tradisi panen padi yang sudah berlangsung cukup lama tidak bisa bertahan, karena terjadinya perubahan varietas padi yang ditanam. Pada saat gerakan *Lappo Ase* dianjurkan pemerintah desamaka varietas padi lokal, seperti *ase mandi* dan *ase ranggong* tidak diperkenankan untuk ditanam. Pergantian varietas padi lokal ke varietas padi unggul menyebabkan tradisi panen padi mulai berkurang dan sampai saat ini tidak tampak lagi di Desa Bulolohe. *Mattiro laonruma* dan

tradisi panen padi sirna sebagai dampak kehadiran teknologi padi unggul, yang menggeser secara paksa benih padi lokal karena dinilai produksinya rendah dan dipanen agak lama. Sementara pemerintah menghendaki produksi padi yang tinggi dan dipanen lebih cepat, sehingga terjadi kontradiksi antara keinginan masyarakat dengan kemauan pemerintah. Dengan demikian, kehadiran teknologi dapat membantu meringankan beban manusia, namun dalam kondisi tertentu justru mematikan budaya masyarakat yang selama ini telah dipelihara sebagai tradisi masyarakat.

Adapun budaya masyarakat Desa Bulolohe yang masih tetap dipertahankan, dipelihara dan dilaksanakan sampai sekarang, adalah:

Pertama, budaya *sipakatau sipakalebbi*. Merupakan tradisi atau budaya masyarakat yang berlangsung dalam hubungan antar manusia untuk saling menghormati dan saling menghargai, baik sesama warga masyarakat desa maupun warga masyarakat lain. *Sipakatau sipakalebbi* dimaksudkan adalah sikap menghormati dan menghargai sesamanya. Budaya ini tetap berlangsung karena disosialisasikan oleh orangtua kepada anak-anaknya sejak kecil, mengingat budaya menghargai orang lain merupakan cerminan perilaku sopan santun dalam keluarga dan masyarakat. Oleh karena lebih awal ditanamkan dalam kehidupan keluarga, maka budaya *sipakatau sipakalebbi* sangat mengakar dalam masyarakat. Selain itu, budaya tersebut tidak terpengaruh dengan budaya luar karena masyarakat Desa Bulolohe menilai sebagai tradisi yang perlu dilestarikan dan bertujuan baik sesuai norma-norma dalam kehidupan masyarakat.

Kedua, budaya *rera*. Budaya ini merupakan bentuk kerja sama petani yang masih terpelihara dan berlangsung di Desa Bulolohe secara turun-temurun. *Rera* ini merupakan budaya gotong royong masyarakat dalam pertukaran tenaga kerja tradisional, di mana petani secara bergiliran bekerja menanam padi di sawah. Sebagai desa persawahan maka terlaksananya budaya *rera* ini tidak dapat dilepaskan dari tingginya kesadaran petani untuk saling membantu sesama petani. Dalam budaya *rera* terkandung di dalamnya resiprositas antara seorang petani dengan petani lainnya, sehingga tercipta relasi yang saling menguntungkan di antara mereka sesama petani.

Seorang petani mengungkapkan bahwa *rera* dapat membantu meringankan pekerjaan petani karena dilakukan secara berkelompok menanam padi. Selain itu, dapat juga menjadi wadah yang menyatukan petani sehingga tetap berkembang pola kerja sama di dalamnya. Pola kerja sama dalam *rera* ini dipelihara dan diikuti oleh komunitas petani sehingga menjadi budaya masyarakat. Kebudayaan adalah cara hidup yang berkembang dan dianut oleh sekelompok orang serta berlangsung dari generasi ke generasi (Tubbs, Moss dalam Suranto, 2010:33). Dalam kegiatan *rera* ini biasanya diikuti sebanyak 10-20 orang petani secara bergantian dari sawah yang satu ke sawah lainnya sesuai jadwal musim tanam padi.

Pada saat ini kegiatan *rera* menghadapi tantangan dengan kehadiran teknologi mesin tanam padi di Desa Bulolohe. Selama 2 tahun terakhir ini tenaga manusia digantikan dengan tenaga mesin dalam menanam padi, sehingga budaya *rera* sedikit mengalami penurunan. Walaupun mengalami tantangan, namun budaya *rera* ini dapat bertahan, karena masih tingginya kesadaran

masyarakat khususnya petani dalam memelihara kebudayaan yang selama ini mereka laksanakan dalam kehidupannya selaku petani. Lebih jauh bahwa bertahannya budaya *rera* karena didorong oleh prinsip hidup masyarakat Desa Bulolohe yang tercermin dalam kebiasaan saling membantu sesamanya.

Di Desa Bulolohe terdapat juga pertemuan budaya yang terkait dengan penggunaan bahasa sehari-hari. Dalam hal bahasa yang dipakai masyarakat, maka selain bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional digunakan pula bahasa daerah, seperti bahasa Bugis dan bahasa Makassar dalam dialek *konjo*. Bahasa Bugis sudah lama dipakai oleh penduduk Desa Bulolohe dan kemudian kedatangan etnis Makassar membawa bahasa Makassar sehingga terjadi pertemuan budaya dari 2 bahasa tersebut yang dinamakan *symbiotic*. *Symbiotic* adalah pertemuan antara individu-individu dari suatu masyarakat dan individu-individu dari masyarakat lainnya tanpa mengubah kebudayaan masing-masing (Setiadi dan Kolip, 2013 : 649).

Berdasarkan pengamatan lapangan menunjukkan bahwa bahasa Bugis digunakan secara umum berdampingan dengan bahasa Makassar yang asli dan yang berdialek *konjo*, terutama penduduk yang berasal dari Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Penduduk Desa Bulolohe yang menggunakan bahasa Makassar tanpa dialek *konjo* adalah penduduk yang berasal dari Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Bantaeng. Dalam perkembangan masyarakat Desa Bulolohe, maka etnis Bugis sudah dapat berbahasa Makassar dan sebaliknya etnis Makassar dapat pula berbahasa Bugis. Penggunaan bahasa Indonesia, Bugis dan bahasa Makassar merupakan katalisator dalam interaksi sosial masyarakat, sehingga dengan bahasa yang dipakai dengan

mudah saling memahami di antara mereka selaku penduduk Desa Bulolohe.

Dalam hal budaya, masyarakat Desa Bulolohe termasuk masyarakat yang terbuka dengan budaya dari luar. Melalui iklan di televisi dan penggunaan media sosial memudahkan masyarakat melihat dan mengadopsi budaya dari luar, yang tidak hanya diadopsi orang dewasa dan remaja, tetapi juga termasuk anak-anak. Pengaruh budaya luar bagi orang dewasa, khususnya kaum ibu-ibu di Desa Bulolohe memberi implikasi terhadap munculnya budaya konsumtif. Budaya konsumtif ditandai dengan pembelian barang-barang perabotan rumah tangga, seperti gelas, cangkir, piring dan sendok secara lusinan. Akan tetapi barang-barang tersebut tidak dipakai sehari-hari dalam rumah tangga, melainkan hanya dipajang dalam lemari yang diletakkan di ruang tamu. Dalam setahun terkadang perabotan rumah tangga tersebut tidak dipakai, kecuali kalau ada pesta perkawinan untuk digunakan tetangga atau keluarga terdekat.

Berbeda dengan anak remaja, mereka mengadopsi budaya dari luar terkait dengan gaya hidup (*life style*), seperti pakaian, sepatu, *gadget*, model rambut dan lain-lain. Untuk mengikuti *trend* gaya hidup yang melanda kehidupan anak remaja, terkadang tidak berjalan mulus karena untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup diperlukan biaya yang cukup besar. Dengan gencarnya iklan di televisi yang menawarkan kebutuhan gaya hidup memaksa orangtua mereka untuk memenuhinya dalam keadaan dipaksakan. Tak terkecuali orang dewasa dan anak remaja, maka anak-anak juga dengan mudah mengadopsi budaya dari luar, seperti produk mainan mobil, kereta api, pesawat dan boneka-boneka. Selain itu, anak-anak Desa Bulolohe sudah tidak asing

lagi dengan berbagai produk makanan dari luar, seperti Chitato, Chiki, Taro, Indomie, Sarimie, biskuit berbagai merek dan lain-lain. Bahkan akhir-akhir ini muncul budaya baru bagi anak-anak di Desa Bulolohe, yaitu budaya ulang tahun kelahiran anak. Dalam ulang tahun seorang anak terkadang didatangkan makanan siap saji dari Kota Bulukumba. Desakan untuk memenuhi kebutuhan permainan anak-anak dan produk makanan modern, sangat terkait dengan gencarnya iklan yang menawarkan produk-produk industri untuk diminati anak-anak. Dengan demikian anak-anak menjadi target pemasaran barang-barang industri baik di kota maupun di desa.

Ada beberapa argumen yang menjadi landasan mengapa anak-anak dijadikan salah satu objek pasar oleh para industriawan (Nugroho, 2001: 36) yaitu: *Pertama*, anak-anak lebih mengandalkan emosi dibanding rasio dalam pengambilan keputusan. *Kedua*, anak-anak merupakan basis kehidupan yang panjang dalam proses konsumsi mengingat usia hidupnya yang masih lama. *Ketiga*, mereka masih dalam proses sosialisasi dan dianggap memiliki loyalitas terhadap sesuatu hal, termasuk loyal pada komoditi dan merek tertentu. *Keempat*, karena masih dalam proses pembentukan kepribadian maka mereka sangat mudah dipengaruhi oleh berbagai hal, terutama oleh promosi produk-produk tertentu. *Kelima*, pilihannya terhadap sebuah komoditi dengan merek tertentu dapat dipaksakan kepada orangtuanya.

E. Agama

Kehidupan beragama di Desa Bulolohe cukup dinamis yang ditandai dengan keaktifan anak-anak seusia sekolah dasar belajar mengaji atau membaca al-Qur'an. Pada masa lalu untuk belajar

membaca al-Qur'an kita tidak mengalami kesulitan karena ada guru mengaji yang siap mengajarkan al-Qur'an, mulai al-Qur'an kecil sampai al-Qur'an besar. Guru mengaji ini secara ikhlas dan sukarela menuntun anak-anak untuk pintar membaca al-Qur'an. Di Desa Bulolohe tampak bahwa seorang guru mengaji memiliki tanggung jawab besar kepada santrinya agar mereka dapat membaca dan menamatkan al-Qur'an kecil dan besar. Belajar mengaji secara tradisional biasanya dilakukan di rumah seorang guru mengaji yang tempat tinggalnya masih dekat dengan rumah santrinya, sehingga tidak ada alasan anak-anak untuk tidak datang mengaji.

Ada kebiasaan para santri yang akan belajar mengaji, baik laki-laki maupun perempuan membawa air 1 ember untuk mengisi gentong yang ada di depan rumah guru mengaji. Setelah gentong tersebut diisi air oleh para santri secara bersama-sama, maka secara bergiliran para santri pun mengikuti pelajaran mengaji dengan cara saling berhadapan dengan guru mengaji. Bagi santri yang sementara sekolah di SD kegiatan pengajian dilakukan pada sore hari sesudah pulang sekolah. Kegiatan pengajian dilakukan secara rutin minimal 3 kali dalam seminggu hingga para santri dinyatakan tamat membaca al-Qur'an. Apabila seorang santri dinyatakan telah tamat belajar al-Qur'an dan dapat membaca dengan baik, maka ada tradisi makan ayam dengan nasi dari ketan putih (*sokko*) di rumah guru mengaji. Bagi mereka yang tamat mengaji tidak mendapat ijazah atau sertifikat sebagai bukti yang menandai selesainya menamatkan al-Qur'an. Guru mengaji tidak mengenal formalitas ijazah bagi santrinya, namun letak kegembiraannya apabila santrinya mampu membaca al-Qur'an dengan baik dan benar.

Dalam perkembangannya pada tahun 2003 terjadi transformasi dari cara pengajian tradisional melalui guru mengaji menjadi cara pengajian modern melalui Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) dan Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKA). Transformasi berlangsung karena intervensi pemerintah daerah, sesuai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) keagamaan di Kabupaten Bulukumba, yaitu: Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Al-Qur'an bagi Siswa dan Calon Pengantin dalam Kabupaten Bulukumba. Adapun yang melatarbelakangi ditetapkannya Perda tersebut adalah adanya kenyataan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Bulukumba untuk mempelajari, membaca, mendalami dan mengamalkan al-Qur'an masih rendah.

Untuk terlaksananya Perda tersebut di seluruh Desa dan Kelurahan di Kabupaten Bulukumba, maka strategi yang dilakukan adalah: (Syatar, A. et al, 2021: 79). *Pertama*, melakukan pendataan terhadap kelompok-kelompok pengajian tradisional yang dilakukan oleh masyarakat untuk dibina dalam bentuk pengajian modern. *Kedua*, menginstruksikan pembentukan TKA/TPA (TKA usia 4-6 tahun, TPA usia 7-12 tahun) dari tingkat Kabupaten sampai Kecamatan, Desa dan Kelurahan serta TPA orang tua. *Ketiga*, memperkuat fungsi dan peranan lembaga BKPRMI Kabupaten Bulukumba sebagai leading sektor pembinaan, pengembangan dan pendataan serta pengorganisasian lembaga TPA/TKA. *Keempat*, menyediakan anggaran pembinaan TKA/TPA melalui pos APBD Kabupaten sejak tahun 1995 sampai sekarang (bantuan pembinaan berupa dana pengelolaan, dana pengadaan sarana prasarana pendukung belajar dan bantuan materil berupa al-Qur'an, buku metode Iqra dan Toga Wisuda.

Kelima, mengangkat tenaga kontrak guru mengaji yang disebar ke seluruh TPA/TKA dalam wilayah Kabupaten Bulukumba (tahun 2004 dimulai dengan jumlah guru 160 orang). *Keenam*, menetapkan kebijakan Pemerintah Daerah tentang pemberlakuan persyaratan pandai baca al-Qur'an bagi calon Pegawai Negeri Sipil (SK Nomor 800/5701/ 2003), calon siswa SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi, pegawai yang akan naik pangkat termasuk guru sebagai tenaga fungsional, calon mempelai/pengantin, pegawai yang akan dipromosikan menduduki jabatan struktural maupun fungsional, calon Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD (sesuai surat Bupati Nomor 240/84/PMD), calon Jamaah Haji.

Strategi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam menerapkan Perda Pandai Baca Al-Qur'an di Desa Bulolohe disambut masyarakat secara antusias. Hal ini karena pandai membaca al-Qur'an bagi masyarakat Desa Bulolohe merupakan suatu kewajiban yang harus dimiliki bagi setiap muslim. Dengan demikian anjuran pemerintah harus dilaksanakan, sehingga setiap orang muslim harus pandai membaca al-Qur'an. Sebelum adanya Perda Pandai Baca al-Qur'an di Desa Bulolohe telah ada pengajian dalam lingkup keluarga, namun dengan adanya Perda tersebut semakin berkembang. Hal ini ditandai dengan tumbuhnya pengajian secara institusional melalui TKA dan TPA yang berlangsung dengan baik berdasarkan kelompok umur. Untuk TKA (usia 4-6 tahun) dan TPA (usia 7-12 tahun) dilaksanakan di setiap masjid di Dusun Bulolohe, Bentengnge, Balantieng, Parukku dan Dusun Abbatungnge. Dukungan orangtua dan semangat para guru TKA/TPA dalam melakukan pembelajaran al-Qur'an sangat membantu dalam menghasilkan anak-anak yang pandai membaca al-Qur'an di Desa Bulolohe. Terlebih lagi karena

kepandaian membaca al-Qur'an menjadi persyaratan untuk masuk di SLTP dan SLTA, sehingga menguatkan dan mempercepat pencapaian pandai baca al-Qur'an di kalangan masyarakat Desa Bulolohe.

Selain perkembangan kegiatan TKA/TPA di Desa Bulolohe, maka 5 tahun terakhir ini (mulai tahun 2015-2020) mulai berkembang minat anak-anak usia 7 tahun untuk masuk pendidikan pesantren. Dikemukakan oleh Kepala Sekolah SMPN 40 Bulukumba, bahwa berkurangnya siswa dari Desa Bulolohe masuk SMPN 40 Bulukumba karena di antara mereka sudah mulai tertarik untuk melanjutkan pendidikan di pesantren. Keinginan anak usia 7 tahun untuk belajar di pesantren mendapat dukungan dari orang tuanya. Di Desa Bulolohe terdapat 1 pesantren, yaitu Pesantren Al-Fatiha yang terletak di Dusun Abbatungge. Di pesantren ini selain fokus kepada pendidikan agama bagi siswanya juga melakukan pelatihan keterampilan jahit-menjahit, sehingga setelah siswanya tamat dari pesantren sudah memiliki ketrampilan. Pesantren ini mulai diminati oleh anak-anak dari Desa Bulolohe sendiri, termasuk juga dari luar Desa Bulolohe dan hingga sekarang telah memiliki siswa sebanyak 60 orang. Anak-anak yang lain ada pula memilih pesantren yang jauh dari Desa Bulolohe, namun masih dalam wilayah Sulawesi Selatan, seperti pesantren di Kabupaten Gowa dan Kabupaten Bone.

Perkembangan kegiatan keagamaan di Desa Bulolohe yang meningkat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, menggugurkan tesis yang dikemukakan oleh Smelser dalam P. Sztompka (2017: 143) bahwa dimensi masyarakat modern di bidang agama ditandai oleh sekularisasi. Dalam realitas kehidupan modern di Desa Bulolohe tidak terjadi sekularisasi.

Sekularisasi, merosotnya arti penting keyakinan agama, kekuatan gaib, nilai, dan norma dan digantikan oleh gagasan dan aturan yang disahkan oleh argumen dan pertimbangan duniawi (Sztompka 2004: 83). Dalam kehidupan beragama di Desa Bulolohe justru semakin meningkat pentingnya keyakinan beragama, shalat berjama'ah di masjid, berkembangnya pengajian modern melalui TKA/TPA dan kegiatan keagamaan lainnya.

Dari berbagai penjelasan yang telah di uraikan sebelumnya, maka secara ringkas dinamika sosial budaya masyarakat Desa Bulolohe sampai tahun 2020, seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2 Dinamika Sosial Budaya Masyarakat di Desa Bulolohe Tahun 2020.

Aspek	Dahulu	Sekarang
Pendidikan	Pendidikan dasar dan pendidikan lanjutan pertama (SD dan SLTP).	Pendidikan SD, SLTP SLTA (SMA/SMK) dan pendidikan tinggi (Diploma, S1 dan S2)
Kesehatan	Pengobatan tradisional (dukun/di rumah)	Pengobatan modern (tenaga medis/fasilitas kesehatan)
Ketenagakerjaan	Homogen (petani dan ibu rumah tangga)	Heterogen (petani, ibu rumah tangga, pekebun, peternak, pedagang, tukang, pegawai negeri dan swasta dan lain-lain)
Budaya	Tertutup dari luar Tradisi panen padi <i>Mattiro laonruma</i>	Terbuka dari luar Tradisi panen padi (tidak ada lagi) <i>Mattiro laonruma</i> (tidak berkelanjutan)
	Gotong royong (<i>rera</i>) Sipakatau sipakalebbi	Gotong royong (<i>rera</i>) tetap bertahan. Sipakatau sipakalebbi (tetap bertahan dan terpelihara)
	Bahasa Bugis	Bahasa Indonesia, Bugis dan Bahasa Makassar.

	Pengajian tradisional (guru mengaji/di rumah)	Pengajian modern (Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) dan Taman Kanak- kanak Al-Qur'an (TKA) di masjid dan rumah.
Agama	Masjid masih terbatas	Masjid berkembang, terdapat di setiap dusun.
	Pendidikan agama di sekolah umum	Pendidikan agama di sekolah umum dan Pondok Pesantren.

Sumber: Diolah oleh Peneliti, Tahun 2021.

BAB IV

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT

Desa Bulolohe merupakan desa korporatis yang dibentuk pada era orde baru, masyarakatnya pernah mengalami kepemimpinan otoriter karena tidak adanya ruang untuk menyampaikan aspirasi. Segala bentuk perubahan dalam masyarakat diatur dari atas secara seragam melalui ideologi cetak biru (*blue print*). Masyarakat desa hanya diposisikan sebagai objek dan pemerintah selaku subjek yang dominan. Kehidupan demokratis yang merupakan harapan masyarakat belum dapat diwujudkan, karena peran pemerintah terlalu jauh mengatur desa. Dalam perkembangannya di era reformasi mulai ada keterbukaan bagi masyarakat dalam pengambilan keputusan sehingga tercipta demokratisasi di desa.

Demokratisasi merupakan cara dan proses yang memberi peluang dan wewenang yang memungkinkan masyarakat menentukan dan mengelola hidupnya sendiri melalui dialog, diskusi, aksi yang bertumpu di atas persamaan dan keadilan (Fakih, 1999 : 66). Pendapat yang sama tentang demokrasi dikemukakan oleh Suwarsono dan A. Y. So (1991: 44) bahwa demokrasi diartikan sebagai satu sistem politik yang secara *ajeg*

memberikan kesempatan secara konstitusional untuk terjadinya perubahan pelaku pemerintahan dan memberikan kesempatan yang sah kepada penduduknya untuk memberikan pengaruh pada berbagai keputusan pokok dengan cara menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pemegang kekuasaan politik. Kehidupan demokrasi dapat berjalan baik apabila tercipta hubungan politik yang cukup terbuka, sehingga masyarakat mudah menyampaikan aspirasinya.

Berkaitan dengan penyampaian aspirasi masyarakat dan penggunaan hak pilihnya dalam kekuasaan politik merupakan bagian dari partisipasi politik masyarakat. Secara sederhana partisipasi politik dipahami sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan cara memilih pimpinan dan secara langsung atau secara tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*) (Setiadi dan Kolip, 2015 : 128). Mengenai partisipasi politik masyarakat di Desa Bulolohe, dapat dilihat dalam keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan keterlibatan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

A. Musrenbang Desa

Dalam hal partisipasi politik masyarakat dalam pengambilan keputusan di Desa Bulolohe bukan merupakan sesuatu yang baru, melainkan sudah lama berlangsung dalam masyarakat. Arena partisipasi politik masyarakat yang selama ini dilaksanakan adalah forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa. Musrenbang dimaknai sebagai diskusi atau musyawarah masyarakat untuk merumuskan kebutuhan pembangunan daerah

(Pudjianto, 2019 : 113). Mekanisme Musrenbang diawali dari desa, kecamatan dan kabupaten. Pada level kabupaten usulan kegiatan akan melalui proses politik dengan adanya pembahasan di DPRD Kabupaten Bulukumba. Proses politik dinyatakan final setelah ditetapkan APBD Kabupaten Bulukumba.

Dalam pelaksanaan pengambilan keputusan melalui Musrenbang desa di Desa Bulolohe tampaknya kurang berjalan mulus. Hal ini karena tindakan pemerintah supradesa (Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten) terkadang membatasi atau kurang memberikan kesempatan kepada warga masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat dalam Musrenbang desa. Kalaupun diberikan ruang menyampaikan usulan rencana kegiatan biasanya cukup selektif, sehingga tidak semua usulan masyarakat dapat diakomodir dalam Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten. Hal yang menarik bahwa forum Musrenbang desa tidak berjalan dialogis, tetapi lebih banyak dikuasai oleh pemerintah supradesa. Secara faktual justru pemerintah supradesa mendominasi dengan memasukkan usulan kegiatan dari instansinya untuk diakomodir dalam RKP Desa Bulolohe.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Desa Bulolohe tahun 2020 terdapat 17 usulan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, namun yang diakomodir hanya 4 usulan kegiatan. Di bidang pembangunan terdapat 21 usulan kegiatan, akan tetapi yang diakomodir untuk dibawa ke Musrenbang Kecamatan hanya 5 usulan kegiatan. Sedangkan untuk bidang pembinaan kemasyarakatan terdapat 15 usulan kegiatan, tetapi yang diakomodir hanya 3 usulan kegiatan. Untuk kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat terdapat 12 usulan

kegiatan, namun yang diakomodir untuk diusulkan dalam Musrenbang Kecamatan adalah sebanyak 4 usulan kegiatan. Terbatasnya usulan masyarakat untuk diakomodir dalam Musrenbang Kecamatan, menunjukkan fakta bahwa aspirasi murni masyarakat desa belum menjadi prioritas dalam pembangunan desa.

Berdasarkan informasi dari pemerintah supradesa, bahwa tidak diakomodirnya usulan masyarakat Desa Bulolohe dalam Musrenbang Kecamatan, karena: (a) usulan masyarakat yang tersusun dalam RKP Desa lebih banyak sebagai daftar keinginan daripada daftar kebutuhan prioritas masyarakat desa. (b) secara umum usulan masyarakat tidak sesuai dengan skala prioritas kecamatan sehingga tidak semua usulan dapat diakomodir dalam tahapan perencanaan pada level kecamatan. Meskipun usulan masyarakat akan dikawal oleh delegasi desa sampai Musrenbang kecamatan, namun bukan sesuatu yang mudah. Hal ini karena delegasi desa akan berhadapan dengan elite pemerintah supradesa, untuk memperebutkan usulan sektoral dari dinas-dinas kabupaten agar diakomodir dalam perencanaan kabupaten. Perjuangan delegasi desa untuk mempertahankan hasil keputusan masyarakat dalam bentuk usulan kegiatan lebih banyak yang gagal daripada yang berhasil diakomodir dalam Musrenbang kecamatan dan kabupaten.

Dengan mencermati fakta terkait terbatasnya usulan masyarakat yang terakomodir, maka semakin menegaskan bahwa pengambilan keputusan pada level bawah belum berjalan optimal. Hal ini karena adanya hambatan struktural dilihat dari relasi kuasa yang tidak seimbang antara pemerintah supradesa dengan masyarakat desa. Masyarakat desa menempati struktur

sosial paling bawah, sementara pemerintah supradesa merupakan elit birokrasi yang dapat mengontrol dan mengendalikan masyarakat lapisan bawah. Dalam kondisi tertentu terkadang masyarakat mau berpartisipasi secara politik dalam menentukan kebijakan perencanaan pembangunan, namun karena menguatnya kendala struktural sehingga masyarakat desa tidak antusias lagi dalam pengambilan keputusan pada level desa.

Tantangan yang terbesar dalam proses partisipasi adalah bagaimana suara mereka yang tertinggal dapat didengar dan memengaruhi keputusan yang diambil (Eko & Krisdyatmiko, 2006 : 321). Proses membatasi aspirasi masyarakat sebagaimana diuraikan sebelumnya merupakan salah satu bentuk mencederai partisipasi masyarakat. Seharusnya forum Musrenbang sebagai ruang publik (*public sphere*) sebagai wadah pertukaran ide, gagasan, serta saran yang prosesnya dilandasi sifat kekeluargaan dan tidak membedakan latar belakang sosial dan budaya seseorang, kelihatannya hanya menjadi wadah untuk melakukan penindasan (Nain, 2021 : 44). Partisipasi ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

Selain partisipasi politik dalam pengambilan keputusan sebagaimana diuraikan sebelumnya maka partisipasi politik masyarakat Desa Bulolohe dapat pula dilihat dari berbagai pelaksanaan pemilihan umum secara langsung sebagai berikut:

B. Pemilihan Kepala Desa

Sebelum tahun 1993 Desa Bulolohe ditetapkan sebagai desa persiapan, yang merupakan pemekaran dari Desa Bontomanai. Selama desa persiapan tidak dilakukan pemilihan kepala desa

(Pilkades) karena pejabat kepala desa ditunjuk secara langsung. Adapun Pilkades yang telah dilaksanakan di Desa Bulolohe sudah berlangsung selama 4 kali, yaitu:

Pertama, Pilkades tahun 1995. Untuk memilih kepala desa secara definitif di Desa Bulolohe, maka untuk pertama kali diadakan Pilkades pada 1995. Pada waktu itu terdapat 2 calon kepala desa yang berkompetisi antara lain: Khutbah Saleh dan Andi Akmil Kr. Odde. Dilihat dari partisipasi masyarakat dalam memberikan hak pilihnya, maka yang memperoleh suara terbanyak adalah Khutbah Saleh. Terbatasnya jumlah calon kepala desa memengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam memberikan suara dalam Pilkades. Seorang informan, AMY (52 tahun) yang diwawancarai pada 2 Agustus 2021, menyatakan bahwa kurangnya calon kepala desa berpengaruh dengan rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam memberikan suaranya pada saat dilaksanakan Pilkades. Lebih lanjut dikatakan bahwa partisipasi masyarakat yang ikut memberikan suara di Pilkades ketika itu hanya mencapai 70 persen. Diperkirakan ada 30 persen pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, tanpa diketahui penyebabnya.

Kedua, Pilkades tahun 2004. Pelaksanaan Pilkades tahun 2004 kembali diikuti 2 calon kepala desa, yaitu: petahana Khutbah Saleh dan Abdul Rasyid Nain. Dalam Pilkades yang diikuti 2 orang calon kepala desa, yang mendapat suara terbanyak adalah petahana Khutbah Saleh untuk masa jabatan 6 tahun. Partisipasi politik masyarakat mulai meningkat jika dibandingkan dengan Pilkades tahun 1995. Kesadaran masyarakat untuk menyalurkan dukungan terhadap calon kepala desa tertentu mulai membaik seiring dengan meningkatnya pemahaman untuk memilih

pemimpin di desanya. Warga masyarakat Desa Bulolohe secara sukarela dan tanpa paksaan mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) untuk menyalurkan aspirasinya pada hari pelaksanaan Pilkades. Dengan adanya kesadaran masyarakat untuk memilih pemimpin di desanya, sehingga partisipasi politik masyarakat dalam Pilkades dapat mencapai 75 persen.

Ketiga, Pilkades tahun 2009. Pelaksanaan Pilkades tahun 2009 sedikit berbeda dengan 2 kali Pilkades sebelumnya, karena Pilkades kali ini diikuti sebanyak 5 calon kepala desa, yaitu: Nurwahidah, Andi Akmil Kr Odde, Nasaruddin, Muhammad Alwi Muin dan Muh Yusuf. Pilkades yang ketiga ini untuk pertama kali ada calon kepala desa dari unsur perempuan. Hal ini memberikan indikasi bahwa untuk menjadi kepala desa tidak hanya dari unsur laki-laki, akan tetapi pihak perempuan juga memiliki peluang yang sama menjadi kepala desa. Kandidat yang memperoleh suara terbanyak adalah Andi Akmil Kr. Odde, mengalahkan 4 kandidat lainnya dalam Pilkades tahun 2009. Oleh karena banyaknya calon kepala desa sehingga setiap calon menghimbau kepada pendukungnya untuk datang memberikan hak pilihnya di TPS yang telah ditentukan panitia penyelenggara Pilkades. Dampaknya partisipasi politik masyarakat dalam Pilkades mengalami peningkatan hingga mencapai 80 persen.

Keempat, Pilkades tahun 2016. Untuk pelaksanaan Pilkades tahun 2016 sama dengan Pilkades tahun 2009, karena jumlah calon kepala desa sebanyak 5 orang, yaitu: Tajuddin, Arfah, Abdul Rasyid Nain, Khutbah Saleh dan Rachmawati. Setelah dilakukan perhitungan suara di TPS maka yang memperoleh suara mayoritas/terbanyak adalah Abdul Rasyid Nain, yang unggul dari 4 calon lainnya. Jumlah suara yang diperoleh sebanyak 698

sehingga terpilih menjadi Kepala Desa Bulolohe sampai sekarang. Dengan melihat banyaknya jumlah calon kepala desa yang ikut berkontestasi dalam Pilkades 2016, sehingga setiap calon berupaya keras untuk menghimbau para pendukungnya agar menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara.

Setiap calon kepala desa mengingatkan kepada pemilih yang telah terdaftar agar tidak melakukan sikap golput, sehingga mengurangi perolehan suara di TPS. Melalui himbauan kepada pemilih dari setiap calon kepala desa sehingga partisipasi politik masyarakat dalam Pilkades 2016 meningkat mencapai 85 persen. Menurut informasi dari ARN (53 tahun) yang diwawancarai pada 3 Agustus 2021, mengatakan bahwa Pilkades 2016 cukup berhasil karena tingginya kesadaran warga Desa Bulolohe dalam memberikan hak pilihnya sehingga partisipasi politik masyarakat dalam Pilkades dapat mencapai diatas 80 persen.

Mencermati pelaksanaan Pilkades di Desa Bulolohe yang telah berlangsung sampai 4 kali sebagaimana diuraikan sebelumnya, tampak bahwa partisipasi politik masyarakat secara bertahap mengalami peningkatan secara signifikan. Tingginya antusias masyarakat Desa Bulolohe untuk menjadi kepala desa dapat dilihat dari meningkatnya jumlah calon yang ikut dalam Pilkades. Jika 2 periode Pilkades sebelumnya jumlah calon kepala desa yang ikut berkompetisi hanya 2 orang. Akan tetapi berbeda dengan 2 periode Pilkades terakhir ini, di mana jumlah calon kepala desa sebanyak 5 orang.

Pada dasarnya jumlah calon kepala desa dapat melebihi 5 orang, namun karena dibatasi oleh regulasi sehingga jumlah calon kepala desa yang ikut berkompetisi hanya 5 orang saja. Dengan demikian, jika bakal calon kepala desa di atas 5 orang dilakukan

tes tertulis untuk mendapatkan 5 calon kepala desa yang siap mengikuti Pilkades. Pilkades tahun 2016 di Desa Bulolohe terdapat 6 bakal calon kepala desa, sehingga untuk menetapkan 5 calon kepala desa dilaksanakan tes tertulis oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba. Hasil tes tertulis tersebut digugurkanlah 1 orang bakal calon kepala desa, sehingga yang ikut berkompetisi dalam Pilkades adalah 5 orang.

Di berbagai daerah terkadang dalam pemilihan Pilkades muncul isu politik uang (*money politics*). *Money politics* sebagai transaksi atau rencana transaksi bermotif politik dengan menggunakan uang (atau segala bentuk yang diwujudkan dengan memanfaatkan konvertibilitas uang) yang bertujuan untuk memengaruhi si penerima untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tindakan untuk kepentingan si pemberi (Ismawan, 1999 : 15). Dalam praktiknya lebih jauh dikemukakan bahwa para calon kepala desa acapkali mendadak menjadi sinterklas menjelang hari pemungutan suara. Mereka membagi uang atau barang agar pilihan rakyat akan jatuh kepadanya (*Ibid*, 19). Berkaitan dengan *money politics* selama 4 kali pemilihan kepala desa di Desa Bulolohe, penulis mengalami kesulitan untuk menemukan fakta di lapangan. Tidak ada satu pun informan yang dapat secara terbuka menjelaskan praktik *money politics* karena mereka tidak pernah melihat secara langsung. Mereka takut mengada-ada karena tidak melihat kejadiannya, sehingga walaupun ada yang melakukan *money politics* bukan calon kepala desa. Penulis tidak berhenti dengan informasi warga masyarakat terkait *money politics*, lalu penulis melakukan konfirmasi kepada mantan Panitia Pilkades. Hasilnya tidak jauh berbeda tetap

tidak tahu proses *money politics* berlangsung di desanya. Bahkan dipertegas bahwa selaku panitia, seandainya ada calon kepala desa melakukan *money politic* maka dapat dianulir sebelum Pilkades dilaksanakan. Partisipasi politik masyarakat dalam Pilkades meningkat bukan karena adanya praktik *money politics* tetapi adanya kesadaran warga untuk berdemokrasi dalam Pilkades. Terutama untuk memilih kepala desa yang dapat menciptakan perubahan di desanya.

C. Pemilihan Kepala Daerah

Dalam setiap pemilihan kepala daerah, baik pemilihan Bupati atau Gubernur, masyarakat Desa Bulolohe aktif dalam memberikan hak pilihnya pada saat pemungutan suara. Selama pemilihan langsung di era reformasi, masyarakat Desa Bulolohe telah melalui beberapa kali pemilihan kepala daerah. Untuk pemilihan Bupati Bulukumba secara langsung telah terlaksana selama 4 kali, yaitu: pada 2005, 2010, 2015 dan 2020 (<https://www.kpu.bulukumbakab.com>). Pemilihan Bupati Bulukumba secara langsung pertama kali dilaksanakan tahun 2005, namun pemilih dari Desa Bulolohe tidak ada kesulitan mengadaptasi pemilihan ini karena pemilihan langsung sudah biasa dilalui pada saat pemilihan kepala desa. Masyarakat pemilih secara terbuka menggunakan hak pilihnya karena didukung dengan kesadaran tinggi untuk memilih pemimpin daerahnya untuk pertama kali secara langsung. Dalam melakukan partisipasi politik masyarakat melalui pemilihan Bupati dapat berjalan lancar di Desa Bulolohe karena setiap pemilih bebas menentukan pilihannya. Konflik-konflik kecil yang terkadang terjadi pada pemilihan kepala desa hampir tidak ditemukan dalam pemilihan Bupati secara langsung.

Partisipasi pemilih termasuk cukup tinggi setelah dilakukan perhitungan suara di setiap TPS dalam Desa Bulolohe.

Pemilihan Bupati Bulukumba untuk yang kedua kalinya tahun 2010 dan ketiga kalinya pada 2015, tidak jauh berbeda dengan pemilihan Bupati Bulukumba yang pertama tahun 2005. Masyarakat pemilih di Desa Bulolohe tetap antusias memilih pemimpin daerahnya dengan mendatangi TPS untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Partisipasi pemilih pada pemilihan Bupati yang kedua dan ketiga semakin meningkat karena bertambahnya kesadaran politik masyarakat seiring dengan tingkat pendidikan yang semakin baik, terutama munculnya pemilih pemula di Desa Bulolohe. Semangat pemilih pemula di Desa Bulolohe menambah partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Bupati di Kabupaten Bulukumba. Dengan demikian, ada korelasi antara tingkat pendidikan masyarakat dengan pelaksanaan demokrasi yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan langsung kepala daerah. Temuan di Desa Bulolohe, khususnya yang memiliki pendidikan SLTA/ sederajat cukup tinggi partisipasi politiknya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba.

Pemilihan Bupati Bulukumba yang keempat kalinya, yang dilaksanakan pada 9 Desember 2020, sedikit berbeda dengan pemilihan Bupati sebelumnya. Pemilihan Bupati yang dilaksanakan pada era Pandemi Covid 19 mengharuskan pemilih untuk mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak antar pemilih guna menghindari kerumunan. Setiap pemilih harus memakai masker sebelum dan sesudah memasuki TPS untuk memberikan suaranya dalam pemilihan Bupati. Pada hari pemungutan suara di TPS tidak tampak adanya kerumunan masyarakat pemilih

yang saling berinteraksi secara bebas, melainkan mereka pulang ke rumahnya masing-masing setelah memberikan hak pilihnya di TPS. Himbauan petugas TPS untuk mematuhi protokol kesehatan bagi pemilih cukup diterima dengan baik, sehingga dalam pelaksanaan pemungutan suara dapat berjalan lancar.

Dalam beberapa hari setelah pemungutan suara tidak ditemukan adanya warga masyarakat Desa Bulolohe terinfeksi Covid 19. Meskipun suasana pemungutan suara kelihatan sepi karena warga masyarakat dilarang melakukan kerumunan, namun antusias masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya masih tetap tinggi. Partisipasi politik masyarakat Desa Bulolohe lebih meningkat lagi dalam pemilihan Bupati yang keempat kalinya secara langsung. Dikemukakan oleh Kepala Desa Bulolohe bahwa partisipasi politik masyarakat Desa Bulolohe dalam pemilihan Bupati secara langsung yang keempat kalinya mencapai sekitar 85 persen. Munculnya Tim Sukses dari setiap kandidat Bupati yang berkompetisi, mendorong para pemilih menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan sedapat mungkin agar pemilih tidak bersikap golput.

Selain pemerintah desa yang mendorong warganya untuk tidak golput, maka sudah mulai muncul pihak tertentu dari luar desa yang memotivasi warga agar tidak golput dalam pemilihan Bupati secara langsung yang keempat kalinya. Kompetisi untuk meraih suara pemilih di Desa Bulolohe tampaknya tidak cukup hanya kunjungan rumah kandidat Bupati kepada warga. Akan tetapi yang banyak berperan menyosialisasikan seorang calon Bupati adalah Tim Sukses yang mereka bentuk dan diberi tanggung jawab untuk meraih suara terbanyak di wilayahnya. Terlepas dari peran Tim Sukses dalam mendorong partisipasi

politik masyarakat, kesadaran politik warga Desa Bulolohe sangat menentukan meningkatnya partisipasi politiknya dalam setiap pemilihan kepala daerah.

Selain pemilihan Bupati secara langsung, masyarakat Desa Bulolohe juga telah berpartisipasi dalam pemilihan Gubernur secara langsung. Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan secara langsung telah dilaksanakan selama 3 kali, yaitu: pada 2007 (5 November 2007), 2013 (22 Januari 2013) dan pada 2018 (27 Juni 2018) (sulsel.kpu.go.id). Pemilihan Gubernur yang telah berlangsung selama 3 kali periode pemilihan cukup berjalan seperti biasa, karena penduduk Desa Bulolohe sudah terbiasa dengan pelaksanaan pemilihan langsung mulai dari pemilihan kepala desa hingga pemilihan Bupati. Masyarakat Desa Bulolohe merespons pemilihan Gubernur dengan mendatangi TPS pada hari pemungutan suara. Pesta demokrasi untuk memilih pemimpin pada level provinsi ini kurang semeriah dengan memilih pemimpin pada level kabupaten. Partisipasi politik memilih dalam pemilihan Gubernur sedikit menurun jika dibandingkan dengan pemilihan Bupati.

Menurunnya partisipasi politik memilih karena memilih bersikap rasional untuk terciptanya perubahan dalam kehidupan mereka sebagai warga desa. Gubernur dinilai sedikit jauh dari mereka sebagai penduduk desa, sehingga aspirasi mereka belum tentu mendapat tanggapan kepada pemerintah di atasnya (supradesa). Dengan pertimbangan jarak ini sehingga dalam memilih Gubernur dianggap biasa saja, tidak seantusias dalam memilih Bupati. Sikap antusias dalam memilih Bupati karena mudah berinteraksi dan dekat dengan tempat tinggalnya sehingga sewaktu-waktu bisa bertemu menyampaikan permasalahannya.

Meskipun ada ungkapan bahwa kepedulian seorang pemimpin kepada rakyatnya menjadi penting, namun di Desa Bulolohe sikap peduli pemimpin yang dari luar desa belum banyak tampak dalam mengubah kehidupan masyarakat. Dengan demikian, partisipasi politik pemilih ada kaitannya dengan perubahan yang akan dilakukan oleh seorang pemimpin.

D. Pemilihan Legislatif

Masyarakat Desa Bulolohe cukup aktif dalam melaksanakan partisipasi politiknya dalam pemilihan legislatif. Selama reformasi berlangsung hingga sekarang telah dilaksanakan pemilihan anggota legislatif selama 5 kali, yaitu: (1) tahun 1999 (7 Juni 1999) periode 1999-2004, pemilihan DPR dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; (2) tahun 2004 (5 April 2004) periode 2004-2009, pemilihan DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; (3) tahun 2009 (9 April 2009) periode 2009-2014, pemilihan DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; (4) tahun 2014 (9 April 2014) periode 2014-2019, pemilihan DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan (5) tahun 2019 (17 April 2019) periode 2019-2024, pemilihan DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. (<https://id.m.wikipedia.org>)

Pelaksanaan pemilihan anggota legislatif untuk memilih DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Desa Bulolohe cukup berjalan lancar bagi pemilih yang berpendidikan SLTA/ sederajat, karena mampu mengidentifikasi calon legislatif yang mereka akan pilih. Bagi pemilih yang hanya berpendidikan sekolah dasar atau tidak berpendidikan, mengalami kesulitan untuk mengenali calon anggota legislatif yang akan dipilih.

Kesulitan ini karena setiap partai politik memiliki jumlah calon yang cukup banyak dalam 1 daerah pemilihan (Dapil). Di Desa Bulolohe banyak orangtua tidak menggunakan hak pilihnya hanya karena tidak mengenal siapa calon legislatif yang mereka akan pilih pada hari pemungutan suara. Terkadang calon legislatif kabupaten saja mereka tidak kenal, apalagi calon legislatif provinsi dan pusat. Fenomena ini sering kali berlangsung pada setiap pemilihan legislatif di desa. Oleh karena itu sangat wajar jika partisipasi politik pemilih dalam pemilihan anggota legislatif lebih rendah dari pemilihan Bupati dan pemilihan Gubernur.

Meskipun pemilih dewasa dihimbau agar tidak golput, namun masih banyak di antara mereka tidak menggunakan hak pilihnya hanya karena kesulitan mengenali calon legislatif. Berbeda dengan pemilih milenial yang menilai pemilihan legislatif sebagai bagian dari pembelajaran demokrasi di desanya, sehingga pemilih milenial merespons dengan cukup antusias. Pemilihan legislatif tahun 2019 semakin dinamis karena mulai ada calon legislatif yang menggunakan Tim Sukses dari warga Desa Bulolohe, yang cukup giat mempertemukan antara pemilih dengan calon legislatif kabupaten. Seharusnya ada kelompok independen yang melakukan sosialisasi terkait tata cara pemilihan anggota legislatif, sehingga pada hari pemungutan suara tidak banyak yang dinyatakan batal.

Secara faktual partisipasi politik masyarakat cukup tinggi, namun karena suara yang batal juga tinggi sehingga kontribusi suaranya sia-sia. Tatanan kehidupan yang rukun sebagai karakteristik masyarakat desa perlu dipertahankan, pilihan boleh berbeda tetapi tidak untuk merusak kerukunan hidup sebagai warga desa yang selama ini hidup santun dan beradab. Secara

empiris cukup banyak warga desa mengalami keretakan keluarga hanya karena perbedaan pilihan dan sampai pemilihan berikutnya belum berdamai. Ditekankan oleh kepala desa bahwa pemilihan legislatif yang melibatkan Tim Sukses dari desa jangan menjadi arena menabur kebencian dan permusuhan karena berbeda pilihan adalah hal yang biasa dalam kehidupan demokrasi.

E. Pemilihan Presiden

Dalam era reformasi semua jabatan politis dilakukan melalui pemilihan secara langsung. Sukses kepemimpinan 5 tahun telah berhasil memilih pemimpin negara, melalui pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah dilakukan selama 4 kali, yaitu: (1) tahun 2004 (5 Juli 2004) periode 2004-2009, (2) tahun 2009 (8 Juli 2009) periode 2009-2014, (3) tahun 2014 (9 Juli 2014) periode 2014-2019 dan (4) tahun 2019 (17 April 2019) periode 2019-2024. (<https://id.m.wikipedia.org>). Masyarakat Desa Bulolohe telah melalui pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan lancar selama 4 periode dan tidak menimbulkan gejolak sosial yang merugikan masyarakat. Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak jauh berbeda dengan partisipasi politik dalam pemilihan Gubernur. Fenomena tentang perlunya seorang pemimpin melakukan perubahan menjadi salah satu indikasi untuk dipilih, karena masyarakat desa senantiasa membutuhkan perubahan. Dalam pemilihan Presiden di Desa Bulolohe tidak tampak adanya Tim Sukses yang memengaruhi masyarakat untuk memilih calon Presiden tertentu.

Sebagai pesta demokrasi untuk memilih pemimpin tertinggi di negeri ini seharusnya pemilihan Presiden disambut dengan

meriah. Akan tetapi, dalam kenyataannya hanya seperti biasa, baik pemilih milenial maupun pemilih dewasa tidak dilakukan dengan sikap fanatik dalam mendukung calon Presiden tertentu. Dampaknya tidak ada konflik di antara pemilih sesama warga desa karena masyarakat desa sudah cukup dewasa menghadapi setiap pemilihan langsung di desanya. Diintegrasikannya antara pemilihan Presiden dan pemilihan legislatif tahun 2019 cukup menyita waktu seorang pemilih ketika berada di bilik suara. Hal ini karena untuk membuka kertas suara yang begitu banyak membutuhkan waktu yang cukup lama. Dengan banyaknya waktu yang dipergunakan sehingga banyak pemilih tidak memberikan hak pilihnya karena tidak mau antri untuk bergantian masuk di bilik suara. Hal ini juga turut memengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Disarankan oleh warga masyarakat Desa Bulolohe agar penggabungan pemilihan Presiden dengan pemilihan legislatif perlu untuk dikaji ulang dalam pelaksanaannya. Melalui televisi, ada di antara warga masyarakat Desa Bulolohe melihat petugas TPS menjadi korban meninggal dunia setelah selesai perhitungan suara di TPS. Secara umum mereka meninggal karena kelelahan melakukan perhitungan suara di TPS, sebagai konsekuensi penggabungan antara pemilihan Presiden dengan pemilihan legislatif.

BAB V

PERKEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT

Untuk menganalisis perkembangan ekonomi masyarakat di Desa Bulolohe, maka masih relevan dengan mencermati struktur ekonomi yang dikemukakan oleh J. H. Boeke dengan *dual economy*, yaitu berupa struktur ekonomi modern dan struktur ekonomi tradisional (Nasikun, 2012: 57). Sejak terbentuknya Desa Bulolohe menjadi desa tersendiri yang terpisah dengan Desa Bontomanai, maka perekonomian Desa Bulolohe memiliki struktur ekonomi perdesaan yang tradisional bercorak agraris. Secara umum kegiatan ekonomi masyarakat masih dilakukan di sektor pertanian dengan aktor utama adalah petani. Petani adalah orang melakukan kegiatan usaha pada sektor pertanian baik pertanian kebun, ladang, sawah, perikanan dan lainnya pada suatu lahan yang diusahakan dengan tujuan keuntungan ekonomi (Hadiutomo, 2012: 2). Perekonomian masyarakat desa belum berorientasi kepada kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan dengan menggunakan sumber daya secara maksimal. Perekonomian masyarakat hanya bertujuan memenuhi kebutuhan keluarga dan masih terbatas kepada usaha-usaha yang berorientasi pasar. Kegiatan usaha ekonomi tradisional yang

dikembangkan dan merupakan sumber pendapatan utama masyarakat di Desa Bulolohe adalah usaha pertanian sawah.

Dalam bukunya *Involusi Pertanian*, C. Geertz (1976:29-30) menguraikan bahwa sawah adalah merupakan suatu struktur buatan, sangat khusus, terus-menerus ditanami, dan terbuka. Kegiatan di sawah sangat tergantung dari persediaan air yang terkontrol dengan baik, karena tanaman padi di sawah senantiasa memerlukan air yang cukup banyak. Di Desa Bulolohe kegiatan usaha di sawah dapat berlangsung sampai panen padi minimal 2 kali setahun, sehingga sangat menunjang perkembangan ekonomi masyarakat dari sektor pertanian sawah. Meskipun pertanian sawah pada awalnya merupakan usaha yang bersifat subsisten, namun secara perlahan-lahan berkembang menjadi pertanian komersial. Menurut Rahardjo (1999: 68) subsistensi secara umum diartikan sebagai cara hidup yang cenderung minimalis. Usaha-usaha yang dilakukan cenderung ditujukan untuk sekadar hidup.

Menurut Clifton R. Wharton dalam Rahardjo (1999: 68) membedakan subsistensi produksi dan subsistensi hidup. Subsistensi produksi dikarakterisasi dengan derajat komersialisasi dan monetisasi yang rendah. Sedangkan subsistensi hidup berkaitan dengan tingkat hidup yang bersifat minimalis hanya untuk sekadar hidup. Pertanian subsistensi yang berlangsung pada masyarakat petani di Desa Bulolohe, produksinya tidak secara keseluruhan untuk dikonsumsi saja. Akan tetapi, sudah mulai dijual di pasar dalam jumlah yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan lain, seperti kebutuhan sandang. Hasil pertanian yang dijual ke pasar bukan untuk menghimpun modal, tetapi lebih sekadar untuk kelangsungan hidup (*survive*). Pertanian subsistensi yang murni menurut Wharton adalah semua

produksi dikonsumsi dan tidak ada yang dijual serta tidak ada penggunaan barang-barang yang masuk.

Berdasarkan temuan lapangan di Desa Bulolohe maka pertanian subsisten yang dikemukakan oleh Clifton R. Wharton tampaknya tidak murni berlaku. Hal ini karena petani subsisten yang produksinya tidak hanya untuk dikonsumsi tetapi juga dijual di pasar. Selain itu tetap ada barang tertentu yang masuk untuk memenuhi kebutuhan lain sesuai keperluan petani. Dipertegas dari hasil wawancara dengan Bapak AMP (52 tahun) pada 5 Juli 2021, bahwa:

Bertani tradisional (maksudnya subsisten) produksinya seperti gabah atau beras lebih utama untuk dikonsumsi sehari-hari dan juga disimpan sebagai persediaan. Untuk yang dijual di pasaran sangat dibatasi, yaitu hanya sekadar mendapatkan uang untuk membeli lauk-pauk seperti ikan dan bumbu masak. Apalagi padi yang ditanam terbatas produksinya sehingga untuk menjualnya juga dibatasi sesuai keperluan sehari-hari dan bukan untuk membeli barang mewah.

Perilaku petani subsisten di atas oleh J. C. Scott (1994) merupakan strategi hidup mereka yang berorientasi “dahulukan selamat” (*safety first*), yang mendahulukan keamanan konsumsi minimum keluarga daripada rasionalisasi produksi. Dalam kehidupan petani subsisten lebih berorientasi pada motif untuk memenuhi kepuasan dan kepentingan-kepentingan sosial. Relasi sosial yang terjadi dalam masyarakat Desa Bulolohe bukan merupakan relasi ekonomi, yang berdasarkan perhitungan untung-rugi. Secara historis ketika itu masih tetap mempertahankan tradisi, karena petani memiliki watak alami dengan ekonomi moral sebelum mengenal hubungan kapitalis.

Ekonomi moral ditandai oleh produksi yang tujuannya sekadar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (subsisten), dengan syarat jaminan kebutuhan hidup tersedia dan didorong oleh keinginan menghindari risiko dan kurang dipengaruhi kepentingan pasar (Schrauwer, 2002: 164).

Dalam perkembangannya, setelah pertanian subsisten yang menjadi corak perekonomian desa mengalami evolusi melalui transformasi dari struktur ekonomi tradisional kepada struktur ekonomi modern. Petani tradisional yang subsisten bergerak secara berangsur-angsur menuju kepada petani modern yang komersial. Dari kondisi masyarakat yang subsisten menuju masyarakat yang berorientasi pasar (Nugroho, 2001: 61). Masuknya program revolusi hijau (*green revolution*) di Desa Bulolohe pada 1980 bertujuan untuk menciptakan perubahan dari pertanian tradisional menjadi pertanian modern. Selain cara kerjanya, perilaku petani pun dituntut berubah mengikuti pola pertanian modern, khususnya petani sawah. Pertanian modern yang diintroduksi pemerintah ke desa, termasuk di Desa Bulolohe memberikan pengaruh terhadap perkembangan ekonomi masyarakat dengan munculnya kapitalisasi di desa.

Kapitalisasi di Desa Bulolohe ditandai dengan sistem ekonomi uang melalui kehadiran institusi keuangan formal yang menyertai pelaksanaan intensifikasi pertanian sawah dalam revolusi hijau. Keberadaan BRI Unit Desa yang ditunjuk pemerintah menyediakan kredit produksi petani, mendorong petani untuk meningkatkan produksi padi yang berorientasi pasar. BRI Unit Desa yang terletak di Desa Bontomanai menjadi tempat transaksi keuangan antara pihak perbankan dengan petani di Desa Bulolohe selaku peserta intensifikasi pertanian

sawah. Selain itu, kehadiran teknologi penggilingan padi (*rice huller*) yang turut memengaruhi kapitalisasi di Desa Bulolohe, karena terjadinya pembayaran jasa penggilingan padi baik dalam bentuk uang atau beras. Termasuk munculnya usaha ekonomi baru masyarakat yang menggunakan transaksi uang, seperti kios-kios yang menjual sarana produksi pertanian berupa pupuk dan pestisida.

Semua kegiatan usaha yang menggunakan transaksi uang atau dinilai dengan uang, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan merupakan bentuk ekonomi kapitalis. Max Weber dalam J. K. Garna (1993: 46) secara umum menegaskan bahwa kapitalisme adalah suatu sistem usaha yang bertujuan untuk meraih keuntungan. Kapitalisme itu terikat dalam relasi-relasi pasar yang telah berkembang dalam berbagai tempat dan waktu. Berkembangnya kapitalisme di desa memunculkan perubahan cara pandang masyarakat terhadap keberadaan uang. Jika selama ini uang dipandang sebagai sarana pertukaran dalam masyarakat, namun saat ini uang telah menjadi tujuan. Implikasi sebagai tujuan maka cenderung dalam memperoleh uang dipergunakan berbagai cara, meskipun bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat.

Berkembangnya usaha ekonomi masyarakat di luar sektor pertanian di Desa Bulolohe yang didukung dengan sistem ekonomi uang, telah memunculkan kelas kewiraswastaan dalam masyarakat. Hal ini seperti, pedagang hasil bumi, pedagang kendaraan bermotor, jasa perbengkelan, jasa traktor pembajak sawah, usaha penjualan sarana produksi pertanian, jasa ojek gabah, usaha penjualan barang campuran (kelontong), tukang batu dan kayu dan lain-lain. Dengan adanya pelbagai usaha ekonomi

masyarakat seperti disebutkan di atas, semakin menegaskan bahwa di Desa Bulolohe tidak hanya berkembang usaha pertanian dalam arti luas. Akan tetapi juga telah berkembang usaha-usaha yang lain dengan adanya kelas kewiraswastaan di desa.

Berkaitan dengan kewiraswastaan, maka cukup menarik penjelasan dari David C. McClelland. Dikemukakan oleh McClelland (1987) bahwa semangat kewiraswastaan adalah yang mendorong perkembangan ekonomi. Semangat dalam diri pengusaha yang tidak hanya didorong oleh motif mencari keuntungan semata, akan tetapi lebih banyak didorong oleh hasrat kuat berprestasi demi melakukan pekerjaan yang baik. Sepintas sesuai pengamatan di Desa Bulolohe bahwa para pedagang ini memiliki semangat yang tinggi dalam berusaha, jika dibandingkan dengan kelas wiraswasta yang lain. Dengan demikian, sesuai temuan lapangan di Desa Bulolohe bahwa kelas pedagang terutama pedagang hasil bumi dan pedagang kendaraan bermotor lebih sukses daripada kelas wiraswasta di sektor jasa. Keberhasilan para pedagang ini dilihat dari kepemilikan barang bergerak, seperti mobil dan motor barang tidak bergerak, seperti tanah dan rumah serta emas.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak HD (51 tahun), salah seorang pedagang hasil bumi pada 5 Juli 2021, mengatak-an bahwa: dari usaha perdagangan hasil bumi yang saya lakukan selama 20 tahun dapat meningkatkan pendapatan. Pendapatan yang saya peroleh digunakan membeli tanah dan kendaraan berupa mobil dan motor. Hal yang sama dikemukakan oleh ARS (38 tahun) selaku pedagang kendaraan bermotor yang diwawancarai pada 6 Juli 2021, mengatakan bahwa pendapatan yang saya peroleh dari usaha perdagangan telah meningkatkan

pendapatan. Dari pendapatan tersebut saya gunakan untuk membeli ruko dan kendaraan berupa mobil dan motor serta perabot rumah tangga.

Meskipun perkembangan ekonomi masyarakat Desa Bulolohe tumbuh dengan adanya berbagai usaha ekonomi di luar sektor pertanian, namun hingga saat ini sektor pertanian dalam arti luas masih menjadi penopang utama ekonomi masyarakat. Pertanian sawah dan perkebunan masih menjadi sumber utama pendapatan masyarakat di Desa Bulolohe. Untuk melihat perkembangan ekonomi masyarakat di Desa Bulolohe, dapat diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut:

A. Pertanian Polikultur

Desa Bulolohe merupakan salah satu desa di Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, yang memiliki lahan cukup subur sehingga berbagai jenis tanaman dapat dikembangkan masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan usaha tani di Desa Bulolohe termasuk dalam pertanian polikultur. Sedikit berbeda dengan desa-desa lain di Kabupaten Bulukumba yang hanya mengembangkan satu jenis tanaman saja dalam usahatannya sehingga memiliki pertanian monokultur seperti, tanaman padi pada lahan persawahan. Pertanian polikultur ditandai dengan adanya berbagai jenis tanaman yang dikembangkan petani dalam kegiatan usahanya, seperti tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, usaha peternakan dan budi daya perikanan darat. Dalam Wikipedia disebutkan bahwa pertanian campuran (polikultur) adalah usaha pertanian yang membudidayakan berbagai jenis tanaman pertanian pada lahan yang sama.

Pertanian polikultur dengan pola tumpang sari yang dilakukan petani pada lahan perkebunannya, selain didasarkan pada keterbatasan lahan pertanian juga karena termotivasi dengan membaiknya harga komoditas pertanian di pasaran. Pada awalnya petani hanya menanam kopi atau lada (merica), tetapi karena harga cengkih cukup tinggi di pasar lokal dan pasar dalam negeri maka kebunnya ditambahkan tanaman cengkih. Kegiatan usaha tani yang didalamnya terdapat 1-3 jenis tanaman dalam 1 lokasi lahan pertanian, dalam masyarakat Desa Bulolohe dikenal dengan "*mattanisicala-cala*" (bertani semrawut). Setiap tanaman diberikan peluang yang sama untuk tumbuh dan berkembang sampai berproduksi. Setelah lama-kelamaan antara tanaman yang satu dengan tanaman lain bertemu tangkainya dan saling mengganggu sehingga produktivitasnya menurun.

Pengembangan usaha pertanian secara semrawut ini di Desa Bulolohe sudah lama berlangsung dan tampaknya sulit dilakukan perubahan karena terkait pola pikir dan pendidikan petani. Dengan menanam 1 jenis tanaman pada lahan perkebunannya seperti, tanaman cengkih, maka mereka dinilai terlalu berani menghadapi risiko dalam bentuk gagal panen. Di kalangan petani di Desa Bulolohe berkembang suatu prinsip bahwa jika 1 tanaman gagal panen, maka masih ada tanaman lain yang dapat dipanen. Dengan prinsip inilah yang banyak mewarnai cara bertani di Desa Bulolohe, sehingga secara umum dilakukan pola tumpang sari di kebun. Dengan cara ini risiko dikurangi karena kalau 1 macam tanaman tidak berhasil maka diharapkan tanaman lainnya akan memberikan hasil (Mubyarto, 1995 : 81).

Sebagai pertanian polikultur dengan pola tumpang sari, sering kali ditemukan kesulitan dalam menghitung populasi

tanaman dalam 1 hektar lahan kebun. Temuan lapangan di Desa Bulolohe menunjukkan bahwa seorang petani memiliki lebih dari 1 bahkan sampai 3 jenis tanaman dalam usaha taninya. Dalam 1 hektar kebun, didalamnya terdapat tanaman hortikultura berupa tanaman buah-buahan dan tanaman perkebunan, seperti cengkih dan lada. Dengan demikian jika seorang petani ingin diketahui berapa luas lahan buah-buahan, cengkih dan lada maka tampak luasnya sebanyak 3 hektar untuk 3 jenis tanaman. Dalam kenyataan di lapangan dengan pola tumpang sari maka ke-3 jenis tanaman tersebut hanya berada dalam 1 hektar lahan kebun saja.

Selain pola tumpang sari pada lahan kebun ditemukan pula di Desa Bulolohe kebiasaan melakukan rotasi tanaman. Kegiatan rotasi tanaman banyak ditemukan pada lahan perkebunan yang dikelola petani secara perorangan. Pada 1950 petani di Desa Bulolohe telah melakukan budi daya tanaman kopi, yang terletak di Dusun Parukku sampai Dusun Abbatungge. Tanaman kopi cukup populer dikembangkan masyarakat, karena harganya begitu mahal dan menjanjikan di tingkat petani serta merupakan salah satu sumber pendapatan masyarakat di luar pertanian sawah. Tanaman kopi yang dikembangkan sampai tahun 1975 secara bertahap dilakukan rotasi dengan tanaman cengkih, karena harga cengkih cukup tinggi di pasar lokal maupun pasar regional dan nasional. Dengan meningkatnya harga cengkih di pasar berimplikasi dengan ditinggalkannya budi daya kopi, sehingga banyak tanaman kopi dimusnahkan dan diganti dengan tanaman cengkih. Pada saat sekarang ini sudah sulit kita temukan populasi kopi di kebun petani, walaupun ada kopi yang tumbuh hanya menjadi tanaman pembatas kebun dalam jumlah yang terbatas.

Menjelang tahun 1985 harga cengkih ditingkat petani mengalami kemerosotan dengan adanya pemasaran tunggal melalui koperasi. Petani cengkih di Desa Bulolohe ada yang masih mempertahankan tanaman cengkihnya meskipun dengan harga yang murah. Akan tetapi cukup banyak petani cengkih melakukan rotasi tanaman dengan beralih kepada tanaman cokelat (kakao). Dengan demikian, di Desa Bulolohe tampak ada persaingan di antara petani yang masih memelihara cengkih dengan petani yang melakukan budi daya kakao. Berbeda dengan petani yang berlahan luas biasanya mempertahankan tanaman cengkihnya sekaligus menanam tanaman kakao.

Meredupnya budi daya tanaman kakao di Desa Bulolohe sehingga secara umum petani kembali menanam cengkeh. Tanaman cengkih yang baru tumbuh sebagai hasil rotasi tanaman kakao, cukup mewarnai usaha ekonomi masyarakat Desa Bulolohe di sektor perkebunan. Perilaku petani dalam melakukan rotasi tanaman di Desa Bulolohe lebih banyak karena mengikuti *trend* pasar komoditas perkebunan dari pada gangguan hama tanaman. Dengan *trend* pasar cukup banyak petani mengalami kerugian karena pada saat menanam harga komoditas perkebunan meningkat di pasar lokal. Namun ketika mulai panen harga komoditas perkebunan menurun secara drastis. Fenomena ini cukup banyak dialami petani cengkih, karena ketika menanam cengkih harga masih mahal tetapi pada saat panen harga turun. Petani kurang sabar memelihara tanamannya, sehingga melakukan rotasi tanaman meskipun hasilnya kurang menguntungkan petani dilihat dari peningkatan pendapatan.

Dengan mencermati pertanian polikultur di Desa Bulolohe dengan berbagai jenis tanaman yang dikembangkan, namun

belum terarah dan kurang fokus meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga perlu dilakukan gerakan satu desa satu produksi (*one village one product*). Satu desa menghasilkan satu produk utama yang kompetitif sebagai suatu usaha meningkatkan pendapatan dan standar kehidupan penduduk di desa (Sumodiningrat & Wulandari, 2016 : 205). *One village one product* (OVOV) dimaksudkan bukan satu desa satu produk melainkan setiap desa terpilih satu produk yang difasilitasi oleh pemerintah untuk dikembangkan (*Ibid*, 206). Dengan ditetapkannya setiap desa satu produk terpilih maka memudahkan untuk mengetahui produk unggulan suatu desa. Berdasarkan pengamatan lapangan di Desa Bulolohe maka tanaman rambutan dapat dipilih menjadi produk unggulan desa (*one village one product*). Hal ini karena tanaman rambutan cukup mudah beradaptasi dengan iklim dan kondisi tanah serta sudah banyak yang berhasil berbuah dan di panen. Desa Bulolohe sebagai salah satu desa di Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba akan semakin mudah dikenal karena memiliki 1 produk unggulan desa, yaitu tanaman rambutan.

Dari berbagai usaha ekonomi masyarakat yang ditemukan dalam pertanian polikultur di Desa Bulolohe sebagaimana diuraikan di bawah ini.

B. Pertanian Sawah

Masyarakat Desa Bulolohe hidup bersama dalam komunitas petani dalam arti luas, seperti petani sawah, pekebun dan peternak. Komunitas lain seperti pedagang, pengusaha, pegawai, pekerja jasa dan lainnya tidak begitu dominan, sehingga masyarakat Desa Bulolohe masih dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang dominan sebagai komunitas petani. Komunitas adalah sebuah

kelompok sosial yang mempunyai ikatan intim (*gemeinschaft*) (Kurniawan, 2020: 252). Pengembangan pertanian sawah sebagai bagian dari usaha ekonomi masyarakat di Desa Bulolohe dilakukan oleh komunitas petani, baik secara perorangan maupun berkelompok. Pertanian sawah merupakan kegiatan usaha tertua dan sampai sekarang masih tetap berlangsung di Desa Bulolohe.

Dalam hal peningkatan produksi padi dilakukan dengan cara intensifikasi pada lahan persawahan. Intensifikasi dimaksudkan penggunaan lebih banyak faktor produksi tenaga kerja dan modal atas sebidang tanah tertentu untuk mencapai hasil produksi yang lebih besar (Mubyarto, 1995:77). Berdasarkan Profil Desa Bulolohe Tahun 2020, disebutkan luas padi sawah di Desa Bulolohe adalah sebesar 175,50 ha dengan hasil produksi 5 ton/ha, sehingga nilai produksi mencapai Rp.2.008.500.000,-. Berdasarkan wawancara dengan Bapak RHT (53 tahun), selaku Penyuluh Pertanian Lapangan di Desa Bulolohe yang diwawancarai pada 16 Juni 2021 terungkap bahwa produksi padi 5 ton/ha belum mencapai target karena idealnya dengan sawah irigasi teknis bisa mencapai 8 ton/ha. Petani masih memiliki peluang untuk meningkatkan produksi padinya dengan melaksanakan intensifikasi secara maksimal melalui penggunaan pupuk berimbang. Kelemahan petani karena jarang mengikuti anjuran dari penyuluh pertanian lapangan, agar dapat menggunakan pupuk berimbang sebagaimana yang dipersyaratkan dalam intensifikasi pertanian sawah.

Pelaksanaan intensifikasi pertanian sawah dilakukan secara terus menerus, karena dipahami bahwa hanya dengan cara intensifikasi maka produksi pertanian khususnya padi akan meningkat hasilnya. Pemahaman ini disosialisasikan kepada

petani di Desa Bulolohe, sehingga intensifikasi pertanian menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan. Setelah intensifikasi pertanian sawah berlangsung cukup lama, melalui penggunaan tenaga kerja, modal dan teknologi maka dampaknya telah terjadi penurunan produksi. Fenomena menurunnya produksi ini menurut Mubyarto (1995) adalah berlakunya hukum kenaikan hasil yang makin berkurang (*law of diminishing return*). Secara sederhana dijelaskan bahwa penggunaan *input* produksi pada areal lahan tertentu dapat meningkatkan produksi. Walaupun demikian, karena dilakukan secara terus-menerus maka produksi yang meningkat pada puncak tertentu akan mengalami penurunan. Kondisi inilah yang dialami petani sawah di Desa Bulolohe, yang produktivitas lahannya semakin hari semakin menurun. Meskipun sawah petani terkadang diselingi dengan tanaman palawija seperti kacang tanah dan jagung dalam pola tanam padi-palawija-padi, namun hasilnya tidak maksimal. Hal ini karena pola ini tidak rutin dilaksanakan oleh petani sawah, sehingga dengan tanaman padi terus-menerus kesuburan tanah berkurang dan berdampak menurunnya produksi padi.

Hal lain yang cukup menarik untuk dicermati adalah pemasaran produksi pertanian, khususnya padi. Di Desa Bulolohe produksi padi lebih banyak dijual di sawah ketika panen raya berlangsung. Transaksi penjualan gabah di pematang sawah cukup ramai karena pedagang langsung berhubungan dengan petani tanpa perantara. Begitu harga gabah disepakati antara petani dan pedagang, maka gabah petani langsung ditimbang dan dibayarkan serta diangkut ke luar Kabupaten Bulukumba. Pembayaran harga gabah ada yang dibayar tunai dan ada pula yang tidak dibayar tunai. Adapun yang tidak dibayar tunai

biasanya dibayarkan paling lama 1 minggu sesuai kesepakatan petani dengan pedagang gabah. Dalam praktiknya terkadang pedagang menyalahi kesepakatan sehingga petani mengalami keterlambatan pembayaran dan merugikan petani. Adapun gabah yang merupakan hasil panen di sawah hanya sedikit yang dibawa ke rumah petani, yaitu untuk kebutuhan konsumsi keluarga sambil menunggu panen padi berikutnya.

Berdasarkan pengamatan lapangan bahwa gabah petani yang dijual di persawahan pada umumnya diangkut ke Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan. Dengan penjualan gabah di persawahan maka petani tidak mendapat nilai tambah. Anjuran pemerintah desa dan penyuluh pertanian lapangan, agar melakukan petik, olah dan jual tampaknya belum menjadi perhatian petani. Jika petik, olah dan jual dilakukan petani maka paling tidak ada 2 keuntungan yang dapat menjadi nilai tambah petani, yaitu: (1) gabah yang dibawa ke rumah dapat dikeringkan untuk disimpan dan nanti setelah harga gabah di pasar umum membaik baru diolah menjadi beras yang siap dipasarkan. Petani tidak dapat dimainkan oleh pedagang dengan harga murah karena yang dijual adalah beras, bukan gabah seperti di persawahan. Petani mendapat pendapatan tambahan dari penjualan beras karena harganya lebih mahal daripada gabah; (2) dari hasil penggilingan gabah menjadi beras, petani mendapat bekatul (*rice polish*) dan dedak padi (*rice bran*) untuk pakan ternak ayam dan itik, sehingga di tingkat rumah tangga petani dapat berkembang usaha ternak ayam dan itik karena pakannya tersedia dari dedak.

Berkaitan dengan stratifikasi sosial dilihat dari kepemilikan lahan pertanian sawah di Desa Bulolohe, tampak kurang ditemukan penguasaan lahan yang dominan antara satu petani

dengan petani lainnya. Disparitas antara petani yang memiliki sawah dengan yang tidak memiliki sawah tidak begitu kelihatan. Secara umum petani di Desa Bulolohe memiliki sawah dan hanya sedikit yang tidak memiliki sawah. Berdasarkan penelusuran dokumen Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Bulolohe ditemukan bahwa hampir semua petani memiliki sawah, yang luasnya bervariasi. Adapun luas sawah yang paling sedikit dimiliki petani adalah 0,25 ha dan yang paling luas adalah 4 ha. Rata-rata petani di Desa Bulolohe memiliki sawah antara 0,50-1 ha, sehingga kurang tampak adanya petani yang memiliki sawah begitu luas.

Oleh karena, pertanian sawah merupakan bagian dari usaha ekonomi masyarakat di Desa Bulolohe, maka dalam mengerjakan sawah ditemukan berbagai cara antara lain:

Pertama, petani mengerjakan sawahnya sendiri. Pola ini paling banyak dilakukan petani, karena merupakan pekerjaan utama mereka sebagai petani yang harus menggarap sawah sendiri. Selain itu, karena sawah yang dikerjakan dengan luas tertentu mampu digarap sendiri, sehingga tanpa bantuan orang lain mereka mampu melaksanakannya. Dari segi tenaga kerja tersedia dalam lingkup keluarga sehingga secara mandiri dapat melakukan kegiatan usaha pertanian sawahnya.

Kedua, petani memberikan sebagian sawahnya untuk dikerjakan orang lain. Model seperti ini ditemukan kepada petani yang memiliki sawah yang luas. Petani yang hanya suka berkebun daripada bekerja di sawah, sehingga sawahnya dikerjakan sebagian kepada petani yang berlahan sempit atau petani yang tidak memiliki sawah. Di kalangan pemilik sawah yang luas ada kebiasaan berpola dengan memberikan sebagian lahan sawahnya

untuk digarap oleh petani yang tidak memiliki sawah. Kebiasaan ini cukup lama berlangsung di masyarakat Desa Bulolohe, jauh sebelum Desa Bulolohe menjadi desa tersendiri. Pada dasarnya kebiasaan berpola ini untuk menciptakan pemerataan, agar setiap petani dapat menggarap lahan sawah meskipun bukan miliknya.

Ketiga, sistem gadai (*pasanra*). Petani pemilik sawah yang menggadaikan sawahnya kepada orang lain, baik kepada sesama petani maupun bukan petani dikenal dengan istilah *mappasanra*. Pihak lain yang menggarap sawah dari proses gadai dinamakan *massanrai*. Dalam sistem gadai ini biasanya ada ketentuan waktu yang disepakati antara kedua belah pihak, terkadang 1-3 tahun baru dapat ditebus sawah yang digadaikan. Walaupun demikian, belakangan ini mengalami perubahan di Desa Bulolohe karena tidak ditetapkan lagi waktu untuk ditebus, namun tergantung dari kemampuan keuangan petani pemilik untuk menebusnya. Temuan lain dari sistem gadai ini sering kali berakhir dengan pelepasan hak atas sawah melalui jual-beli. Pada awalnya sawah yang digadaikan dalam waktu tertentu tidak dapat ditebus, bahkan uang gadainya selalu ditambah sesuai kebutuhan sehingga semakin sulit untuk ditebus. Oleh karena itu, jalan terbaik untuk menyelesaikan sistem gadai ini maka disepakati dengan melakukan jual-beli. Praktik jual-beli sawah yang diawali sistem gadai di Desa Bulolohe merupakan salah satu bentuk transaksi ekonomi masyarakat. Berdasarkan penelusuran lapangan diperoleh informasi bahwa asal mula kepemilikan sawah oleh orang luar di Desa Bulolohe, seperti orang dari kota karena berawal dari sistem gadai dan diakhiri dengan jual-beli.

Keempat, pola bagi hasil (*teseng*). Pemilik sawah menyerahkan kepada penggarap untuk dikerjakan sawahnya sesuai ketentuan

bagi hasil yang disepakati. Relasi antara pemilik sawah dengan penggarap menciptakan 2 macam petani, yaitu petani pemilik dan petani penggarap. Petani pemilik sawah yang melakukan bagi hasil di Desa Bulolohe dikenal dengan nama *mappateseng*, sedangkan petani penggarap yang mengerjakan sawah disebut dengan *patteseng*. Pembagian hasil panen berupa gabah diatur dengan bagi hasil sesuai kesepakatan tidak tertulis antara petani *mappateseng* dengan petani *patteseng*. Kesepakatan ini dipelihara kedua belah pihak dalam jangka waktu lama sehingga menjadi tradisi dalam bagi hasil padi di masyarakat Desa Bulolohe.

Berdasarkan penelusuran lapangan baik kepada petani *mappateseng* maupun petani *patteseng* terungkap bahwa kebiasaan bagi hasil yang dilakukan adalah 2 pola, yaitu: (1) petani pemilik sawah dan petani penggarap masing-masing menerima separuh hasil panen padi, setelah dikurangi biaya produksi seperti harga benih, pupuk dan sewa traktor; dan (2) petani pemilik sawah dan petani penggarap masing-masing menerima separuh hasil panen padi, namun biaya produksi dibebankan kepada petani penggarap. Pola bagi hasil yang pertama terpelihara cukup lama dan tercipta relasi permanen sehingga kedua belah pihak tercipta hubungan yang saling menguntungkan (*simbiose mutualistis*).

Hubungan inilah yang menciptakan ikatan patron-klien seperti yang dikemukakan oleh James C. Scott. Menurut Scott (1993:7) bahwa:

Patron-klien merupakan pertukaran hubungan antara kedua peran, di mana seorang individu dengan status sosio-ekonomi yang lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumberdayanya untuk menyediakan perlindungan dan/atau keuntungan-keuntungan bagi seseorang dengan status lebih rendah (klien). Pada gilirannya, klien membalasnya dengan

menawarkan dukungan umum dan bantuan, termasuk jasa pribadi kepada patron.

Hubungan patron-klien terpelihara seperti dideskripsikan di atas, karena sebagian petani pemilik terutama dari keturunan bangsawan yang memiliki sawah cukup luas melaksanakan seremoni pesta panen. Pesta panen ini merupakan upaya untuk menekan apabila terjadi konflik tersembunyi antara petani pemilik dengan petani penggarap. Konflik yang sering terjadi berkaitan dengan bagi hasil panen padi, yang terkadang merugikan petani penggarap. Untuk tidak kehilangan petani penggarap maka pesta panen setiap musim tanam menjadi arena meredam konflik, sehingga petani penggarap tetap mendapat penghormatan dan tidak merasa dieksploitasi oleh petani pemilik.

Dalam hal keberlanjutan pertanian sawah sebagai salah satu sumber pendapatan petani di Desa Bulolohe maka cukup menarik kita cermati pernyataan Bapak Kadir Abdullah selaku pegiat pertanian dan wisata desa di Desa Balangtaroang. Pernyataan tersebut dimuat dalam media sosial (*face book*) pada 17 September 2019 pukul 08.06 WITA, bahwa: harus kita bertanam padi terus menerus sementara ancaman kekeringan semakin “nyata”. Saatnya petani bangkit beralih dari padi ke komoditas yang dapat mendongkrak pendapatan. Pembangunan pertanian harus merujuk pada “pendapatan petani”. Petani tidak boleh diikat oleh belenggu “ketahanan pangan” karena pasti yang rugi ujung-ujungnya yang korban “petani”. Mencermati pernyataan di atas maka keberlangsungan budi daya padi di Desa Bulolohe terkait dengan ancaman kekeringan mungkin dapat diatasi. Hal ini karena semua sawah di Desa Bulolohe telah mendapat irigasi teknis dari Sungai Balantieng sepanjang tahun.

Akan tetapi, ancaman yang mulai tampak fenomenanya dengan menanam padi terus-menerus adalah berlakunya hukum kenaikan hasil yang makin berkurang (*law of diminishing return*). Apabila hukum tersebut dialami petani sawah maka yang disarankan Pak Kadir, agar petani bangkit beralih dari padi ke komoditas yang dapat mendongkrak pendapatan adalah signifikan untuk diterapkan.

Petani harus diberi kebebasan mengembangkan usaha taninya yang menguntungkan petani. Pernyataan kunci dari Pak Kadir agar ada perubahan paradigma pembangunan pertanian, yang selama ini berorientasi produksi berubah menjadi peningkatan pendapatan petani. Disinilah *entry point* untuk memfasilitasi petani dalam mengamati perkembangan pasar komoditas pertanian, sehingga mereka dalam mengembangkan usahatani-nya senantiasa berorientasi pasar yang menguntungkan. Patut disayangkan informasi pasar komoditas pertanian yang disiarkan radio pemerintah hanya berlangsung dari 1990 sampai 2000 dan kini tidak disiarkan lagi. Oleh karena itu petani di Desa Bulolohe dalam mengakses informasi pasar komoditas pertanian menggunakan *handphone* untuk berkomunikasi dengan pedagang pengumpul, yang ada di ibu kota kabupaten dan provinsi. Walaupun demikian, akhir-akhir ini sudah ada pedagang pengumpul hasil bumi di Desa Bulolohe yang siap membeli hasil produksi pertanian para petani. Dengan demikian pemasaran hasil bumi cukup berjalan lancar meskipun terkadang ada gangguan sedikit terkait menurunnya harga di pasar lokal dan regional.

Meskipun petani telah berupaya meningkatkan pendapatannya melalui kegiatan pemasaran produksi hasil per-taniannya,

namun selaku petani tidak terlepas dari adanya berbagai beban yang dapat memengaruhi kehidupan ekonominya, antara lain:

Pertama, kewajiban adat (Chambers, 1988: 149). Di Desa Bulolohe beban petani dalam hal kewajiban adat masih tetap berlangsung dalam masyarakat. Petani yang sangat merasakan beban ini adalah petani berlahan sempit dalam memenuhi kewajiban biaya perkawinan dan kematian. Uang mahar menjadikan banyak orangtua terbebani, terutama dalam masyarakat yang masih memakai adat-istiadat tersebut. Bagi petani kecil terkadang harus menjual lahan garapannya untuk memenuhi jumlah mahar yang diminta (Chambers, 1988: 150). Demi memenuhi kewajiban adat maka banyak di antara orangtua di Desa Bulolohe rela menjual tanahnya untuk membiayai pernikahan anaknya. Meskipun penjualan tanah tidak dilakukan secara terang-terangan karena ada perasaan malu di kalangan masyarakat.

Kedua, biaya sarana produksi pertanian. Terjadinya fluktuasi harga sarana produksi pertanian sering kali menjadi beban bagi petani karena kurang seimbang antara hasil penjualan produksi pertanian dengan harga sarana produksi. Di Desa Bulolohe terkadang harga pupuk, benih, dan pestisida mengalami kenaikan pada saat musim tanam padi. Sementara harga gabah mengalami penurunan ketika panen padi, karena di dalam kenyataannya berlaku hukum ekonomi antara permintaan dan penawaran. Beban terberat yang pernah dialami petani ketika pemerintah mencabut subsidi pupuk, sementara petani selama ini sudah terbiasa dengan subsidi pemerintah. Petani yang berlahan sempit dan petani penggarap banyak mengalami beban karena subsidi pupuk dihentikan, sehingga petani terpaksa berutang kepada penjual pupuk yang ada di desa.

Ketiga, musibah (Chambers, 1988: 151). Beban petani yang muncul karena adanya musibah sering kali tidak dapat diprediksi karena musibah tersebut di luar kemampuan manusia sehingga sulit diantisipasi. Dalam kasus kebakaran rumah warga di Dusun Bulolohe sampai saat ini merupakan beban karena harus kehilangan tempat tinggal dan peralatan rumah tangga serta barang-barang lainnya. Untuk kelangsungan hidupnya mereka menumpang sementara kepada tetangganya yang masih ada hubungan keluarga.

Beban petani yang lain terkait musibah adalah pencurian ternak. Dalam beberapa keluarga petani yang mengalami musibah pencurian ternak di Desa Bulolohe merasa terpukul karena kehilangan ternak sapi, yang merupakan aset berharga dalam kehidupannya. Di Desa Bulolohe, warga yang memiliki ternak sapi disamakan dengan orang yang memiliki emas. Sedemikian berharganya ternak sapi karena mudah dijual dan mendatangkan uang, yang hampir sama pada saat menjual emas. Oleh karena itu musibah kehilangan ternak sapi sama dengan musibah kehilangan barang berharga seperti emas. Hal yang sama dialami petani yang kehilangan traktor pembajak sawah karena musibah pencurian. Petani tersebut mengalami beban karena traktor yang dipakai untuk membajak sawah sudah tidak ada lagi, sementara untuk mengganti traktor baru membutuhkan dana yang besar. Dengan kehilangan traktor maka aktivitas dalam mengolah tanah persawahan menjadi terganggu.

C. Tanaman Sayuran

Kegiatan ekonomi masyarakat di Desa Bulolohe cukup ber-

variasi, seperti bertani di sawah, berkebun, menanam sayur-sayuran, beternak, dan lain-lain. Tanaman sayuran merupakan salah satu usaha ekonomi masyarakat Desa Bulolohe yang sudah berlangsung lama sampai sekarang. Di antara tanaman sayuran yang sudah lama dikembangkan petani adalah tanaman terong. Berawal dari kedatangan orang Bone di Desa Bulolohe yang membawa benih terong, maka pada saat itulah mulai dikembangkan budi daya tanaman terong secara terbatas. Pengembangan budi daya terong kemudian diadopsi oleh petani lain yang sudah lama menetap di Desa Bulolohe seperti, petani dari Dusun Parukku. Tanaman terong mulai menyebar dan tidak hanya ditanam di daerah persawahan di Dusun Balantieng, melainkan ditanam pula di Dusun Bulolohe, Dusun Parukku dan Dusun Abbatungge.

Menyebarnya tanaman terong yang dikembangkan petani di sawah telah memberikan kegiatan usaha baru bagi masyarakat Desa Bulolohe. Sejak 1980 sampai saat ini cukup banyak petani terong yang berhasil meningkatkan pendapatannya, selain menanam padi. Petani yang memiliki sawah tidak semua digarap untuk tanaman padi, melainkan dipisahkan sedikit atau sebagian sawahnya untuk lokasi tanaman terong. Penanaman terong di Desa Bulolohe lebih banyak dilakukan 2 bulan sebelum musim kemarau berlangsung, dengan target panen pada musim kemarau. Pemeliharaan tanaman terong tidak terganggu, karena didukung dengan ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan setiap saat. Budi daya tanaman terong dapat berkelanjutan di Desa Bulolohe, karena diuntungkan dengan adanya air sungai Balantieng yang tersedia sepanjang tahun. Potensi air ini dimanfaatkan petani

sehingga menjadi produktif dengan menanam sayur-mayur di sawah.

Semakin meluasnya budi daya tanaman terong di lingkungan petani sehingga Desa Bulolohe mulai dikenal sebagai desa penghasil terong. Adapun luas tanaman terong di Desa Bulolohe pada 2020 secara keseluruhan adalah seluas 5 ha. Strategi petani terong dalam menjaga stabilitas harga dengan cara meng-hindari penanaman terong pada musim hujan, karena pada musim tersebut cukup banyak petani lain yang menanam di luar Desa Bulolohe. Produksi terong yang melimpah akan berdampak turunnya harga terong di pasar lokal. Dengan menanam terong di musim kemarau dapat menciptakan harga yang stabil karena daerah lain tidak melakukan penanaman terong. Hal ini karena sawah yang akan ditanami terong tidak ditunjang dengan ketersediaan air, yang merupakan salah satu syarat dalam budi daya tanaman terong.

Dalam hal pemasaran terong dari Desa Bulolohe tampaknya tidak mengalami kesulitan. Berdasarkan pengamatan lapangan bahwa terong yang diproduksi petani dipasarkan ke luar desa, yaitu ke Pasar Tanete Kabupaten Bulukumba sampai ke Pasar Sentral Kabupaten Sinjai dan Salomekko Kabupaten Bone. Pedagang yang memasarkan terong ke berbagai daerah dilakukan oleh kaum perempuan dari ibu rumah tangga yang memang suka berdagang dan berasal dari Desa Bulolohe sendiri. Mereka sangat gesit dalam berdagang ditandai dengan kemampuannya menemukan daerah pemasaran baru yang menguntungkan, meskipun harus menyeberang laut seperti ke Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai. Relasi antara petani terong dan pedagang saling percaya (*mutual trust*) karena pembayaran harga terong dapat dilunasi setelah kembali dari pasar. Di antara keduanya ada

kesepakatan pembayaran yang diatur paling lama 3 hari setelah terong diangkut oleh pedagang ke pasar. Transaksi penjualan terong cukup ramai kelihatan di sore hari pada saat panen di sawah. Terong yang akan dibawa ke pasar biasanya diletakkan di pinggir jalan poros Bulolohe-Anrang, yang siap diangkut pada pagi hari dengan menggunakan mobil pete-pete. Mobil pengangkut terong ini merupakan mobil lokal yang sudah berlangganan dengan pedagang terong untuk siap digunakan setiap saat sesuai kebutuhan.

Dengan mencermati usaha ekonomi masyarakat melalui budi daya tanaman terong di Desa Bulolohe, maka tampak didalamnya ada pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Hal ini terlihat dari aktivitas budi daya tanaman terong yang dilakukan oleh petani dari kaum laki-laki dan yang melakukan pemasaran adalah kaum perempuan. Meskipun tidak banyak perempuan yang melakukan pekerjaan selaku pedagang terong, namun paling tidak muncul kegiatan baru di luar sektor domestik sebagai ibu rumah tangga. Implikasinya bahwa petani terong cukup antusias melakukan budi daya di sawah bersamaan dengan tanaman sayuran yang lain, seperti kacang panjang, bayam, timun, tomat, kangkung darat dan lain-lain. Dari berbagai tanaman sayuran tersebut masih tetap dikembangkan oleh petani di Desa Bulolohe, namun tidak sama perkembangannya dengan tanaman terong. Keberlanjutan budi daya tanaman terong karena adanya dukungan dari pedagang untuk memasarkan produkasinya ke pelbagai daerah dengan lancar. Di kalangan petani, pasar menjadi penting karena produksi yang melimpah bukan jaminan meningkatkan pendapatan petani, tetapi kondisi pasar yang baik dapat memengaruhi peningkatan pendapatan petani.

Selain tanaman terong yang telah melembaga dalam masyarakat petani di Desa Bulolohe, maka ada pula tanaman sayuran yang pernah populer seperti, tanaman cabe besar (lombok). Tanaman cabe besar dengan sistem mulsa plastik pertama kali dikembangkan di Dusun Bulolohe pada lahan sawah pinggir jalan poros Bulolohe-Anrang. Teknologi sistem mulsa plastik ini masuk ke Desa Bulolohe dibawa oleh putra desa Bulolohe yang telah menyelesaikan studi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada 1995. Menjelang wisuda sarjana (S1) putra desa tersebut belajar budi daya cabe besar di daerah Muntilan Kabupaten Magelang Jawa Tengah. Dengan bekal pengetahuan lapangan yang didapatkan dari seorang petani cabe di Muntilan, sehingga putra desa tersebut termotivasi melakukan penanaman cabe di daerah kelahirannya di Desa Bulolohe. Meskipun bukan berlatar belakang pendidikan pertanian, bukan menjadi kendala untuk mencoba dan menyebarkan teknologi mulsa plastik tersebut dalam lingkungan keluarga sendiri.

Tanaman cabe dengan sistem mulsa plastik yang ditanam sebanyak 2000 pohon pada 1995 cukup berhasil meraih keuntungan spektakuler. Melambungnya harga cabe di pasar dalam negeri hingga tembus Rp. 50.000,- per kilogram dan terbatasnya produksi di sentra tanaman cabe di Indonesia, sehingga kenaikan harga cabe dapat dinikmati hasilnya. Dengan tingginya harga cabe besar dan terbatasnya produksi ketika itu menjadi perhatian pemerintah dan membahasnya dalam rapat terbatas di Istana Negara di era pemerintahan Presiden Soeharto. Pembahasan terkait upaya mengatasi kelangkaan cabe di pasar lokal dan regional. Setiap pemerintah daerah diinstruksikan untuk

mengatasi kelangkaan cabe dengan melakukan penanaman cabe di daerahnya. Mungkin sekali dalam sejarah dan momentum yang tepat pada saat menanam cabe karena di panen dengan harga tinggi, sehingga Desa Bulolohe dikenal sukses pertama kali menanam cabe besar dengan sistem mulsa plastik di Sulawesi Selatan.

Dengan keberhasilan ini diapresiasi oleh Bupati Bulukumba, Drs. A. Patabai Pabokori dengan melakukan kunjungan ke lokasi tanaman cabe dan berdialog secara langsung dengan pemilik tanaman cabe A. Nai Maninriang. Dari hasil kunjungannya, Bupati mengatakan bahwa usaha menanam cabe dengan teknologi mulsa plastik perlu dilanjutkan, semoga petani lain juga dapat mengadopsi dan menanam di lahan sawahnya sendiri. Pada 1996 petani di Desa Bulolohe mulai mengadopsi teknologi mulsa plastik dalam menanam cabe, yang dilakukan sebanyak 15 petani pada lahan sawahnya sendiri. Penyuluh pertanian lapangan juga mulai menyewa lahan sawah petani di Desa Bulolohe untuk lokasi tanaman cabe. Kegiatan menanam cabe cukup ramai dilakukan sehingga banyak orang dari luar Desa Bulolohe datang untuk melihat kegiatan tersebut, karena merupakan teknologi baru dalam menanam cabe besar. Kunjungan para penyuluh pertanian lapangan yang berasal dari Kabupaten Bulukumba sendiri dan Kabupaten Enrekang, menambah jumlah pengunjung untuk melihat secara langsung tanaman cabe besar dengan sistem mulsa plastik di Desa Bulolohe.

Tanaman cabe besar sebagai kegiatan usaha ekonomi baru di Desa Bulolohe tidak dilakukan secara merata di tingkat petani. Hal ini karena yang mengadopsi teknologi tersebut hanya petani yang mampu membeli sarana produksi seperti pupuk, pestisida

dan mulsa plastik. Selain itu, diperlukan keterampilan tertentu dalam melakukan budi daya cabe besar, yang belum tentu dimiliki petani lain. Petani yang takut risiko dan takut gagal tidak antusias menanam cabe, meskipun harga pasar cukup baik. Terbatasnya areal tanaman cabe besar di Desa Bulolohe setiap tahun menjadi kendala bagi pedagang dari luar untuk melakukan kontrak pembelian cabe. Termasuk ketidakmampuan petani dalam menjaga kualitas dan kontinuitas produksi cabe sesuai yang dibutuhkan pasar. Berbeda dengan petani cabe di Kabupaten Brebes Jawa Tengah, yang mampu menjaga kualitas dan kontinuitas produksi cabe sehingga mendapat kontrak pemasaran dari pihak industri mie instan. Jika ada penanaman cabe maka produksinya dipasarkan oleh pedagang lokal bersamaan dengan pemasaran terong, kacang panjang, timun, bayam, kangkung dan lain-lain. Tanaman sayur seperti kacang panjang, timun, bayam, kangkung yang ditanam di Desa Bulolohe bukan merupakan tanaman populer, karena kontribusinya dalam meningkatkan pendapatan petani masih sangat terbatas. Tanaman tersebut dikembangkan dalam areal yang sempit dan belum menjadi usaha ekonomi produktif yang berorientasi pasar.

Dengan adanya kendala terkait kontinuitas produksi cabe di Desa Bulolohe, maka pada 1997 Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Bulukumba melakukan pengembangan tanaman cabe besar. Lokasinya di Desa Tanah Harapan dalam kompleks pertanian Ganjengnge pada lahan sawah 2 ha. Bersamaan dengan itu petani dari Desa Bijawang ikut pula mengembangkan tanaman cabe besar secara swadaya di lahan sawahnya sendiri. Panen perdana cabe di Ganjengnge dilakukan oleh pejabat dari Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten

Bulukumba, karena dinilai sukses melaksanakan instruksi pemerintah dalam mengatasi kelangkaan cabe besar di pasar. Sementara petani di Desa Bijawang juga berhasil meningkatkan pendapatannya dari budidaya cabe, sehingga melakukan penanaman secara berkelanjutan.

Dalam perkembangannya sebagai usaha ekonomi baru di Desa Bulolohe, penanaman cabe besar hanya berlangsung selama 5 tahun, termasuk di Desa Bijawang. Hal ini karena selain meningkatnya harga mulsa plastik, juga karena fluktuasi harga cabe besar yang naik-turun serta berkembangnya areal pertanaman cabe baru di luar Kabupaten Bulukumba. Dampaknya produksi cabe besar mengalami peningkatan sehingga berpengaruh terhadap menurunnya harga cabe di pasar lokal. Dengan melihat kondisi pasar dalam kaitannya dengan adopsi inovasi teknologi, maka budi daya cabe melalui teknologi mulsa plastik cukup menarik untuk dicermati. Secara teoretis orang yang mendapatkan keuntungan dari adopsi inovasi teknologi adalah orang yang paling terakhir, sementara dalam budidaya cabe besar dengan teknologi mulsa plastik justru yang mendapatkan keuntungan adalah orang yang pertama menerapkannya. Dalam kultur orang Bugis dianjurkan bahwa orang yang pertama melakukan sesuatu biasanya lebih berhasil daripada yang terakhir melakukannya. Demikian yang terjadi pada usaha ekonomi budi daya cabe besar dengan teknologi mulsa plastik di Desa Bulolohe, yang pertama kali memulai mengembangkannya maka itulah yang meraih keuntungan.

D. Tanaman Buah-Buahan

Secara umum tanaman buah-buahan sudah lama dikembang-

kan petani di Desa Bulolohe terutama tanaman rambutan, durian, mangga, pisang, manggis dan pepaya kalifornia. Dalam pengembangannya belum dikelola sebagai usaha ekonomi produktif yang dapat menambah pendapatan petani. Petani yang menanam buah-buahan hanya sekedar memenuhi kebutuhan keluarga dan kerabat yang berkunjung pada waktu panen buah-buahan. Petani belum mengembangkan dalam bentuk usaha agribisnis buah yang dapat meningkatkan pendapatan mereka. Komoditas hortikultura khususnya buah-buahan memiliki prospek cerah di sektor pertanian. Pengembangan buah-buahan dalam bentuk agribisnis dan agroindustri sangat baik kedepannya karena permintaan terhadap komoditas ini akan meningkat baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri (Ariyanto, 2006: 12). Jika panen buah-buahan berlangsung di Desa Bulolohe tampaknya desa ini ramai dikunjungi banyak orang terutama pada hari Sabtu dan Minggu. Buah-buahan memiliki daya tarik sehingga banyak di antara orang perkotaan memanfaatkan waktu liburnya dengan mengunjungi petani yang sementara panen buah.

Tanaman buah yang sedikit berorientasi pasar adalah tanaman rambutan. Hal ini karena rambutan yang ditanam sudah mengalami transformasi dari rambutan hutan menjadi rambutan okulasi seperti rambutan lengkung. Bibit rambutan lengkung ini didatangkan dari sentra bibit buah-buahan dari Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. Selain itu, ada pula bibit rambutan yang didatangkan dari pohon induk yang ada di Desa Balangpesoang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Belakangan ini petani mendatangkan tanaman rambutan lengkung dari daerah Bili-bili Kabupaten Gowa. Petani memilih rambutan lengkung karena memiliki nilai

ekonomi yang berbeda dengan rambutan lain seperti rambutan Aceh. Harga rambutan lengkeng lebih mahal dari rambutan lain, buahnya manis serta tahan lama, sehingga dapat dipasarkan sampai ke Makassar. Rambutan lengkeng asal Desa Bulolohe sudah mulai juga dipasarkan ke Kabupaten Selayar, yang merupakan kabupaten tetangga dengan Kabupaten Bulukumba.

Sepintas tampak bahwa tanaman rambutan lengkeng ini belum merupakan produk unggulan Desa Bulolohe, namun semangat petani untuk menanam rambutan perlu diapresiasi dengan baik. Secara perlahan-lahan Desa Bulolohe mulai dikenal oleh pedagang buah sebagai desa penghasil buah rambutan. Pada waktu panen rambutan dan manggis banyak pedagang buah mengunjungi Desa Bulolohe, dengan membawa harga yang baik untuk buah rambutan dan manggis. Permintaan buah rambutan dan manggis termasuk cukup tinggi, namun tidak seimbang dengan populasi yang dipelihara petani. Petani masih terbatas dalam melakukan penanaman buah-buahan karena nanti petani lain menjual dengan harga mahal baru mereka juga termotivasi untuk melakukan penanaman buah-buahan.

Dalam pengembangan tanaman buah-buahan di Desa Bulolohe, tampak adanya sikap latah dari petani, yang hanya menanam tanaman buah karena mengikuti petani lain yang lebih duluan berhasil. Sikap latah petani ditemukan dengan kebiasaan menanam tanaman buah-buahan tetapi tidak serius melakukan pemeliharaan sampai berproduksi. Bahkan cukup banyak tanaman buah-buahan yang diterlantarkan pemiliknya, sehingga tidak memberikan hasil yang dapat menambah pendapatan selaku petani. Tanaman lain yang memiliki prospek ekonomi yang baik di Desa Bulolohe adalah tanaman petai. Tanaman ini tampak mulai

langka di desa, termasuk di Desa Bulolohe. Sementara permintaan buah petai dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang tinggi di pasar lokal dan regional. Walaupun demikian, permintaan buah petai tidak dapat dipenuhi karena dalam pengembangannya hanya sebatas tanaman pagar. Populasinya juga terbatas dan berangsur punah karena penyakit batang yang menyerang tanaman petai tersebut. Dengan demikian petani tidak mampu mempertahankan populasi tanaman petainya, meskipun harganya cukup mahal di pasar.

E. Perkebunan

Dilihat dari usaha ekonomi masyarakat di sektor perkebunan di Desa Bulolohe, tampak adanya berbagai jenis tanaman perkebunan yang pernah dikembangkan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena tersedianya lahan perkebunan milik warga masyarakat. Berdasarkan Profil Desa Bulolohe tahun 2020, terdapat lahan perkebunan seluas 150,50 ha. Kegiatan usaha ekonomi di sektor perkebunan yang paling lama adalah tanaman kopi, yang sama lamanya dengan kegiatan menanam padi di persawahan. Dalam hal budi daya tanaman kopi, dijelaskan di dalam tulisan Heddy Shri Ahimsa Putra (1988: 64) dalam buku *“Minawang: Hubungan Patron-Klien di Sulawesi Selatan”*, bahwa di luar hasil dari padi dan jagung, orang Sulawesi Selatan juga mendapat penghasilan dari tanaman kopi. Tanaman kopi mulai masuk di kawasan Sulawesi Selatan pada 1830-an, dan semenjak itu penduduk semakin giat mengusahakan tanaman tersebut karena hasilnya cukup menguntungkan.

Di Desa Bulolohe tidak diketahui secara pasti kapan warga masyarakat mulai menanam kopi. Akan tetapi berdasarkan

informasi dari HAB (73 tahun) yang diwawancarai pada 6 Juli 2021, yang merupakan generasi kedua yang menanam kopi mengatakan bahwa, warga masyarakat di Desa Bulolohe mulai menanam kopi pada 1950. Lokasi tanaman kopi ketika itu di Desa Bulolohe terdapat di pinggiran kawasan hutan Anrang, yang sekarang ini dikenal dengan wilayah Dusun Parukku dan Dusun Abbatungge. Sebagai petani tradisional dalam menanam kopi tanpa disertai dengan uji coba lahan yang akan ditanami. Penduduk desa hanya memperkirakan saja tanah yang akan ditanami kopi. Tanah yang ditanami kopi merupakan daerah pinggiran hutan yang telah dibabat dan dibersihkan kayunya langsung ditanami kopi. Tanaman kopi di Desa Bulolohe hanya merupakan tanaman perkebunan rakyat, yang pengelolannya masih bersifat tradisional, sehingga kurang memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi masyarakat.

Sejak munculnya tanaman cengkih sekitar tahun 1980, maka secara berangsur-angsur tanaman kopi mulai ditinggalkan di Desa Bulolohe. Populasi tanaman kopi yang ada saat ini hanya ditanam sebatas pagar kebun dalam jumlah yang terbatas, sehingga bukan lagi menjadi usaha ekonomi masyarakat di sektor perkebunan. Dengan berakhirnya tanaman kopi maka tanaman yang cukup populer dikembangkan petani di Desa Bulolohe adalah tanaman cengkih. Petani seolah-olah terhipnotis dengan harga cengkih yang tinggi dan menggiurkan, sehingga banyak tanaman kopi yang masih produktif dikorbankan dengan cara dimusnahkan untuk diganti dengan tanaman cengkih. Tanaman kopi yang ada di kawasan Parukku dan Bulolohe serentak dihilangkan dan lokasi bekas tanaman kopi diganti tanaman cengkih. Keberadaan tanaman

cengkih cukup memberikan perubahan kehidupan petani sejalan dengan meningkatnya harga cengkih di pasar umum.

Meningkatnya pendapatan petani cengkih memberikan implikasi terhadap menguatnya hasrat petani untuk memiliki barang elektronik, seperti televisi, kulkas, kipas angin dan lain-lain. Kepemilikan petani dengan barang elektronik tersebut hanya merupakan bentuk perilaku konsumtif, karena untuk memanfaatkan barang tersebut harus disertai dengan ketersediaan aliran listrik. Sementara aliran listrik ketika itu belum terpasang di rumah penduduk. Selain itu banyak petani termotivasi untuk menyekolahkan anaknya sampai jenjang perguruan tinggi, karena tersedianya biaya pendidikan yang bersumber dari penjualan cengkih. Bertahannya harga cengkih ini menarik orang dari kota Bulukumba dan kota Ujung Pandang (kini kota Makassar) untuk menanam cengkih di Desa Bulolohe. Dengan kekuatan modal yang dibawa dari kota masuk ke Desa Bulolohe memberi dampak pada peralihan penguasaan lahan perkebunan untuk tanaman cengkih melalui transaksi jual-beli. Petani yang kurang berminat menanam cengkih dan membutuhkan sejumlah uang, maka dengan mudah melepaskan lahan mereka kepada orang kota untuk ditanami cengkih. Berawal dari daya tarik tanaman cengkeh ini, sehingga cukup marak peralihan kepemilikan lahan pertanian dari petani Desa Bulolohe kepada orang kota yang melakukan usaha ekonomi di sektor perkebunan cengkih.

Sebagai usaha ekonomi masyarakat, tanaman cengkih tidak hanya dikembangkan oleh petani di Desa Bulolohe. Akan tetapi, dikembangkan pula oleh orang-orang dari kota yang merupakan pegawai negeri sipil, pensiunan, pengusaha dan lain-lainnya. Dalam perkembangannya, tanaman cengkeh selama 10 tahun

(1980-1990) mengalami fluktuasi harga dengan menurunnya harga cengkih di pasar umum. Petani cengkih ada yang berbalik arah dengan menanam kakao (coklat) dengan memusnahkan tanaman cengkehnya. Sementara petani lain masih ada yang mempertahankan tanaman cengkihnya meskipun dengan harga murah. Ketika harga kakao mengalami puncak keemasannya pada waktu krisis tahun 1998, maka tanaman cengkih menjadi redup di Desa Bulolohe dan pada puncaknya banyak tanaman cengkih diterlantarkan petani. Petani cengkih tidak mendapat keuntungan ekonomi sebagaimana ketika harga cengkih membaik di pasar umum. Fenomena membaiknya harga komoditi perkebunan mendorong petani di Desa Bulolohe untuk selalu melakukan rotasi tanaman, seperti dari tanaman kopi ke tanaman cengkih dan selanjutnya dari tanaman cengkeh ke tanaman kakao.

Keberadaan tanaman kakao di Desa Bulolohe cukup dinikmati hasilnya bagi petani, karena dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Seorang petani kakao, SDM (54 tahun) yang diwawancarai pada 7 Juli 2021, mengatakan bahwa, keuntungan menanam kakao karena selain cepat dipanen juga setiap bulan berbuah, sehingga hasilnya dapat dinikmati sepanjang tahun. Jika dibandingkan dengan tanaman cengkih yang hanya dipanen sekali dalam setahun cukup membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan hasilnya. Walaupun demikian tanaman cengkih masih ditemukan di Desa Bulolohe, namun petani ketika itu tetap dominan menanam dan memelihara kakao seiring dengan gencarnya anjuran pemerintah untuk menanam kakao. Diakui oleh masyarakat setempat bahwa tanaman kakao banyak memberikan perubahan dalam kehidupan petani, terutama peningkatan pendapatan yang dihasilkan dari produksi kakao.

Perkembangan ekonomi masyarakat di Desa Bulolohe melalui sektor perkebunan dengan tanaman kakao sangat tampak dalam memenuhi kebutuhan sarana transportasi berupa motor. Melalui tanaman kakao cukup banyak petani yang sukses membangun rumah dan membiayai anak-anaknya sampai perguruan tinggi. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan barang elektronik berupa televisi dan peralatan rumah tangga yang digerakkan oleh tenaga listrik, seperti *rice cooker* dan *dispenser*.

Tanaman kakao ini diusahakan secara meluas di Desa Bulolohe, yang tidak terbatas pada lahan perkebunan saja. Akan tetapi juga dikembangkan pada lahan yang sempit di belakang rumah penduduk sebagai tanaman pekarangan. Dari berbagai tanaman perkebunan yang pernah diusahakan penduduk Desa Bulolohe sebagai usaha ekonomi masyarakat, maka tanaman kakao inilah yang paling memasyarakat dibandingkan dengan tanaman cengkih, lada, kopi dan kelapa. Dalam hal pemasaran kakao dapat dipastikan tidak mengalami kesulitan, karena petani kakao tidak membawa ke pasar hasil produksinya untuk dijual tetapi pedagang pengumpul yang berkunjung membeli di rumah petani. Kemudahan dalam pemasaran kakao ini menjadi salah satu motivasi bagi petani untuk menanam kakao, sehingga dari tahun ke tahun populasi tanaman kakao semakin berkembang. Perkembangan tanaman kakao mengalami puncaknya pada 2000-2007, ketika tanaman kakao masih produktif menjadi tanaman perkebunan unggulan di Desa Bulolohe. Setelah tanaman kakao ini mengalami ketenarannya sebagai usaha ekonomi masyarakat di sektor perkebunan, ternyata tidak dapat bertahan dan berkelanjutan karena munculnya hama tanaman kakao, yang dikenal dengan penggerek buah kakao (PBK).

Dengan adanya PBK yang sulit diatasi baik secara alami maupun kimiawi sehingga banyak petani menyerah dan tidak memelihara lagi tanaman kakao. Petani memusnahkan tanaman kakao di kebunnya dan melakukan pergantian tanaman, seperti tanaman cengkih dan tanaman buah-buahan. Begitu dahsyatnya PBK ini sehingga sulit lagi kita temukan populasi tanaman kakao di Desa Bulolohe. Biji kakao yang selama ini di jemur di pinggiran jalan desa, kini sulit lagi kita temukan karena populasinya tidak ada lagi di desa. Pedagang kakao yang biasanya mengunjungi rumah petani kakao di sore hari, tampaknya tidak ditemukan lagi untuk membeli biji kakao yang sudah kering. Meskipun era kakao telah berakhir, namun petani di Desa Bulolohe tetap semangat mengelola lahan perkebunannya dengan mengembangkan tanaman yang bernilai ekonomi atau berorientasi pasar, seperti tanaman lada, pala, porang, manggis, pepaya kalifornia, pisang dan lain-lain. Tanaman dalam proses pengembangan adalah tanaman pala dan porang, yang diprediksi akan menjadi usaha ekonomi baru masyarakat di Desa Bulolohe.

F. Peternakan dan Perikanan

Kegiatan usaha ekonomi masyarakat di sektor peternakan di Desa Bulolohe masih merupakan usaha ekonomi tradisional yang kurang berorientasi pasar, karena hasil peternakan cenderung untuk memenuhi konsumsi rumah tangga. Dilihat dari perkembangan usaha peternakan di Desa Bulolohe, maka salah satu usaha peternakan yang masih bertahan adalah usaha peternakan sapi. Pada saat penelitian berlangsung pada 2021, terdapat populasi ternak sapi sebanyak 431 ekor dengan jumlah

pemilik adalah 160 orang. Populasi ternak besar seperti, kerbau, kuda dan kambing sudah jarang ditemukan di Desa Bulolohe. Hal ini karena adanya transformasi penggunaan tenaga hewan menjadi tenaga mesin dalam mengolah lahan persawahan. Jika sebelumnya dalam mengolah lahan sawah menggunakan kerbau atau kuda, maka kini beralih dengan menggunakan traktor. Selain itu petani di Desa Bulolohe sudah tidak tertarik memelihara kerbau dan kuda, karena perkembangbiakannya sampai berproduksi cukup lama dibandingkan dengan memelihara sapi. Dengan waktu yang lama baru berproduksi sehingga secara ekonomi tidak memberi keuntungan kepada peternak kerbau dan kuda serta implikasinya populasi ternak kerbau dan kuda mendekati kepunahan.

Bertahannya usaha peternakan sapi, selain karena cepat berkembang biak juga karena harganya semakin tinggi nilai jualnya di pasar umum setiap tahun. Hal ini juga karena didukung dengan teknik inseminasi sehingga mendorong perkembangan populasi ternak sapi di Desa Bulolohe. Istilah inseminasi di kalangan peternak sapi di Desa Bulolohe dikenal dengan kawin suntik. Himbauan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba kepada para peternak sapi untuk melarang memotong sapi betina yang produktif, tampaknya memberikan kontribusi bagi kelangsungan produksi ternak sapi. Dengan himbauan tersebut sehingga populasi sapi betina dapat dipertahankan di Desa Bulolohe. Meskipun usaha ternak sapi sering mengalami gangguan, dengan munculnya pencurian ternak sapi namun usaha inilah yang merupakan primadona bagi peternak sapi.

Dikatakan primadona karena bagi petani yang memiliki ternak sapi sangat mudah mereka uangkan sama seperti emas yang mudah ditukar dengan uang. Dengan gencarnya program inseminasi pada ternak sapi sehingga kegiatan beternak sapi di Desa Bulolohe merupakan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Hal ini karena usaha tersebut secara nyata dapat meningkatkan pendapatan warga masyarakat, terutama bagi para peternak sapi. Berdasarkan pengamatan bahwa kegiatan beternak sapi hanya merupakan usaha sampingan saja, karena secara umum pekerjaan utama penduduk di Desa Bulolohe adalah petani sawah dan berkebun.

Dalam pengembangan usaha peternakan telah mengalami kemajuan, yaitu transformasi dari sistem gembalaan menjadi sistem kandang. Jika selama ini ternak sapi dipelihara secara gembalaan pada lahan tertentu, namun kini ternak sapi secara bertahap mulai dikandangkan di sekitar rumah penduduk. Adapun luas lahan gembalaan yang masih bertahan yang letaknya terpencar sesuai pemilik lahannya adalah seluas 10,00 ha. Konsekuensi dari sistem kandang ini maka para petani harus memelihara rumput gajah dan sejenisnya untuk makanan ternak yang mereka pelihara. Rumput gajah sebagai makanan ternak sapi biasanya ditanam di pinggir kebun atau di pinggir sungai. Adapun luas tanaman pakan ternak (rumput gajah) adalah seluas 10,00 ha, dengan produksi hijauan makanan ternak 3.00 ton/ha.

Usaha ternak sapi di Desa Bulolohe terkadang tidak berjalan mulus, bahkan sering terjadi konflik antara pemilik ternak dan pemilik kebun. Hal ini sering kali dialami oleh peternak sapi yang tidak memiliki kebun, sehingga cukup kesulitan untuk menanam rumput gajah dalam memenuhi kebutuhan makanan

ternak sapinya. Untuk memenuhi makanan ternaknya terpaksa mereka mengambil rumput biasa pada kebun orang lain tanpa diminta, sehingga terjadi benturan dengan pemilik kebun yang juga membutuhkan rumput untuk makanan ternaknya. Kejadian seperti ini sangat kelihatan ketika musim kemarau berlangsung di Desa Bulolohe, yang berdampak pada perebutan rumput makanan ternak sapi. Bahkan terkadang selama musim kemarau berlangsung, peternak sapi dari luar Desa Bulolohe datang untuk mengambil rumput pada lahan atau kebun milik warga Desa Bulolohe dan sekitarnya.

Selain usaha ternak sapi yang cukup berkembang di Desa Bulolohe, maka usaha ternak lain yang dipelihara secara tradisional adalah ternak ayam kampung. Ternak ayam kampung dilakukan secara merata di kalangan penduduk Desa Bulolohe, sehingga jika dicermati hampir semua rumah tangga memelihara ayam kampung. Pemeliharaan ayam kampung merupakan usaha ternak kecil, yang termasuk paling lama dilakukan penduduk Desa Bulolohe. Dilihat dari aspek ekonomi maka ternak ayam kampung memiliki prospek yang baik dikembangkan sebagai usaha unggulan, karena harganya cukup stabil di pasar umum. Berdasarkan temuan lapangan menunjukkan bahwa ternak ayam di Desa Bulolohe belum dikembangkan secara komersial yang berorientasi pasar. Secara umum ayam yang dipelihara hanya sekadar memenuhi kebutuhan keluarga, meskipun terbuka peluang pasar yang semakin berkembang untuk dipenuhi.

Tantangan peluang pasar untuk ayam kampung tidak direspons oleh masyarakat Desa Bulolohe, sehingga usaha ternak ayam kampung tepat jika dikatakan hidup segan mati tak mau. Deskripsi tentang keuntungan ekonomi dari ternak ayam

kampung tidak begitu gencar disosialisasikan ke masyarakat, sehingga warga masyarakat juga kurang merespons untuk mengembangkan secara komersial. Warga masyarakat Desa Bulolohe lebih banyak menerima pengetahuan terkait dengan pengembangan ternak modern, seperti ternak ayam pedaging dan petelur karena berproduksi secara cepat dibandingkan dengan ayam kampung. Dalam pengembangan ternak modern membutuhkan pengetahuan dan teknologi sehingga sulit diadaptasi oleh petani karena terbatasnya pengetahuan yang dimiliki. Di sisi lain peternak sulit menerima perubahan sehingga bersikap utamakan selamat (*safety first*), karena setiap perubahan merupakan ancaman bagi dirinya yang berakhir dengan takut gagal dalam usaha peternakannya. Peternakan ayam pedaging dan petelur sudah banyak yang pernah dilakukan oleh warga masyarakat Desa Bulolohe, namun belum ada yang berhasil dan berkelanjutan sebagaimana peternakan ayam yang dikelola orang lain secara komersial.

Berdasarkan wawancara dengan seorang peternak, NRN (47 tahun) pada 7 Juli 2021 menyatakan bahwa, kegagalan yang dialami dalam usaha ternak ayam petelur terkait dengan rendahnya pengetahuan dan keterampilan dalam pemeliharaan ternak ayam yang sedang dikembangkan. Pengetahuan terkait dengan kebersihan kandang dan keterampilan menangani gangguan penyakit yang secara tiba-tiba menyerang ternak ayamnya. Kegagalan yang dialami sehingga ia tidak melanjutkan lagi usaha peternakan ayamnya. Tindakan peternak untuk tidak melanjutkan usaha peternakannya merupakan tindakan rasional. Hal ini relevan dengan pendapat Homans dalam G. Ritzer (2003 : 78) bahwa tindakan sosial dilihat ekuivalen dengan tindakan

ekonomis. Suatu tindakan adalah rasional, berdasarkan perhitungan untung-rugi. Dengan demikian, semakin besar keuntungan yang diperoleh peternak ayam dalam mengembangkan usahanya maka tindakannya akan diulangi karena memberi manfaat bagi dirinya. Akan tetapi jika tidak memberi keuntungan kemungkinan tindakannya tidak akan diulangi.

Masyarakat desa dalam mengembangkan usaha ekonominya masih ditemukan sikap latah, yang hanya ikut-ikutan melakukan usaha ternak ayam hanya karena melihat di lingkungan tempat tinggalnya banyak yang beternak ayam. Sikap latah ini banyak menimbulkan kerugian karena tidak didasari dengan pengetahuan dan keterampilan dalam menjalankan usaha peternakannya. Tersendatnya usaha ternak ayam pedaging dan petelur di Desa Bulolohe bukan merupakan sesuatu hal yang baru terjadi, akan tetapi masyarakat sudah sering kali melakukannya namun belum berhasil. Implikasinya, kebutuhan daging ayam dan telur bagi masyarakat desa harus didatangkan dari luar desa karena belum mampu di produksi di Desa Bulolohe. Harapan bahwa usaha peternakan ayam dapat membantu meningkatkan pendapatan dan perkembangan ekonomi masyarakat, tampaknya belum dapat terwujud secara nyata. Transformasi teknologi budi daya ayam pedaging dan petelur tampaknya belum dikuasai oleh peternak di Desa Bulolohe. Termasuk keterbatasan dana pengembangan usaha peternakan yang dikembangkan masyarakat sehingga usaha peternakan modern ini banyak yang tidak berkelanjutan.

Berkaitan dengan usaha peternakan ayam pedaging dan petelur yang banyak mengalami kegagalan, maka kegagalan yang sama juga terjadi pada usaha di sektor perikanan. Desa

Bulolohe merupakan desa dataran rendah yang berada pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Dengan ketinggian tersebut sehingga usaha perikanan yang potensial dikembangkan adalah ikan air tawar, seperti ikan mas, mujair, nila, dan ikan lele. Pengembangan usaha perikanan darat sudah lama dilakukan oleh petani seperti, budi daya ikan mas dan ikan mujair, namun dalam pengelolaannya masih bersifat tradisional dan belum berorientasi pasar. Pemeliharaan ikan tersebut dengan sistem mina padi karena ditunjang dengan tersedianya air dari irigasi teknis Sungai Balantieng, sehingga memungkinkan memelihara ikan air tawar selama 12 bulan. Meskipun tersedia air tawar untuk budi daya ikan namun usaha tersebut tidak berkelanjutan, karena sikap latah petani seperti yang dialami peternak ayam. Mereka memelihara ikan hanya karena terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya, bukan karena dimotivasi dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki untuk meningkatkan pendapatan dari usaha perikanan.

Setelah ikan mas dan ikan mujair tidak dikembangkan lagi, maka pada 1995 mulai dibudidayakan ikan nila dan ikan lele sebagai usaha ekonomi masyarakat yang baru di sektor perikanan. Budi daya ikan nila dan ikan lele cukup diminati masyarakat karena cepat berkembang biak dibandingkan dengan ikan mas atau ikan mujair. Secara umum hasil perikanan darat, seperti ikan nila dan ikan lele hanya untuk konsumsi keluarga dan masih kurang untuk dijual ke pasar. Usaha perikanan darat di Desa Bulolohe memiliki prospek ekonomi, karena didukung dengan adanya mata air dan rawa kecil untuk pengembangan perikanan darat. Akan tetapi, usaha ini belum dikelola masyarakat sebagai usaha yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomis. Dampaknya usaha

sektor perikanan tidak berkembang sehingga belum memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Bulolohe.

G. Industri dan Perdagangan

Sejak Desa Bulolohe menjadi desa definitif maka sektor pertanian belum mengalami transformasi dalam sektor industri. Oleh karena, lambatnya perubahan yang terjadi sehingga Desa Bulolohe masih tetap dominan sebagai desa pertanian di Kabupaten Bulukumba. Hal ini sesuai dengan pengamatan lapangan bahwa masyarakat Desa Bulolohe secara umum masih dominan bekerja di sektor pertanian. Jika terjadi perubahan di sektor pertanian ke sektor industri tampak sangat lambat dan walaupun terdapat perubahan bukan industri manufaktur yang terjadi, melainkan industri pengolahan hasil pertanian. Dilihat dari keberadaan industri yang merupakan usaha ekonomi masyarakat, maka salah satu industri di Desa Bulolohe adalah industri pengolahan minyak cengkih yang terletak di Dusun Abbatungge. Keberadaan industri minyak cengkih ini dikelola secara tertutup sehingga baik tenaga kerja maupun produksi dan pemasarannya tidak diketahui oleh pemerintah desa dan masyarakat. Masyarakat desa hanya mengetahui bahan bakunya yang berasal dari daun cengkih kering, yang diambil dari Desa Bulolohe sendiri maupun didatangkan dari luar desa, seperti beberapa desa penghasil cengkih dari Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.

Industri lain yang menjadi usaha ekonomi masyarakat di Desa Bulolohe adalah industri mebel, seperti pembuatan kursi tamu. Industri mebel ini masih dikelola secara perorangan

dalam produksi yang terbatas sesuai pesanan yang berasal dari warga masyarakat Desa Bulolohe atau dari luar masyarakat Desa Bulolohe. Dalam pembuatan kursi yang dikategorikan industri kecil berskala rumah tangga bahan bakunya didatangkan dari luar Desa Bulolohe, sehingga terkadang tidak berkelanjutan produksinya karena sangat tergantung dari bahan baku dari luar desa. Bahan baku, khususnya kayu sulit dipenuhi di desa karena tidak ada lagi hutan rakyat yang menyediakan kayu dan juga tidak mudah menebang kayu milik masyarakat untuk dijual kepada pengelola industri mebel. Dengan demikian, industri mebel di Desa Bulolohe dapat berlangsung produksinya apabila bahan bakunya tersedia meskipun didatangkan dari luar Desa Bulolohe. Minat masyarakat membeli kursi cukup tinggi karena pembayarannya tidak dalam bentuk kontan, melainkan dicicil sesudah panen padi. Dengan cara pembayaran cicilan seperti itu maka pemasaran kursi cukup berkembang dilihat dari meningkatnya pemesanan dari luar Desa Bulolohe. Meskipun kursi yang diproduksi mutunya sedikit lebih rendah dari kursi yang dijual di toko mebel di Bulukumba, namun karena pembayarannya dicicil sesuai panen maka minat masyarakat membeli kursi termasuk cukup tinggi khususnya dari luar Desa Bulolohe.

Berdasarkan wawancara dengan BS (49 tahun) selaku pengusaha mebel pada 7 Juli 2021 terungkap bahwa, mebel (kursi tamu) yang dihasilkan diminati oleh pembeli dari luar desa karena harganya lebih murah dibandingkan dengan harga mebel yang dijual di toko, apalagi pembayarannya bisa dicicil. Selain itu, bahan baku yang dipakai hampir sama kualitasnya dengan bahan baku dari kursi yang dijual di toko. Dikatakan lebih lanjut

bahwa puncak pemasaran kursi tamu tersebut adalah menjelang Hari Raya Idul Fitri yang berlangsung setiap tahun. Sebagaimana diketahui bahwa di masyarakat pedesaan ada kecenderungan yang berkembang bahwa menjelang Hari Raya Idul Fitri senantiasa memperlihatkan sesuatu yang baru, seperti kursi tamu yang baru. Meskipun pemasaran kursi tamu tersebut cukup bagus, namun usaha ini kurang berkembang saat ini karena meningkatnya harga bahan baku seperti kayu dan bahan baku lainnya. Terbatasnya kemampuan pengrajin mebel dalam memenuhi bahan baku yang diperlukan, sehingga mereka menghentikan produksinya dan beralih kepada usaha lain yang lebih menguntungkan. Harapan para pengrajin mebel untuk menciptakan Desa Bulolohe sebagai sentra produksi mebel, khususnya kursi tidak dapat diwujudkan.

Di Desa Bulolohe juga terdapat industri pengolahan batu kali secara tradisional, yang dilakukan penduduk desa yang bertempat tinggal di sekitar Sungai Balantieng. Pengolahan batu kali ini lebih banyak dilakukan oleh kaum perempuan sehingga aktivitas mereka tampak seperti industri rumah tangga. Pengolahan batu kali menjadi krikil merupakan usaha ekonomi masyarakat yang sudah cukup lama berlangsung di Desa Bulolohe, lokasinya di Dusun Balantieng. Sepintas usaha ini tidak terlalu berkembang, karena selain menggunakan peralatan sederhana dengan produksi yang terbatas, juga tidak mampu bersaing dengan pabrik pemecah batu yang menggunakan tenaga mesin. Penduduk Desa Bulolohe yang terlibat secara langsung dalam kegiatan pengolahan batu kali sebanyak 30 laki-laki dan 28 perempuan. Batu krikil yang dihasilkan dari hasil pengolahan batu kali ini dijual kepada masyarakat yang sementara

mengerjakan bangunan permanen atau kepada kontraktor lokal yang mengerjakan bangunan infrastruktur pemerintah. Sebagai usaha ekonomi masyarakat maka hasil dari industri batu kali ini tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Untuk menambah pendapatan mereka, maka pada musim panen padi ibu-ibu yang bekerja selaku pemecah batu kali beralih menjadi tenaga kerja pemanen padi. Meskipun industri batu kali ini telah lama menjadi kegiatan ekonomi masyarakat yang mendiami pinggiran sungai Balantieng, namun dilihat dari kehidupan mereka belum terpenuhi kesejahteraannya secara optimal.

Selain industri minyak cengkih, mebel dan industri batu kali yang telah dikenal oleh masyarakat luas, terdapat pula industri yang dalam proses perkembangan seperti industri pakaian, kerajinan, makanan, alat rumah tangga dan lain-lain. Munculnya industri pakaian ini sangat terkait dengan kontribusi Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Bulukumba dalam memberikan pelatihan menjahit bagi perempuan di Desa Bulolohe. Berdasarkan wawancara dengan ANS (41 tahun) selaku pengelola usaha industri pakaian pada 7 Juli 2021, mengatakan bahwa: dengan pendidikan keterampilan menjahit yang diperoleh dari Balai Latihan Kerja Kabupaten Bulukumba sangat membantu, sehingga dapat mengembangkan usaha menjahit pakaian di desanya. Dengan demikian, warga masyarakat tidak perlu lagi ke luar Desa Bulolohe jika ingin menjahit pakaian. Di Desa Bulolohe terdapat 2 unit usaha industri pakaian, yang dikelola oleh kaum perempuan sehingga terjadi transformasi tenaga kerja dari sektor domestik menjadi pekerja di sektor industri meskipun dalam proses usaha ekonomi yang baru berkembang.

Hal yang menarik dengan adanya industri makanan di Desa Bulolohe, yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan akan keberadaannya. Dimulai dari adanya warung makan yang dikelola oleh orang Jawa, yang tidak hanya melayani warga masyarakat Desa Bulolohe namun juga melayani dari luar Desa Bulolohe. Secara umum yang dilayani dari luar desa adalah para sopir *truck* yang mengangkut material bangunan menuju poros jalan Bulolohe-Tanete. Di Desa Bulolohe terdapat 3 unit usaha warung makan yang melayani masyarakat, termasuk 1 warung yang melayani anak sekolah dasar. Keberadaan warung makan memberikan implikasi kepada ibu rumah tangga di desa dengan mengurangi frekuensi memasak di rumah. Dalam kondisi tertentu terkadang hanya memesan makanan yang siap saji dari warung makan, sehingga kegiatan memasak di rumah menjadi berkurang. Fenomena ini merupakan kebiasaan baru dengan memesan makanan dari warung, sehingga mulai pula berkembang warung kue tradisional sebagai usaha ekonomi masyarakat di Desa Bulolohe. Ibu-ibu yang sebelumnya hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga mengalami perubahan dengan adanya mata pencaharian baru selaku penjual kue, sehingga dengan adanya industri makanan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Berbeda dengan usaha ekonomi masyarakat di sektor industri yang kurang berkembang. Di sektor perdagangan justru mengalami perkembangan yang cukup maju, seperti perdagangan hasil bumi dan usaha dagang barang campuran. Pedagang hasil bumi berkembang dari tahun ke tahun, seiring dengan perkembangan produksi komoditas pertanian, seperti gabah dan beras serta komoditas tanaman perkebunan, seperti

cengkih. Termasuk tanaman buah-buahan, seperti rambutan dan manggis yang diperdagangkan ke Makassar dan Selayar. Sedangkan produksi padi berupa gabah diperdagangkan keluar Kabupaten Bulukumba, yaitu ke Kabupaten Bone dan Sidenreng Rappang. Di Desa Bulolohe juga terdapat usaha perdagangan, seperti pedagang sarana produksi pertanian (saprodi), seperti pupuk dan pestisida, usaha dagang air minum dalam kemasan dan perdagangan gas elpiji. Usaha perdagangan pupuk dan pestisida telah lama berlangsung di Desa Bulolohe, yang bersamaan dengan perdagangan hasil bumi dan barang campuran.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari tidak mengalami kesulitan karena secara umum berbagai jenis barang kebutuhan masyarakat tersedia di Desa Bulolohe. Barang yang diperlukan cukup tersedia di toko swalayan yang berada di Desa Bulolohe sebagai representasi pasar modern. Keberadaan toko swalayan yang terletak pada batas Desa Bulolohe dengan Desa Bontomanai menimbulkan persaingan dengan usaha perdagangan barang campuran yang ada di sekitar toko swalayan. Pedagang barang campuran yang terlebih dahulu menempati daerah perbatasan kedua desa tersebut karena letaknya strategis dekat dengan pasar Desa Bontomanai. Keberadaan pasar Desa Bontomanai yang dekat dengan wilayah Desa Bulolohe sangat besar pengaruhnya dalam mendukung kegiatan perdagangan masyarakat. Produksi komoditi pertanian, perkebunan dan peternakan dipasarkan secara lokal di pasar Desa Bontomanai. Melalui transaksi perdagangan di pasar Desa Bontomanai lalu berkembang pedagang pengumpul hasil bumi di Desa Bulolohe. Pedagang pengumpul ini langsung membeli hasil produksi petani dan menjualnya di pasar lokal atau pasar kecamatan

dan kabupaten. Dengan demikian, usaha perdagangan dapat berkembang apabila terjadi dinamika pasar dalam masyarakat, baik pasar lokal, pasar dalam negeri maupun pasar mancanegara.

Secara ringkas dideskripsikan perkembangan usaha ekonomi masyarakat di Desa Bulolohe tahun 2020 sesuai sektor usaha dan jenis usaha yang dikembangkan serta kategori perkembangannya seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Perkembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Sektor dan Jenis Usaha di Desa Bulolohe Tahun 2020

Sektor/Bidang	Jenis Usaha	Kategori
Pertanian		
a. Sawah	Padi	Berkembang
	Jagung	Kurang berkembang
	Kacang tanah	Kurang berkembang
b. Sayuran	Terong	Berkembang
	Kacang panjang	Kurang berkembang
	Timun	Kurang berkembang
c. Buah-buahan	Kangkung	Kurang berkembang
	Rambutan	Berkembang
	Durian	Kurang berkembang
	Mangga	Kurang berkembang
	Manggis	Kurang berkembang
	Pisang	Berkembang
Perkebunan	Kopi	Tidak berkembang
	Kakao	Tidak berkembang
	Cengkeh	Berkembang
	Lada	kurang berkembang
	Porang	Proses perkembangan
Pernakan	sapi	Berkembang
	kerbau	Tidak berkembang
	kuda	Tidak berkembang
	ayam kampung	Berkembang
	ayam pedaging	Tidak berkembang
	ayam petelur	Tidak berkembang
	itik	Tidak berkembang

Sektor/Bidang	Jenis Usaha	Kategori
Perikanan	Ikan mas	Tidak berkembang
	Ikan mujair	Tidak berkembang
	Ikan nila	Kurang berkembang
	Ikan lele	Kurang berkembang
Industri	Minyak cengkih	Berkembang
	Mebel	Kurang berkembang
	Batu kali	Kurang berkembang
Perdagangan	Hasil bumi	Berkembang
	Barang campuran	Berkembang

Sumber: Diolah oleh Peneliti, Tahun 2021.

Berdasarkan Tabel 5.1 di atas menunjukkan bahwa perkembangan usaha ekonomi masyarakat di Desa Bulolohe masih didominasi oleh sektor pertanian dalam arti luas, seperti tanaman padi, sayuran, buah-buahan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Sedangkan usaha ekonomi masyarakat yang belum begitu berkembang adalah sektor industri dan perdagangan.

Dilihat dari perkembangan usaha ekonomi masyarakat di Desa Bulolohe berdasarkan jenis usaha yang dilakukan dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu: (1) berkembang, seperti usaha tanaman padi, terong, rambutan, pisang, cengkih, peternakan sapi, ayam kampung, industri minyak cengkih, perdagangan hasil bumi dan barang campuran; (2) kurang berkembang, seperti usaha tanaman jagung, kacang tanah, kacang panjang, timun, kangkung, durian, mangga, manggis, lada (merica), ikan nila dan lele, industri mebel dan batu kali; (3) tidak berkembang, antara lain usaha tanaman kopi, kakao, ternak kerbau, kuda, ayam pedaging dan petelur, itik, budi daya ikan mas dan ikan mujair; dan (4) proses perkembangan, seperti usaha tanaman pala dan porang.

Dari berbagai usaha ekonomi masyarakat di Desa Bulolohe sebagaimana dideskripsikan di atas mulai pertanian sawah, tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, tanaman perkebunan, usaha peternakan dan perikanan, industri dan perdagangan dalam keberlanjutannya sangat dipengaruhi perkembangan pasar. Melalui perkembangan pasar memaksa petani untuk menanam komoditi pertanian yang memiliki nilai jual tinggi. Implikasinya terjadi transformasi dari komoditi pertanian yang nilai jualnya rendah menuju komoditi pertanian dengan nilai jual tinggi. Terjadinya rotasi tanaman yang berlangsung selama ini di Desa Bulolohe tiada lain karena mengikuti dinamika pasar sebagai faktor determinan dalam usaha ekonomi masyarakat. Perkembangan ekonomi masyarakat di Desa Bulolohe sangat terkait dengan dinamika pasar. Alfred Marshal dalam Damsar & Indrayani (2018: 36) melihat pasar sebagai suatu mekanisme dalam penciptaan harga. Dalam ekonomi klasik mengaitkan pasar dengan proses pertemuan antara permintaan dan penawaran (penciptaan harga). Terciptanya harga memotivasi masyarakat, khususnya petani di Desa Bulolohe dalam melakukan kegiatan produksi pertaniannya.

Ada beberapa petani di Desa Bulolohe yang cukup jeli melihat harga komoditas di pasar, sehingga dalam melakukan produksi dalam usaha taninya dapat meraih keuntungan. Hal ini karena harga komoditasnya yang stabil setelah panen, seperti petani terong, lombok (cabe) termasuk petani cengkih yang memperoleh pendapatan spektakuler karena harganya mendadak naik mengikuti perkembangan pasar. Sementara di kalangan

wiraswasta terciptanya harga menjadi semangat untuk mendorong tumbuhnya kegiatan perdagangan, sehingga kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa dapat terpenuhi dengan lancar. Sebuah pasar akan berjalan dengan baik jika individu-individu di dalamnya bertindak sebagai pembeli dan sekaligus penjual. Ketika penjual menjual komoditas, maka penjual mendapatkan uang yang bisa dia gunakan untuk membeli barang-barang yang bisa memenuhi kebutuhannya (Damsar, 2010:116).

Perkembangan pasar di Desa Bulolohe sedikit mengalami kemajuan, karena untuk memperoleh barang kebutuhan tertentu tidak hanya melalui pasar tradisional yang mempertemukan antara pembeli dan penjual secara tatap muka (*face to face*). Akan tetapi barang-barang kebutuhan masyarakat dapat diperoleh melalui transaksi *online*. Maraknya transaksi *online* di kalangan kaum milenial di Desa Bulolohe, selain karena pengaruh iklan di televisi dan media sosial juga karena ada pengaruh Pandemi Covid 19. Perkembangan teknologi komunikasi melalui media *internet* telah mengubah cara orang berkomunikasi. Masyarakat dari kalangan milenial memiliki kepercayaan (*trust*) dengan pihak penjual barang, sehingga tanpa bertemu secara fisik dengan penjual dapat melakukan transaksi pembelian secara *online*. Dengan adanya saling percaya (*mutual trust*) dalam transaksi *online*, menunjukkan bahwa kaum milenial di Desa Bulolohe telah memiliki modal sosial. Modal sosial ini tidak tumbuh secara tiba-tiba, melainkan melalui proses transformasi masyarakat, yang ditandai dengan berkembangnya cara berpikir rasional karena didukung dengan tingkat pendidikan masyarakat yang semakin

baik. Selain itu, adanya kemudahan masyarakat di Desa Bulolohe dalam mengakses informasi dan teknologi sehingga memudahkan untuk memperoleh pengetahuan secara meluas tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

BAB VI

KEHADIRAN TEKNOLOGI DI DESA

Masuknya teknologi di Desa Bulolohe telah membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat. Berbagai program pemerintah yang dilakukan di desa, didalamnya tidak terlepas dari adanya unsur penerapan teknologi. Meskipun teknologi tersebut masih sederhana yang lazim dikenal dengan teknologi tepat guna. Sebagai salah satu desa pertanian di Kabupaten Bulukumba, maka teknologi yang dominan diintroduksi pemerintah dalam masyarakat adalah teknologi di bidang pertanian dalam arti luas. Termasuk teknologi pendukungnya, seperti teknologi pengolahan hasil pertanian. Selain itu tidak mengabaikan kehadiran teknologi yang lain, seperti teknologi informasi dan komunikasi serta teknologi energi dan listrik karena dapat memberikan kemudahan dalam kehidupan masyarakat. Pada awalnya teknologi diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia dan mempermudah manusia memenuhi segala kebutuhan hidupnya (Martono, 2016 : 217). Terkait dengan kehadiran teknologi di Desa Bulolohe, ada yang didatangkan dari luar desa melalui program pemerintah dan ada

pula yang diupayakan sendiri oleh masyarakat desa dengan tetap mendatangkan dari luar desa. Kemampuan masyarakat Desa Bulolohe untuk mandiri menciptakan teknologi belum tampak sebagai aktivitas baru, yang dapat melahirkan perubahan dalam masyarakat.

Berikut ini berbagai teknologi yang diintroduksi pemerintah dalam masyarakat Desa Bulolohe, yang telah membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat, antara lain:

A. Teknologi Pertanian

Pada 1980 pemerintah melakukan program revolusi hijau (*green revolution*) melalui program Bimbingan Massal (Bimas) untuk pertanian sawah dengan pola intensifikasi pertanian dengan penerapan Panca Usaha Tani. Dalam penerapannya dilakukan melalui pemilihan bibit unggul, pengolahan tanah yang baik, pemupukan yang tepat, pengendalian hama dan penyakit tanaman serta pengairan atau irigasi yang baik. Penerapan Panca Usaha Tani pada lahan persawahan di Kabupaten Bulukumba dikenal dengan Operasi *Lappo Ase*, yang dalam bahasa Bugis artinya tumpukan padi (Nain, 2018 : 90). Gerakan *Lappo Ase* merupakan kegiatan terpadu untuk meningkatkan produksi padi pada lahan persawahan tertentu. Dilaksanakan secara merata terhadap desa-desa pertanian sawah di Kabupaten Bulukumba, termasuk di Desa Bulolohe.

Selama 3 (tiga) tahun (1980-1983) gerakan *Lappo Ase* dilaksanakan di Desa Bulolohe, ternyata belum berjalan mulus karena adanya resistensi petani dalam bentuk protes kepada pemerintah desa. Protes yang dilancarkan oleh beberapa petani terkait dengan ketidakmampuan petani memenuhi persyaratan

yang ditawarkan oleh Gerakan *Lappo Ase*. Paket yang ditawarkan untuk dipenuhi dalam intensifikasi pertanian antara lain, penggunaan benih padi varietas unggul, pupuk kimia, pestisida dan insentif kredit produksi. Meskipun petani diberikan insentif usaha tani dalam bentuk kredit produksi dari bank yang ditetapkan pemerintah, namun tidak semua petani bersedia menerima insentif tersebut.

Petani di Desa Bulolohe tidak kompak menerima program *Lappo Ase*. Petani terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: (1) kelompok petani yang menerima program *Lappo Ase* dan (2) kelompok petani yang menolak program *Lappo Ase*. Menurut Scott (1994: 23) petani dengan teknologi baru cenderung bersikap resisten dengan mendahulukan keselamatan (*safety first*) dan berupaya untuk meminimalkan risiko (*minimizing risk*). Dari pemahaman ini maka teknologi sulit diterima karena masyarakat beranggapan bahwa perubahan yang dibawa oleh penerapan teknologi akan membawa ancaman yang akan mengguncang subsistensinya. Dengan sikap pesimistik masyarakat khawatir adanya kerusakan tatanan yang sudah mapan yang telah memberikan kebersamaan dalam komunitasnya.

Oleh karena itu, hanya petani yang mampu dan berani menanggung risiko yang akan menerapkan teknologi baru. Bagi petani yang menolak program *Lappo Ase* sering kali mendapat tindakan kekerasan dari oknum kepala desa. Bentuk kekerasan yang dilakukan adalah kekerasan fisik disertai tindakan mencabut tanaman padi varietas lokal di persawahan. Begitu kuatnya tekanan kepada petani yang menolak program revolusi hijau ini, sehingga memasuki musim tanam tahun 1983, petani mengalah lalu menyesuaikan diri untuk menerapkan program *Lappo Ase*.

Meskipun paket program *Lappo Ase* tidak semua diterapkan oleh petani terutama penggunaan pupuk berimbang. Hal ini karena selain terbatasnya biaya produksi dan pengetahuan petani juga karena belum terbiasa menggunakan pupuk berimbang untuk tanaman padinya.

Penerapan revolusi hijau di Desa Bulolohe melalui intensifikasi pertanian telah membawa perubahan-perubahan baru dalam kehidupan masyarakat disertai berbagai implikasi yang ditimbulkannya. Selama periode tahun 1980-2020 (40 tahun) terdapat beberapa perubahan penting di Desa Bulolohe, antara lain:

Pertama, teknologi benih padi. Penggunaan benih padi varietas unggul, memberikan dampak pada ketergantungan petani terhadap benih padi unggul setiap musim tanam, karena tidak bisa disediakan oleh petani atau diproduksi di desa sendiri. Kondisi ini menguntungkan kapitalis perbenihan baik pada level nasional maupun internasional. Asal mula benih padi varietas unggul yang ditanam petani di Desa Bulolohe didatangkan pemerintah dari *International Rice Research Institute (IRRI)* Filipina, yang oleh petani di Desa Bulolohe disebut dengan padi *iri (aseiri)* karena kesulitan menyebut padi dari *IRRI*.

Di daerah asalnya benih padi varietas modern tersebut membutuhkan waktu 10 tahun baru diterima petani di desa, sementara di Indonesia dimobilisasi untuk segera ditanam oleh petani. Menurut survei Umehara, tak seorang pun di desa itu yang mencoba varietas modern tersebut pada 1966, dan nanti pada 1976 sudah 100% petani menanam varietas modern (Hayami & Kikuchi, 1987: 134). Salah satu benih padi unggul dari *IRRI* yang paling banyak ditanam pada awal hingga beberapa

tahun pelaksanaan program *Lappo Ase* adalah varietas PB5 dan IR 64. Benih padi varietas unggul yang paling lama ditanam di Desa Bulolohe adalah IR 64, karena tahan terhadap hama wereng. Jenis benih padi varietas PB5 dan PB 64 yang dimobilisasi pemerintah kepada petani memberikan dampak kepada tersingkirnya benih padi varietas lokal.

Di lingkungan petani muncul budaya diam untuk tidak menyebutkan benih padi varietas lokal yang selama ini mereka tanam di sawah. Menguatnya mobilisasi perbenihan yang di-introduksi pemerintah, sehingga di kalangan petani tabu untuk mendiskusikan berbagai benih padi varietas lokal karena adanya ancaman kekerasan fisik dari pemerintah setempat. Dalam perkembangannya setelah tahun 1984 mengalami perubahan karena benih varietas unggul yang selama ini didatangkan dari luar, kini sudah bisa diproduksi dalam negeri, seperti varietas Membramo, Citarum dan Cisadane. Adapun benih padi varietas unggul yang ditanam di Desa Bulolohe sampai saat ini adalah varietas Ciliwung, Cigulis dan Invari. Terlepas dari tersedianya benih varietas unggul dalam negeri, tampak bahwa ketergantungan petani di Desa Bulolohe dengan benih padi varietas unggul sangat tinggi, sehingga mereka tidak dapat menanam padi tanpa adanya benih padi varietas unggul yang didatangkan dari luar desa.

Berdasarkan temuan lapangan di Desa Bulolohe bahwa sampai saat ini ketergantungan dengan benih padi varietas unggul masih tetap berlangsung dan tampaknya belum ada indikasi untuk keluar dari ketergantungan tersebut. Dengan mencermati pendapat Max Weber dalam Johnson (1986 : 235) terkait kandang besi (*iron cage*). Tampaknya petani di

Desa Bulolohe telah mem-bangun dalam dirinya kandang besi (*iron cage*). Hal ini karena petani tidak dapat menanam padi jika tidak tersedia benih padi varietas unggul yang didatangkan dari luar desa. Fenomena ini menurut Scott W. Campbell (1990 :198) sebagai bentuk dominasi material yang tidak memberdayakan petani. Petani setiap mendekati musim tanam padi merasa tertindas karena tidak merdeka dan berdaulat dalam memilih benih padi yang akan ditanam di sawahnya.

Salah satu upaya untuk keluar dari sangkar besi tersebut diperlukan demonstrasi plot (*demplot*) perbenihan di desa. Dalam pelaksanaannya perlu dibimbing oleh penyuluh pertanian lapangan sehingga menghasilkan benih padi lokal yang unggul. Fenomena *iron cage* juga terjadi pada penggunaan pupuk dalam pertanian sawah. Jika sebelumnya petani hanya menggunakan pupuk alami dari humus maka dengan transformasi teknologi kini menggunakan pupuk kimia (anorganik). Humus merupakan daun yang hancur di atas permukaan tanah dan mengandung unsur hara yang diperlukan tanaman. Para petani tidak dapat menanam padi apabila tidak tersedia pupuk anorganik. Jenis pupuk anorganik merupakan pupuk buatan pabrik, seperti pupuk Urea, KCL, TSP, SP36, ZA dan NPK.

Secara umum petani di Desa Bulolohe lebih banyak menggunakan pupuk Urea di persawahan, dibandingkan dengan penggunaan pupuk yang lain, seperti KCL, TSP dan ZA. Para petani masih sedikit yang menerapkan pemupukan berimbang seperti yang dianjurkan oleh penyuluh pertanian lapangan. Pupuk yang paling digandrungi petani adalah pupuk Urea. Oleh karena itu petani di Desa Bulolohe terkadang panik, jika jadwal pemupukan padi tiba masanya sementara pupuk Urea langka di

pasaran. Ketika penelitian ini dilakukan distribusi pupuk sudah berlangsung dengan lancar. Petani bisa mendapatkan pupuk anorganik melalui ketua kelompok tani. Menguatnya penggunaan pupuk anorganik, khususnya pupuk Urea secara terus menerus dalam jangka panjang memberikan dampak pada menurunnya kesuburan tanah. Hal ini banyak dialami oleh petani sawah, yang hanya mengandalkan penggunaan pupuk anorganik karena kesuburan tanahnya semakin menurun.

Penggunaan pupuk semakin meningkat sementara produksi padi pada sawah dengan areal tertentu tidak mengalami peningkatan. Untuk keluar dari perangkap pupuk anorganik diperlukan transformasi dari penggunaan pupuk anorganik ke pupuk organik. Pupuk organik yang dianjurkan adalah pupuk kompos, yang dapat dilakukan secara bertahap untuk mengimbangi penggunaan pupuk anorganik. Dalam upaya untuk mengubah perilaku petani dari penggunaan pupuk anorganik ke pupuk organik, memerlukan waktu yang panjang karena para petani sudah terinternalisasi dengan pupuk anorganik.

Disadari atau tidak, dengan masuknya teknologi benih padi varietas unggul, maka petani di Desa Bulolohe telah kehilangan 3 (tiga) keanekaragaman hayati (*biological diversity*) berupa varietas padi lokal, yaitu *ase mandi* (padi *mandi*), *ase ranggong* (padi *ranggong*) dan *ase pulu* (padi ketan) yang menghasilkan beras ketan berwarna putih dan hitam. Patut disayangkan karena di daerah lain masih tetap mempertahankan varietas padi lokalnya, seperti varietas padi *rojolele* di Kabupaten Klaten Jawa Tengah sebagai varietas unggul dan harganya mahal di pasar lokal dan pasar dalam negeri. Hal yang sama petani di Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan yang masih mempertahankan beras ketan

mandoti yang disimpan di lumbung (*landa*) sampai 100 tahun. Dari ketiga varietas padi lokal yang pernah ada di Desa Bulolohe telah memberikan kontribusi terhadap pengisian lumbung padi keluarga petani. Lumbung padi keluarga ini berfungsi sebagai cadangan pangan ketika petani mengalami gagal panen, musim kemarau atau paceklik. Walaupun demikian, lumbung padi sekarang ini hanya menjadi kenangan masa lalu, karena petani tampaknya sudah menyatu dengan padi varietas unggul baru yang diintroduksi pemerintah dalam intensifikasi pertanian sawah.

Selain petani kehilangan sumber daya hayati sebagaimana diuraikan di atas, petani di Desa Bulolohe juga kehilangan budaya lokalnya, seperti budaya *mattiro laonruma* dan kegiatan seremonial pada saat panen padi. Dengan dikembangkannya varietas padi unggul tidak ada lagi musyawarah *mattiro laonruma* untuk persiapan dan pelaksanaan menanam padi. Demikian juga pada saat panen tiba, kita tidak pernah lagi melihat acara seremonial memanen padi yang dilakukan perempuan desa dengan diikuti nyanyian tradisional. Oleh karena itu, begitu dahsyatnya teknologi perbenihan padi sehingga petani di Desa Bulolohe harus kehilangan benih padi lokalnya termasuk budaya lokal yang selama ini telah terinternalisasi cukup lama dalam kehidupan mereka.

Implikasi lain dari teknologi benih padi varietas unggul di Desa Bulolohe telah mengubah cara panen padi dari pemakaian ani-ani (mirip pisau) ke pemakaian sabit dan akhir-akhir ini menggunakan mesin pemanen yang lebih modern lagi. Teknologi sederhana pemanen padi dengan menggunakan ani-ani ini di Desa Bulolohe dikenal dengan nama *rakkapeng*. Cara kerjanya, *rakkapeng* digenggam dengan tangan kanan untuk memotong

tangkai padi yang berdiri tegak secara satu persatu. Hasil panen padi dalam jumlah tertentu diikat untuk diangkut dengan kuda ke rumah petani. Dampak perubahan dari ani-ani ke sabit tidak begitu bermasalah karena tenaga kerja pemanen perempuan dapat beradaptasi dengan menggunakan sabit. Berbeda dengan perubahan dari sabit ke penggunaan mesin pemanen menimbulkan masalah sosial. Hal ini karena tidak terserapnya tenaga kerja perempuan sehingga mereka termarginalkan dengan kehadiran teknologi mesin pemanen di desa. Teknologi mesin pemanen padi di Desa Bulolohe mulai marak dipakai jasanya oleh petani pada 2015.

Pemakaian mesin pemanen menimbulkan perubahan sosial di desa-desa di Kabupaten Bulukumba, termasuk di Desa Bulolohe yang berakibat gangguan sosial karena banyak yang menentang perubahan itu terutama kaum perempuan. Perempuan desa yang selama ini berpartisipasi dalam pertanian terutama pada saat panen padi di sawah, kini sudah tidak kelihatan lagi karena tenaga kerja mereka digantikan dengan teknologi berupa mesin pemanen padi. Pelaksanaan panen padi dengan menggunakan mobil pemanen diatur jasa panennya antara petani dengan pemilik mobil pemanen padi. Di Desa Bulolohe jasa pemanen padi dengan menggunakan mobil pemanen adalah 10 karung berbanding 1 karung, yaitu jika 10 karung gabah petani ukuran karung isi 50 kg dikeluarkan jasa panennya 1 karung. Mengenai ketentuan jasa panen padi dapat berubah sesuai kondisi medan persawahan, seperti sawah yang miring letaknya dan jauh dari jalan raya/desa akan bertambah jasa panennya.

Berbeda dengan jasa panen padi di Desa Kampili Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa yang menetapkan 9 karung ber-

banding 1 karung. Jasa panen padi dapat bertambah sesuai kondisi persawahan seperti sawah yang berlumpur, maka jasa panennya dapat meningkat karena sulit dijangkau mobil pemanen. Dengan kehadiran mesin pemanen padi maka tenaga kerja perempuan dapat dilibatkan dalam penanaman padi, namun kebiasaan menanam padi bagi perempuan di Desa Bulolohe bukan merupakan sesuatu yang lazim. Dengan demikian, perempuan dalam rumah tangga petani tetap bekerja di sektor domestik sebagai ibu rumah tangga dan tidak berperan serta lagi dalam sektor pertanian tanaman pangan. Revolusi hijau (*green revolution*) secara ekonomi telah menyingkirkan kaum perempuan dari pekerjaannya dan kehilangan pekerjaan sehingga terjadi proses pemiskinan terhadap perempuan (Narwoko dan Suyanto, 2019 : 300).

Dalam hal pengendalian hama dan penyakit tanaman tampaknya petani di Desa Bulolohe masih tetap juga mengalami fenomena *iron cage*. Meskipun petani telah mengikuti sekolah lapang pengendalian hama dan penyakit tanaman, namun hasilnya di lapangan belum efektif. Hal ini karena pengendalian hama dan penyakit tanaman yang dianjurkan secara alami melalui teknologi lokal, belum diterapkan oleh petani dan masih saja tergantung dari teknologi pengendalian hama dan penyakit tanaman dari luar desanya. Secara umum di Desa Bulolohe semua pengendalian hama dan penyakit tanaman masih menggunakan bahan kimia dari produksi pabrik industri pestisida, yang disosialisasikan oleh formulator dan produknya banyak tersedia dan beredar di pasar umum.

Kedua, pengolahan tanah dari tenaga hewan menjadi tenaga mesin. Pengolahan tanah di Desa Bulolohe tampak juga

mengalami perubahan yang cukup maju mengikuti perkembangan teknologi. Selama tahun 1980-1995 (15 tahun) pengolahan tanah pada lahan persawahan di Desa Bulolohe masih menggunakan tenaga hewan, seperti sapi, kerbau dan kuda. Terbatasnya lahan pengembalaan ternak sebagai konsekuensi dari pengembangan perkebunan rakyat, sehingga cukup banyak petani yang tidak memelihara ternak sapi dan kerbau. Berawal dari terbatasnya populasi ternak sapi dan kerbau, sehingga petani melakukan pengolahan lahan sawah dengan menggunakan traktor roda 2.

Setelah 1995 sampai saat ini sudah sulit kita temukan di Desa Bulolohe, petani yang mengolah tanah persawahan dengan menggunakan tenaga hewan. Peralihan dari tenaga hewan ke penggunaan mesin traktor memunculkan usaha baru di Desa Bulolohe, yaitu dengan berkembangnya usaha jasa traktor untuk pengolahan tanah. Implikasi dari penggunaan traktor dapat menambah pengeluaran petani, baik petani pemilik maupun petani penggarap. Untuk mengurangi beban petani terkait biaya jasa pengolahan lahan persawahan, Pemerintah Kabupaten Bulukumba melakukan pengadaan traktor untuk dibagikan kepada kelompok tani. Jumlah traktor dari Pemerintah Kabupaten Bulukumba (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura) sebanyak 8 unit dan traktor dari masyarakat sebanyak 10 unit.

Meskipun ada bantuan traktor di Desa Bulolohe, namun belum mencukupi di kalangan petani sehingga petani masih banyak menyewa traktor untuk pengolahan lahan persawahan. Dengan masuknya teknologi mesin traktor menciptakan diversifikasi usaha di satu sisi, namun di sisi lain dapat menambah beban petani untuk membayar jasa traktor terutama bagi petani yang

berlahan sempit di Desa Bulolohe. Menarik penjelasan dari Martono (2016 : 231) bahwa teknologi selalu berwajah ganda, di satu saat ia menjadi teman dan di saat yang lain ia juga bisa menjadi lawan.

Ketiga, teknologi pengangkutan hasil panen. Terjadi perubahan pengangkutan hasil panen padi dari tenaga kuda menjadi motor ojek gabah. Sebelum tahun 1983 di Desa Bulolohe ketika panen padi kita dapat melihat suatu kegiatan untuk membawa padi dari sawah ke rumah petani dengan menggunakan kuda. Hasil panen padi lokal, seperti *ase mandi* dan *ase ranggong* diangkut ke rumah petani dengan kuda yang dikenal dengan *matteke ase*. Padi lokal yang telah dipanen di sawah diikat secara rapi lalu diangkut dengan menggunakan kuda. Oleh karena terbatasnya jumlah kuda di Desa Bulolohe, maka kegiatan *matteke ase* ini lebih banyak dilakukan oleh pendatang dari luar desa. Mereka adalah penduduk desa yang berasal dari Kecamatan Bontotiro dan Kecamatan Herlang dengan membawa kudanya untuk melaksanakan jasa pengangkutan padi di Desa Bulolohe. Biasanya mereka menetap 1 sampai 2 bulan di rumah penduduk selama berlangsungnya panen padi lokal. Jasa angkut *matteke ase* ditetapkan setiap 100 ikat padi dikeluarkan jasa angkutnya (*matteke ase*) sebanyak 20 ikat padi.

Setelah tahun 1984, kegiatan *mattekease* mulai ditinggalkan seiring dengan tidak dilakukan lagi penanaman padi lokal. Kegiatan *matteke ase* digantikan dengan *mapparakka ase*. Hasil panen padi varietas unggul yang berbentuk gabah dimasukkan dalam karung plastik ukuran 40 kg. Kegiatan *mapparakka ase* tampak ketika gabah dalam karung plastik diletakkan diatas punggung kuda untuk diangkut ke rumah petani. Pada saat panen

raya padi berlangsung di Desa Bulolohe, kegiatan *mapparakka ase* cukup marak dengan banyaknya warga pendatang dari luar desa yang menawarkan jasa pengangkutan gabah. Adapun jasa angkut kegiatan *mapparakka ase* adalah setiap 10 karung gabah dikeluarkan jasa angkutnya sebanyak 1 karung.

Dalam perkembangannya setelah tahun 2010 jasa angkut dengan kuda tidak tampak lagi di Desa Bulolohe. Pengangkutan hasil panen padi yang sebelumnya dari kuda, berubah dengan menggunakan motor yang dikenal dengan ojek gabah. Ojek gabah merupakan motor roda dua yang dimodifikasi oleh bengkel lokal di desa untuk digunakan mengangkut gabah petani. Cara pengangkutannya cukup sederhana dimulai dengan memasukkan gabah ke dalam karung plastik kemudian diletakkan di belakang setir motor lalu diangkut ke rumah petani. Ojek gabah ini cukup leluasa menjangkau daerah persawahan, sehingga petani tidak mengalami kesulitan dalam mengangkut hasil panen padinya sampai ke rumahnya. Jasa angkut gabah melalui ojek ini lebih banyak dilakukan oleh pemuda-pemuda desa, yang selama ini kurang berminat bekerja di sektor pertanian. Mengenai jasa ojek gabah ditetapkan dengan nilai uang, tidak seperti jasa angkut dengan kuda yang diberlakukan dengan mengeluarkan gabah petani. Di Desa Bulolohe, jasa ojek gabah sebesar Rp.15.000,- sampai dengan Rp.25.000,- untuk setiap karung. Penetapan jasa ojek gabah dilihat dari jarak sawah dengan jalan poros/desa. Semakin jauh dari jalan poros/desa maka semakin besar pula jasa angkutnya sampai ke rumah petani.

Besarnya jasa ojek gabah ini, agar tidak merugikan antara petani dengan pihak jasa ojek gabah maka sudah selayaknya ditetapkan dengan peraturan desa. Dengan demikian, ke-

beradaan teknologi berupa motor ojek gabah di Desa Bulolohe berimplikasi dengan tidak adanya warga pendatang dari luar desa yang melakukan jasa pengangkutan gabah ke rumah petani. Pengangkutan hasil panen padi dilakukan sendiri oleh penduduk Desa Bulolohe. Masyarakat petani di Desa Bulolohe secara berangsur-angsur tumbuh kesadarannya melakukan kegiatan petik, olah dan jual sehingga gabahnya diangkut ke rumah untuk diolah dan kemudian dijual di pasar umum. Jika selama ini gabah mereka lebih banyak dijual di sawah, sehingga tidak memperoleh nilai tambah dari hasil penjualan gabahnya namun sekarang dijual dalam bentuk beras.

B. Pengolahan Hasil Pertanian

Pada awal 1982 ditemukan adanya transformasi dalam pengolahan hasil pertanian, khususnya padi di Desa Bulolohe. Transformasi yang terjadi terutama pada level rumah tangga petani, yaitu perubahan dari menumbuk gabah menjadi beras dan menggiling gabah dengan pemakaian mesin penggiling beras (*rice huller*). Kehadiran teknologi mesin penggiling beras di Desa Bulolohe mengakhiri tenaga kerja perempuan dalam pengolahan hasil pertanian, seperti padi. Kebiasaan menumbuk gabah menjadi beras dengan menggunakan lesung dan alu mulai ditinggalkan. Pabrik penggilingan padi menjadi salah satu teknologi terbaik untuk mendapatkan beras berkualitas dan diproses dengan cepat. Dengan adanya mesin penggiling beras maka disitulah menjadi permulaan tenaga kerja perempuan tidak terpakai dengan kehadiran teknologi. Perempuan desa yang selama ini menggunakan tenaga fisiknya menumbuk gabah, kini tidak ditemukan lagi di Desa Bulolohe. Keberadaan *rice huller* ini

memunculkan wirausaha baru di Desa Bulolohe melalui usaha jasa penggilingan padi, yang hampir sama dengan jasa penggunaan traktor pada pengolahan tanah persawahan.

Di Desa Bulolohe terdapat 3 pabrik penggilingan padi, yaitu: (1) penggilingan padi yang ketika itu berada di Jalan Mawar Dusun Bulolohe, tepatnya di belakang rumah Alm. Ambo Mamara. Pemiliknya berasal dari Kota Bulukumba, bukan orang Desa Bulolohe. (2) penggilingan padi yang terletak di belakang rumah Alm. Puang Bulu di Dusun Bulolohe, yang pengelolanya ketika itu adalah Pak Usman. (3) penggilingan padi yang berada di Dusun Bentengnge, tepatnya jalan Poros Bontomanai-Lonrong. Pemiliknya adalah H. Latang yang ketika itu bertempat tinggal di Desa Bontomanai. Adapun jasa penggilingan padi yang berlaku pada saat itu adalah 1 kaleng besar berisi 10 liter beras dikeluarkan jasa pabriknya 1 liter beras. Ukuran lain yang biasa juga digunakan adalah 1 kaleng besar berisi 20 liter beras dikeluarkan jasa pabriknya sebanyak 2 liter beras.

Setelah ketiga pabrik penggilingan padi ini tidak beroperasi lagi di Desa Bulolohe, maka ibu rumah tangga petani mengalami kesulitan karena harus keluar ke desa tetangga (Desa Bontomanai) apabila ingin melakukan penggilingan padi. Penggilingan padi milik H. Tamakka di Desa Bontomanai paling banyak dikunjungi oleh ibu-ibu dari Desa Bulolohe. Dalam mengisi kekosongan penggilingan padi di Desa Bulolohe maka dalam perkembangannya pada 1995 telah berdiri lagi 1 pabrik penggilingan padi, tempatnya di daerah Borong Kalukue Dusun Bulolohe. Pemiliknya adalah Bapak Khutbah Saleh, yang pada saat itu merupakan Kepala Desa Bulolohe. Adapun jasa penggilingan padi yang berlaku pada saat itu adalah 10 liter beras dikeluarkan jasa pabriknya sebanyak 1 liter.

Seiring dengan kejelian pengusaha maka penggilingan padi yang menetap permanen di suatu tempat tertentu di Desa Bulolohe, kemudian digantikan dengan penggilingan padi keliling desa dengan menggunakan mobil. Perubahan dari pabrik penggilingan padi permanen menjadi pabrik penggilingan padi keliling desa mulai muncul pada 2015. Jika selama ini ibu rumah tangga yang mendatangi pabrik penggilingan padi, kini mereka didatangi oleh penggilingan padi keliling. Dimaksudkan pabrik padi keliling karena dalam menawarkan jasa penggilingan padi mereka keliling desa langsung di rumah penduduk dan biasanya beroperasi sekitar jam 12.00 wita ke atas sampai sore hari. Adapun jasa penggilingan padi keliling adalah 20 liter beras dikeluarkan jasa pabrik penggilingannya sebesar 2 liter.

Keberadaan penggilingan padi keliling merupakan salah satu upaya mendekatkan pelayanan kepada ibu-ibu rumah tangga, sehingga di masyarakat Desa Bulolohe berkembang anggapan bahwa perempuan di desa saat ini telah dimanja dengan kehadiran teknologi. Oleh karena bagi ibu-ibu rumah tangga yang akan melakukan penggilingan gabah menjadi beras tidak mengalami kesulitan, karena hanya menunggu kedatangan pabrik padi keliling yang datang setiap hari. Dengan menggunakan telepon seluler, pemilik pabrik keliling dapat didatangkan di rumah, apabila gabahnya sudah kering dan siap untuk di pabrik. Dalam hal ini teknologi memudahkan kehidupan manusia karena dapat memperlancar komunikasi antara pihak penggilingan padi keliling dengan ibu-ibu yang akan menggiling gabahnya dengan cepat.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Masyarakat Desa Bulolohe sama seperti desa-desa lainnya di Kabupaten Bulukumba, yaitu memiliki dinamika dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat Bulolohe memiliki motivasi yang tinggi untuk mengetahui berbagai informasi dari luar, terutama yang berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan dan perbaikan taraf hidupnya. Untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan masyarakat maka berbagai sumber informasi yang dimanfaatkan dari luar desa, antara lain:

Pertama, surat kabar (koran). Setelah Desa Bulolohe resmi menjadi desa definitif pada 1995, maka sumber informasi utama yang digunakan masyarakat adalah koran. Meskipun masyarakat yang berlangganan koran masih terbatas pada penduduk Desa Bulolohe yang berpendidikan SLTP ke atas, seperti guru sekolah, pegawai negeri sipil, perangkat desa, petani dan pekebun yang maju serta segelintir wiraswasta di desa. Dari mereka ini semua menyebarkan informasi yang didapatkan dari koran kepada masyarakat umum, melalui pertemuan informal dalam relasi ketetanggaan. Adapun koran yang pertama masuk di Desa Bulolohe adalah Harian "Pedoman Rakyat", yang terbit di Ujung Pandang (kini Makassar). Koran tersebut diantar setiap hari ke Kabupaten Bulukumba kepada agen yang telah ditunjuk untuk didistribusikan ke desa-desa, termasuk Desa Bulolohe. Batas terakhir pengantaran koran tersebut adalah Kabupaten Sinjai sekitar 210 km dari Kota Makassar.

Dalam perkembangannya beberapa tahun kemudian, selain koran "Pedoman Rakyat" yang menjadi sumber bacaan masyarakat juga terdapat koran "Harian Fajar" yang mulai masuk di Desa Bulolohe sehingga menambah bacaan masyarakat.

Dengan masuknya kedua koran tersebut di Desa Bulolohe sejalan dengan program koran masuk desa yang telah dicanangkan pemerintah, guna meningkatkan akses masyarakat akan pentingnya suatu informasi. Dari kedua koran ini menjadi bacaan utama masyarakat desa sehingga secara berangsur-angsur masyarakat mulai mengetahui perkembangan daerah lain. Koran yang telah dibaca oleh pelanggannya tidak serta-merta dibuang begitu saja, akan tetapi masih dapat dibaca oleh warga masyarakat lain yang membutuhkan informasi. Meskipun beritanya tidak *up date* lagi namun koran tersebut masih saja ada yang membutuhkannya, terutama untuk dipakai latihan membaca bagi warga Desa Bulolohe yang sementara mengikuti sekolah pemberantasan buta huruf di desa.

Kedua, radio. Sumber informasi selain koran yang digunakan di Desa Bulolohe adalah pemanfaatan radio. Penduduk Desa Bulolohe yang memiliki radio sangat terbatas sekali, sehingga tidak semua warga masyarakat dapat menikmati siaran radio. Radio sebagai sarana untuk mendapatkan informasi masih tergolong barang langka, karena hanya segelintir orang yang masuk kategori elite desa mampu membeli radio. Walaupun demikian, antusias masyarakat Desa Bulolohe mendengar radio cukup tinggi, karena ketika ada siaran perdesaan mereka secara bersama-sama berkumpul dengan warga lainnya mendengarkan radio. Semangat masyarakat mendengar radio tidak dapat dilepaskan dari kontribusi masyarakat yang berpendidikan, seperti guru sekolah, penyuluh pertanian, pegawai negeri dan swasta. Mereka ini merupakan agen pembaruan di desa yang senantiasa mendorong masyarakat untuk mendapatkan informasi demi kemajuan hidupnya.

Siaran radio yang digemari masyarakat juga berbeda-beda. Bagi kalangan pemuda desa lebih tertarik mendengar radio yang menyiarkan acara sepakbola dan hiburan (nyanyian), sedangkan kalangan petani dan pekebun lebih suka mendengar siaran perdesaan dan siaran harga komoditi pertanian di berbagai pasar induk di Indonesia. Akan tetapi, akhir-akhir ini siaran radio banyak mengalami perubahan karena lebih banyak menyiarkan acara hiburan dan iklan produk tertentu, baik yang dilakukan radio pemerintah dan swasta. Siaran yang terkait harga komoditi pertanian tidak pernah kedengaran lagi, meskipun hal itu penting diketahui oleh para petani sebelum melaksanakan usaha taninya terlebih dalam memasarkan hasil pertaniannya.

Mencermati kehadiran koran dan radio di Desa Bulolohe ketika itu maka sesungguhnya telah membawa perubahan kepada masyarakat. Hal ini relevan dengan pendapat Daniel Lerner dalam Nugroho (2014 : 99) menyatakan bahwa media massa memiliki peran penting untuk mengubah masyarakat. Melalui media massa ditemukan adanya masyarakat Desa Bulolohe mengalami mobilitas sosial horizontal dan vertikal, terutama para petani yang beralih pekerjaan menjadi pedagang. Mereka berdagang hasil bumi dari Bulolohe ke Makassar dengan sukses. Selain itu, ada petani yang mampu bertani dengan baik karena inovasi yang diperoleh dari media massa melalui koran masuk desa.

Ketiga, televisi. Kehadiran televisi sebagai salah satu sumber informasi di Desa Bulolohe sekitar tahun 1986 bersamaan dengan masuknya program listrik masuk desa. Masyarakat Desa Bulolohe yang memiliki televisi pada saat itu masih sangat terbatas, yaitu hanya pada kalangan masyarakat tertentu seperti para pegawai

negeri dan swasta, pedagang, pengusaha, petani pemilik dan pekebun cengkih dan kakao. Masyarakat desa yang tidak memiliki televisi terkadang menonton di rumah tetangganya atau kerabatnya yang memiliki televisi. Berdasarkan wawancara dengan salah seorang warga Desa Bulolohe, AGF (59 tahun) yang diwawancarai pada 5 Juli 2021 menyatakan bahwa, apabila ingin menonton televisi maka mereka datang ke rumah kerabatnya. Dia menonton televisi karena ingin melihat kemajuan daerah lain yang disiarkan oleh televisi sekaligus menikmati acara hiburan seperti film dan musik dangdut.

Sejalan dengan kemajuan dan tuntutan kebutuhan masyarakat akan pentingnya informasi, maka hampir semua rumah tangga di Desa Bulolohe telah memiliki televisi. Teknologi komunikasi seperti televisi, komputer, dan sebagainya telah banyak masuk ke daerah perdesaan sehingga masyarakat perdesaan telah memiliki jaringan informasi tentang perubahan sosial dan kebudayaan di tempat lain bahkan dari dunia internasional (Setiadi & Kolip, 2013: 843). Selanjutnya ditegaskan oleh Martono (2016 : 189) bahwa media massa terutama televisi, mengubah dunia menjadi sebuah desa global (*global village*). Informasi dan gambar peristiwa yang terjadi di tempat yang sangat jauh dapat ditonton jutaan orang pada waktu bersamaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa implikasi yang ditimbulkan dengan kehadiran televisi telah membawa perubahan sosial di masyarakat. Gaya hidup (*life style*) masyarakat modern dengan mudah ditiru, meskipun bertentangan dengan budaya di desanya, seperti cara berpakaian, pergaulan bebas, kecanduan narkoba dan lain-lain. Dalam sosiologi dikenal adanya teori imitasi sosial dan identifikasi sosial, di mana seseorang karena pergaulannya dan interaksi sosialnya

secara sengaja ataupun tidak telah meniru tingkah laku ataupun sesuatu yang telah dikerjakan oleh orang lain (Soetomo, 1990: 45).

Di dalam dunia yang semakin kapitalistik, televisi bukan semata-mata media untuk menyebarkan informasi tetapi ideologi hiburan yang terselubung dibalikinya, dalam bentuk iklan untuk menarik pemirsanya (Nugroho, 2001: 37). Menguatnya pengaruh iklan di televisi tampaknya membawa pengaruh kepada warga masyarakat Desa Bulolohe, yaitu munculnya perilaku konsumtif. Berkaitan dengan perilaku konsumtif, temuan lapangan menunjukkan bahwa, ada di antara warga Desa Bulolohe yang membeli barang perkakas rumah tangganya sebagai pajangan di ruang tamu, bukan dipakai sehari-hari sebagaimana rumah tangga yang lain. Menurut Baudrillard dalam Martono (216 : 216) melalui iklan setiap produk kapitalis dapat ditawarkan dengan berbagai cara yang cukup menggoda selera konsumen dan seolah-olah diombang-ambingkan dengan berbagai penawaran dalam iklan. Pilihan ada dalam diri konsumen dan iklan tidak akan pernah bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul dari iklan tersebut.

Dalam kasus tertentu ditemukan seorang ibu rumah tangga yang mengalami korban iklan dari televisi. Dia membeli kulkas untuk keperluan rumah tangga sementara di rumahnya belum ada aliran listrik. Pada akhirnya kulkas tersebut tidak bermanfaat dan hanya menunjukkan simbol kepemilikan barang mewah, yang tidak dimiliki ibu rumah tangga yang lain. Selain ibu rumah tangga, maka perilaku konsumtif juga melanda anak-anak di Desa Bulolohe sebagai konsekuensi kehadiran televisi. Hal ini relevan dengan pendapat Nugroho (2001:35) bahwa iklan di televisi merupakan penyebab meningkatnya permintaan terhadap

produk-produk untuk anak sehingga perilaku konsumtif di kalangan anak-anak merupakan konsekuensi logis yang harus dipikul masyarakat industrial. Contohnya, produk industri yang diminati dan dikonsumsi oleh anak-anak desa dan kota seperti Chitato, Chiki, Indomie, Sarimie, Indomilk, Pasta Gigi Pepsodent, dan lain-lain.

Keempat, telepon. Penggunaan telepon sebagai sarana untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat Desa Bulolohe sampai tahun 2000 masih termasuk langka. Warga masyarakat Desa Bulolohe yang biasa menggunakan jasa telepon adalah para pedagang hasil bumi, dalam menjalin komunikasi dengan rekan bisnisnya yang jauh dari Desa Bulolohe. Termasuk para orangtua yang menyekolahkan anaknya di Perguruan Tinggi di Ujung Pandang (kini Makassar) dan di Pulau Jawa. Untuk mendapatkan layanan telepon biasanya mereka ke Kantor Telkom di Ibu Kota Kabupaten Bulukumba, yang jaraknya 15 km dari Desa Bulolohe. Dengan jarak 15 km bukan merupakan beban bagi pedagang dalam mendapatkan layanan telepon, karena yang terpenting dapat berkomunikasi dengan lancar sesama rekan bisnisnya di daerah lain.

Dalam perkembangannya setelah memasuki tahun 2000 mulai secara berangsur-angsur warga masyarakat Desa Bulolohe menggunakan telepon seluler (*handphone*). Meskipun di antara mereka yang menggunakan telepon seluler masih terbatas pada kalangan pegawai negeri (guru), perangkat desa, pegawai swasta, petani kaya, pedagang hasil bumi, tokoh masyarakat dan lainnya. Selain itu, yang ikut memunculkan penggunaan *handphone* di Desa Bulolohe adalah warga masyarakat Desa Bulolohe yang baru saja pulang merantau dari Kalimantan dan Malaysia. Mereka ini

dengan sengaja memengaruhi kalangan remaja di desa untuk memiliki *handphone*, karena dianggap sebagai bagian dari gaya hidup (*life style*) di masyarakat. Bagi kalangan remaja yang tidak memiliki *handphone* akan tetapi orangtuanya secara ekonomi mampu membeli, maka mereka dinilai ketinggalan zaman dan jauh dari hidup modern. Kepemilikan telepon seluler baik di kalangan orangtua maupun kalangan remaja menjadi simbol kehidupan modernitas. Meskipun banyak di antara mereka memiliki *handphone* yang belum menunjukkan sebagai kebutuhan, namun hanya mengikuti perkembangan lingkungan disekitarnya.

Penggunaan *handphone* secara meluas di kalangan masyarakat Desa Bulolohe setelah memasuki tahun 2010. Dengan mudah kita saksikan warga Desa Bulolohe dari kalangan petani, pedagang, peternak, pemuda-pemudi, pelajar dan pegawai berkomunikasi dengan menggunakan telepon selulernya. Berkembangnya penggunaan *handphone* ini sehingga dengan mudah juga mengakses internet, khususnya bagi kalangan remaja. Dampaknya para remaja banyak yang larut dalam kehidupan dunianya sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain secara *face to face*, karena fokus dengan *handphone* ditangannya. Perilaku remaja yang demikian itu dikenal dengan *phubbing*, yaitu tindakan seseorang yang sibuk sendiri dengan *gadget* ditangannya sehingga ia tidak perhatian kepada orang lain yang berada di dekatnya.

Dengan kebebasan mereka menggunakan *handphone* sehingga terbuka peluang untuk mengakses situs porno karena kurangnya pengawasan orangtua, termasuk menghabiskan waktu bermain *game* sehingga tidak ada waktu untuk belajar. Menurut Scott W. Campbell & Rich Ling (2007) menyatakan bahwa akibat penggunaan *handphone* yang berlebihan, bukan saja menyebabkan

lahirnya alienasi dan isolasi sosial menjadi meningkat di kalangan remaja, tetapi juga menyebabkan biaya penggunaan *handphone* dan internet meningkat pesat tanpa disadari para penggunaannya. Mengacu kepada pendapat di atas, maka sesungguhnya hal inilah yang dialami sebagian orangtua di Desa Bulolohe yang memiliki anak remaja, terkait dengan beban biaya untuk pembelian pulsa *handphone* dan internet.

Pendapat senada dikemukakan oleh Chatherine Chak (2003) bahwa tidak sedikit orangtua prihatin terhadap meluasnya penggunaan *handphone* dan internet, sebab anak-anak mereka menjadi lebih sering bolos, dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain *game*. Berdasarkan pengamatan menunjukkan bahwa kegiatan bermain *game* di kalangan remaja di Desa Bulolohe cukup marak dilaksanakan, sehingga lebih banyak waktu mereka terbuang percuma karena tidak digunakan untuk belajar atau kegiatan produktif di desa. Bahkan, relasi antara anak dengan orangtuanya mengalami frekuensi interaksi yang menurun, karena anak sibuk bermain *handphone* dengan teman sebayanya yang juga memiliki *handphone*. Dengan demikian, penggunaan *handphone* dan internet secara meluas di desa perlu diantisipasi, agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan remaja di perdesaan khususnya di Desa Bulolohe.

D. Teknologi Energi dan Listrik

Bahwa jauh sebelum adanya listrik masuk desa di Desa Bulolohe pada 1986, maka satu-satunya sumber energi yang digunakan untuk memasak adalah kayu bakar. Ada kearifan lokal masyarakat di Desa Bulolohe dalam menyiapkan kayu bakar dengan istilah *mattumba aju* (menumpuk kayu) yang

diletakkan di bawah kolong rumah panggung. Ketika itu hampir semua rumah penduduk di Desa Bulolohe masih merupakan rumah panggung yang terbuat dari kayu. Kayu bakar yang disusun tersebut diambil dari hutan Anrang dengan cara tebang pilih, karena bukan kayu produktif yang diambil melainkan kayu yang telah mati. Kayu bakar yang ditebang di hutan menggunakan gergaji besi ukuran 2 meter, yang digerakkan oleh 2 orang. Kayu yang telah ditebang biasanya dipotong dengan ukuran 50 cm, lalu diangkut dengan kuda ke rumah yang dikenal dengan *matteke aju*. Setelah tiba di rumah kayu gelondongan ini dibelah dengan kapak kemudian disusun secara teratur di bawah kolong rumah dalam bentuk *mattumba aju*. Kegiatan *mattumba aju* ini cukup ramai dilakukan menjelang bulan puasa, untuk persediaan kayu bakar minimal 3 bulan ke depan sesudah berpuasa sampai sesudah Hari Raya Idul Adha. Setelah beberapa tahun kegiatan *mattumba aju* ini berlangsung tampaknya tidak dapat dipertahankan oleh warga masyarakat Desa Bulolohe. Kegiatan *mattumba aju* mulai berkurang dilakukan oleh warga masyarakat Desa Bulolohe seiring dengan terbatasnya kayu bakar yang ada di hutan Anrang.

Dengan terbatasnya kayu bakar maka disitulah mulai terjadi transformasi penggunaan energi, yaitu:

Pertama, dari kayu bakar ke minyak tanah. Transformasi energi dengan menggunakan minyak tanah tidak berlangsung secara drastis, melainkan secara berangsur-angsur karena dalam penggunaan minyak tanah masih dikombinasikan pula dengan kayu bakar. Minyak tanah selain digunakan untuk memasak, juga digunakan sebagai sumber energi untuk lampu penerang seperti obor, lampu pelita dan lampu petromaks. Di malam hari

apabila warga desa melakukan kunjungan kepada kerabatnya atau warga desa lainnya biasanya menggunakan obor dan sesekali ada yang menggunakan senter. Meskipun penggunaan minyak tanah cukup melembaga di kalangan masyarakat, namun dengan adanya listrik masuk desa pada 1986 tidak serta-merta penggunaan minyak tanah ditinggalkan begitu saja. Bagi warga masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah, masih tetap mempertahankan penggunaan minyak tanah untuk sumber energi lampu penerang dan untuk memasak diselingi penggunaan kayu bakar. Sedikit berbeda dengan lapisan masyarakat Desa Bulolohe yang berpenghasilan menengah ke atas, penggunaan minyak tanah hanya untuk memasak sedangkan untuk penerangan menggunakan listrik dari PLN.

Kedua, dari minyak tanah ke gas elpiji. Setelah Pemerintah melakukan rasionalisasi penggunaan energi, yang difokuskan kepada kebutuhan masyarakat bawah maka dilakukan perubahan dari minyak tanah kepada penggunaan gas elpiji. Transformasi penggunaan minyak tanah ke gas elpiji tidak begitu mudah diadopsi oleh ibu rumah tangga di Desa Bulolohe. Hal ini karena seorang ibu rumah tangga harus mampu membeli kompor gas dan peralatan masak yang sesuai. Oleh karena minyak tanah langka di pasar umum sampai ke desa, sehingga untuk menyesuaikan penggunaan gas elpiji maka ada beberapa ibu rumah tangga membeli kompor gas dengan cara cicilan.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu NRM (41 tahun) seorang ibu rumah tangga, yang bertempat tinggal di Dusun Bulolohe yang diwawancarai pada 6 Juli 2021 mengatakan bahwa, ketika terjadi perubahan penggunaan minyak tanah ke gas elpiji kami sesama ibu rumah tangga sangat bingung karena tidak

mampu membeli kompor gas, apalagi minyak tanah sudah sulit kita temukan di pengecer. Dengan mencermati pendapat yang dikemukakan oleh ibu rumah tangga tersebut di atas maka sesungguhnya pada permulaan perubahan penggunaan minyak tanah ke gas elpiji menimbulkan beban bagi ibu rumah tangga. Adapun yang menerima dampak dari perubahan ini adalah kaum ibu yang tidak mampu menyesuaikan dengan teknologi energi karena membutuhkan biaya untuk pengadaan kompor gas dan peralatan masak. Untuk lebih mengenalkan kepada masyarakat desa dan kota penggunaan gas elpiji maka pemerintah menggunakan iklan melalui televisi. Hal ini sama ketika kapitalis memperkenalkan produknya melalui iklan, sehingga dengan mudah dilihat oleh khalayak ramai atau konsumen.

Menguatnya rangsangan iklan dari gas elpiji tersebut sehingga sulit dihindari untuk menggunakan sumber energi lain, kecuali dengan melakukan konsumsi dari produk yang ditawarkan (gas elpiji). Masyarakat desa, khususnya ibu rumah tangga yang bekerja di sektor domestik masuk dalam sangkar besi (*iron cage*), karena apabila ingin memasak tidak ada pilihan lain kecuali dengan menggunakan gas elpiji baik ukuran kecil atau besar. Untuk keluar dari *iron cage* ini tampaknya masih sulit karena di satu sisi masyarakat ingin kembali menggunakan kayu bakar untuk memasak, sementara sudah ada larangan dari pihak kehutanan untuk tidak mengambil kayu yang tidak produktif. Hal ini karena adanya perubahan fungsi hutan Anrang dari hutan lindung menjadi hutan produksi, yang pada saat hutan lindung masih dapat mengambil kayu yang telah mati untuk kayu bakar.

Disisi lain dalam menggunakan energi listrik untuk memasak membutuhkan biaya yang tidak sedikit, yang sulit dipenuhi bagi masyarakat kalangan bawah di Desa Bulolohe.

Ketiga, penggunaan listrik. Selain penggunaan gas elpiji untuk memasak maka di Desa Bulolohe juga dalam kesehariannya telah menggunakan listrik untuk penerangan di rumah penduduk. Dalam hal penggunaan listrik untuk rumah tangga di Desa Bulolohe tampaknya sudah hampir terpenuhi dengan baik. Aliran listrik yang masuk ke rumah penduduk tidak hanya digunakan untuk penerangan di rumah tetapi juga menjadi sumber energi untuk memasak, kulkas, mesin air, setrika, televisi, *handphone* dan lain-lain. Bagi rumah tangga yang tidak dapat aliran listrik secara langsung dari PLN, ada yang menyambung aliran listrik dari tetangganya baik sepengetahuan maupun tidak sepengetahuan PLN.

Berdasarkan temuan lapangan bahwa bagi warga masyarakat yang melakukan penyambungan dengan tetangganya terkesan aliran listrik yang diperoleh secara ilegal. Kesadaran berbagi aliran listrik sesama tetangga merupakan salah satu bentuk kepedulian atau kebersamaan masyarakat di Desa Bulolohe, meskipun secara normatif melanggar aturan PLN. Tindakan berbagi aliran listrik dari warga desa yang mampu kepada yang tidak mampu merupakan pemerataan teknologi dan ini mirip dengan kemiskinan bersama (*shared poverty*) dari Clifford Geertz (1976). Tindakan warga desa melalui pemerataan aliran listrik, karena ingin menunjukkan rasa empati kepada masyarakat yang belum memiliki aliran listrik. Bagi warga desa yang melakukan penyambungan, pola pembayaran listrik ke PLN diatur dengan kesepakatan sesuai jumlah rumah tangga yang menggunakan

listrik. Temuan lapangan menunjukkan bahwa rumah tangga yang tidak memiliki aliran listrik disebabkan terbatasnya dana untuk biaya pendaftaran baru, pembelian meteran listrik dan berbagai biaya komponen yang diperlukan pada saat pemasangan aliran listrik.

Dengan adanya program Listrik Masuk Desa pada tahun 1986 kemudian ditingkatkan dengan terkoneksi jaringan listrik PLTA Bakaru, maka Desa Bulolohe ikut mengalami perubahan seperti desa-desa lainnya di Kabupaten Bulukumba. Perubahan yang terjadi di Desa Bulolohe dengan masuknya teknologi listrik menurut Max Weber adalah hilangnya pesona dunia (*Disenchantment of the world*). Hal ini ditandai dengan tidak adanya lagi tempat angker, sebagai dampak dari kehadiran listrik di Desa Bulolohe. Pemakaman umum yang luasnya mendekati 1 ha di pusat Desa Bulolohe bukan lagi tempat angker, karena warga desa sudah berani melintas di atasnya meskipun di malam hari. Keberadaan pemakaman tertua ini merupakan tempat pemakaman leluhur dari orang-orang yang dituakan di desa yang dikenal selaku tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat termasuk leluhur kaum bangsawan dan masyarakat umum di desa itu.

Ketika Bulolohe masih merupakan salah satu dusun dari Desa Bontomanai maka wilayah Bulolohe di sekitar pemakaman ini dikenal dengan sebutan kampung *jera* (*jera* dalam bahasa Bugis berarti kuburan). Kampung *jera* yang pernah dikenal orang baik dari dalam desa maupun dari luar desa hilang namanya setelah Desa Bulolohe resmi menjadi desa definitif, berpisah dengan Desa Bontomanai selaku desa induk. Di pemakaman umum di Dusun Bentengnge warga desa lebih berani lagi dengan membangun

rumah berdekatan dengan pemakaman umum yang tidak ada pagar pembatasnya. Sepintas rumah warga menyatu dengan lokasi pemakaman umum sebagai implikasi terbatasnya lokasi perumahan warga, seiring dengan meningkatnya harga tanah di desa. Suasana desa yang sebelumnya hening dan gelap gulita berubah menjadi terang benderang karena adanya aliran listrik. Hal ini karena didukung dengan kesadaran warga masyarakat untuk memasang lampu jalan di depan rumahnya dan lampu teras pada malam hari, meskipun belum semua warga masyarakat melaksanakannya.

Masuknya listrik di desa memberikan perubahan pola pikir kepada masyarakat dari hal-hal yang tidak rasional menjadi rasional. Keberadaan makhluk jadi-jadian, seperti *parakang* dan *poppo* yang sering menghebohkan warga desa karena muncul di malam hari tampaknya sudah mulai tidak dipercaya lagi. Mitos yang berkembang dari suasana kegelapan secara pelahan-lahan mulai ditinggalkan oleh warga masyarakat, karena masyarakat desa mulai rasional dalam menilai lingkungan sekitarnya. Dengan demikian masuknya teknologi di perdesaan, khususnya listrik memberikan dampak terhadap perubahan masyarakat, yaitu terciptanya masyarakat rasional di desa.

Untuk mengetahui perubahan yang terjadi di Desa Bulolohe dengan kehadiran teknologi, seperti pada tabel berikut ini.

Tabel. 6. Kehadiran Teknologi dan Implikasinya
di Desa Bulolohe Tahun 2020

Teknologi	Transformasi		Implikasi Teknologi
	Dahulu	Sekarang	
Benih Padi	Varietas lokal, padi <i>mandi</i> , <i>ranggong</i> , padi <i>pulu</i> .	Varietas unggul, ciliwung, cigulis, invari.	Padi varietas lokal tidak ada lagi (sudah punah).
Pupuk	Daun tanaman (humus)	Pupuk anorganik (Urea, TSP, KCl, ZA)	Kesuburan tanah menurun/kenaikan hasil berkurang.
Pestisida	Daun tanaman lokal	Bahan kimia dari pabrik pestisida	Pencemaran lingkungan.
Pemanen	Tenaga manusia (ani-ani / sabit)	Tenaga mesin (mobil pemanen)	Tenaga kerja perempuan termarginalkan.
Transportasi	Tenaga hewan (kuda)	Mesin (ojek gabah)	Jasa angkut gabah meningkat.
Komunikasi	Suara (radio dan telepon biasa)	Suara dan gambar (televisi, handphone, internet)	Bebas mengakses situs yang bertentangan dengan norma masyarakat.
Energi	Kayu bakar dan minyak tanah	Gas elpiji dan listrik	Menambah beban pengeluaran rumah tangga miskin.

Sumber : Diolah oleh Peneliti, Tahun 2021

BAB VII

INFRASTRUKTUR DESA

Perkembangan suatu desa dapat dilihat dari dukungan atau ketersediaan infrastruktur yang terdapat di desa itu. Infrastruktur desa cukup mengemuka di daerah perdesaan sejalan dengan popularitasnya dana desa di masyarakat. Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, membuka peluang untuk menggunakan Dana Desa dalam kegiatan pembangunan infrastruktur di desa. Pelaksanaan pembangunan desa yang sumber dananya dari Dana Desa mulai dari tahun 2015-2020 masih dominan untuk pembangunan infrastruktur desa. Secara sederhana infrastruktur lazim di-konsepsikan sebagai fasilitas fisik beserta sistem layanannya. Infrastruktur dipilah ke dalam dua kategori yaitu: (Usman, 2015: 2). *Pertama; public utilities* (fasilitas umum) seperti sarana komunikasi, pipa air bersih, pipa gas, sanitasi dan pengolahan limbah dan lain-lain, dan *Kedua; public works* (pekerjaan umum) seperti jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan, bandar udara, dam, kanal irigasi, saluran *drainage* dan sebagainya. Berdasarkan kedua kategori infrastruktur sebagaimana diuraikan di atas, di Desa

Bulolohe terdapat infrastruktur yang termasuk dalam kategori fasilitas umum adalah perpipaan air bersih dan infrastruktur yang termasuk kategori pekerjaan umum adalah jalan desa, jalan kabupaten dan jalan negara, jembatan desa, saluran irigasi desa dan drainase.

Pembangunan infrastruktur di Desa Bulolohe, baik untuk fasilitas umum maupun kategori pekerjaan umum dibiayai dari dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Program Dana Desa secara bertahap, dana Program Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan dana swadaya masyarakat desa. Selama 5 tahun terakhir ini (2015-2020) perkembangan pembangunan infrastruktur di Desa Bulolohe cukup pesat, karena baik Kepala Desa sebelumnya maupun Kepala Desa sekarang lebih prioritas untuk pembangunan infrastruktur di desanya. Kepala desa di Kabupaten Bulukumba, termasuk Kepala Desa Bulolohe lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur fisik, seperti pembangunan jalan desa (rabat beton) dan jembatan desa karena: (1) untuk memperlancar pengangkutan hasil pertanian masyarakat dari sawah ke rumah petani dengan menggunakan ojek gabah; (2) untuk menunjukkan kepada warga masyarakat atas kemampuannya melakukan pembangunan, yang mudah dinilai sebagai keberhasilan dalam memimpin di desanya; dan (3) pembangunan fisik lebih mudah dilihat oleh orang luar (*outsider*), sehingga memberi kesan betapa pesatnya pembangunan yang dilaksanakan di desa itu.

Dalam perkembangannya pada tahun 2018, pembangunan infrastruktur desa yang dibiayai dari Dana Desa mengalami perubahan dengan adanya kebijakan pemerintah melalui

Program Padat Karya Tunai di Desa. Dalam program tersebut dipersyaratkan bahwa penggunaan Dana Desa yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur diarahkan paling sedikit 30 persen wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam upaya menciptakan lapangan kerja di desa. Walaupun demikian, berdasarkan observasi lapangan maka ketentuan 30 persen yang ditetapkan pemerintah tampaknya tidak dilakukan secara konsisten. Hal ini karena dalam pelaksanaannya di Desa Bulolohe sangat bervariasi, dilihat dari berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur desa yang dilaksanakan melalui anggaran Dana Desa.

Bahwa dari 14 jenis kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Bulolohe pada 2018, terdapat 8 kegiatan yang upah kerjanya/padat karya tunai (PKT) di atas 30 persen, yaitu: pembangunan drainase Balantieng 1 (51,05%), drainase 1 Bulolohe (40,61%), drainase 2 Bulolohe (40,09%), drainase Balantieng 2 (53,54%), perkerasan jalan Dusun Balantieng (63,83%), perkerasan jalan Dusun Bulolohe (41,44%), rabat beton Balantieng (63,21%), dan duicker/jembatan Balantieng (30,12%). Selain itu, terdapat 5 kegiatan pembangunan infrastruktur yang upah kerjanya di bawah 30 persen, seperti duicker/jembatan Bentengnge (29,40%), rabat beton Abbatungnge (19,08%), rabat beton Bentengnge (18,54%), rabat beton Parukku (19,07%), dan talud Bulolohe (15,48%).

Pada dasarnya kebijakan pemerintah dalam Program Padat Karya Tunai di desa bertujuan untuk memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat yang masuk kategori penganggur di desa. Program ini melibatkan tenaga kerja lokal yang menganggur di desa dalam setiap pembangunan infrastruktur yang dibiayai

dari Dana Desa. Dalam pelaksanaan program tersebut diklaim pemerintah sebagai kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin tampaknya masih memerlukan pengkajian secara cermat. Jika dikaji secara mendalam maka dalam pelaksanaan Program Padat Karya Tunai di desa, sebetulnya terjadi permasalahan dilematis antara pendekatan teknis dan pendekatan sosial dalam penggunaan jumlah tenaga kerja. Secara teknis pembangunan infrastruktur di desa seperti kegiatan pengerasan jalan dapat menggunakan tenaga kerja 30 orang selama 60 hari, namun karena mengutamakan aspek sosial sehingga tenaga kerja yang dilibatkan mencapai 60 orang dengan hari kerja yang sama. Apabila tim pelaksana kegiatan di desa melakukan pendekatan teknis maka cukup banyak tenaga kerja yang tidak terlibat dalam kegiatan pembangunan infrastruktur di desa. Akan tetapi jika pendekatan sosial diterapkan maka sesungguhnya dapat menampung tenaga kerja dalam jumlah yang banyak. Fenomena yang terjadi menimbulkan suatu inefisiensi karena adanya kelebihan penggunaan tenaga kerja.

Meningkatnya penggunaan tenaga kerja dalam pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai aspek teknis merupakan indikasi adanya kepentingan tersembunyi dalam pelaksanaan Padat Karya Tunai di desa. Kepentingan tersembunyi hanya dapat dipahami melalui apa yang oleh C. Wright Mills disebut "imajinasi sosiologis", yakni kemampuan untuk dapat menangkap dan memahami apa yang tersembunyi di balik suatu fenomena (Nasikun, 2002:62). Dengan mengacu kepada imajinasi sosiologis maka kepentingan tersembunyi ditunjukkan dengan terakomodasinya tenaga kerja di desa untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur di desa, meskipun dengan

mengabaikan efisiensi. Di balik suatu fenomena maka fakta lapangan menunjukkan bahwa kelebihan tenaga kerja dalam pembangunan infrastruktur di desa justru menciptakan pengangguran tidak kentara (*disquised anemployment*).

Dalam upaya melibatkan tenaga kerja lokal dalam pelaksanaan kegiatan infrastruktur di desa tampaknya belum dapat dikatakan sebagai pemberdayaan masyarakat miskin/marginal khususnya bagi pengangguran di desa. Hal ini karena Program Padat Karya Tunai hanya sebatas melibatkan tenaga kerja lokal yang bersifat sementara pada tahap pelaksanaan kegiatan saja dengan imbalan upah kerja dari Dana Desa. Pemberdayaan bukan hanya dilihat dari keterlibatan secara fisik dalam pelaksanaan, tetapi yang jauh lebih penting adalah mereka memiliki akses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan menikmati hasil pembangunan. Pemberdayaan masyarakat idealnya dapat meningkatkan kapasitas masyarakat miskin agar mampu memanfaatkan potensi dalam lingkungannya secara mandiri.

Mengutip pendapat Sumarsono maka semakin jelas bahwa keterlibatan buruh dan tukang sebagai tenaga kerja lokal dalam pembangunan infrastruktur di desa masih jauh dari kegiatan pemberdayaan karena belum dilakukan pengembangan kemampuan masyarakat. Menurut Sumarsono dalam Kumolo & Tim (2017 : 203), pemberdayaan masyarakat desa diartikan sebagai sebuah proses membangun melalui pengembangan kemampuan masyarakatnya. Upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan berbagai cara, sebagai contoh diadakannya pelatihan-pelatihan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia desa potensial.

Berdasarkan uraian terkait infrastruktur desa seperti di atas maka untuk mengetahui perkembangan infrastruktur di desa Bulolohe, dapat dideskripsikan seperti berikut ini:

A. Perpipaan Air Bersih

Potensi sumber daya air berupa mata air dengan debit tinggi, yang terdapat di Dusun Parukku menjadi sumber pembangunan perpipaan air bersih di Desa Bulolohe. Perpipaan air bersih dengan sistem gravitasi alam dibangun pada 1987, yang pada saat itu Bulolohe masih merupakan salah satu dusun dari desa Bontomanai. Perpipaan ini lokasi mata airnya sekitar 500 meter dari sungai Balantieng. Pembangunan perpipaan ini dibangun atas bantuan Pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui kerja sama dengan Unicef, yang difasilitasi oleh H. Basrun selaku petugas kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba. Saluran pipanya mengikuti pinggir sungai Balantieng dan menyeberang jalan raya Poros Bulukumba-Tanete sampai batas Desa Bulolohe dengan Desa Bontomanai sepanjang 2 km. Perpipaan air bersih ini dinikmati oleh masyarakat selama 11 tahun (1987-1998). Oleh karena tidak ada pemeliharaan dari Pemerintah Desa sesudah 11 tahun ketika itu sehingga tidak dinikmati masyarakat secara berkelanjutan. Dampaknya perpipaan air bersih tersebut menjadi aset yang terbengkalai karena tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Bulolohe.

Untuk memperbaiki perpipaan air bersih tersebut tidak sesederhana itu, karena terkait dengan kewenangan antara pemerintah kabupaten dengan desa. Pemerintah desa menghadapi permasalahan dilematis karena di satu sisi jika perpipaan air bersih diperbaiki sementara bukan kewenangannya. Di

samping itu perpipaan tersebut tidak masuk aset desa karena belum diserahkan dari pemerintah kabupaten ke desa. Di sisi lain, kebutuhan air bersih merupakan salah satu bagian dari pelayanan kepada masyarakat desa. Oleh karena, tidak jelasnya kewenangan dan kelembagaan yang dibentuk untuk mengelola air bersih tersebut dan rendahnya kesadaran masyarakat, sehingga warga desa terkadang merusak saluran pipa untuk kepentingan pribadi. Masyarakat menilai bahwa kurangnya ketegasan pemerintah desa ketika itu sehingga fasilitas umum yang seharusnya dinikmati semua warga desa, namun dalam realitasnya hanya dinikmati oleh orang tertentu saja. Pelajaran yang bisa diambil dari kasus air bersih ini, bahwa ke depan setiap fasilitas umum yang dibangun pemerintah supradesa di suatu desa hendaknya diserahkan kepada Pemerintah desa agar menjadi aset desa untuk dipelihara melalui dana APBDesa. Terkecuali infrastruktur kategori pekerjaan umum yang skala besar dan anggaran yang tinggi tidak perlu diserahkan ke desa karena anggaran desa tidak mampu menjangkau pemeliharannya, sekaligus bukan merupakan kewenangan desa.

Oleh karena tidak berfungsinya perpipaan air bersih yang dibangun pada 1987 ini, maka dengan melihat kebutuhan masyarakat yang mendesak sehingga dilakukan pembangunan perpipaan air bersih pada 2018. Lokasi mata airnya di daerah persawahan di Desa Bontomanai (desa tetangga) dan saluran pipanya melalui persawahan dari Desa Bontomanai menuju Dusun Bulolohe sepanjang 3 km. Perpipaan air bersih dari Dusun Bulolohe menyeberang jalan raya di depan Kantor Desa Bulolohe mengikuti jalan raya sampai ke Dusun Bentengge sepanjang 2,5 km. Pembangunan perpipaan air bersih didanai dari

Program Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) sebanyak Rp 250.000.000,- dan dukungan swadaya masyarakat sebesar Rp14.000.000,-

Jumlah rumah tangga yang menikmati air bersih tersebut sampai 2020 sebanyak 120 rumah tangga. Untuk keberlanjutan dari perpipaan air bersih ini agar tidak menjadi fasilitas umum yang terbengkalai dan sia-sia serta dapat dinikmati secara berkesinambungan, maka disarankan agar pihak pengelola Pamsimas dan Pemerintah Kabupaten menyerahkan ke Pemerintah Desa. Setelah diserahkan dan menjadi kewenangan Pemerintah desa maka dalam pengelolaannya diintegrasikan dalam Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai salah satu unit usaha. Diharapkan ke depan agar dapat meningkatkan pendapatan BUM Desa dari pembayaran iuran air bersih yang diatur dalam Peraturan Desa, sehingga memberikan dampak pada peningkatan pendapatan asli desa. Hal ini mengingat bahwa dana yang dikelola BUM Desa merupakan dana penyertaan modal dari Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Aryo Sosiawan (2019) dari Universitas Negeri Makassar di Desa Karangrejek Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, menunjukkan bahwa BUM Desa yang mengelola air bersih sebagai salah satu unit usaha mampu meningkatkan pendapatan asli desa dan pendapatan masyarakat desa. Meningkatnya pendapatan masyarakat karena munculnya usaha-usaha baru seperti pencucian kendaraan, industri tahu dan tempe, industri galon, warung makan dan lain-lain. Termasuk kontribusi BUM Desa

dalam membantu meringankan beban keluarga miskin dengan memberikan bantuan pendidikan berupa baju seragam sekolah, santunan kematian dan pelayanan gratis *ambulance* desa.

Keterlibatan BUM Desa di Desa Bulolohe dalam menangani air bersih untuk warga masyarakat belum dilakukan, namun telah diagendakan dalam program kerja BUM Desa. Meskipun perpipaan air bersih yang relatif baru dibangun dan dalam proses uji coba di masyarakat, namun demi keberlangsungan pelayanan air bersih maka upaya pemeliharaan tetap menjadi prioritas utama. Perlindungan mata air sangat perlu dilakukan demi tersedianya air bersih sepanjang tahun. Apabila terjadi musim kemarau maka airnya tetap bertahan dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan adanya perpipaan air bersih telah mendukung transformasi sosial sektor kesehatan, yang sebelumnya masyarakat kurang menikmati air bersih mengalami perubahan dengan mengonsumsi air bersih dari mata air alami yang dialirkan melalui perpipaan ke rumah penduduk Desa Bulolohe.

B. Jalan dan Jembatan Desa

Desa Bulolohe memiliki 5 dusun, yaitu Dusun Bulolohe, Bentengge, Balantieng, Parukku dan Dusun Abbatungge. Untuk dapat terkoneksi antara 1 dusun dengan dusun lainnya perlu didukung dengan ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan desa serta drainase. Keberadaan jalan dan jembatan desa memberikan kontribusi terhadap mobilitas penduduk serta mendukung kelangsungan kegiatan pertanian di Desa Bulolohe. Wilayah Desa Bulolohe yang dibelah oleh jalan negara, berupa jalan laston sepanjang 1 km, mulai batas Desa Bontomanai sampai

dengan batas Desa Batukaropa. Jalan negara ini menghubungkan antara Kabupaten Bulukumba dengan Kabupaten Sinjai. Di Desa Bulolohe terdapat jalan Kabupaten sepanjang 3,5 km dari Poros Bulolohe-Kindang berupa jalan lapen. Jalan kabupaten yang lain sepanjang 800 m, yang menghubungkan Dusun Bulolohe dengan Dusun Bentengnge. Dilihat dari kondisi jalan Kabupaten ketika penelitian ini berlangsung, tampak terjadi kerusakan yang cukup parah sehingga diperlukan perbaikan secara serius guna memperlancar mobilitas penduduk, barang, jasa dan lainnya.

Desa Bulolohe termasuk desa yang tidak terisolir karena didukung dengan ketersediaan jalan desa yang cukup memadai, berupa jalan rabat beton yang tersebar di seluruh dusun dalam wilayah Desa Bulolohe. Rabat beton dibiayai dari Dana Desa mulai tahun 2016-2020 dan juga dana Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP). Rabat beton di Dusun Bentengnge 770 meter, Dusun Balantieng 400 meter, Dusun Bulolohe 455 meter, Dusun Parukku 245 meter dan Dusun Abbatungnge 410 meter. Termasuk pula keberadaan jembatan desa yang terdapat di setiap dusun menghubungkan antara satu dusun dengan dusun lainnya, sehingga membantu kelancaran pengangkutan hasil bumi masyarakat. Di Desa Bulolohe terdapat 9 jembatan desa, yaitu : di Dusun Bulolohe 2 buah, Dusun Bentengnge 3 buah, Dusun Balantieng 2 buah, Dusun Parukku 1 buah dan Dusun Abbatungnge 1 buah.

Dengan adanya jalan dan jembatan desa maka ojek gabah yang selama ini hanya berada di jalan poros. Namun kini dengan leluasa masuk ke persawahan karena didukung dengan adanya jalan dan jembatan desa. Dengan demikian, keberadaan jalan dan jembatan desa telah mendukung transformasi ekonomi dan

teknologi di Desa Bulolohe. Transformasi ekonomi dilihat dari perubahan terhadap kelancaran distribusi barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat Desa Bulolohe, dari sentra produksi ke berbagai pasar produksi yang berkembang di masyarakat. Sedangkan transformasi teknologi memberikan kontribusi dari penggunaan tenaga hewan ke penggunaan mesin. Dengan jalan dan jembatan yang baik maka hasil produksi pertanian tidak diangkut lagi dengan tenaga hewan (kuda), akan tetapi menggunakan mesin dengan ojek gabah, termasuk mobil selaku sarana angkutan di desa.

C. Irigasi Desa

Di Desa Bulolohe tidak ditemukan sawah tadah hujan karena tersedia jaringan irigasi teknis. Kegiatan usaha pertanian berlangsung sepanjang tahun karena didukung dengan irigasi teknis yang berasal dari air sungai Balantieng. Mata air dari sungai Balantieng berasal dari kaki gunung Bawakaraeng terletak di perbatasan Kabupaten Bulukumba dengan Kabupaten Sinjai. Air tersebut melewati beberapa desa, seperti Desa Bulolohe, Desa Bontomanai, Desa Topanda dan Desa Tanah Harapan hingga desa-desa persawahan di Kecamatan Ujung Loe, seperti Desa Seppang, Bijawang, Padangloang dan desa-desa lainnya. Dengan adanya irigasi teknis ini maka sesungguhnya masyarakat Desa Bulolohe sangat diuntungkan, terutama petani. Keuntungan yang diperoleh petani, seperti: (a) minimal 2 kali panen padi dalam setahun karena didukung dengan ketersediaan air. (b) dapat melakukan rotasi tanaman dengan mengubah tanaman padi menjadi tanaman sayur mayur sesuai perkembangan harga komoditas; dan (c) kelangsungan usaha tani terjamin sepanjang

tahun meskipun musim kemarau berlangsung karena adanya ketersediaan air. Irigasi teknis yang ada di Desa Bulolohe bukan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, melainkan kewenangan pemerintah pusat.

Berdasarkan pembagian saluran irigasi di Desa Bulolohe, terdapat 2,5 km saluran primer yang merupakan kewenangan pemerintah pusat dan dapat mengairi sawah seluas 175,90 ha. Saluran sekunder sepanjang 800 meter, yang tersebar di setiap dusun dengan panjang saluran irigasinya berbeda-beda. Untuk saluran tersier terdapat secara merata di setiap dusun sehingga dapat memperlancar masuknya air ke petak sawah. Adapun saluran tersier yang terdapat di setiap dusun adalah: Dusun Balantieng 475 meter, Dusun Bulolohe 1.140 meter, Dusun Bentengnge 100 meter, Dusun Parukku 12.000 meter dan Dusun Abbatungge 380 meter. Saluran irigasi tersier yang terpanjang adalah di Dusun Parukku karena sebanding dengan luasnya wilayah persawahan. Berikutnya adalah Dusun Bulolohe karena luas sawahnya mendekati luas sawah yang ada di Dusun Parukku. Adapun saluran irigasi tersier yang panjangnya termasuk kategori sedang terdapat di Dusun Balantieng. Luas sawah di Dusun Balantieng tidak jauh berbeda dengan luas sawah di Dusun Bulolohe, namun saluran irigasi tersier belum begitu berkembang dan merata sampai ke petak persawahan petani.

Berdasarkan pengamatan penulis terkait dengan keberadaan saluran irigasi tersier di Desa Bulolohe tampak bahwa saluran irigasi tersier sangat penting dalam mempercepat gerakan air menuju petak persawahan. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) belum sepenuhnya berperan dalam mengoptimalkan

pengembangan saluran irigasi tersier. Dampaknya penggunaan air di persawahan tidak efisien karena banyaknya air terbuang kembali ke sungai Balantieng, karena terbatasnya saluran tersier di Dusun Balantieng. Di Dusun Parukku dan Dusun Bulolohe masih banyak ditemukan saluran tersier yang belum permanen sehingga jalannya air tidak lancar masuk ke daerah persawahan. Bangunan saluran irigasi tersier yang sudah permanen di Desa Bulolohe sangat mendukung pelaksanaan kegiatan usaha tani dengan pola tanam padi, palawija dan padi karena air cukup tersedia dan penggunaannya dapat diatur sendiri oleh petani.

Meskipun berbagai kekurangan irigasi desa di Desa Bulolohe namun belum menjadi hambatan dalam pengembangan pertanian sawah, karena menanam padi dan palawija masih saja berlangsung setiap musim tanam tanpa kekurangan air. Dengan irigasi desa di Desa Bulolohe telah mendukung transformasi ekonomi terutama dalam kegiatan budi daya pertanian sawah, yang dapat meningkatkan produksi dan pendapatan petani. Kegiatan usaha ekonomi masyarakat tidak hanya menanam padi, akan tetapi dengan adanya dukungan irigasi desa petani dapat menanam sayur-mayur, yang hasilnya dapat menambah pendapatan petani. Perubahan yang terjadi terlihat dari pertanian monokultur menjadi pertanian polikultur di daerah persawahan. Irigasi yang baik menjadi salah satu syarat dalam pelaksanaan intensifikasi pertanian terutama dalam meningkatkan produksi padi pada areal tertentu.

D. Drainase

Sebelum ada drainase maka permasalahan yang muncul secara berulang setiap musim hujan adalah genangan air di depan

atau di samping rumah penduduk, terutama daerah pemukiman yang menempati lokasi yang rendah. Pada musim hujan luapan air dari sawah menggenangi pemukiman karena tidak ada drainase yang bisa mengalirkan air dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Di Dusun Bulolohe berpotensi munculnya genangan air masuk ke pemukiman karena di belakang rumah penduduk terdapat sungai dan sawah yang tidak jelas pembuangan airnya. Di Dusun Parukku dan Dusun Abbatungnge mengalami kondisi yang sama, genangan air yang terjadi karena air hujan dari pemukiman penduduk langsung ke jalan raya. Hal ini karena tidak ada drainase yang dapat menampung air terutama pada musim hujan. Di Dusun Bentengnge terdapat pemukiman penduduk yang padat, sehingga pada musim hujan berpotensi munculnya genangan air yang dapat memberi dampak pada pencemaran lingkungan. Hal ini karena pada musim hujan bercampur antara air hujan dan air limbah yang dapat menimbulkan masalah kesehatan masyarakat. Dalam aspek kesehatan lingkungan, salah satu kekurangan selama ini di Desa Bulolohe adalah tidak adanya saluran pembuangan air limbah (SPAL). Genangan air dapat menjadi media berkembang biaknya nyamuk sehingga dapat terjadi penyakit demam berdarah.

Dengan mencermati permasalahan di atas yang sering terulang setiap tahun pada musim hujan, maka di Desa Bulolohe telah dilakukan penataan lingkungan pemukiman penduduk melalui pembangunan drainase. Pembangunan drainase dilakukan untuk menghindari genangan air di depan halaman rumah penduduk pada musim hujan berlangsung. Pembangunan drainase di Desa Bulolohe sudah lama berlangsung dimulai dengan adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) pada 2009. Pembangunan drainase yang dibiayai oleh PNPM-MP terdapat di Dusun Bulolohe pada bagian kiri dan kanan jalan sepanjang 400 meter dan di Dusun Bentengnge sepanjang 800 meter di kiri dan kanan jalan kabupaten.

Sebelum tahun 2019 Desa Bulolohe mendapat alokasi dana APBD Kabupaten Bulukumba melalui dana aspirasi DPRD untuk pembangunan drainase. Di Dusun Bulolohe, drainase dibangun sepanjang 310 meter, Dusun Parukku 600 meter dan Dusun Bentengnge sepanjang 400 meter serta Dusun Abbatungge sepanjang 500 meter. Pembangunan drainase yang dilakukan di Desa Bulolohe tampaknya tidak merata untuk semua dusun, karena masih ada 1 dusun yang belum mendapatkan pembangunan drainase, yaitu Dusun Balantieng. Meskipun pembangunan drainase belum sepenuhnya merata, namun paling tidak sudah ada upaya untuk melakukan perubahan dalam masyarakat. Drainase yang telah dibangun di 4 dusun dapat mendukung transformasi sosial pada sektor kesehatan karena dapat mengatasi genangan air dan pencemaran lingkungan pemukiman.

Dengan adanya drainase, air dapat mengalir secara teratur dari satu tempat ke tempat lain tanpa menimbulkan genangan lagi. Dengan demikian, tidak ada lagi genangan air di sekitar halaman atau pemukiman penduduk untuk tempat berkembangbiaknya nyamuk sebagai penyebab demam berdarah. Selain aspek kesehatan maka drainase juga menciptakan estetika dalam pemukiman penduduk, karena drainase di depan rumah menjadi pembatas antara pagar rumah dengan badan jalan. Antara pagar rumah dengan bangunan drainase di Desa

Bulolohe tampaknya sangat indah karena ditanami berbagai jenis bunga yang berwarna-warni. Meskipun tidak semua rumah tertata pekarangannya, namun secara bertahap masyarakat Desa Bulolohe cukup antusias menanam dan memelihara berbagai bunga demi mewujudkan keindahan pekarangan rumahnya.

Sebagai gambaran perkembangan infrastruktur desa di Desa Bulolohe sampai tahun 2020, seperti pada tabel berikut ini.

Tabel. 7. Perkembangan Infrastruktur Desa
di Desa Bulolohe Tahun 2020

Infrastruktur Desa	Lokasi (Dusun)	Satuan (meter)
Perpipaan Air Bersih	Bulolohe	2.500
Jalan negara	Bulolohe-Balantieng	1.000
Jalan Kabupaten	Bulolohe-Kindang	3.500
Jalan Kabupaten	Bulolohe-Bentengnge	800
Rabat beton	Bentengnge	770
Rabat beton	Balantieng	400
Rabat beton	Bulolohe	455
Infrastruktur Desa	Lokasi (Dusun)	Satuan (meter)
Rabat beton	Parukku	245
Rabat beton	Abbatungnge	410
Jembatan desa	Bulolohe	2*
Jembatan desa	Bentengnge	3*
Jembatan desa	Balantieng	2*
Jembatan desa	Parukku	1*
Jembatan desa	Abbatungnge	1*
Irigasi/saluran primer	5 Dusun	2.500
Irigasi/saluran sekunder	5 Dusun	800
Irigasi/saluran tersier	Balantieng	475
Irigasi/saluran tersier	Bulolohe	1.140
Irigasi/saluran tersier	Bentengnge	100
Irigasi/saluran tersier	Parukku	1.200

Irigasi/saluran tersier	Abbatungge	380
Drainase	Bulolohe	710
Drainase	Bentengge	1.200
Drainase	Parukku	600
Drainase	Abbatungge	500

Sumber: Diolah oleh Peneliti Tahun 2020.

Berdasarkan Tabel 7 diatas tampak bahwa Desa Bulolohe memiliki infrastruktur desa yang bervariasi, seperti jalan dan jembatan desa, irigasi desa, perpipaan air bersih dan drainase. Adapun ukuran panjang untuk infrastruktur, seperti perpipaan air bersih, jalan, irigasi desa dan drainase menggunakan satuan meter (m), sedangkan untuk jembatan desa menggunakan satuan buah di dalam Tabel 7 dengan simbol (*). Tantangan yang dihadapi Pemerintah Desa Bulolohe ke depan adalah upaya mengalokasikan anggaran perbaikan infrastruktur desa yang menjadi kewenangannya. Penganggaran perbaikan infrastruktur tersebut perlu direncanakan secara cermat, sehingga semua infrastruktur mendapat anggaran perbaikan. Perbaikan infrastruktur desa menjadi penting karena pembangunannya sudah cukup lama dan telah mengalami kerusakan. Dengan demikian, infrastruktur desa yang telah dibangun dan mendapat perbaikan dapat dipergunakan masyarakat desa secara berkelanjutan.

BAB VIII

KELEMBAGAAN DESA DAN SUPRADESA

Di Desa Bulolohe terdapat berbagai kelembagaan desa, seperti lembaga pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan dan lembaga pemerintah supradesa. Dari berbagai kelembagaan tersebut masing-masing melaksanakan tugas dan fungsinya, dengan melakukan perubahan dalam masyarakat di Desa Bulolohe. Perubahan dan transformasi dapat dilakukan baik oleh negara maupun masyarakat sendiri. Transformasi struktural yang diinisiasi oleh negara dilakukan melalui kebijakan pemerintah (Soetomo, 2013 : 87). Transformasi sosial yang berlangsung selama ini di Desa Bulolohe tidak serta-merta terjadi begitu saja, melainkan adanya dukungan berbagai kelembagaan sehingga perubahan yang terjadi berjalan secara terarah dan terencana. Sedangkan perubahan yang diinisiasi oleh masyarakat sendiri, salah satu bentuknya melalui gerakan sosial (*Ibid*, 87).

Di Desa Bulolohe pada 1991 pernah terjadi gerakan sosial dalam bentuk protes kepada pemerintah, dengan menuntut perubahan penguasaan lahan perkebunan rakyat. Tanah yang dikuasai petani di Dusun Parukku secara tiba-tiba dikuasai

pengusaha perkebunan tebu, sehingga petani kehilangan lahan perkebunannya. Mencermati perubahan yang terjadi di Desa Bulolohe tampaknya lebih dominan dilakukan dari atas melalui kebijakan pemerintah dalam pembangunan daerah dan pembangunan sektoral, jika dibandingkan dengan perubahan yang dilakukan oleh masyarakat bawah. Perubahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui kegiatan pembangunan dan perubahan untuk menciptakan kemandirian dilaksanakan dengan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak didukung dengan kemampuan kelembagaan selaku pelaksana program dan kegiatan.

Setiap lembaga melaksanakan program dan kegiatan di masyarakat sehingga di Desa Bulolohe tidak ditemukan adanya lembaga papan nama. Suatu lembaga yang menghiasi halaman depan Kantor Desa, namun tidak melakukan berbagai aktivitas lagi di masyarakat desa. Lembaga papan nama ini dalam keberadaannya terkadang diungkapkan dengan sebutan “hidup segan mati tak mau”. Ketika pemerintah memberikan fasilitas dalam bentuk dana bantuan maka lembaga tersebut cukup aktif kegiatannya, namun setelah dana bantuan dihentikan tidak tampak lagi aktivitasnya dalam masyarakat desa. Bahkan pengelolaannya ditengarai hanya bersatu pada saat akan menerima bantuan pemerintah dan bercerai-berai setelah bantuan sudah diterima sehingga lembaga tersebut merupakan kelompok semu. Kelompok semu ini cukup rentan karena di dalamnya kurang kerja sama dan minimnya *trust*, sehingga lembaga tersebut

sulit kita harapkan melakukan transformasi dalam masyarakat desa.

Dari penjelasan sebelumnya maka untuk mendeskripsikan dukungan kelembagaan desa dan supradesa dalam transformasi sosial masyarakat di Desa Bulolohe seperti berikut ini:

A. Pemerintah Desa dan BPD

Pemerintah desa adalah Kepala Desa yang dibantu dengan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri atas Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Kepala Desa terpilih bersama Perangkatnya telah menyusun perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 6 tahun yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Selain itu disusun pula perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 1 tahun yang biasa disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). RPJM Desa dan RKP Desa berisi program dan kegiatan yang bertujuan untuk melakukan perubahan dalam masyarakat desa secara terencana, terarah dan berkelanjutan. Program dan kegiatan dalam RPJM Desa dan RKP Desa meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam penyampaian visi dan misi calon Kepala Desa di hadapan masyarakat terdapat kata kunci utama, yaitu kata “perubahan” sebagai janji politik kepada masyarakat pemilih di desanya. Program dan kegiatan yang membawa perubahan dalam masyarakat menjadi prioritas kerja Kepala Desa, sehingga harapan masyarakat akan adanya perubahan bisa menjadi kenyataan dan dirasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.

Kepala Desa dan Perangkatnya tetap konsisten melaksanakan program dan kegiatan sehingga mendukung transformasi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti aspek sosial budaya, politik, ekonomi dan teknologi di desa. Sebagai seorang pemimpin di desanya memiliki pula tanggung jawab yang besar dalam mentransformasikan program dan kegiatan dari pemerintah supradesa. Keberhasilan seorang Kepala Desa dapat dilihat dari kemampuannya melaksanakan semua program pemerintah dari atas. Berdasarkan pengamatan di Desa Bulolohe bahwa hampir semua program dan kegiatan pembangunan, pelaksanaannya membutuhkan Kepala Desa sebagai pelaksana lapangan. Dengan demikian, posisi Kepala Desa sangat strategis dalam melakukan transformasi sosial di masyarakat Desa Bulolohe yang dibantu dengan perangkat desa sesuai bidang tugasnya masing-masing. Apabila dalam suatu periode kepemimpinan Kepala Desa tidak menciptakan suatu perubahan yang berarti dalam masyarakat, maka implikasinya dapat menurunkan simpati masyarakat di desanya.

Untuk suksesnya Kepala Desa dalam mendukung transformasi sosial di desanya maka program dan kegiatannya harus mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dibahas bersama antara Kepala Desa dengan BPD. Setelah mendapatkan persetujuan dari BPD maka APB Desa dapat dilaksanakan oleh Kepala Desa bersama Perangkatnya dan BPD melakukan pengawasan dalam pelaksanaannya di desa. Pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa menjadi penting agar pelaksanaan APB Desa sesuai dengan perencanaan dan target sasaran yang akan dicapai. Hal ini karena APB Desa

menjadi instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Terkait dengan respons BPD dalam menerima aspirasi masyarakat di Desa Bulolohe tampaknya belum berjalan secara optimal. Hal ini dilihat dari terbatasnya Peraturan Desa (Perdes) yang ditetapkan bersama antara BPD dengan Kepala Desa. Perdes yang rutin ditetapkan setiap tahun adalah Perdes tentang APB Desa. Keterbatasan kemampuan BPD ditengarai ikut memengaruhi sehingga kurang mampu berbuat dalam menyusun peraturan desa. Forum musyawarah BPD kurang efektif dalam menghasilkan keputusan yang terkait dengan dukungan dalam transformasi sosial di desa. Tampaknya BPD ke depan perlu ditingkatkan kapasitasnya, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya lebih optimal dalam menetapkan produk hukum di desa. Termasuk dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

B. LPMD/PKK Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, disebutkan dalam pasal 7 bahwa jenis lembaga kemasyarakatan terdiri dari : (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK); (2) Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK); (3) Lembaga Adat; (4) Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan; (5) Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW); Karang Taruna; dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya. Dari berbagai lembaga kemasyarakatan sebagaimana disebutkan sebelumnya, di Desa Bulolohe terdapat 2 lembaga

kemasyarakatan yang cukup berperan dalam kehidupan masyarakat, yaitu Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LPMD) dan Tim Penggerak PKK Desa. Keberadaan LPMD dan PKK Desa di Desa Bulolohe berfungsi untuk melakukan pemberdayaan masyarakat desa. Meskipun lembaga kemasyarakatan lain tetap pula melakukan fungsi, namun kurang begitu optimal melayani masyarakat desa, seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lembaga Adat dan Karang Taruna.

Dalam pemberdayaan masyarakat dimanfaatkan lembaga-lembaga mediasi (*mediating institution*) yang berfungsi menjadi penengah dua kehidupan, yaitu kehidupan publik dan kehidupan privat. Lembaga-lembaga ini di satu sisi memberikan makna privat tetapi di sisi yang lain mempunyai arti publik, sehingga mampu mentransfer makna dan nilai privat ke dalam pemaknaan struktur-struktur mega (Nugroho, 2001: 143). LPMD dan PKK Desa adalah lembaga kemasyarakatan yang berfungsi sebagai struktur perantara. Di satu sisi, masyarakat memerlukan adanya unsur perantara dengan pemerintah dan di sisi yang lain pemerintah juga perlu adanya unsur perantara dengan masyarakat, sehingga keberadaan lembaga kemasyarakatan sama-sama dibutuhkan baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah (Rauf & Munaf, 2015 : 103).

LPMD sebagai lembaga mediasi dalam menjalankan tugasnya, antara lain: *Pertama*, menyusun rencana pembangunan secara partisipatif. Di Desa Bulolohe, LPMD bersama-sama warga masyarakat menyusun rencana pembangunan untuk diajukan dan dibahas dalam Pramusrenbang pada level dusun dan Musrenbang desa. Perencanaan yang disusun ini tiada lain adalah untuk menampung aspirasi masyarakat dalam pembangunan.

Dasar perencanaan yang dilakukan oleh LPMD bersama masyarakat desa adalah untuk melakukan transformasi ekonomi melalui pengembangan potensi sumber daya alam menjadi sumber ekonomi produktif. Desa Bulolohe sebagai desa pertanian dipetakan dalam perencanaan desa secara bertahap untuk menghasilkan komoditi pertanian yang memiliki nilai ekonomi dan berdaya saing. Dalam penyusunan perencanaan partisipatif, setiap petani diberi ruang untuk menyampaikan permasalahan dan kebutuhannya, sehingga dapat diatasi masalahnya dan dipenuhi kebutuhannya dalam program dan kegiatan pembangunan desa. Dengan demikian, LPMD telah mendukung transformasi ekonomi petani dari petani subsisten berubah menjadi petani komersial yang berorientasi pasar.

Kedua, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat. Berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Bulolohe membutuhkan swadaya masyarakat, seperti pembangunan air bersih, saluran irigasi tersier, perbaikan rabat beton, drainase dan lain-lain. LPMD belum optimal mendorong masyarakat berswadaya karena persepsi yang terbangun di masyarakat bahwa setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa telah dibiayai oleh pemerintah desa. Untuk kontribusi masyarakat dalam bentuk tenaga kerja saja dalam setiap kegiatan pembangunan di desa, tampaknya sudah mulai sulit tercapai. Hal ini karena adanya kebijakan pemerintah terkait program padat karya tunai dalam pembangunan infrastruktur di desa. Setiap pembangunan infrastruktur di desa yang menggunakan tenaga kerja, mulai tukang kayu, tukang batu dan buruh bangunan harus diberikan upah kerja. Dampaknya infrastruktur desa yang telah dibangun dan membutuhkan

swadaya gotong royong masyarakat dalam perbaikannya tidak bisa dilakukan, karena masyarakat menilai bahwa perbaikannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah atau pemerintah desa. Dengan demikian, dukungan LPMD dalam transformasi sosial budaya dalam bidang ketenagakerjaan di Desa Bulolohe kurang berjalan dengan baik, karena masih rendahnya swadaya gotong masyarakat. Hal ini dilihat dari terbatasnya partisipasi tenaga kerja secara sukarela dalam pembangunan infrastruktur desa.

Lembaga-lembaga lain yang cukup berperan dalam pemberdayaan masyarakat khususnya pada level keluarga di Desa Bulolohe adalah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa. PKK Desa yang terbentuk dalam suatu Tim Penggerak dalam melakukan pemberdayaan difokuskan pada kehidupan rumah tangga di desa. Dalam mengkaji pemberdayaan, sebagian besar literatur mengakui pentingnya rumah tangga sebagai sumber utama pemberdayaan. Rumah tangga diartikan sebagai sekelompok penduduk yang hidup di bawah satu atap, makan dari panci yang sama, dan bersama-sama terlibat dalam proses pembuatan keputusan sehari-hari (Priyono & Pranarka, 1996 : 61).

Menurut J. Friedmann (1992 : 33), rumah tangga menempatkan tiga macam kekuatan, yaitu sosial, politik dan psikologis.

Pertama, kekuatan sosial, menyangkut akses terhadap dasar-dasar produksi tertentu suatu rumah tangga, seperti informasi, pengetahuan dan keterampilan, partisipasi dalam organisasi sosial dan sumber-sumber keuangan. Dalam upaya memenuhi kekuatan sosial, PKK Desa Bulolohe telah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu rumah tangga melalui pelatihan. Pelatihan diarahkan dalam usaha-usaha ekonomi

masyarakat, seperti keterampilan menjahit, usaha kerajinan, pembuatan kue tradisional, pengelolaan usaha simpan pinjam yang dapat menjadi sumber pendapatan dalam rumah tangga. Pelatihan kepada ibu rumah tangga yang masih terbatas jumlahnya, paling tidak PKK Desa telah mendukung transformasi sosial budaya dalam bidang pendidikan dan ketenagakerjaan. Dalam bidang pendidikan terjadi perubahan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan ibu rumah tangga. Sedangkan dalam bidang ketenagakerjaan juga mengalami perubahan yang sebelumnya sebagai ibu rumah tangga menjadi pelaku usaha ekonomi sesuai keterampilan yang dimiliki setiap ibu rumah tangga.

Kedua, kekuatan politik, meliputi akses setiap anggota keluarga terhadap proses pembuatan keputusan terutama keputusan yang memengaruhi masa depan mereka. PKK Desa Bulolohe sudah mulai mengorganisir diri untuk terlibat dalam pembuatan keputusan melalui Musrenbang desa, sehingga kehadiran mereka secara langsung untuk memperjuangkan kebutuhan perempuan di desanya. Apalagi dalam penyusunan perencanaan pembangunan dipersyaratkan agar ada unsur perempuan yang harus dilibatkan di dalamnya. Perempuan sudah diberi amanah dari masyarakat menjadi delegasi desa, yang mengawal usulan desa dalam forum Musrenbang kecamatan. Partisipasi perempuan menjadi penting dalam perencanaan desa, karena selama ini banyak sektor domestik yang luput dari perhatian perencana, seperti upaya meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan ibu rumah tangga di desa. Keterlibatan perempuan dalam Musrenbang desa merupakan bentuk dukungan PKK Desa Bulolohe dalam transformasi politik. Hal ini karena bukan

saja terlibat dalam memberikan hak pilihnya pada saat pemilihan langsung kepala desa, kepala daerah, legislatif dan pemilihan Presiden, melainkan sudah berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masa depannya.

Ketiga, kekuatan psikologis, digambarkan sebagai rasa potensi individu (*individual sense of potency*) yang menunjukkan perilaku percaya diri. PKK Desa Bulolohe tidak banyak berperan dalam membangkitkan rasa percaya diri kaum perempuan. Pelatihan yang terkait kesetaraan gender di desa sebagai bagian dari upaya meningkatkan rasa percaya diri perempuan di hadapan laki-laki belum banyak dilakukan di desa. Dampaknya posisi perempuan masih subordinat dari laki-laki sehingga relasinya tidak seimbang dan bahkan cenderung masih adanya dominasi laki-laki terhadap perempuan. Rendahnya percaya diri perempuan belum mendukung transformasi sosial dalam bidang budaya, karena kaum perempuan masih sedikit yang berdaya di hadapan laki-laki. Seharusnya jika transformasi sosial budaya berlangsung, maka antara laki-laki dan perempuan hidup setara.

C. Kelompok Wanita Tani

Dalam upaya meningkatkan pendapatan rumah tangga petani di Desa Bulolohe, pemerintah supradesa melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bulukumba membentuk Kelompok Wanita Tani (KWT) pada 2010. KWT yang dibentuk secara berkelompok bertujuan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya ibu rumah tangga yang melakukan aktivitas seperti petani sehingga disebut dengan wanita tani. Menurut Metalisa dalam Ziyani, et al. (2020), wanita tani merupakan kaum wanita dalam keluarga petani dan

masyarakat pertanian yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dan ikut bertanggung jawab dalam kegiatan usaha tani dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan usaha peningkatan kesejahteraan keluarganya.

Di Desa Bulolohe wanita tani yang tergabung dalam KWT adalah ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan tetap, namun dalam kesehariannya memiliki banyak waktu luang yang belum dimanfaatkan dengan baik. Keberadaan KWT dapat menjadi wadah dalam mendapatkan penghasilan tambahan, selain penghasilan yang diperoleh dari kepala keluarga. KWT yang terbentuk sejak 2010 terdapat di Dusun Parukku 1 kelompok dengan jumlah anggota 25 orang, di Dusun Balantieng 1 kelompok dengan anggota 21 orang dan di Dusun Bentengge 1 kelompok dengan jumlah anggota 20 orang. Adapun sasaran kegiatan KWT di Desa Bulolohe difokuskan kepada pemanfaatan lahan pekarangan yang berada di lingkungan tempat tinggal. Desa Bulolohe sebagai desa pertanian memiliki lahan pekarangan yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Melalui KWT dapat mengubah lahan pekarangan yang sebelumnya kurang produktif menjadi produktif. Berbagai jenis tanaman yang diusahakan di pekarangan, seperti tanaman sayuran dan tanaman obat keluarga (TOGA). Wanita tani secara berkelompok dalam batas wilayah rukun warga menyatu menjadi 1 Kelompok Wanita Tani.

Dalam berusaha tani, mereka mempersiapkan lahan pekarangan untuk ditanami sayur-mayur, seperti tanaman terong, kacang panjang, cabe rawit, bayam, kangkung dan lain-lain. Tanaman sayur-mayur yang ditanam oleh ibu-ibu dalam KWT merupakan tanaman yang sudah beradaptasi dengan kondisi alam Desa Bulolohe. Tanaman sayur-mayur yang dikembangkan

memiliki gizi yang tinggi, sehingga selain dikonsumsi sendiri untuk kebutuhan keluarga juga dijual ke pasar dalam upaya meningkatkan pendapatan rumah tangga. Sedangkan tanaman obat keluarga tidak menjadi prioritas dikembangkan oleh KWT, karena tanaman sayur-mayur lebih tinggi nilai ekonominya daripada tanaman obat keluarga. Secara umum tanaman obat keluarga hanya ditanam di pinggir pekarangan yang berfungsi sebagai pagar pembatas antar tetangga dalam lingkungan rukun warga, seperti tanaman jahe, kunyit, temu lawak dan lengkuas. KWT yang ada di Dusun Parukku, Dusun Balantieng dan Dusun Bentengge belum mengelola tanaman obat keluarga sebagai kegiatan usaha yang berorientasi pasar.

Dengan aktifnya KWT mengembangkan tanaman sayuran di pekarangan, seperti di Dusun Parukku dengan teratur dan berkelanjutan, sehingga Dusun Parukku Desa Bulolohe meraih Tropi Program Kampung Iklim (Proklim) kategori pertama. Proklim ini diperoleh tahun 2016 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Keberhasilan meraih prestasi dalam Proklim ini menunjukkan bahwa KWT di Desa Bulolohe telah memberikan kontribusi dalam penataan pekarangan yang ada dalam lingkungan rumah tangga. Terlepas dari penghargaan yang dicapai, maka KWT di Desa Bulolohe telah mendukung transformasi ekonomi dilihat dari kemampuan KWT dalam menggerakkan usaha ekonomi anggotanya melalui pemanfaatan lahan pekarangan. Kegiatan usaha sayuran dapat menambah pendapatan keluarga, sekaligus menciptakan lapangan kerja sehingga terjadi transformasi sosial dari bekerja sebagai ibu rumah tangga menjadi wanita tani sebagai pelaku usaha di sektor pertanian.

D. UPTD PSDA Parukku

Di Desa Bulolohe terdapat UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Parukku, sebagai lembaga pemerintah supradesa dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bulukumba yang terletak di Dusun Parukku. UPTD PSDA Parukku sudah lama berada di Desa Bulolohe dalam mengelola wilayah Sungai Balantieng. UPTD PSDA Parukku melakukan pembinaan terhadap kelancaran pendistribusian air ke lahan persawahan petani. Tujuannya agar air terbagi secara merata untuk semua desa yang memiliki persawahan dalam wilayah kerjanya. Dahulu UPTD PSDA Parukku memiliki stasiun pengukur curah hujan sehingga petani bisa mendapat informasi tentang perkembangan rata-rata curah hujan yang terjadi setiap bulan. Akan tetapi, saat ini tidak ditemukan lagi sehingga petani tidak dapat mengetahui curah hujan di desanya. Berbeda dengan petani yang sudah melek teknologi dapat mengakses informasi curah hujan dalam aplikasi *The Weather Channel* melalui *handphone*.

Keberadaan UPTD PSDA Parukku memegang peranan penting dalam pengaturan air, penataan saluran primer, sekunder dan saluran tersier serta mendorong petani dalam kelompoknya untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi utama (sekunder dan primer). Selain itu, UPTD PSDA Parukku memiliki kedekatan dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan Petani Pemakai Air (GP3A) dan Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A). Kedekatan ini karena petani yang ada dalam P3A merupakan petani pemakai air di persawahan, yang merupakan sasaran pembinaan UPTD PSDA Parukku. Oleh karena itu, UPTD PSDA Parukku senantiasa membantu petani dalam mempersiapkan penyusunan Rencana

Tata Tanam Global (RTTG) dan Rencana Tata Tanam Detail (RTD) sesuai usulan petani bersama kelompoknya.

Pemanfaatan penduduk lokal menjadi petugas pintu air merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat, karena penduduk setempat dinilai lebih banyak mengetahui kondisi dan permasalahan lokal. UPTD PSDA Parukku telah melakukan sosialisasi kepada petani terkait penggunaan air secara efisien di lahan persawahan dan meningkatkan kesadaran petani berswadaya dalam perbaikan saluran irigasi di wilayah kerjanya. Adapun wilayah kerja UPTD PSDA Parukku di luar Desa Bulolohe adalah Desa Bontomanai, Desa Topanda dan Desa Tanah Harapan, termasuk beberapa desa di Kecamatan Ujung Loe yang mendapat aliran Sungai Balantieng. Begitu luasnya wilayah kerja UPTD PSDA Parukku, sehingga selalu melakukan antisipasi pembagian air jika debit sungai menurun. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketersediaan air di persawahan secara merata dan berkelanjutan.

Keberadaan UPTD PSDA Parukku sebagai lembaga supradesa telah mendukung transformasi ekonomi masyarakat di Desa Bulolohe. Hal ini karena ketersediaan saluran irigasi teknis dapat mengubah usaha ekonomi masyarakat dari pertanian subsisten menjadi pertanian komersial yang berorientasi pasar. Irigasi teknis memberikan kontribusi dalam meningkatkan produksi pertanian sawah. Proses produksi pertanian sawah dapat berlangsung sepanjang tahun karena adanya dukungan ketersediaan air melalui irigasi teknis, sehingga petani tidak kekurangan air meskipun dalam kondisi kemarau. Proses produksi pertanian sawah tetap berlangsung sepanjang tahun dengan pola tanam

padi, palawija dan padi dalam musim tanam gaduh dan rendengan.

E. BPP Parukku

Desa Bulolohe sebagai salah satu desa pertanian di Kabupaten Bulukumba sangat diuntungkan dengan adanya Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Parukku. BPP Parukku merupakan lembaga penyuluhan pertanian yang terdapat di Desa Bulolohe dengan wilayah kerja meliputi semua desa di Kecamatan Rilau Ale. Keberadaan BPP Parukku sangat menguntungkan petani di Desa Bulolohe, karena dekat dengan petani sehingga mudah untuk berinteraksi dengan para penyuluh pertanian lapangan secara langsung. Selain itu, BPP Parukku sebagai suatu lembaga pertanian pada level kecamatan memiliki banyak informasi di bidang pertanian dalam arti luas yang dapat dimanfaatkan petani. BPP Parukku hendaknya membuka ruang (*space*) kepada petani baik secara perorangan maupun kelompok untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan usaha tani yang sedang dikembangkan. Peningkatan kapasitas petani yang merupakan bagian dari tugas BPP Parukku harusnya direspons oleh petani dengan mengikutsertakan dirinya dalam berbagai penyuluhan dan sekolah lapang pertanian.

Berdasarkan pengamatan bahwa keberadaan BPP Parukku di Desa Bulolohe belum banyak dimanfaatkan oleh petani untuk memperoleh informasi pertanian. Petani lebih banyak mendapatkan informasi melalui interaksi dengan sesama petani dan belum sepenuhnya memanfaatkan penyuluh pertanian lapangan sebagai sumber informasi utama. Terkadang petani diundang mengikuti pertemuan, akan tetapi berbagai argumen

klasik yang disampaikan sehingga tidak hadir seperti mengurus ternak dan merawat tanaman yang sulit ditinggalkan. BPP Parukku hendaknya menjadikan Desa Bulolohe sebagai pilot proyek atau percontohan peningkatan kapasitas petani, yang bisa digunakan sebagai lokasi studi banding petani dari luar Desa Bulolohe. Kegiatan studi banding petani tidak perlu ke kawasan Barat Indonesia seperti yang selama ini banyak dilakukan oleh berbagai kalangan dengan membawa petani ke Pulau Jawa.

Petani yang ada di Desa Bulolohe harus fokus dibina secara berkelanjutan sehingga Desa Bulolohe bisa menjadi laboratorium pengembangan sumber daya manusia (SDM) petani. Dukungan pendanaan peningkatan kapasitas petani dialokasikan melalui APBD Kabupaten, guna memenuhi perintah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dalam Pasal 43 disebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan petani melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan. Petani yang telah ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan memiliki tanggung jawab yang besar, karena dituntut menerapkan tata cara budi daya, pasca-panen, pengolahan, dan pemasaran yang baik untuk meningkatkan kualitas dan daya saing secara berkelanjutan. Dalam upaya menarik minat pemuda desa untuk mencintai pertanian maka pendidikan dan keterampilan petani menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan. Petani yang terampil dan mampu mengikuti perkembangan pasar komoditi pertanian, akan menghasilkan komoditi yang berdaya saing tinggi. Petani yang demikian mampu mengubah paradigma pertanian dari

yang berorientasi produksi menjadi orientasi peningkatan pendapatan petani.

Untuk mendukung tercapainya peningkatan pendapatan petani diperlukan transformasi dari subsidi *input* menjadi subsidi *output*. Jika selama ini subsidi *input* berupa benih padi dan pupuk serta pestisida telah dilakukan, namun hasilnya kurang efektif meningkatkan pendapatan petani karena nilai jual produksi pertaniannya yang kurang optimal. Untuk itu sebaiknya yang disubsidi adalah *output* berupa insentif harga komoditi pertanian. Dengan adanya subsidi harga maka petani akan bersemangat menanam tanaman tertentu pada usaha taninya, karena adanya jaminan harga dari pemerintah. Disinilah peran negara dalam melindungi petani yang sampai saat ini masih merupakan penduduk mayoritas di republik ini. Dengan demikian, petani tidak hanya menerima transformasi teknologi, seperti penggunaan bibit varietas unggul, pembuatan pupuk organik, pengembangan pertanian modern, pengolahan hasil pertanian. Akan tetapi juga, diberikan pengetahuan terkait dengan pengembangan pemasaran hasil pertaniannya, sehingga dapat menunjang peningkatan pendapatan petani.

BAB IX

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian lapangan di Desa Bulolohe terkait transformasi sosial budaya, politik, ekonomi dan teknologi di desa serta dukungan infrastruktur dan kelembagaan desa dan supradesa dalam transformasi sosial dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pembangunan desa yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan telah menciptakan perubahan sosial dalam masyarakat desa. Masyarakat Desa Bulolohe telah mengalami transformasi sosial, dengan adanya perubahan dalam aspek sosial budaya, politik, ekonomi dan teknologi di desa, seperti: *Pertama*, transformasi sosial budaya, yang meliputi berbagai bidang, antara lain: (a) bidang pendidikan, dilihat dari perkembangan pendidikan masyarakat yang sebelumnya hanya berpendidikan SD dan SLTP telah berkembang hingga mencapai pendidikan SLTA sampai perguruan tinggi, (b) bidang kesehatan, terjadi perubahan dari pengobatan tradisional melalui tenaga dukun berubah dengan pengobatan modern melalui tenaga medis dan

pemanfaatan fasilitas kesehatan, baik yang ada di desa maupun di luar desa, (c) bidang ketenagakerjaan, yang merupakan tenaga kerja homogen selaku petani menjadi tenaga kerja heterogen, karena selain petani terdapat pekerjaan lain, seperti pedagang, tukang, bengkel, pegawai negeri sipil, pegawai swasta, wiraswasta, buruh dan lain-lain, (d) budaya, dari sedikit tertutup dari budaya luar berubah menjadi terbuka dengan budaya dari luar. Budaya yang masih dipertahankan, seperti budaya *sipakatau sipakalebbi* dan budaya *rera* dan budaya yang tidak terlaksana lagi adalah tradisi panen padi dan *mattiro laonruma*, (e) agama, dilihat dari perkembangan kegiatan keagamaan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Kegiatan pengajian tradisional yang dilaksanakan di rumah berubah dengan pelaksanaan pengajian modern secara terstruktur melalui TPA/TKA, termasuk perubahan dalam peningkatan fasilitas ibadah (masjid) yang tersebar di setiap dusun. Pendidikan agama tidak hanya di sekolah umum, namun dapat juga diperoleh melalui Pondok Pesantren yang ada di Desa Bulolohe. *Kedua*, transformasi politik, terbukanya ruang atau akses masyarakat dalam: (a) pengambilan keputusan, dilihat dengan meningkatnya partisipasi politik masyarakat melalui Musrenbang desa, sehingga keputusan mereka memengaruhi kebijakan pemerintah desa, (b) menggunakan hak pilihnya, tampak dalam kebebasan memilih sehingga dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan langsung kepala desa, pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden. *Ketiga*, transformasi ekonomi, terlihat dari berkembangnya perekonomian masyarakat melalui perubahan dalam: (a) sistem ekonomi tradisional (subsisten) menjadi ekonomi modern (komersial) yang berorientasi pasar. (b) per-

tanian monokultur berubah menjadi pertanian polikultur, dari budidaya padi mengalami transformasi dengan berkembangnya budidaya sayur-mayur, perkebunan, peternakan, industri dan perdagangan. *Keempat*, teknologi di desa, ditandai dengan perubahan yang dibawa oleh revolusi hijau, perubahan penggunaan sarana komunikasi dan penggunaan energi, seperti: (a) teknologi benih padi, dari padi varietas lokal mengalami perubahan dengan benih padi varietas unggul yang diintroduksi pemerintah dalam meningkatkan produksi padi. (b) penggunaan pupuk, dari pupuk alami berubah menjadi pupuk anorganik buatan pabrik, seperti pupuk Urea, TSP, KCL dan ZA, termasuk penggunaan pestisida alami dari tanaman lokal berubah menjadi pestisida dari bahan kimia. (c) pemanen padi, yang berasal dari tenaga manusia dengan menggunakan ani-ani dan sabit berubah menjadi tenaga mesin dari mobil pemanen padi, (d) pengangkutan hasil panen padi, dari tenaga hewan (kuda) berubah menjadi motor ojek gabah. (e) komunikasi, dari radio dan telepon biasa berubah dengan menggunakan televisi, *handphone* dan *internet*, (f) energi, mengalami transformasi dari kayu bakar dan minyak tanah menjadi energi gas elpiji dan listrik.

1. Transformasi sosial budaya, politik, ekonomi dan teknologi di desa dapat berlangsung di Desa Bulolohe karena adanya dukungan infrastruktur desa dan kelembagaan desa dan supradesa, yaitu: (a) Dukungan infrastruktur desa, antara lain: *Pertama*, perpipaan air bersih. Infrastruktur ini telah mendukung transformasi sosial sektor kesehatan, karena sebelumnya masyarakat kurang menikmati air bersih namun dengan adanya infrastruktur tersebut masyarakat telah mengonsumsi air bersih dari mata air alami yang dialirkan

melalui perpipaan ke rumah penduduk. *Kedua*, jalan dan jembatan desa. Keberadaan infrastruktur ini telah mendukung transformasi ekonomi di desa. Transformasi ekonomi terlihat dari kelancaran transportasi hasil produksi masyarakat dari sentra produksi ke berbagai pasar lokal dan pasar umum yang berkembang dalam masyarakat. *Ketiga*, irigasi desa. Saluran irigasi desa telah mendukung transformasi ekonomi masyarakat. Kegiatan usaha ekonomi masyarakat tidak hanya menanam padi, akan tetapi dengan adanya dukungan irigasi desa petani dapat menanam sayur-mayur, palawija yang dapat menambah pendapatan petani. Perubahan yang terjadi dari pertanian monokultur menjadi pertanian polikultur di daerah persawahan. *Keempat*, drainase. Saluran drainase yang ada di setiap dusun telah mendukung transformasi sosial sektor kesehatan, karena dengan drainase dapat mengatasi genangan air sebagai tempat berkembang-biaknya nyamuk demam berdarah. Termasuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan pemukiman penduduk. (b) Dukungan kelembagaan desa dan supradesa, antara lain: *Pertama*, Pemerintah desa dan BPD. Kepala Desa dibantu dengan Perangkat desa telah mendukung transformasi sosial masyarakat desa sesuai bidang tugasnya masing-masing. Untuk suksesnya Kepala Desa dalam mendukung transformasi sosial di desanya maka program dan kegiatannya harus mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Rancangan APBDesa dibahas bersama antara Kepala Desa dengan BPD. Dalam APBDesa di dalamnya terdapat kegiatan yang mendukung transformasi sosial budaya, politik, ekonomi dan teknologi di desa dalam

bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan berbagai bidang kegiatan tersebut, BPD ikut melaksanakan pengawasan di dalamnya sehingga BPD telah mendukung transformasi sosial masyarakat di Desa Bulolohe. *Kedua*, LPMD/PKK Desa. LPMD selaku lembaga kemasyarakatan desa, dalam penyusunan perencanaan partisipatif senantiasa mengakomodir kebutuhan petani, karena setiap petani diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya. LPMD telah mendukung transformasi ekonomi dari petani subsisten berubah menjadi petani komersial. Sedikit berbeda dengan dukungan LPMD dalam transformasi sosial budaya, bidang ketenagakerjaan yang kurang berjalan dengan baik, karena masih rendahnya swadaya gotong masyarakat. Hal ini karena terbatasnya partisipasi tenaga kerja secara sukarela dalam pembangunan infrastruktur desa.

PKK Desa telah mendukung transformasi sosial budaya dalam bidang pendidikan dan ketenagakerjaan. Dalam bidang pendidikan terjadi perubahan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan ibu rumah tangga. Bidang ketenagakerjaan mengalami perubahan dari pekerja sebagai ibu rumah tangga menjadi pelaku usaha ekonomi baru sesuai keterampilan setiap ibu rumah tangga. Keterlibatan perempuan dalam Musrenbang desa merupakan bentuk dukungan PKK Desa dalam transformasi politik. Hal ini karena sudah berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masa depannya. *Ketiga*, Kelompok Wanita Tani. KWT telah mendukung transformasi

ekonomi dilihat dari kemampuan KWT dalam menggerakkan usaha ekonomi anggotanya melalui pemanfaatan lahan pekarangan. Kegiatan usaha pada lahan pekarangan dapat menambah pendapatan keluarga, sekaligus menciptakan lapangan kerja sehingga terjadi transformasi sosial dari bekerja sebagai ibu rumah tangga menjadi wanita tani sebagai pelaku usaha ekonomi di sektor pertanian. *Keempat*, UPTD PSDA Parukku. Keberadaan UPTD PSDA Parukku sebagai lembaga supradesa telah mendukung transformasi ekonomi masyarakat, karena saluran irigasi teknis dapat mengubah usaha ekonomi masyarakat dari pertanian subsisten menjadi pertanian komersial. *Kelima*, BPP Parukku. Lembaga supradesa ini telah mendukung transformasi ekonomi dengan berkembangnya usaha ekonomi masyarakat dalam sektor pertanian, dari pertanian sawah berubah menjadi pertanian sayur-mayur, perkebunan, peternakan dan perikanan. Termasuk dukungan dalam transformasi teknologi melalui penggunaan benih padi varietas unggul, pemupukan dan pemberantasan hama dan penyakit tanaman serta teknologi pengolahan hasil pertanian dalam mewujudkan pola petik, olah dan jual.

B. Rekomendasi

Dalam pelaksanaan kajian transformasi sosial di Desa Bulolohe maka ada beberapa aspek yang direkomendasikan kepada Pemerintah Desa dan masyarakat, yaitu:

1. Aspek Sosial Budaya.

- a. Di sektor pendidikan ditemukan adanya pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-

kanak (TK) yang tidak merata untuk setiap dusun. Dari 5 dusun di Desa Bulolohe yang memiliki PAUD/TK hanya Dusun Parukku. Untuk tercapainya pemerataan pendidikan setingkat PAUD/TK hendaknya Pemerintah desa mengalokasikan dana APBDesa untuk pembangunan PAUD/TK di Dusun Bulolohe, untuk menampung anak-anak dari Dusun Bulolohe sendiri, Dusun Bentengnge dan Dusun Balantieng. Untuk anak-anak dari Dusun Abbatungnge diharapkan ditampung di PAUD/TK yang ada di Dusun Parukku.

- b. Untuk meningkatkan derajat kesehatan lingkungan yang lebih berkualitas hendaknya setiap rumah tangga di Desa Bulolohe tidak membuang sampah di sembarang tempat yang dapat mengotori lingkungan pemukiman penduduk. Setiap rumah hendaknya membuat lubang tempat sampah di sekitar pekarangannya, yang bagian atasnya memakai penutup sehingga tidak menimbulkan bau busuk yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Selain itu, diharapkan masyarakat dapat membuat saluran pembuangan air limbah yang sederhana, sehingga tidak mengotori lingkungan pemukiman atau menjadi tempat berkembang-biaknya nyamuk demam berdarah.

2. Aspek Politik.

Dalam upaya lebih meningkatkan partisipasi politik masyarakat untuk setiap pelaksanaan pemilihan langsung kepala desa, pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden hendaknya dilakukan sosialisasi. Sosialisasi terkait dengan upaya membangun kesadaran politik masyarakat agar dapat menggunakan hak pilihnya untuk setiap pemilihan langsung di desanya. Bahwa suara

mereka sangat menentukan suksesi kepemimpinan dan sedapat mungkin masyarakat tidak bersikap golput dalam pemilihan secara langsung di desanya.

3. Aspek Ekonomi.

- a. Dalam upaya meningkatkan pendapatan petani sawah maka kebiasaan petani menjual gabah di pematang sawah perlu dievaluasi, karena petani tidak mendapat nilai tambah dari hasil penjualan gabahnya. Untuk itu, diperlukan perubahan pola pikir petani dengan melakukan kegiatan petik, olah dan jual sehingga petani mendapatkan nilai tambah dari produksi pertaniannya.
- b. Untuk meningkatkan daya tawar petani sayur-mayur terhadap fluktuasi harga yang tidak menentu maka Pemerintah Desa perlu membangun secara sederhana Tempat Pelelangan Sayur-mayur (TPS) di daerah sentra penghasil sayuran, sehingga petani sayur-mayur tidak dirugikan oleh pedagang pengumpul.

4. Teknologi

- a. Untuk menghindari menurunnya kesuburan tanah sebagai konsekuensi penggunaan pupuk anorganik secara terus-menerus pada lahan persawahan, maka petani perlu dibimbing dan diorientasikan agar secara bertahap mengurangi penggunaan pupuk anorganik. Dianjurkan agar petani menggunakan pupuk organik sehingga tidak merusak lahan pertaniannya dan produksinya tetap berkelanjutan.
- b. Untuk menghidupkan kembali benih padi varietas lokal, yang selama ini tidak ditanam oleh petani di Desa Bulolohe karena bertentangan dengan benih padi varietas unggul, yang dianjurkan dalam program revolusi hijau melalui

intensifikasi pertanian. Untuk itu diperlukan penelitian agar benih padi varietas lokal dapat ditemukan dan dikembangkan kembali di Desa Bulolohe. Desa Bulolohe telah kehilangan 3 varietas lokal, seperti padi *ranggong*, padi *mandi* dan padi *pulu*. Mungkinkah itu muncul yang lokal dalam kondisi global saat ini? Semoga glokalisasi berjalan di desa dengan memadukan yang lokal dengan yang global.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahimsa, P, H. S. 1988. *Minawang: Hubungan Patron-Klien di Sulawesi-Selatan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ahmadin. 2008. *Kapitalisme Bugis, Aspek Sosio-Kultural dalam Etika Bisnis Orang Bugis*, Makassar: Pustaka Refleksi.
- Ariyanto, H. 2006. *Budidaya Tanaman Buah-buahan*, Yogyakarta: PT. Citra Aji Parmana.
- Arikunto, S. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Arsyad, L. et al. 2011. *Strategi Pembangunan Perdesaan Berbasis Lokal*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Asy'ari, S. I. 1933. *Sosiologi Kota dan Desa*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Bintarto, R. 1983, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Budiman, A. 1996. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Campbell, S. W. & Rich, L. 2007. *Effects of Mobile Communication*, Michigan: University of Michigan.
- Chak, K. 2003. *Shyness and Locus of Control as Predictors of Internet Addiction and Internet Use*, Hong Kong: School of Journalism & Communication The Chinese University of Hong Kong.

- Chambers, R. 1988. *Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang*, Jakarta: LP3ES.
- Conyers, D. 1992. *Perencanaan Sosial Di Dunia Ketiga Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Damsar & Indrayani. 2018. *Pengantar Sosiologi Pasar*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Damsar. 2010. *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Daulay, Z. 2011. *Pengetahuan Tradisional, Konsep, Dasar Hukum, dan Praktikanya*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Dlilurrahmah, V. W. et al. 2021. *Fenomena Perilaku Masyarakat di Era Covid-19 dalam Kajian Sosiologis*, Yogyakarta: Guepedia.
- Eko, S, Sujito, A & Kurniawan, B. 2013. *Mutiara Perubahan: Inovasi dan Emansipasi Desa dari Indonesia Timur*, Yogyakarta: IRE Yogyakarta.
- Eko, S, Barori, M & Hastowiyono. 2017. *Desa Baru Negara Lama*. Yogyakarta: Pascasarjana STPMD "APMD".
- Eko, S & Krisdyatimiko (ed). 2006. *Kaya Proyek Miskin Kebijakan: Membongkar Kegagalan Pembangunan Desa*, Yogyakarta: IRE Yogyakarta.
- Fakih, M. 1999. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fernando, N. A. 2008. *Rural Development Outcomes and Drivers*, Manila: Asian Development Bank.
- Fitria, W. & Pratama, M.S. 2013. Pengaruh Fenomena El Nino 1997 dan La Nina 1999 Terhadap Curah Hujan di Biak, *Jurnal Meteorologi dan Geofisika*. VOL.14 No.2: 1.
- Friedmann, J. 1992. *Empowerment: The Politics of Alternative Development*, Cambridge, Massachusetts: Blackwell Publishers.
- Garna, J. K. 1993. *Teori-teori Perubahan Sosial*, Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.

- Geertz, C. 1976. *Involusi Pertanian : Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Hadiutomo, K. 2012. *Mekanisasi Pertanian*, Bogor: IPB Press.
- Hayami, Y & Kikuchi, M. 1987. *Dilema Ekonomi Asia, Suatu Pendekatan Ekonomi Terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Horton, P.B & Hunt, C.L. 1989. *Sosiologi*, Jilid 1 (Terjemahan), Jakarta: Erlangga.
- Ife, J & Tesoriero, F. 2008. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi. (Terjemahan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ismawan, I. 1999. *Money Politics, Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, Yogyakarta: Media Presindo.
- Johnson, D. P. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, (Terjemahan), Jakarta: PT Gramedia.
- Kartohadikoesoemo, S. 1984. *Desa*, Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Kumolo, T & Tim. 2017. *Nawa Cita: Untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia, Integrasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Kurniawan, K.N. 2020. *Kisah Sosiologi: Pemikiran Yang Mengubah Dunia dan Relasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Lauer, R.H. 2001. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Lincoln, Y. S & Denzin, N.K. (ed). 2009. *Handbook of Qualitative Research*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mantra, I. B. 1978. *Population Movement in Wet Rice Communities*, Disertasi, University of Hawaii.
- Mantra, I. B. 2015. *Demografi Umum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Martono, N. 2016. *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Maschab, M. 2013. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, Yogyakarta: PolGov UGM.

- Mas' oed, M. 1994. *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- McClelland, D.C. 1987. *Memacu Masyarakat Berprestasi*, Jakarta: CV Intermedia.
- Mubyarto. 1995. *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Jakarta: LP3ES.
- Murdiyanto, E. 2008. *Sosiologi Perdesaan: Pengantar Untuk memahami Masyarakat Desa*, Yogyakarta: Wimaya Pres UPN Veteran Yogyakarta.
- Muhlighaus, S & Walty, S. 2001. Endogenous Development in Swis Mountain Communities, *Mountain Researh and Development*, Vol. 21(3), August, hlm. 236-242.
- Nain, U. 2012. *Perangkat Desa dan Pengangkatan Sekdes Menjadi PNS*, Makassar: Pustaka Refleksi.
2015. *Posyandu, Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
2018. Transformasi Lumbung Desa: Evaluasi Program Raskin dan Rastra di Kabupaten Bulukumba, *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 5 (1): 85-104.
2021. Dominasi Elit Pemerintah Supradesa dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Bulukumba, Makassar: Pascasarjana UNM Makassar (Disertasi tidak dipublikasikan).
- Narwoko, J. D. & Suyanto, B. 2019. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nasikun. 2002. Hukum, Kekuasaan dan Kekerasan: Suatu Pendekatan Sosiologis, dalam *Dinamika Pedesaan dan Kawasan*, Yogyakarta: Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada.
2012. *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ndraha, T. 1990. *Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugrahani, F. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Solo: Cakra Book.

- Nugroho, R. 2014. *Kebijakan Sosial untuk Negara Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, H. 2001. *Negara, Pasar dan Keadilan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pasaribu, I. L. & Simandjuntak, B. 1986. *Sosiologi Pembangunan Edisi II*, Bandung: Tarsito.
- Prijono, O. S. & Pranarka, A. M. W. 1996. *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
- Pudjianto, W. S. 2019. *Pendekatan Baru Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Rahardjo. 1999. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rauf, R. & Munaf, Y. 2015. *Lembaga Kemasyarakatan Di Indonesia*, Pekanbaru: Zanafa Publishing.
- Ritzer, G. 2003. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rozaki, A. 2012. *Mendemokratisasi Negara, Pasar, dan Masyarakat Sipil*, Yogyakarta: IRE Yogyakarta.
- Salman, D. 2016. *Sosiologi Desa: Revolusi Senyap dan Tarian Kompleksitas*, Makassar: Inninawa.
- Sanderson, K. S. 2003. *Sosiologi Makro*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Schrauwers, A. 2002. Itu Tidak Ekonomis: Sifat Ekonomi Moral Yang Berakar Pada Ekonomi Pasar Di Dataran Tinggi Sulawesi, Indonesia dalam Tania Murray Lii, *Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Scott, J. C. 1990. *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts*, New Haven and London: Yale University Press.
1993. *Perlawanan Kaum Tani*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
1994. *Moral Ekonomi Petani*, Jakarta: LP3ES.

- Setiadi, E.M & Kolip, U. 2013. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
2015. *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soekanto, S.1993. *Beberapa Teori Sosiologi tentang Struktur Masyarakat*, Jakarta: PT. RajaGrafindi Persada.
2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Soetomo. 1990. *Pembangunan Masyarakat: Beberapa Tinjauan Kasus*, Yogyakarta: Liberty.
2013. *Pemberdayaan Masyarakat, Mungkinkah Muncul Antitesisnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sosialismanto, D. 2001. *Hegemoni Negara, Ekonomi Politik Pedesaan Jawa*, Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
- Suranto, AW. 2010. *Komunikasi Sosial Budaya*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suwarsono & So, A. Y. 1991. *Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: LP3ES.
- Sumodiningrat, G & Wulandari, A. 2016. *Membangun Indonesia dari Desa*, Yogyakarta: Media Pressindo.
- Syatar, A.et al. 2021. Formalisasi Hukum Islam dalam Bentuk Peraturan Daerah: Analisis Yuridis Peraturan Daerah Syariah di Bulukumba, *Bilancia* VOL. 15 No 1, Januari-Juni 2021.
- Sztompka, P. 2017. *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Kencana.
- Tikson, D. T. 2005. *Keterbelakangan dan Ketergantungan: Teori Pembangunan di Indonesia, Malaysia dan Thailand*, Makassar: Ininnawa.
- Tjondronegoro, S. M. P. 2008. *Ranah Kajian Sosiologi Pedesaan*, Bogor: Fakultas Ekologi Manusia, IPB.
- Usman, S. 2015. *Esai-Esai Sosiologi Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Usman, H & Akbar, P. S. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.

- Wahono, F. 1999. Revolusi Hijau: Dari Perangkap Involusi ke Perangkap Globalisasi, *Wacana, Jurnal Ilmu Sosial Transformatif*, Nomor IV 1999.
- Wasistiono, S. 2013. *Pengantar Ekologi Pemerintahan*, Jatinangor: IPDN Press Jatinangor.
- Yabbar. R & Hamzah. A. 2015. *Tata Kelola Pemerintahan Desa: Dari Peraturan di Desa Hingga Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; Dari Perencanaan Pembangunan Desa Hingga Pengelolaan Keuangan Desa*, Surabaya: Penerbit Pustaka.
- Yulianto, D. 2021. *COVID-19 Update: New Normal, Vaksinasi, dan Fakta-Fakta Baru Yang Perlu Anda Ketahui*, Yogyakarta: Arruzz Media.
- Zaeny, A. 2010. *Transformasi Sosial dan Gerakan Islam di Indonesia*, Jakarta: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam.
- Ziyan, et al. 2020. Peran Anggota Kelompok Wanita Tani dalam Pemanfaatan Lahan Pekarangan di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok: *Jurnal Inovasi Penelitian* 1 (3): 535-544, 3 Agustus 2020.

SUMBER LAIN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. 1983. Semarang: Aneka Ilmu.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Tanpa tahun terbit, Makassar: Biro Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Selatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2004. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. 2013. Tanpa kota penerbit: Pustaka Mahardika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2014. Bandung: Citra Umbara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Al-Qur'an bagi Siswa dan Calon Pengantin dalam Kabupaten Bulukumba.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Bulolohe Periode 2016-2022.

Profil Desa Bulolohe Tahun 2020.

<https://id.m.wikipedia.org>Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Diakses pada tanggal 27 Agustus 2021.

<https://id.m.wikipedia.org>pemilihan DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Diakses pada tanggal 27 Agustus 2021.

sulsel.kpu.go.id. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Diakses pada tanggal 27 Agustus 2021.

[https:// www.kpu.bulukumbakab.com](https://www.kpu.bulukumbakab.com) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba. Diakses pada tanggal 27 Agustus 2021.

TENTANG PENULIS

Dr. UMAR NAIN, S.Sos, M.Si, Lahir di Bulukumba 10 Mei 1962. Pada tahun 2012 menjadi Dosen Tetap di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sulawesi Selatan. Menyelesaikan studi di Akademi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD) Yogyakarta tahun 1986. Pada tahun 1994 lulus S-1 Prodi Ilmu Sosiatri (kini Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan) Fisipol Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dengan status tugas belajar. Tahun 2001 lulus S-2 Program Studi Sosiologi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan pada tahun 2021 menyelesaikan S-3 Program Studi Sosiologi Pascasarjana Universitas Negeri Makassar.

Mengawali karir sebagai Pegawai Negeri Sipil tahun 1988, dipekerjakan pada Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan. Selama di Pemerintah Kabupaten Bulukumba (1988-2012), pernah menduduki jabatan struktural, Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan Setda Kabupaten Bulukumba dan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bulukumba.

Publikasi ilmiah berupa Buku adalah: Perangkat Desa dan Pengangkatan Sekdes Menjadi PNS, Makassar: Pustaka Refleksi (2012), Posyandu: Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar (2015), Relasi Pemerintah Desa dan Supradesa dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa, Yogyakarta: Pustaka Pelajar (2017), Wisata Pembangunan Desa: Suatu Autokritik, Yogyakarta: Insist Press (2018) dan Pembangunan Desa dalam Perspektif Sosiohistoris, Makassar: Garis Khatulistiwa (2019).

Publikasi Ilmiah dalam bentuk Jurnal adalah: Transformasi Lumbung Desa: Evaluasi Program Raskin dan Rastra di Kabupaten Bulukumba, *Jurnal Pemikiran Sosiologi-UGMYogyakarta* (2018), Implikasi Pelaksanaan Program Dana Desa terhadap Kohesi Sosial di Desa Tamalate Kabupaten Takalar, *Jurnal Sosiohumaniora-UNPAD Bandung* (2018), Analysis of the Strength of Development Agencies in village Development Planning, *Pinisi Business Administration Review-UNM Makassar*(2019), The Supra-Village Government's Elite Domination in Village Development Planning in Bulukumba South Sulawesi Indonesia, *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* (2020), Analysis On The Utilization of Village Funds In Cash For Work Program In Bulukumba Regency, South Sulawesi Indonesia, *International Journal of Advanced Science and Technology* (2020) dan Kajian Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa di Kabupaten Takalar, *Jurnal Pallangga Praja* (2020).

Pada tanggal 1 September 1996 menikah dengan Eni Sulistiyarningsih, S. Sos. di Yogyakarta dan telah dikaruniai dua anak laki-laki. Anak pertama Aryo Sosiawan, saat ini sedang menempuh pendidikan S-2 Magister Sosiologi di Universitas

Hasanuddin. Anak kedua Anan Umran, kini sedang mengikuti pendidikan S-1 Prodi Komunikasi di Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta.